



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan melalui penyusunan peta proses bisnis instansi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
- b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan, peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BLITAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan

BAB II PETA PROSES BISNIS

Pasal 2

- (1) Peta Proses Bisnis disusun dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. dokumen rencana strategis; dan
 - b. dokumen rencana kerja organisasi.
- (3) Ruang lingkup Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan memperhatikan prinsip berikut:

- a. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;

- d. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- g. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

Pasal 4

- (1) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki tujuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
 - c. Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memiliki pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait:
 - a. pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; dan
 - b. penilaian kinerja.

Pasal 5

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. memudahkan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan dengan 4 (empat) tahapan berikut:
 - a. tahap persiapan dan perencanaan;
 - b. tahap pengembangan;
 - c. tahap penerapan/implementasi; dan
 - d. tahap pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peta Proses Bisnis yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

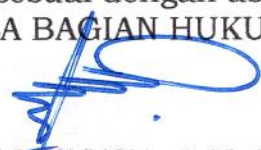
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 8 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu :

a. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

1.1 Pengumpulan Informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan supplier, input, proses, output, dan customer.

Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

- a) Analisis kausal : telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.
- b) Klasifikasi proses : memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.
- c) Pemodelan proses : pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

1.2 Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain :

- a) Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah; dan
- b) secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana.

b. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.

Untuk saat ini Pemerintah Kota Blitar menggunakan level atau tingkatan dengan gambaran sebagai berikut :

1. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

a) Proses Inti

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah;
- 2) berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
- 3) memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

b) Proses Pendukung

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- 2) memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

c) Proses Lainnya

Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

2. Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

3. Level Selanjutnya (Level n)

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

c. Tahap Penerapan/Implementasi

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan peta proses bisnis meliputi :

a. Pengesahan Peta Proses Bisnis

- 1) Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan; dan
- 2) pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan.

b. Pendistribusian Peta Proses Bisnis

- 1) Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui hard copy dan soft copy; dan
- 2) unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.

c. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis

- 1) Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
- 2) bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.

d. Perubahan Peta Proses Bisnis

- 1) Perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
- 2) adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- 3) hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- 4) adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
- 5) adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

d. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali.

Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis instansi pemerintah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

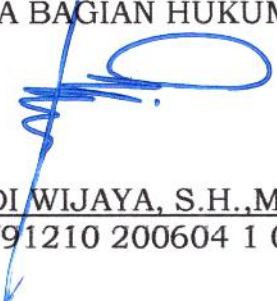
Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

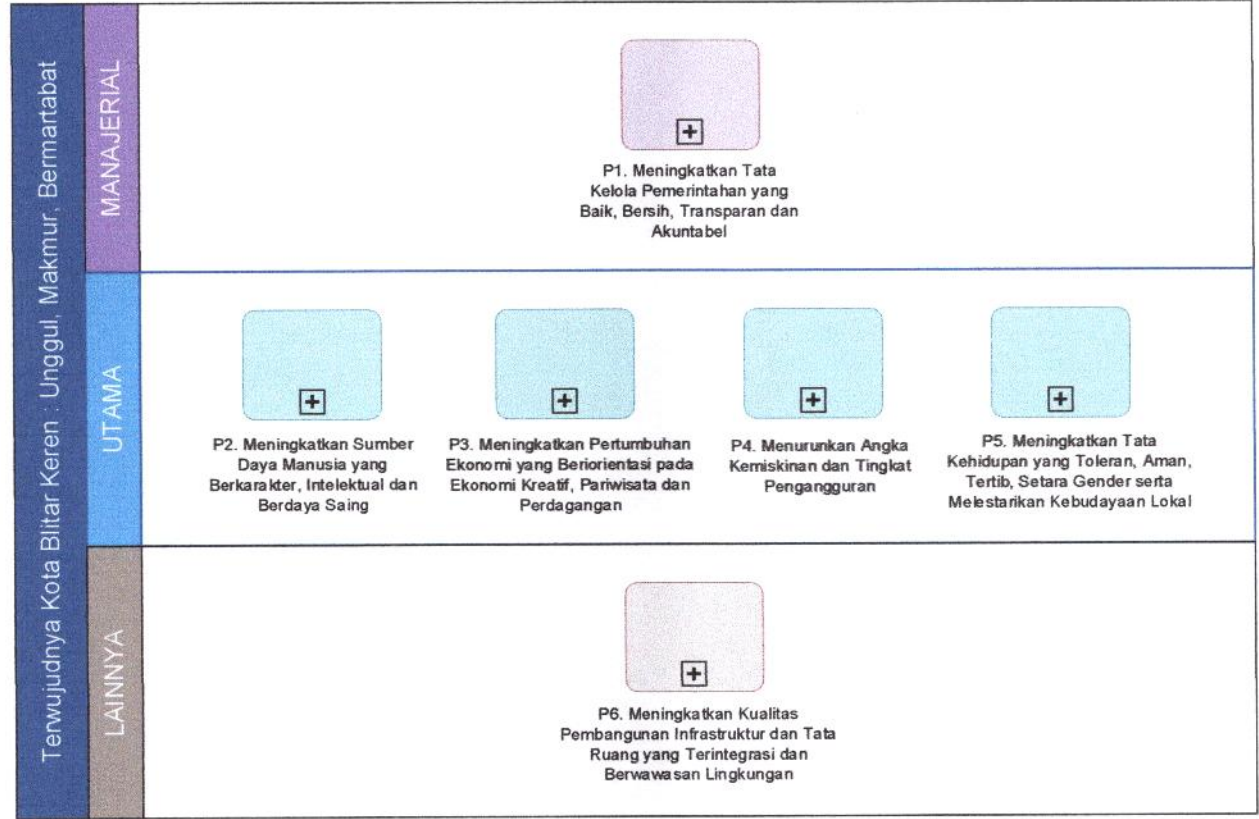


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BLITAR

1. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BLITAR

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Kota Blitar sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya, Kota Blitar memiliki 4 (empat) fungsi/proses utama, meliputi: (1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Intelktual dan Berdaya Saing; (2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan; (3) Menurunkan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran; dan (4) Meningkatkan Tata Kehidupan yang Toleran, Aman, Tertib, Setara Gender serta Melestarikan Kebudayaan Lokal. Empat proses utama tersebut dipengaruhi oleh 1 (satu) proses manajerial yaitu (1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel dan ditunjang oleh 1 (satu) proses lainnya yaitu (1) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan. Proses Bisnis Pemerintah Kota Blitar Level 0 secara keseluruhan ditunjukkan oleh gambar berikut.



Kemudian, peta proses bisnis Pemerintah Kota Blitar ini diturunkan/dijabarkan lebih rinci ke dalam peta proses bisnis level 1 dan level 2 yang akan dijelaskan pada subbab berikut.

1.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 KOTA BLITAR

Peta proses bisnis level 1 merupakan turunan langsung dari proses logis yang harus dilakukan untuk mencapai proses yang ada dalam level 0. Dalam menentukan peta proses bisnis level 1 merujuk pada mandat yang terdapat dalam masing masing urusan yang kemudian dihubungkan dengan arah pembangunan Walikota yang tercantum pada visi dan misi. Perumusan proses bisnis Kota Blitar pada level 1 dapat diuraikan sebagai berikut.

P1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

P1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

P.1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan serta Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

P.1.2 Meningkatkan Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan

P.1.3 Meningkatkan Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

P.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

P.1.5 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

P.1.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

P.1.7 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan yang Tertib

P.1.8 Optimalisasi Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah

P.1.9 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kewilayahan

P2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER, INTELEKTUAL DAN BERDAYA SAING

P.2 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER, INTELEKTUAL DAN BERDAYA SAING

P.2.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

P.2.2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan

P.2.3 Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat

P.2.4 Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga

P3. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERORIENTASI PADA EKONOMI KREATIF, PARIWISATA DAN PERDAGANGAN



P4. MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN



P5. MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG TOLERAN, AMAN, TERTIB, SETARA GENDER SERTA MELESTARIKAN KEBUDAYAAN LOKAL



P6. MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG YANG TERINTEGRASI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

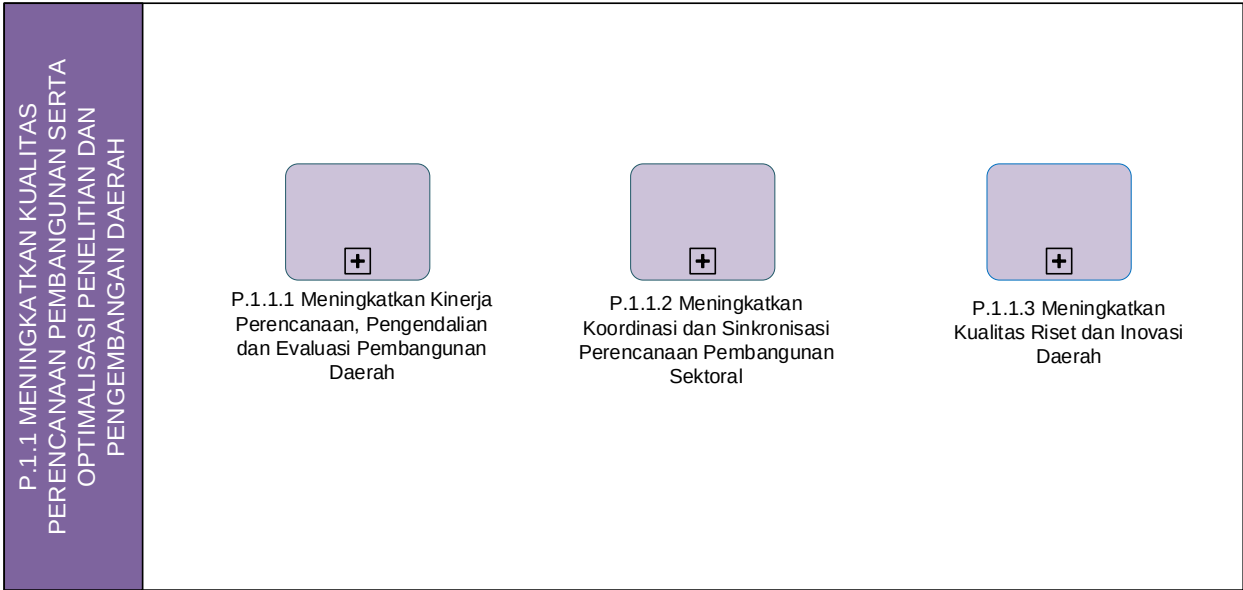


1.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 KOTA BLITAR

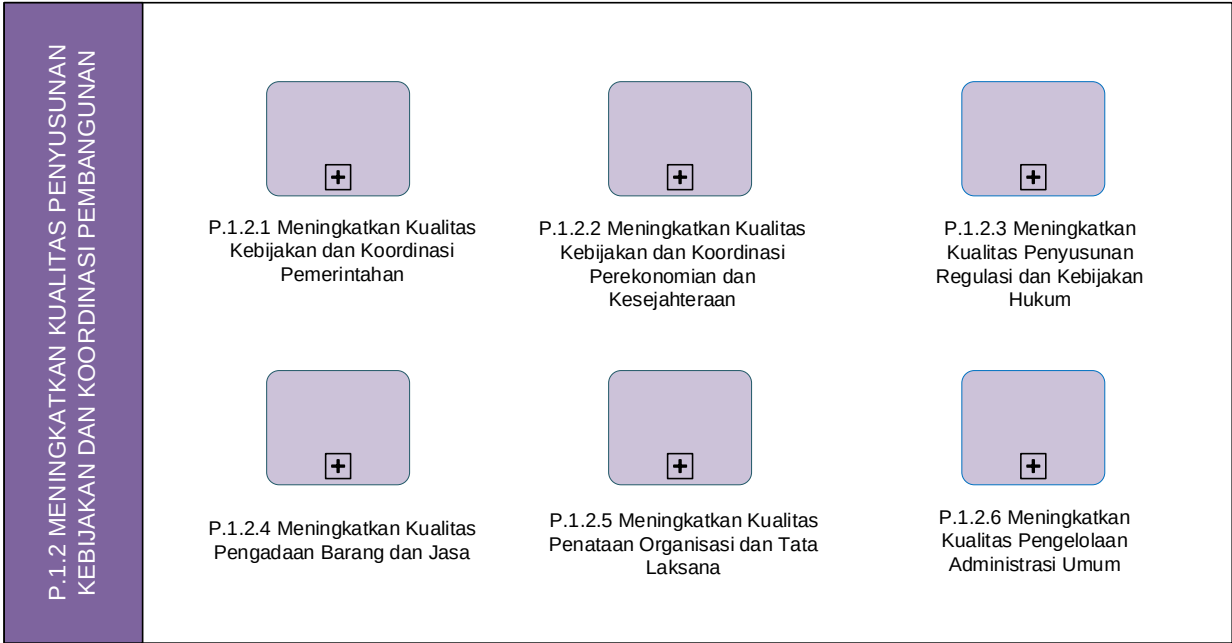
Peta proses bisnis level 2 merupakan turunan langsung dari proses logis yang harus dilakukan untuk mencapai proses yang ada dalam level 1. Dalam menentukan peta proses bisnis level 2 merujuk pada mandat yang terdapat dalam masing masing urusan yang kemudian dihubungkan dengan arah pembangunan Kota Blitar yang tercantum pada visi dan misi. Selanjutnya, dilakukan perumusan peta proses bisnis level 2 dari masing-masing proses pada proses bisnis level 1 sebagaimana diuraikan sebagaimana berikut.

P1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

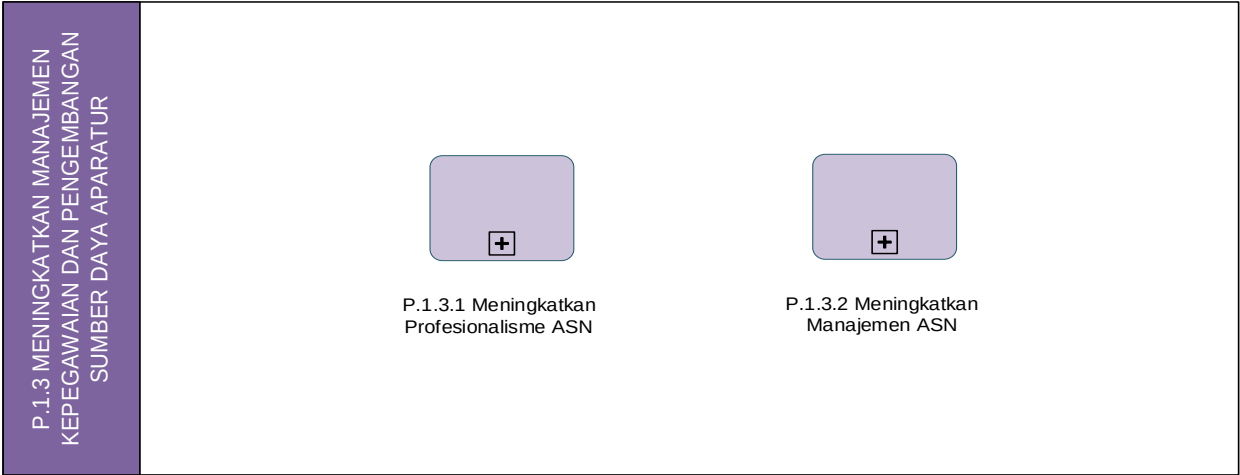
P.1.1 MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SERTA OPTIMALISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



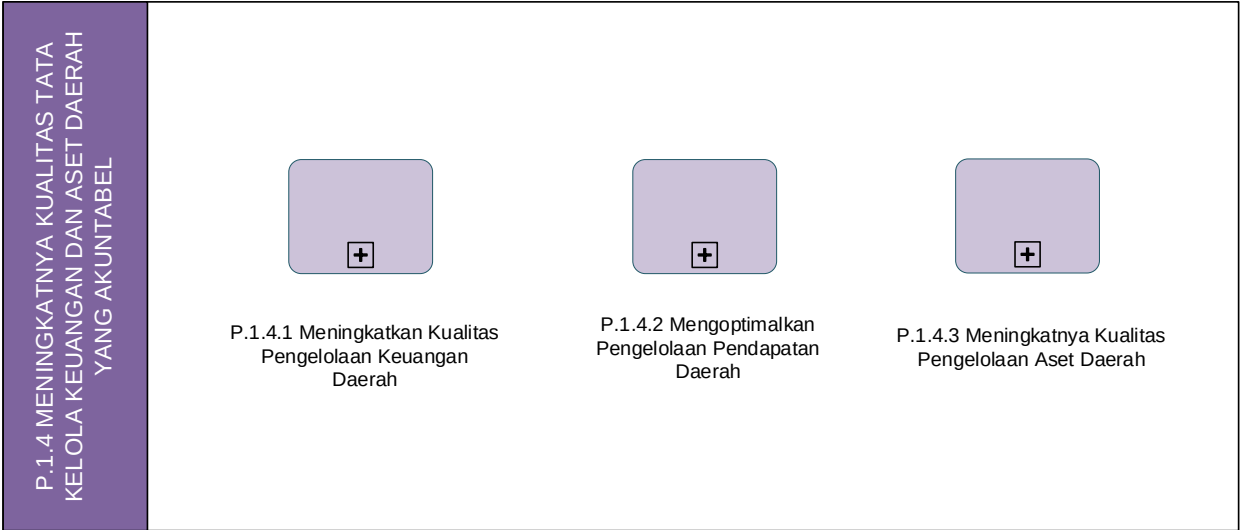
P.1.2 MENINGKATKAN KUALITAS PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PEMBANGUNAN



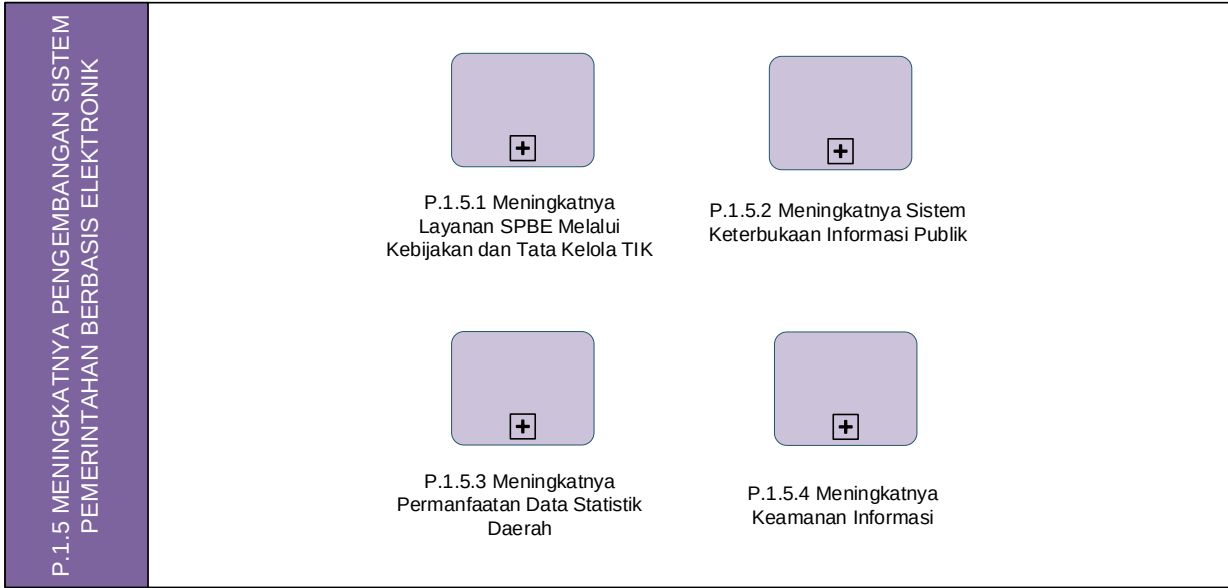
P.1.3 MENINGKATKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR



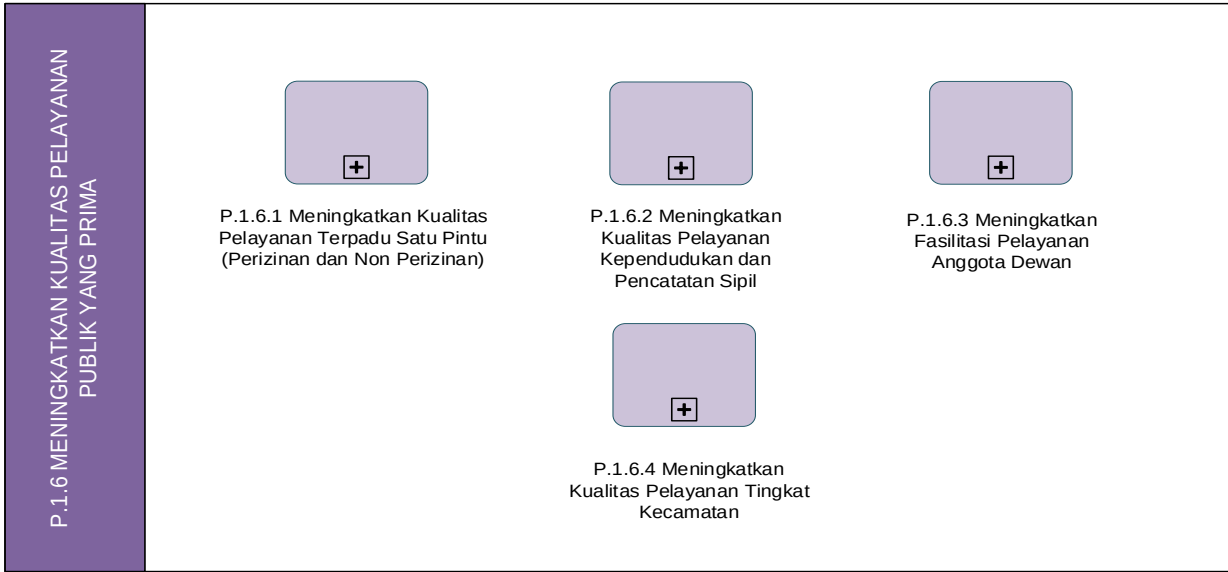
P.1.4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL



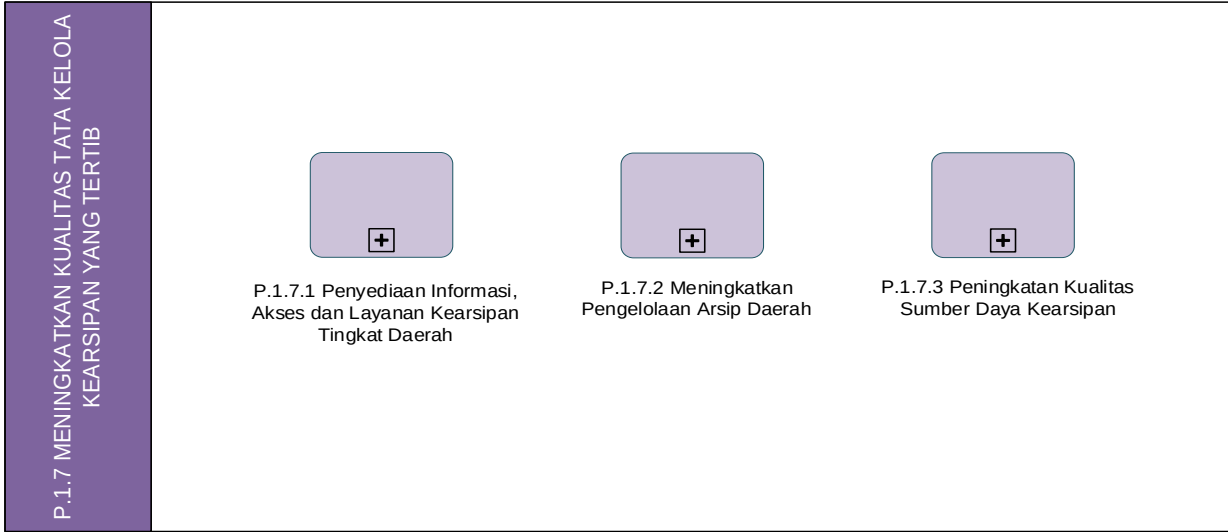
P.1.5 MENINGKATNYA PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



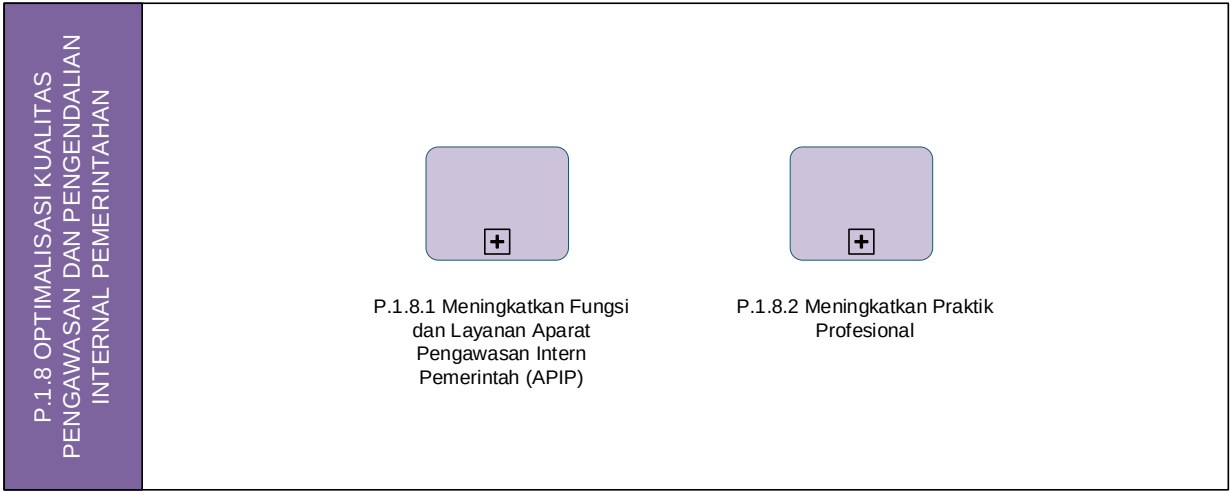
P.1.6 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA



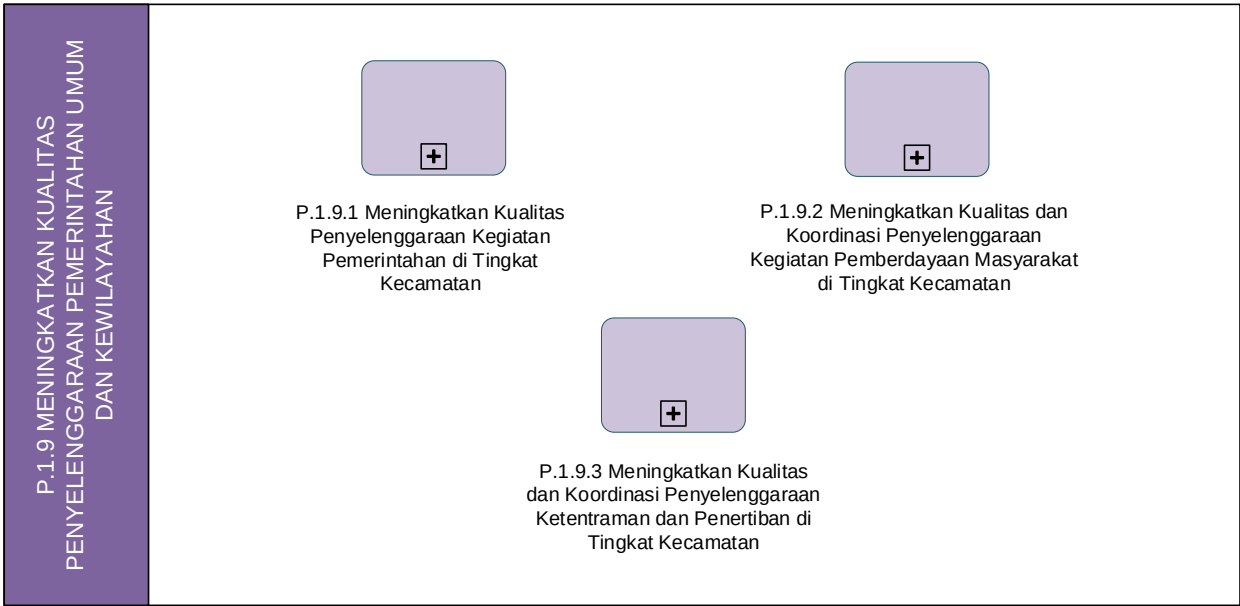
P.1.7 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEARSIPAN YANG TERTIB



P.1.8 OPTIMALISASI KUALITAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

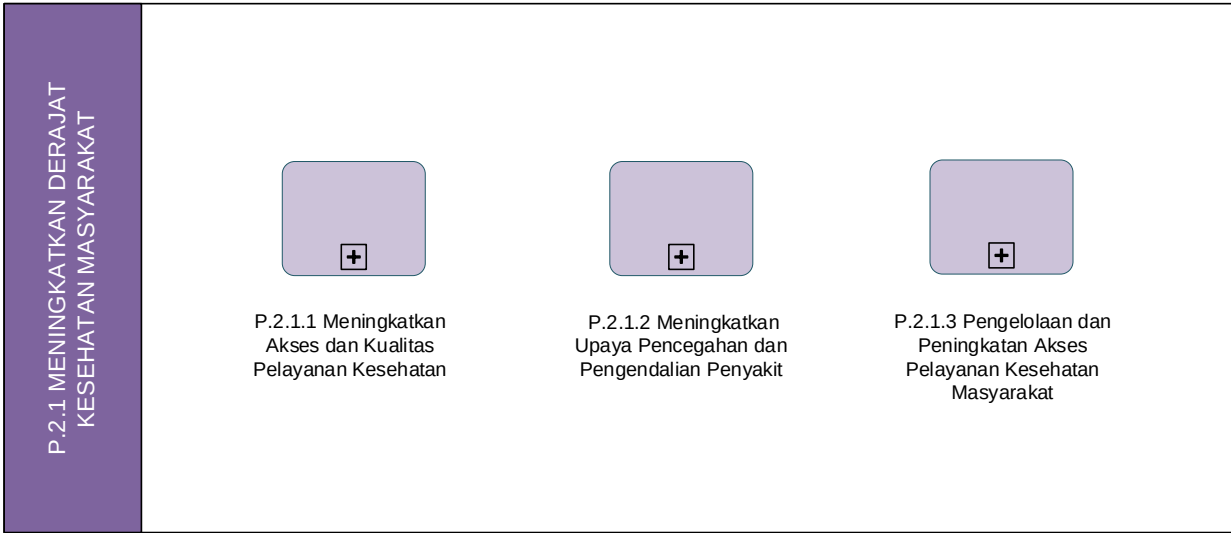


P.1.9 MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEWILAYAHAN

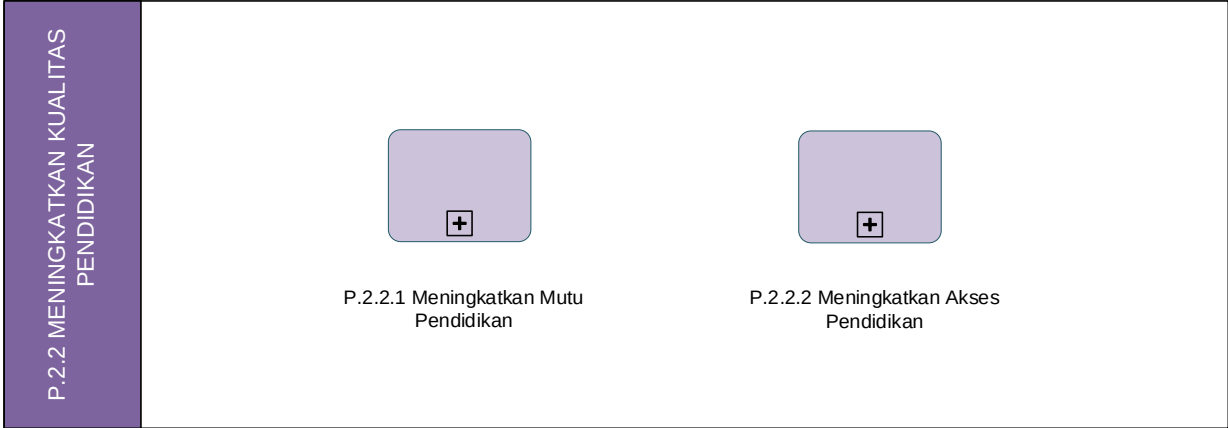


P2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER, INTELEKTUAL DAN BERDAYA SAING

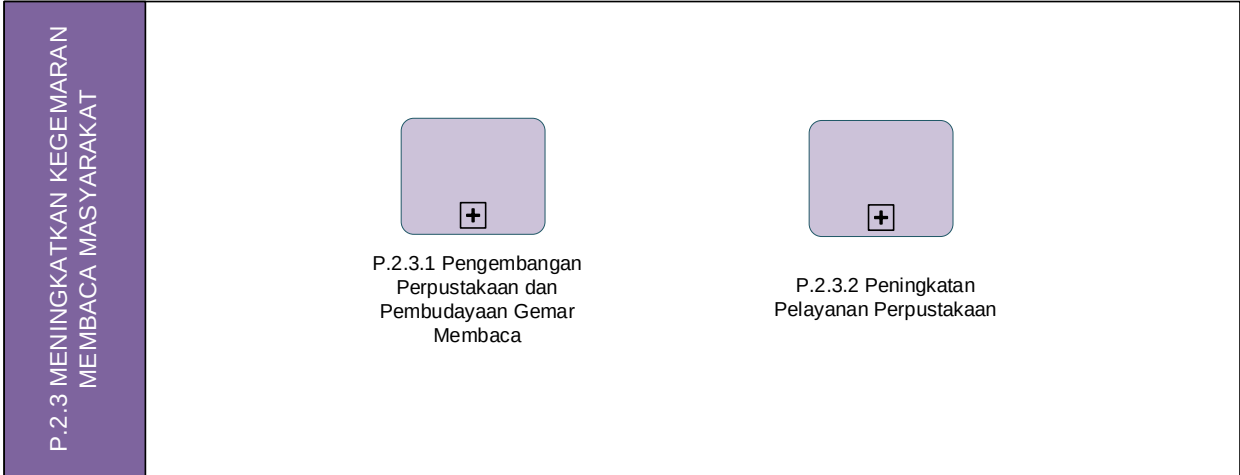
P.2.1 MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT



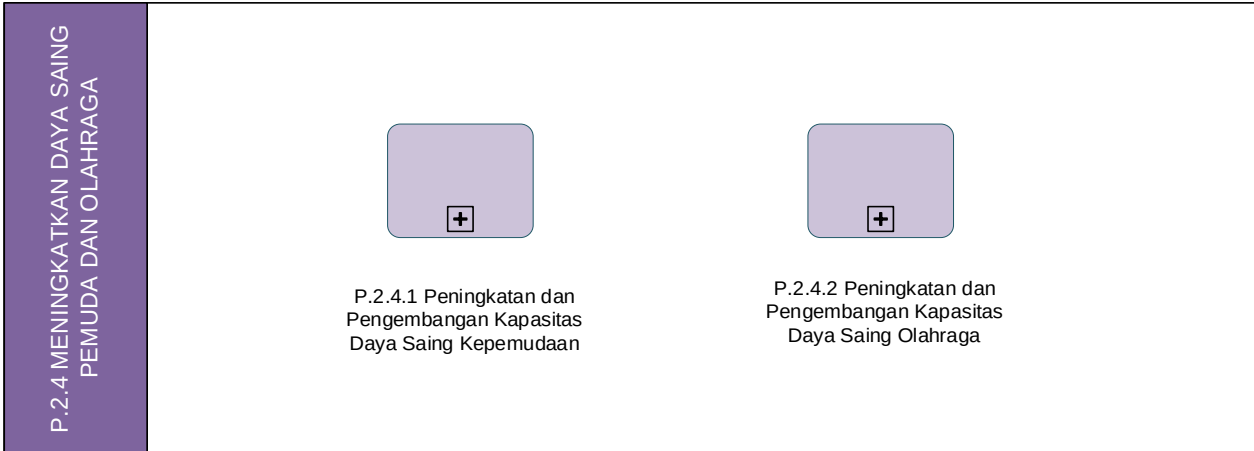
P.2.2 MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN



P.2.3 MENINGKATKAN KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT

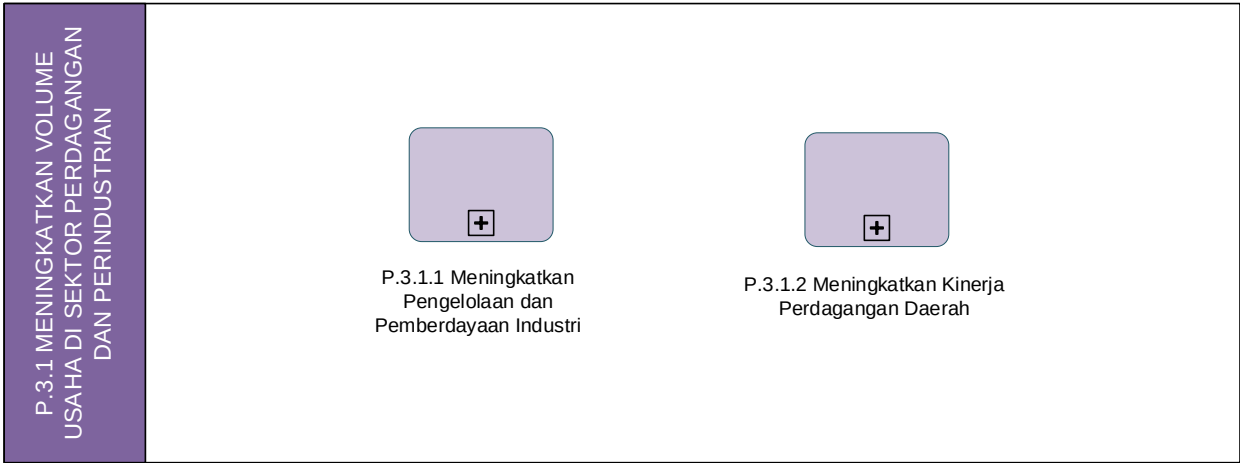


P.2.4 MENINGKATNYA DAYA SAING PEMUDA DAN OLAHRAGA

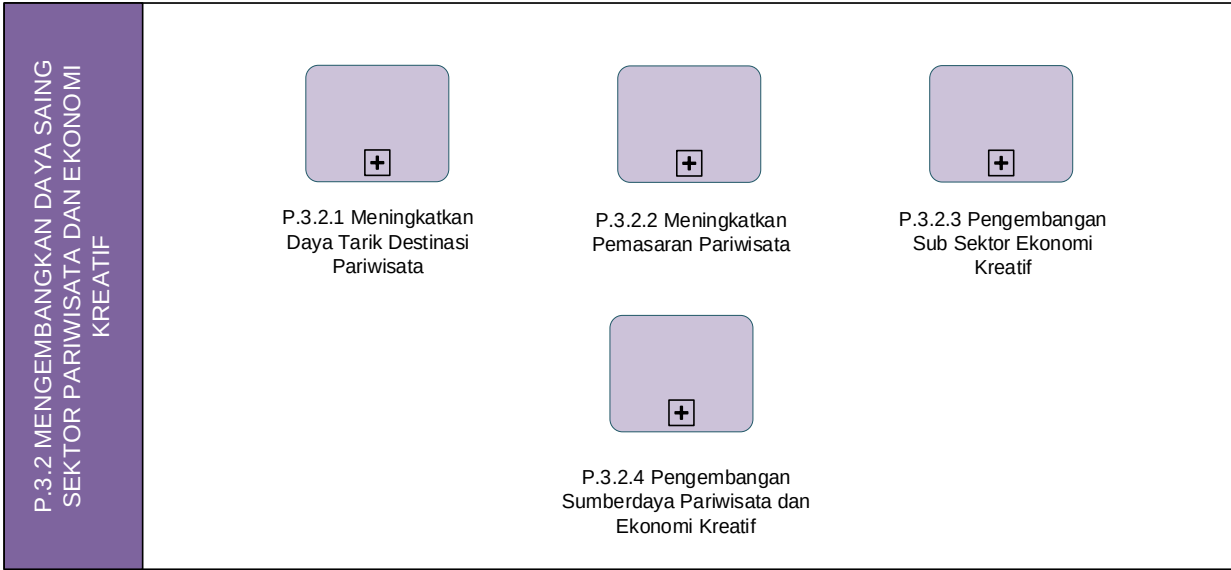


P3. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERORIENTASI PADA EKONOMI KREATIF, PARIWISATA DAN PERDAGANGAN

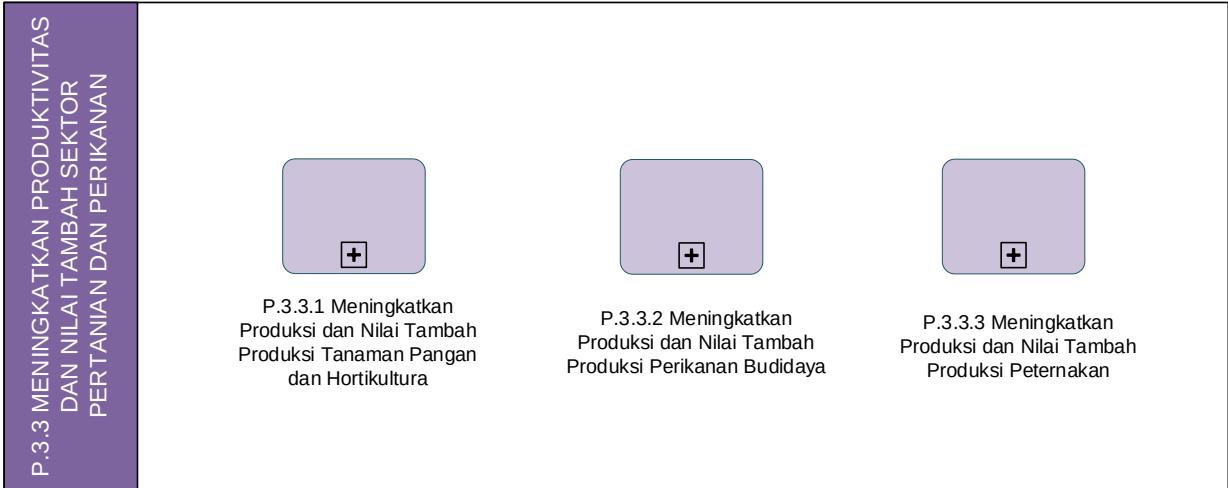
P.3.1 MENINGKATKAN VOLUME USAHA DI SEKTOR PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



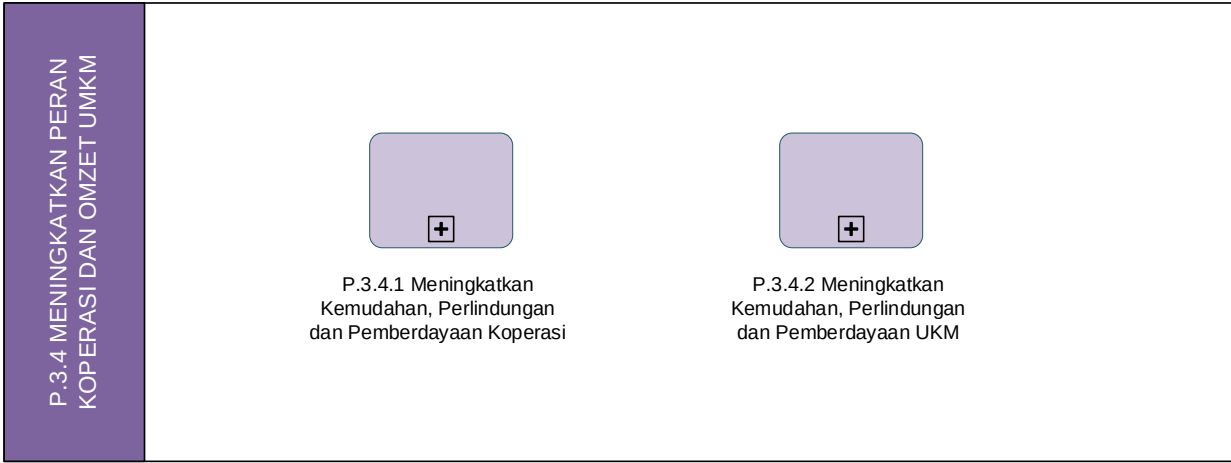
P.3.2 MENGEMBANGKAN DAYA SAING SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



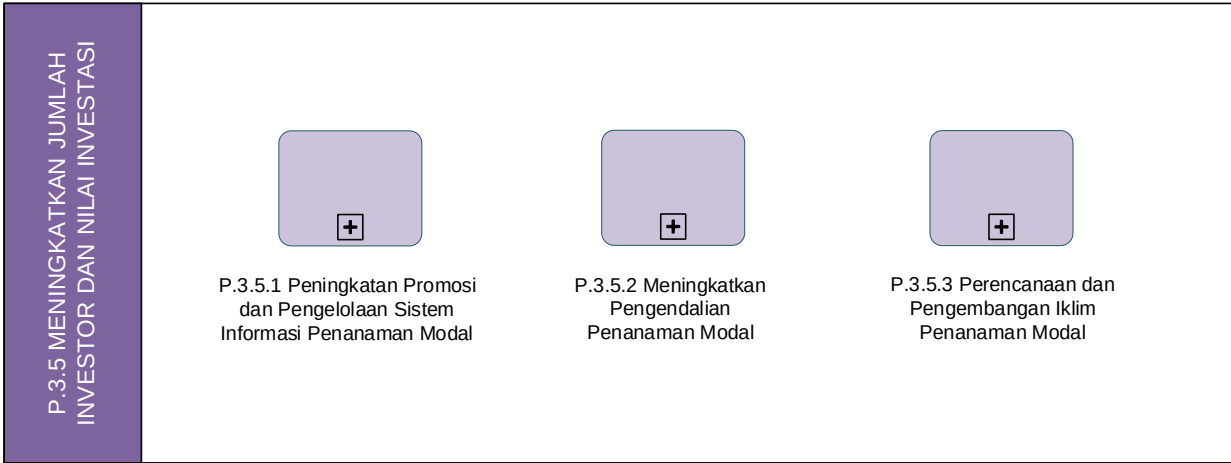
P.3.3 MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN



P.3.4 MENINGKATKAN PERAN KOPERASI DAN OMZET UMKM

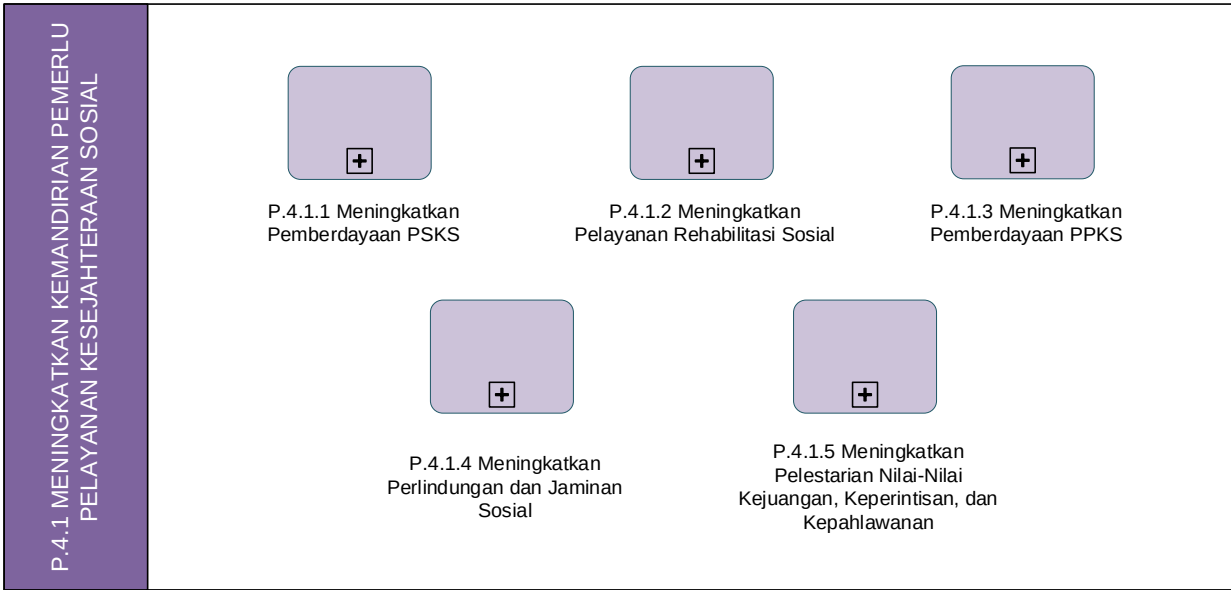


P.3.5 MENINGKATKAN JUMLAH INVESTOR DAN NILAI INVESTASI

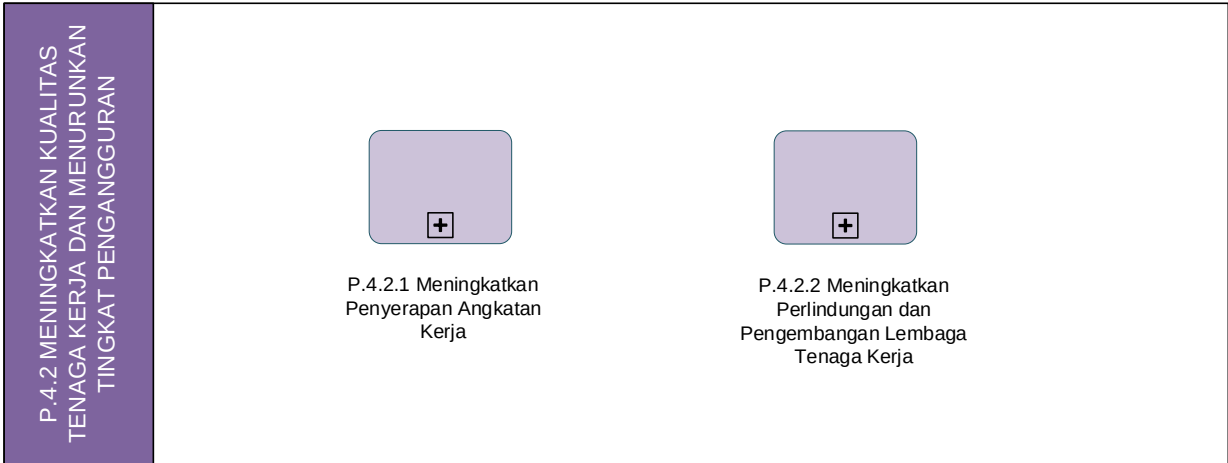


P4. MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN

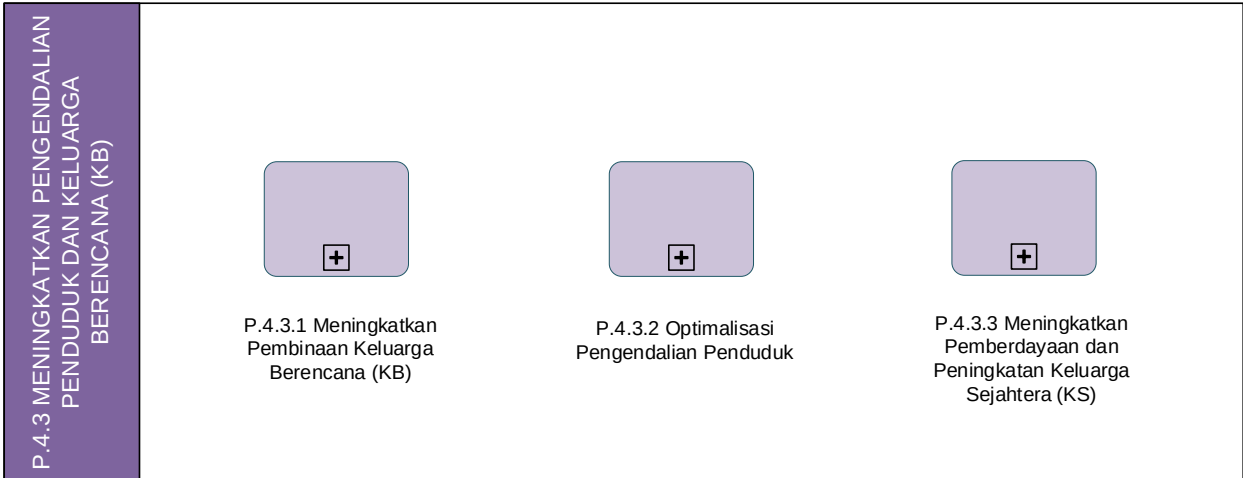
P.4.1 MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



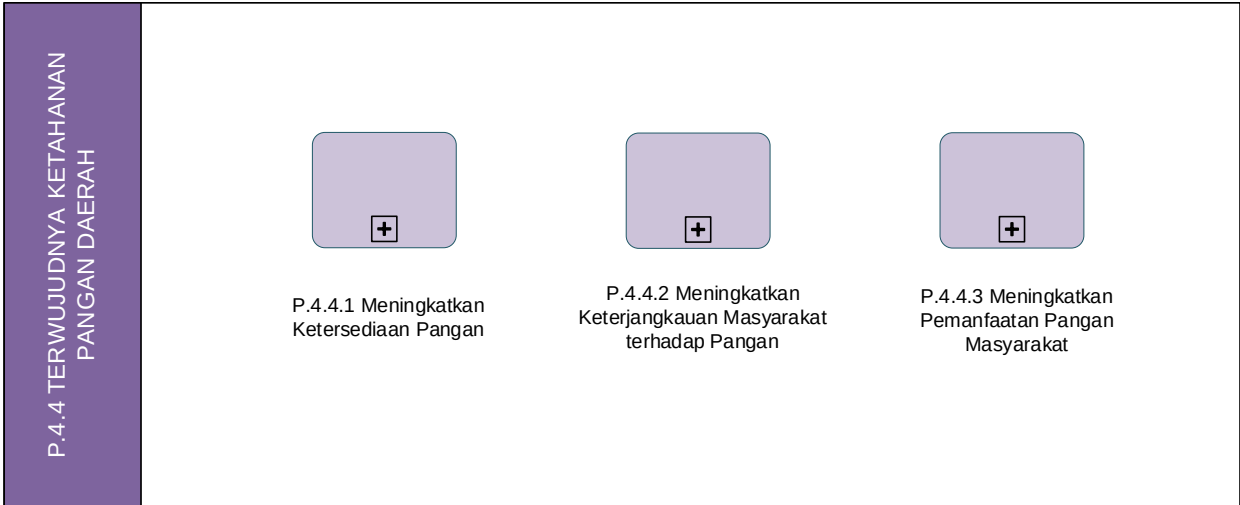
P.4.2 MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DAN MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN



P.4.3 MENINGKATKAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

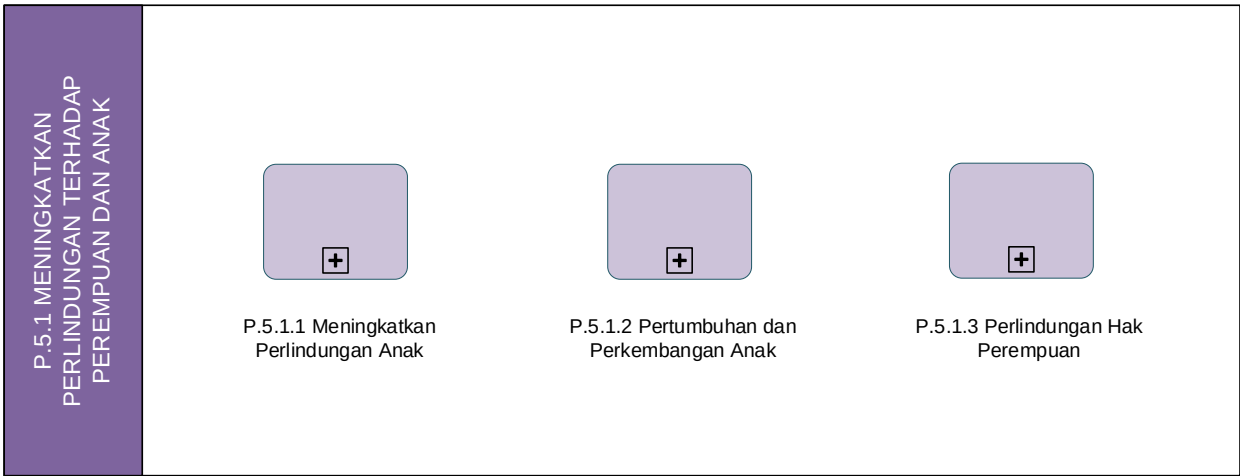


P.4.4 TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH

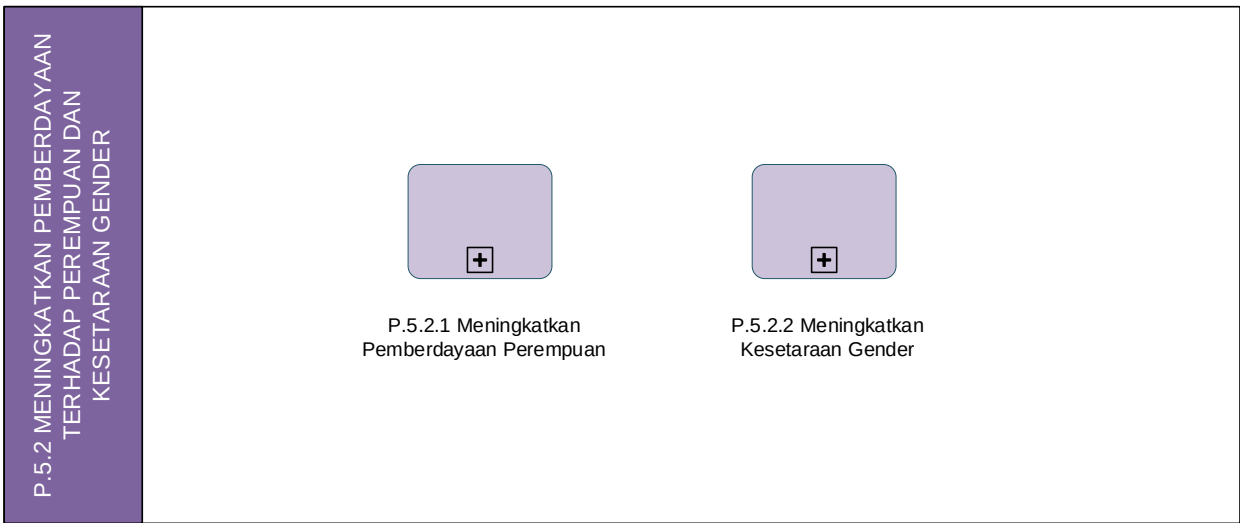


P5. MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG TOLERAN, AMAN, TERTIB, SETARA GENDER SERTA MELESTARIKAN KEBUDAYAAN LOKAL

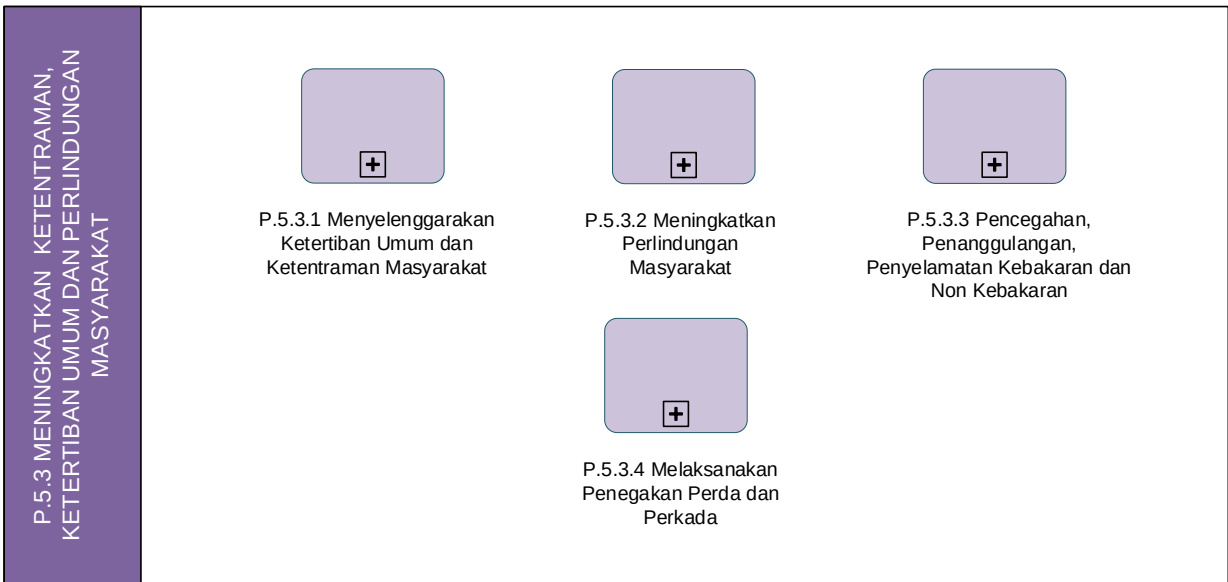
P.5.1 MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK



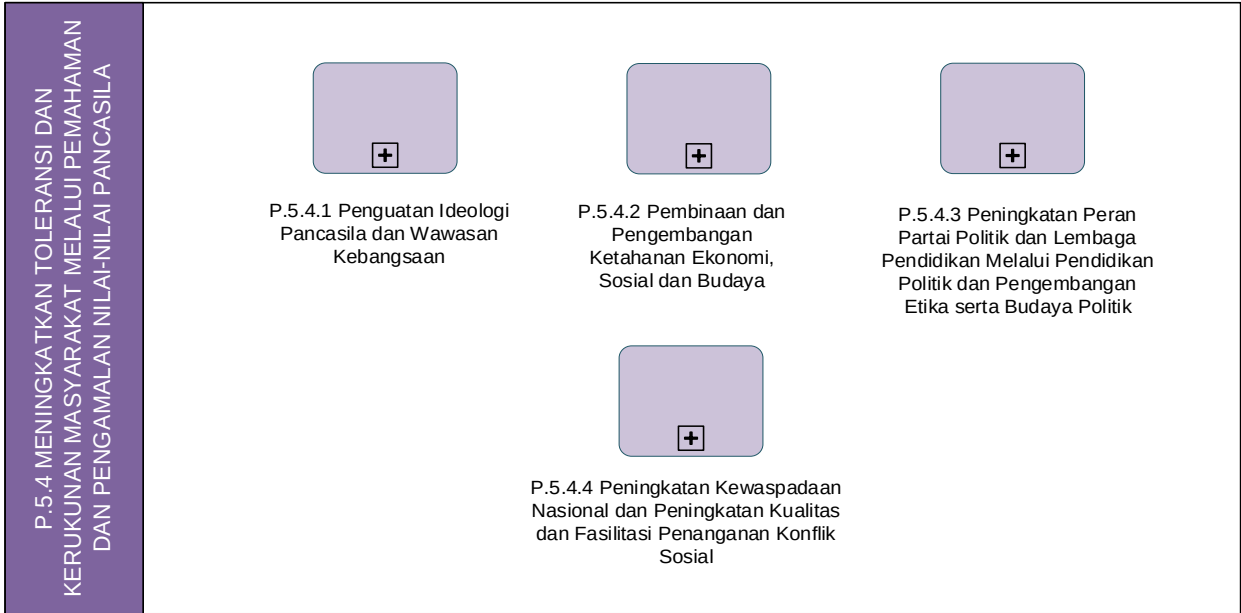
P.5.2 MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN TERHADAP PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER



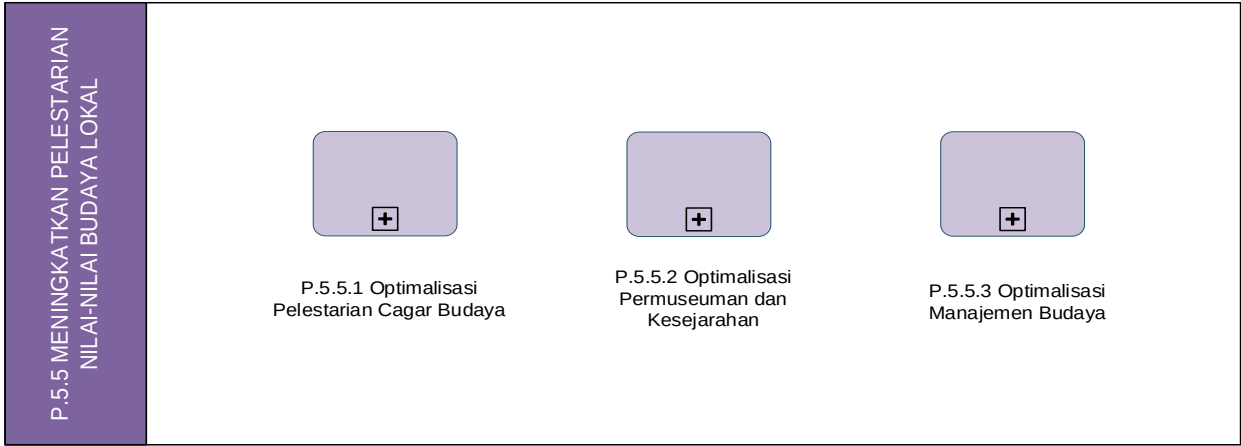
P.5.3 MENINGKATKAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



P.5.4 MENINGKATKAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN MASYARAKAT MELALUI PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA

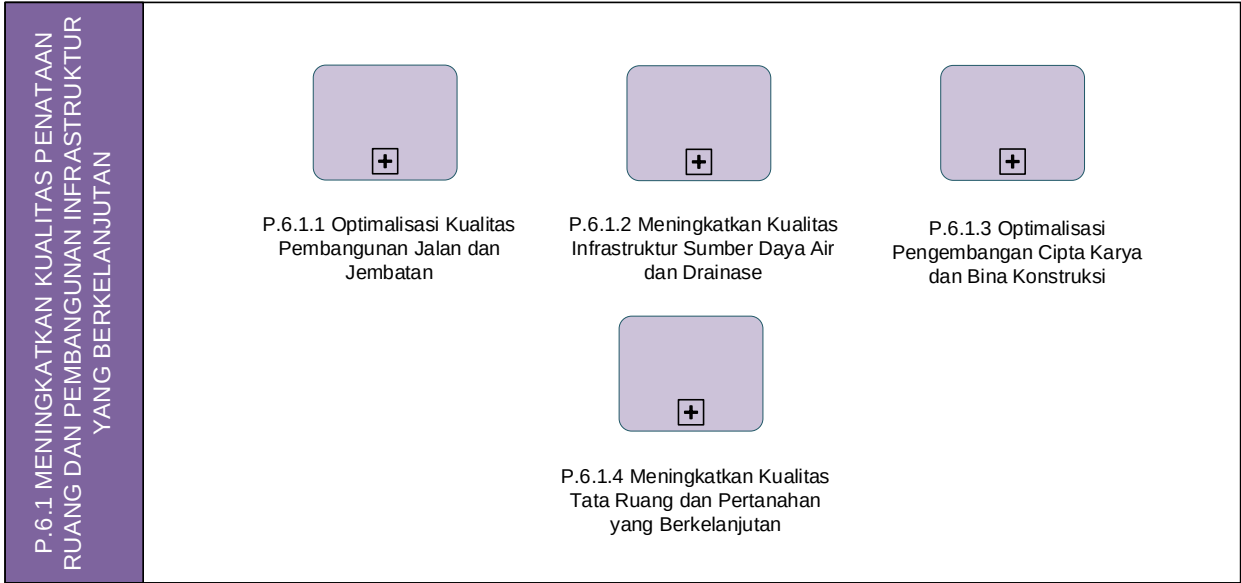


P.5.5 MENINGKATKAN PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL

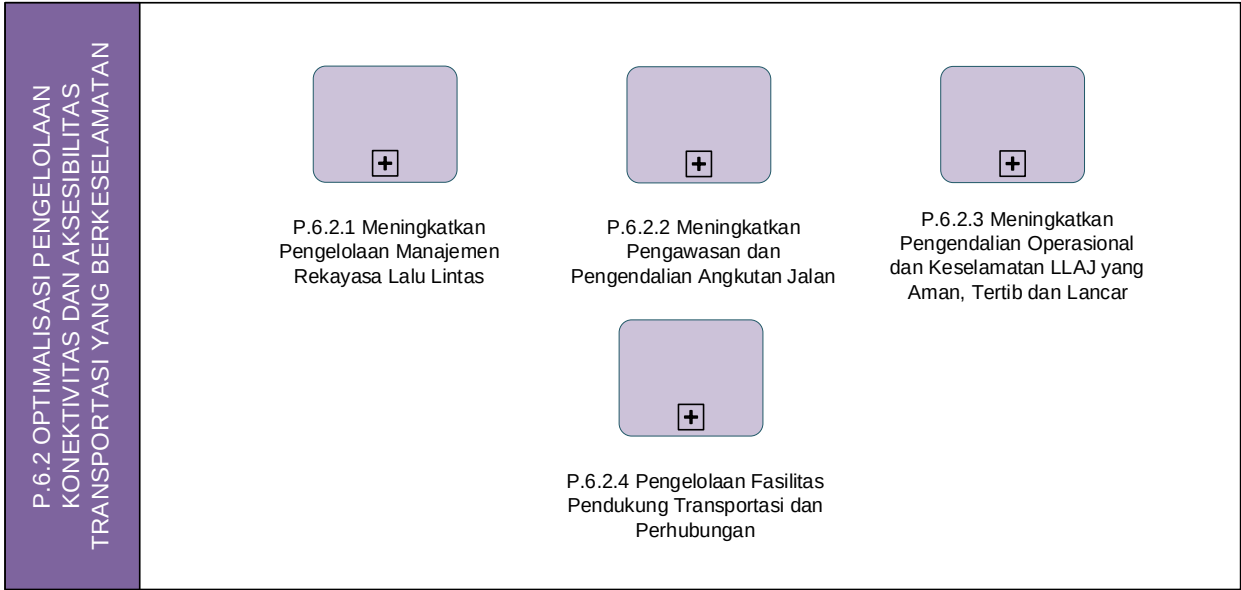


P6. MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG YANG TERINTEGRASI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

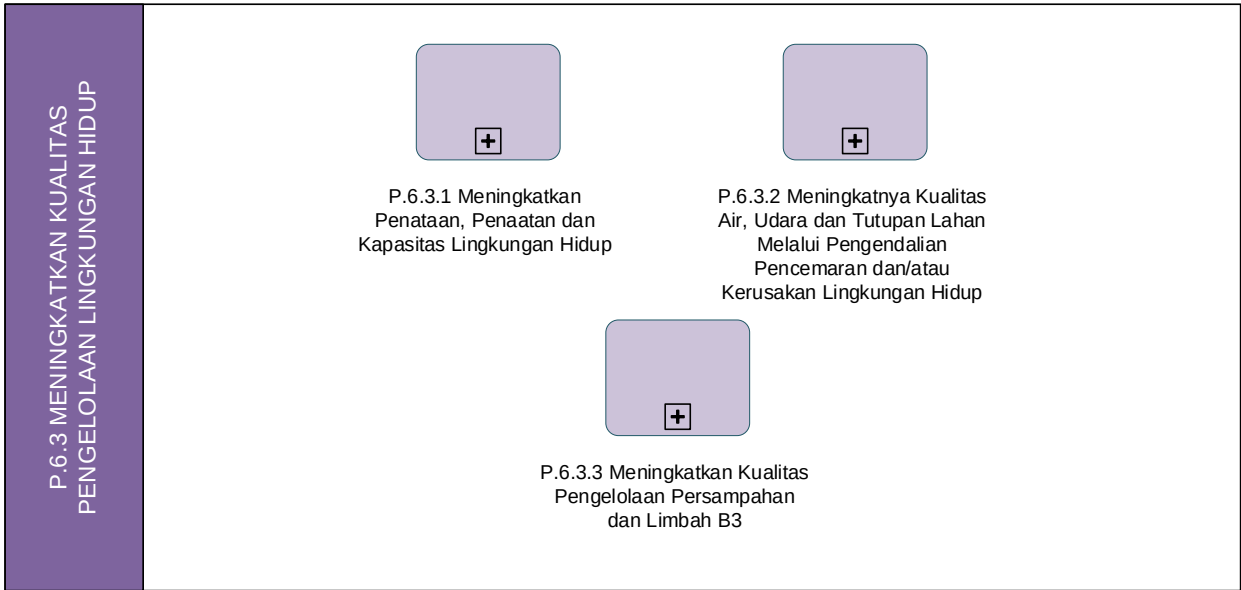
P.6.1 MENINGKATKAN KUALITAS PENATAAN RUANG DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN



P.6.2 OPTIMALISASI PENGELOLAAN KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS TRANSPORTASI YANG BERKESELAMATAN



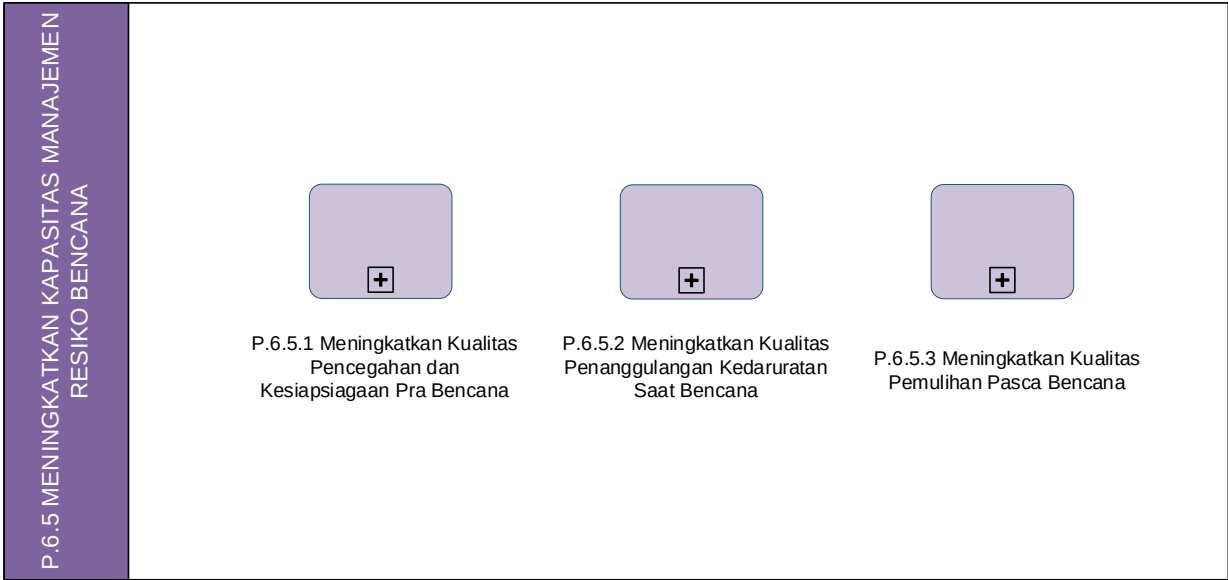
P.6.3 MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



P.6.4 MENINGKATKAN KUALITAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG SEHAT DAN LAYAK HUNI



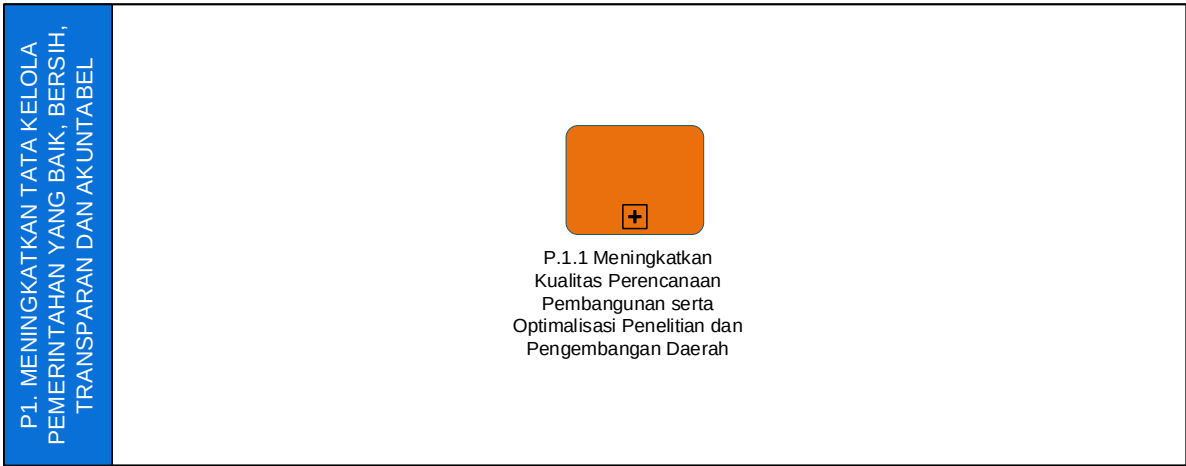
P.6.5 MENINGKATKAN KAPASITAS MANAJEMEN RESIKO BENCANA



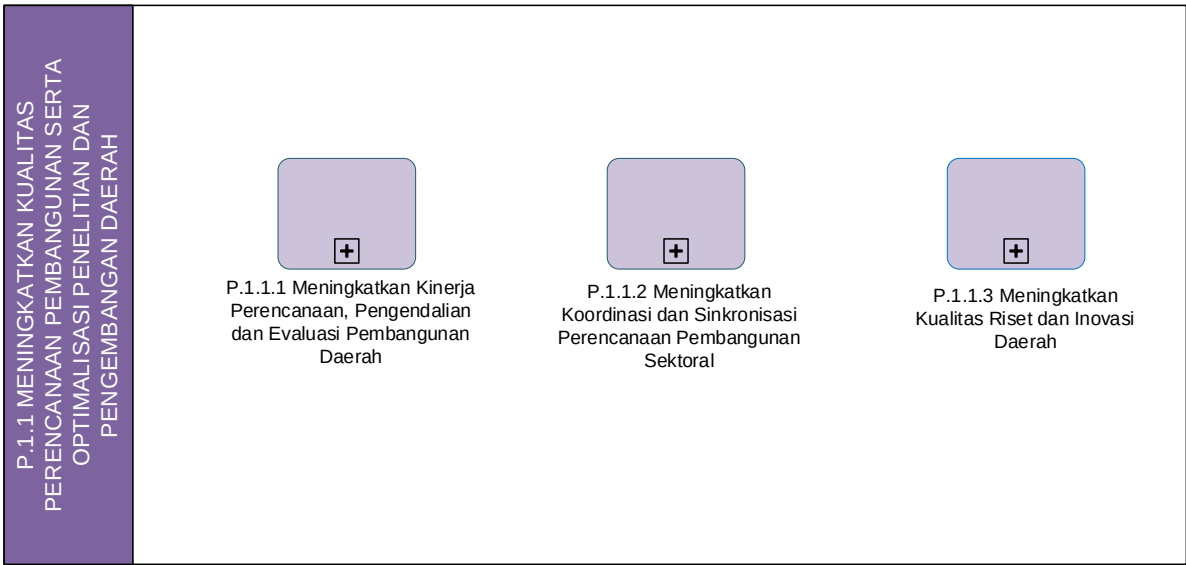
2. PETA PROSES BISNIS DI 30 (TIGA PULUH) PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR

2.1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1.1. Peta Proses Bisnis Level 0



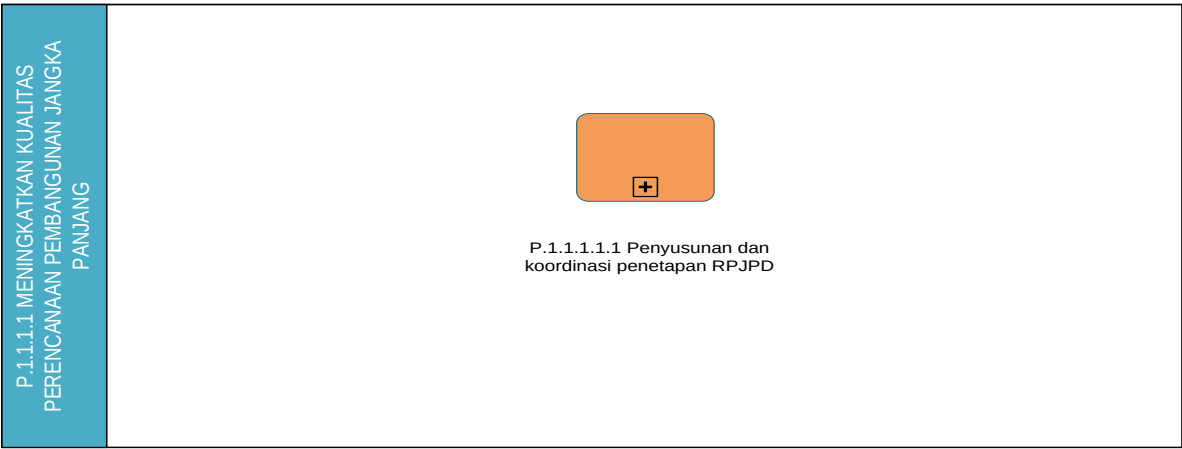
2.1.2. Peta Proses Bisnis Level 1



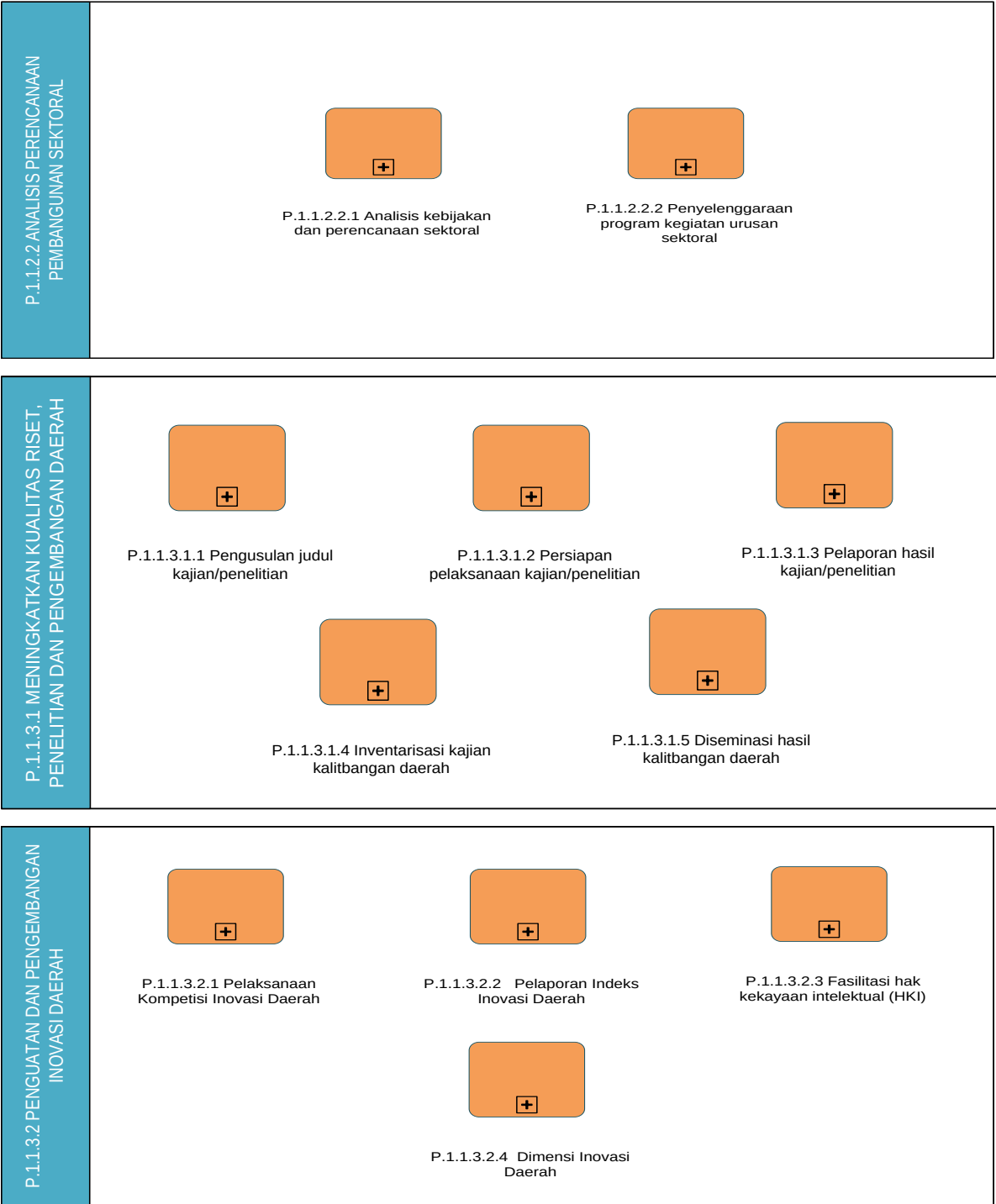
2.1.3. Peta Proses Bisnis Level 2



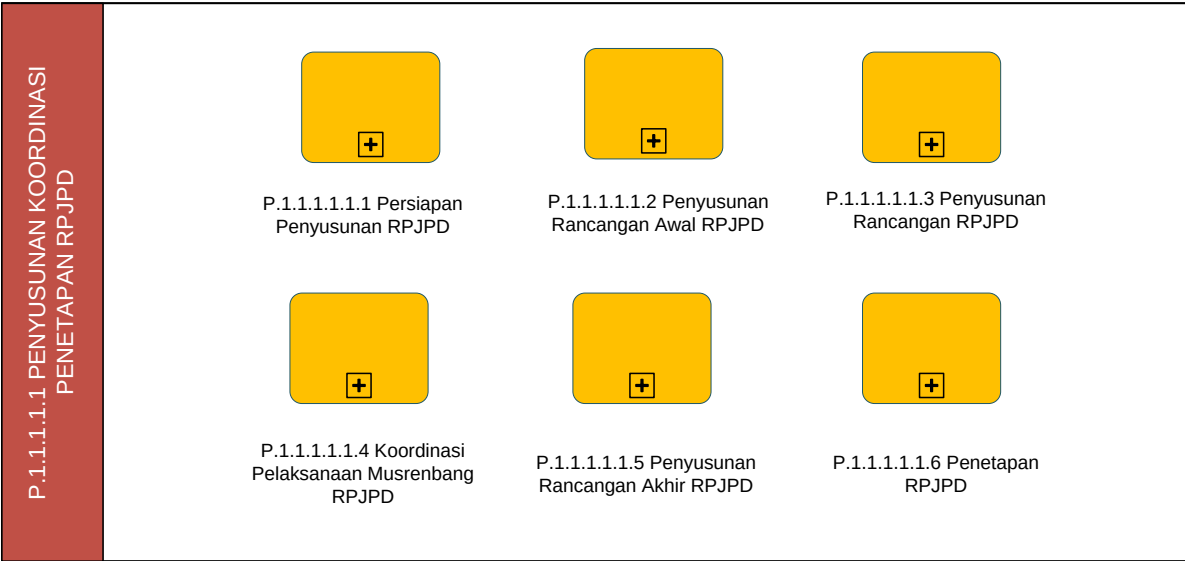
2.1.4. Peta Proses Bisnis Level 3



P.1.1.2 MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	 P.1.1.1.2.1 Penyusunan dan Koordinasi Penetapan RPJMD
P.1.1.1.3MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA TAHUNAN	 P.1.1.1.3.1 Penyusunan RKPD  P.1.1.1.3.2 Penyusunan Perubahan RKPD
P.1.1.1.4 MELAKSANAKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	 P.1.1.1.4.1 Pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah  P.1.1.1.4.2 Ekspose hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
P.1.1.2.1 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	 P.1.1.2.1.1 Fasilitasi perencanaan (Verifikasi dan Validasi Renstra OPD)  P.1.1.2.1.2 Fasilitasi perencanaan (Verifikasi dan Validasi Renja OPD)



2.1.5. Peta Proses Bisnis Level 4



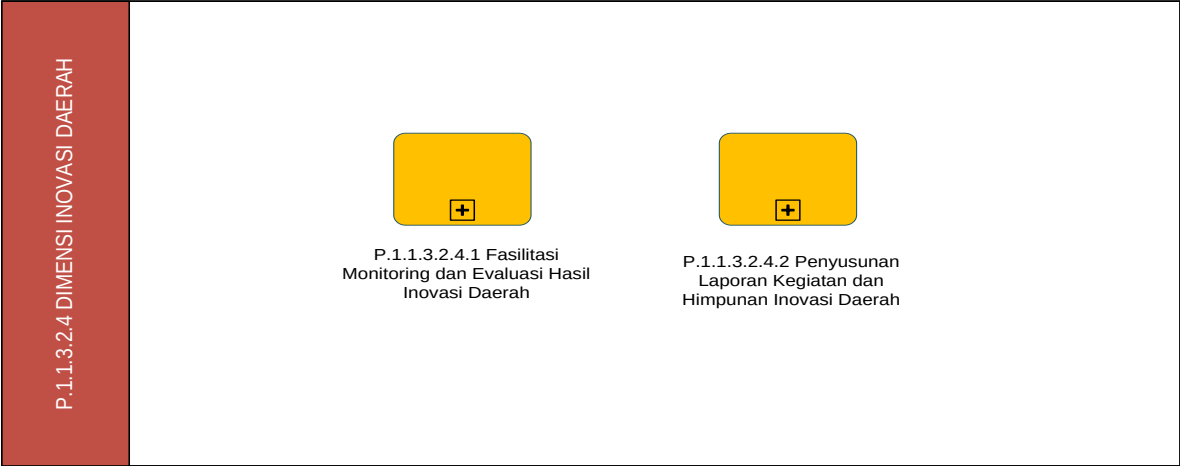
P.1.1.1.2.1 PENYUSUNAN DAN KOORDINASI PENETAPAN RPJMD			
	P.1.1.1.2.1.1 Persiapan Penyusunan RPJMD	P.1.1.1.2.1.2 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	P.1.1.1.2.1.3 Penyusunan Rancangan RPJMD
			
	P.1.1.1.2.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	P.1.1.1.2.1.5 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD	P.1.1.1.2.1.6 Penetapan Perda RPJMD
P.1.1.1.3.1 PENYUSUNAN RKPD			
	P.1.1.1.3.1.1 Persiapan Penyusunan RKPD	P.1.1.1.3.1.2 Penyusunan Rancangan RKPD	P.1.1.1.3.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD
			
	P.1.1.1.3.1.4 Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	P.1.1.1.3.1.5 Penetapan Perbup RKPD	
P.1.1.1.3.2 PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD			
	P.1.1.1.3.2.1 Penyusunan Perubahan RKPD	P.1.1.1.3.2.2 Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	P.1.1.1.3.2.3 Penetapan Perubahan RKPD
P.1.1.1.4.1 PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	P.1.1.1.4.1.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJPD	P.1.1.1.4.1.2 Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD	P.1.1.1.4.1.3 Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD
			
	P.1.1.1.4.1.4 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renstra PD	P.1.1.1.4.1.5 Pengendalian dan evaluasi terhadap Renja PD	

P.1.1.2.1.1 FASILITASI PERENCANAAN (VERIFIKASI DAN VALIDASI RENSTRA OPD	 P.1.1.2.1.1.1 Fasilitas Verifikasi dan Validasi Renstra OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	 P.1.1.2.1.1.2 Fasilitas Verifikasi dan Validasi Renstra OPD Bidang Perekonomian dan SDA	 P.1.1.2.1.1.3 Fasilitas Verifikasi dan Validasi Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
P.1.1.2.1.2 FASILITASI PERENCANAAN (VERIFIKASI DAN VALIDASI RENJA OPD)	 P.1.1.2.1.2.1 Fasilitas Verifikasi dan Validasi Renja OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	 P.1.1.2.1.2.2 Fasilitas Verifikasi dan Validasi Renja OPD Bidang Perekonomian dan SDA	 P.1.1.2.1.2.3 Fasilitas Verifikasi dan Validasi Renja OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
P.1.1.2.2.1 ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SEKTORAL	 P.1.1.2.2.1.1 Penyiapan Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	 P.1.1.2.2.1.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan Sektoral  P.1.1.2.2.1.4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Sektoral	 P.1.1.2.2.1.3 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Sektoral

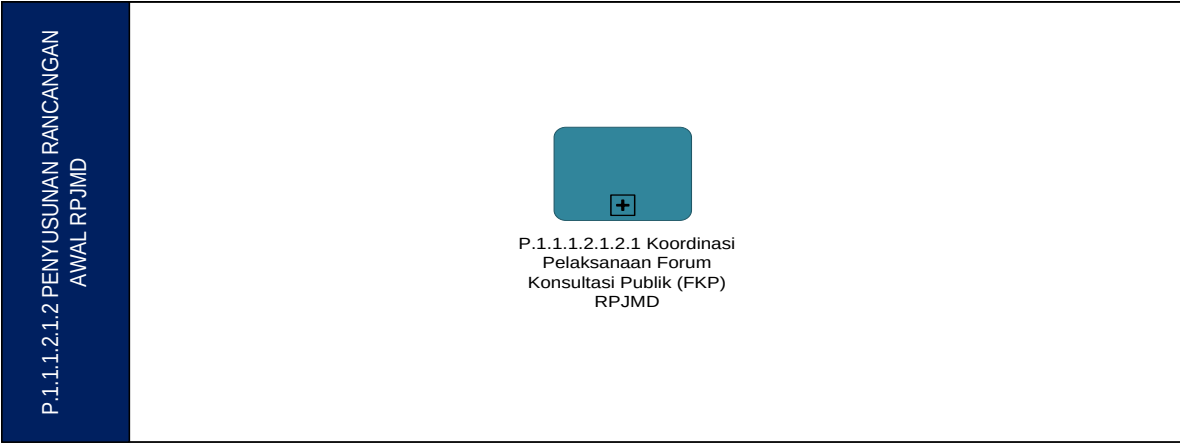
P.1.1.2.2.2 PENYELENGGARAAN PROGRAM KEGIATAN URUSAN SEKTORAL			
	P.1.1.2.2.2.1 Penyusunan SK Tim Koordinasi/Teknis terkait Pelaksanaan Urusan Sektoral	P.1.1.2.2.2.2 Fasilitas dan Koordinasi penyelenggaraan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	P.1.1.2.2.2.3 Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan program bidang perekonomian dan sumber daya alam
			
	P.1.1.2..2.2.4 Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan program bidang infrastruktur dan kewilayahan	P.1.1.2..2.2.5 Pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan sektoral (Pusat/Provinsi/ Kabupaten)	
P.1.1.3.1.1 PENGUSULAN JUDUL KAJIAN/ PENELITIAN			
	P.1.1.3.1.1.1 Koordinasi Persiapan Pengusulan Judul Kajian/ Penelitian Sesuai Pedoman RIK	P.1.1.3.1.1.2 Inventarisasi tema/topik penelitian dan penetapan skala prioritas	
P.1.1.3.1.2 PERSIAPAN PELAKSANAAN KAJIAN/ PENELITIAN			
	P.1.1.3.1.2.1 Fasilitas Himpun Bahan Dokumen/Referensi Kajian/ Penelitian dan Penyusunan KAK	P.1.1.3.1.2.2 Fasilitas Koordinasi dan Pembahasan Kajian/ Penelitian	

P.1.1.3.1.3 PELAPORAN HASIL KAJIAN/ PENELITIAN	 P.1.1.3.1.3.1 Penyusunan Pelaporan Hasil Kajian/ Penelitian
P.1.1.3.1.4 INVENTARISASI KAJIAN KELITBANGAN DAERAH	 P.1.1.3.1.4.1 Invertarisasi Data Hasil Kajian/Penelitian
P.1.1.3.1.5 DISEMINASI HASIL KELITBANGAN DAERAH	 P.1.1.3.1.5.1 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Hasil Kajian Penelitian

P.1.1.3.2.1 PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI DAERAH	 P.1.1.3.2.1.1 Fasilitas Koordinasi Persiapan dan Penyusunan Rencana Kegiatan  P.1.1.3.2.1.2 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan dan Bahan Publikasi  P.1.1.3.2.1.3 Fasilitas Sosialisasi dan Workshop Inovasi  P.1.1.3.2.1.4 Inventarisasi Data dan Dokumen Proposal Inovasi  P.1.1.3.2.1.5 Fasilitas Seleksi Proposal dan Uji Produk Inovasi  P.1.1.3.2.1.6 Fasilitas Penghargaan Pemenang Inovasi  P.1.1.3.2.1.7 Fasilitas Keikutsertaan Lomba Inovasi Tingkat Provinsi  P.1.1.3.2.1.8 Penyusunan Laporan Kegiatan dan Himpunan Karya Inovasi Teknologi
P.1.1.3.2.2 PELAPORAN INDEKS INOVASI DAERAH	 P.1.1.3.2.2.1 Fasilitas Koordinasi Persiapan dan Inventarisasi Data Inovasi  P.1.1.3.2.2.2 Pelaporan Inovasi Daerah Kepada Mendagri
P.1.1.3.2.3 FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)	 P.1.1.3.2.3.1 Fasilitas Koordinasi Persiapan dan Penyusunan Rencana Kegiatan  P.1.1.3.2.3.2 Fasilitas Pelaksanaan Sosialisasi HKI



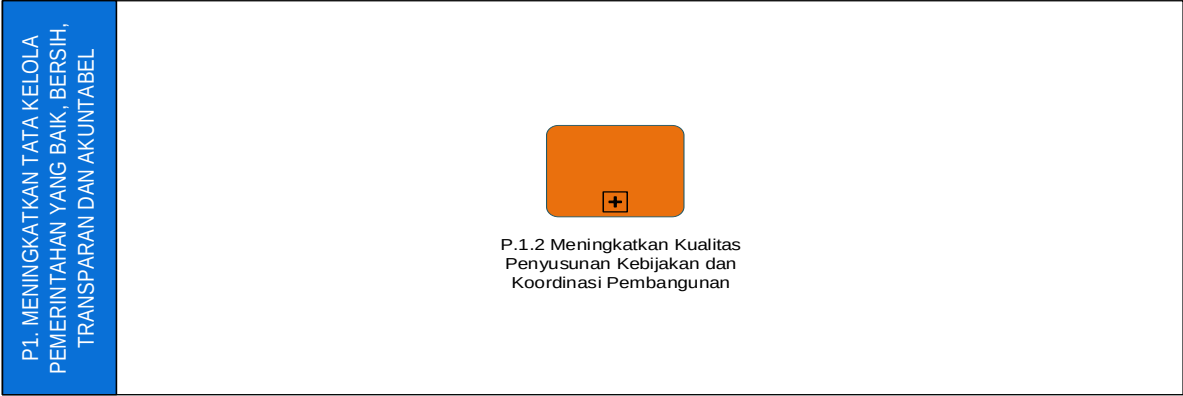
2.1.6. Peta Proses Bisnis Level 5



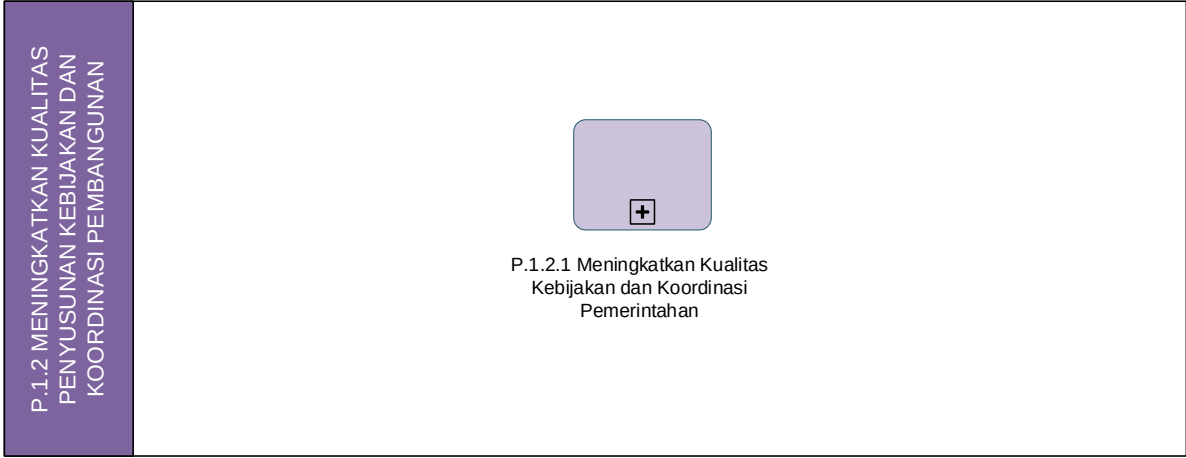
2.2. SEKRETARIAT DAERAH

2.2.1. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN

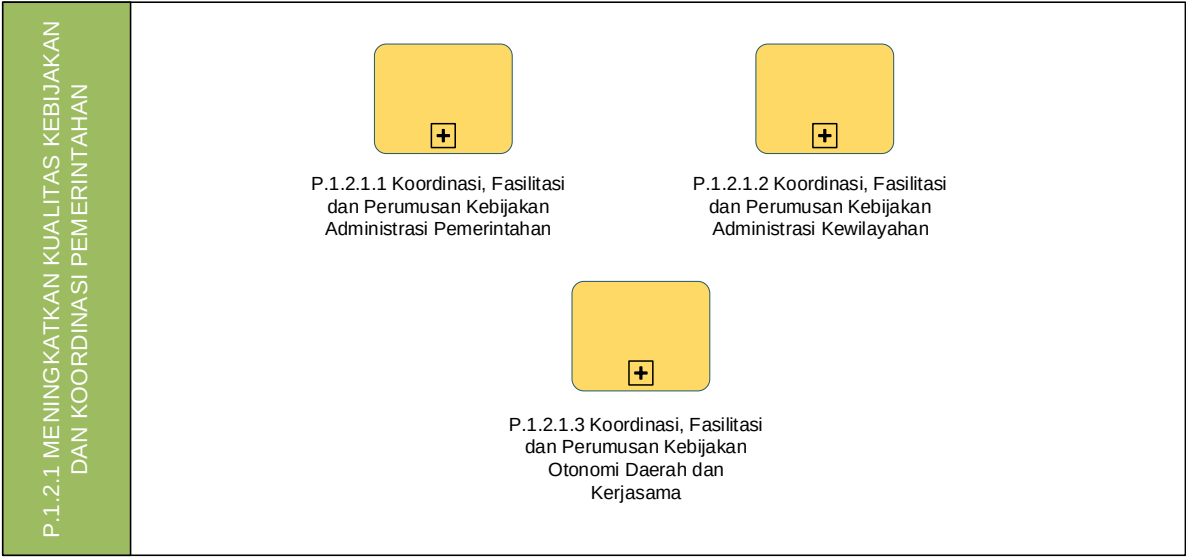
2.2.1.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



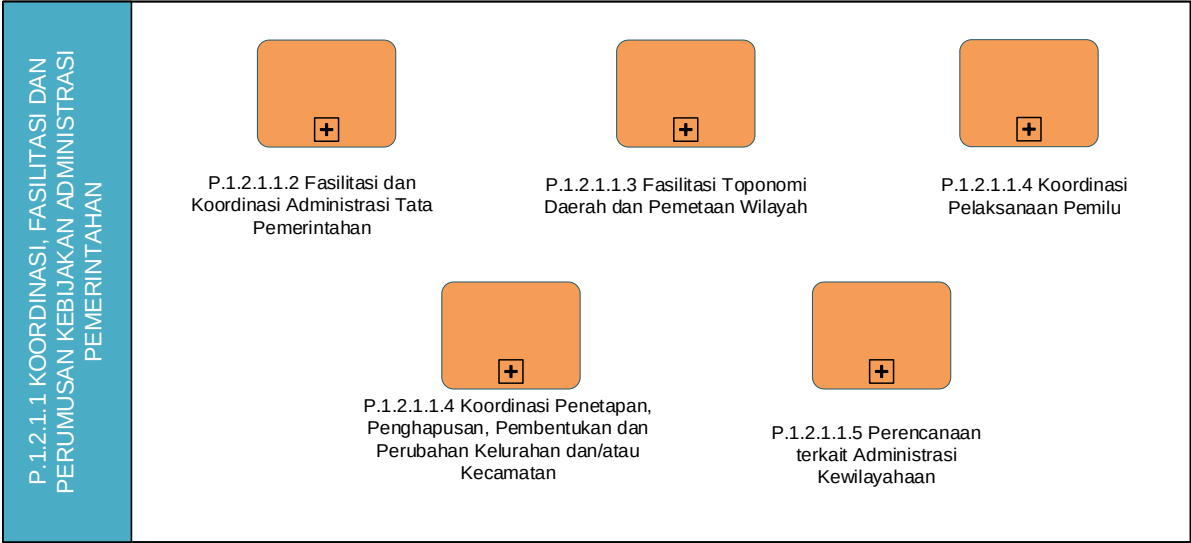
2.2.1.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



2.2.1.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2

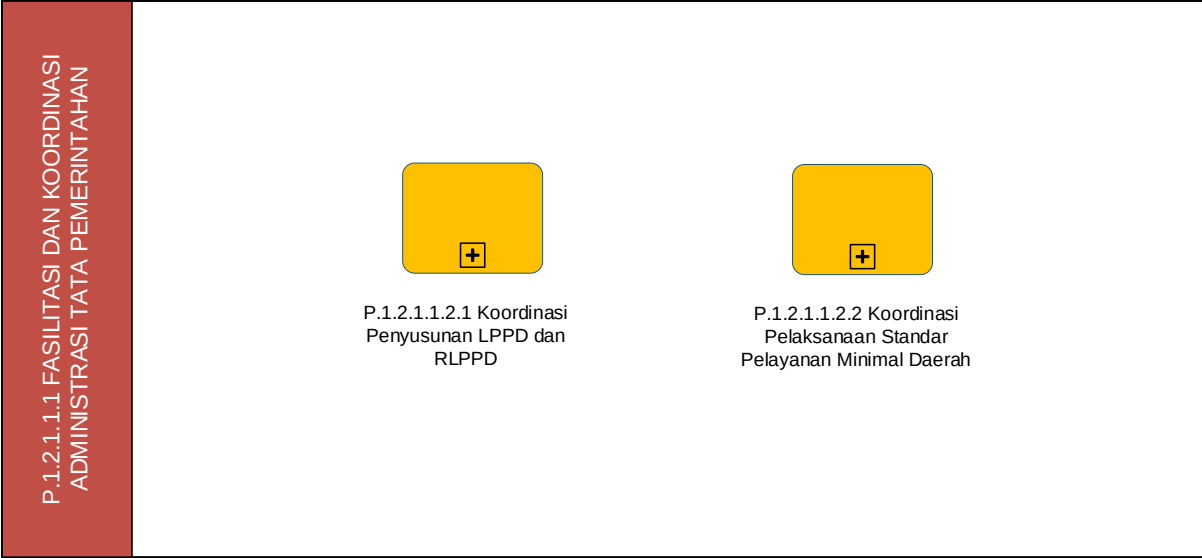


2.2.1.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3

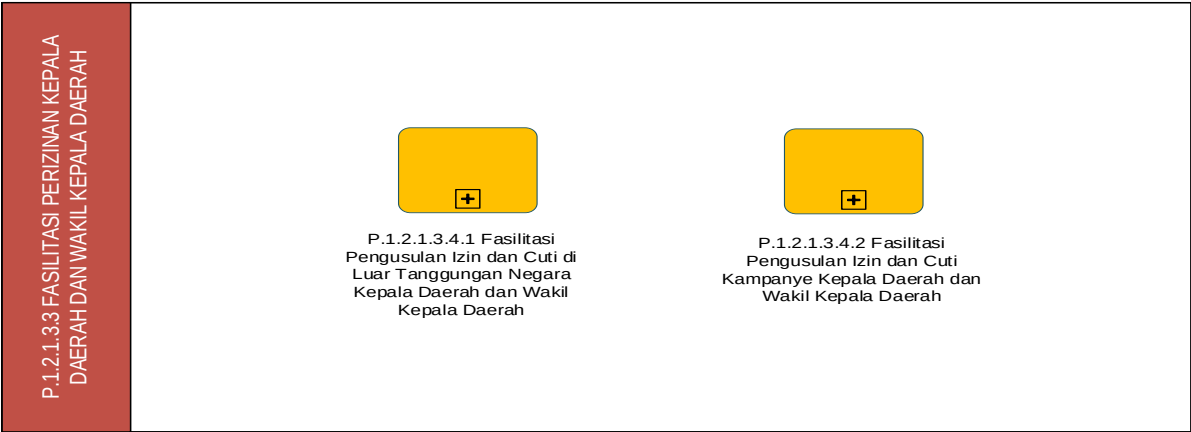




2.2.1.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



P.1.2.1.1.2 FASILITASI TOPONOMI DAERAH DAN PEMETAAN WILAYAH	P.1.2.1.1.3.1 Koordinasi Pendataan Batas Wilayah P.1.2.1.1.3.2 Koordinasi Pendataan Nama Rupabumi Kecamatan dan Kelurahan
P.1.2.1.2.2 PENGUATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KEWILAYAHAN	P.1.2.1.2.3.1 Koordinasi dan Fasilitas Harmonisasi Hubungan antar Kecamatan dan Kelurahan P.1.2.1.2.3.2 Fasilitas Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kualitas Kelmbagaan Penyelenggara di Tingkat Kecamatan P.1.2.1.2.3.3 Penyelenggaraan Penilaian Sinergitas Kecamatan
P.1.2.1.2.3 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DI TINGKAT KECAMATAN	P.1.2.1.2.4.1 Fasilitas dan Koordinasi Pengelolaan Dana Kelurahan P.1.2.1.2.4.2 Pengkoordinasi Pengelolaan Aset Daerah di Tingkat Kelurahan (Khusus Tanah Bengkok)
P.1.2.1.2.5 FASILITASI PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAAN KEMASYARAKATAN	P.1.2.1.2.6.1 Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kecamatan dan Kewilayahan P.1.2.1.2.6.2 Fasilitas dan Koordinasi Kelembagaan Kemasyarakatan

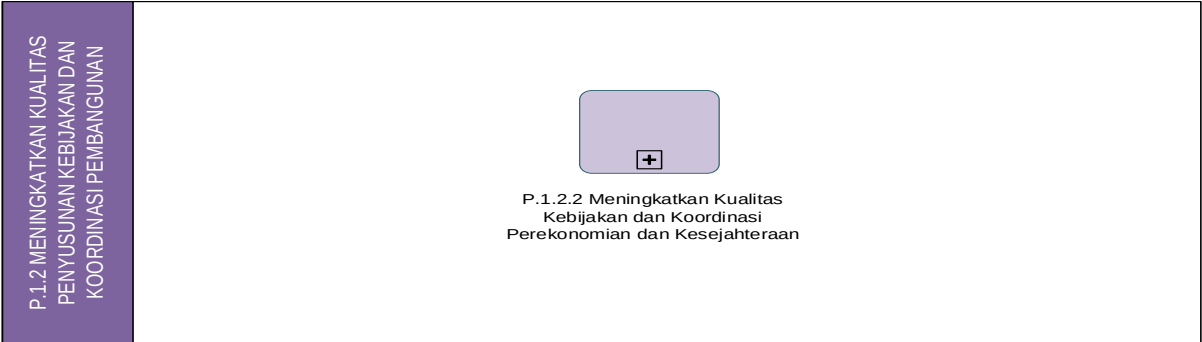


2.2.2. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN KESEJAHTERAAN

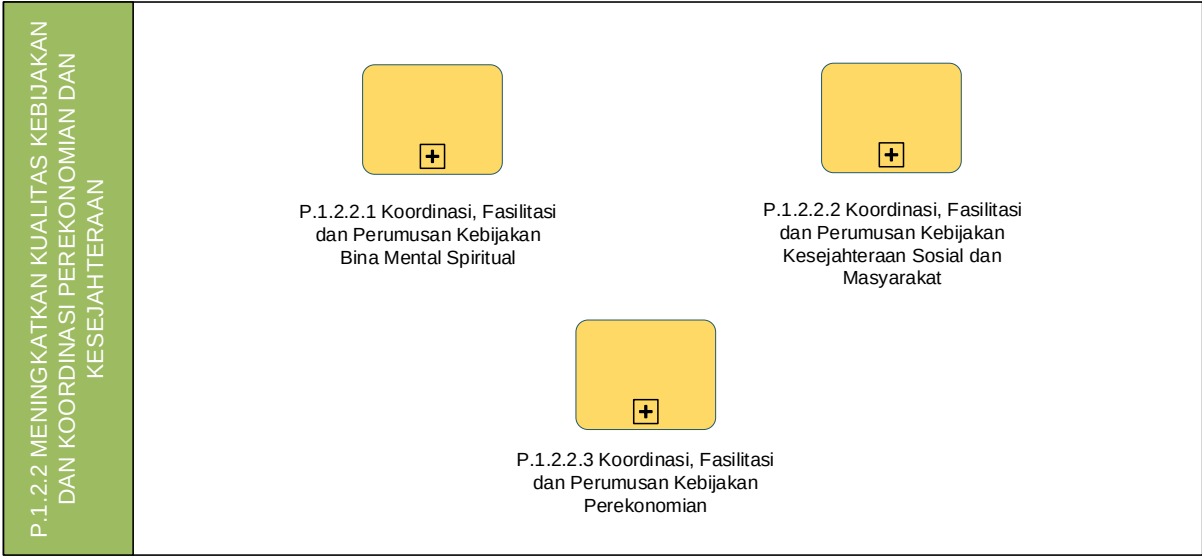
2.2.2.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



2.2.2.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



2.2.2.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2

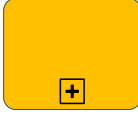
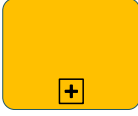
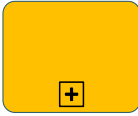


2.2.2.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



2.2.2.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



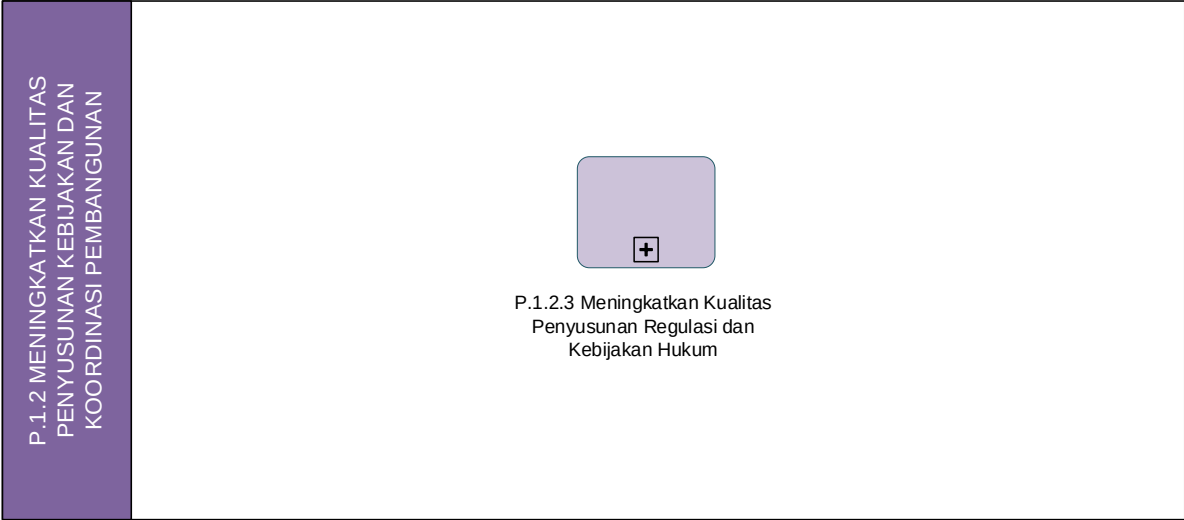
P.1.2.2.2.1 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	 P.1.2.2.2.2.1 Koordinasi Perumusan Kebijakan Daerah terkait Kesejahteraan Sosial  P.1.2.2.2.2.2 Koordinasi Perumusan Kebijakan Daerah terkait Kesejahteraan Masyarakat  P.1.2.2.2.2.3 Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait  P.1.2.2.2.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah  P.1.2.2.2.2.5 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Lainnya  P.1.2.2.2.2.6 Updating Satu Data
P.1.2.2.2.2 KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN	 P.1.2.2.2.3.1 Fasilitas Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
P.1.2.2.2.3 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	 P.1.2.2.3.1.1 Fasilitas Pengelolaan BUMD dan BLUD  P.1.2.2.3.1.2 Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Ekonomi  P.1.2.2.3.1.3 Monev Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
P.1.2.2.3.1 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	 P.1.2.2.3.2.1 Monev Kebijakan Sumber Daya Alam

2.2.3. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM

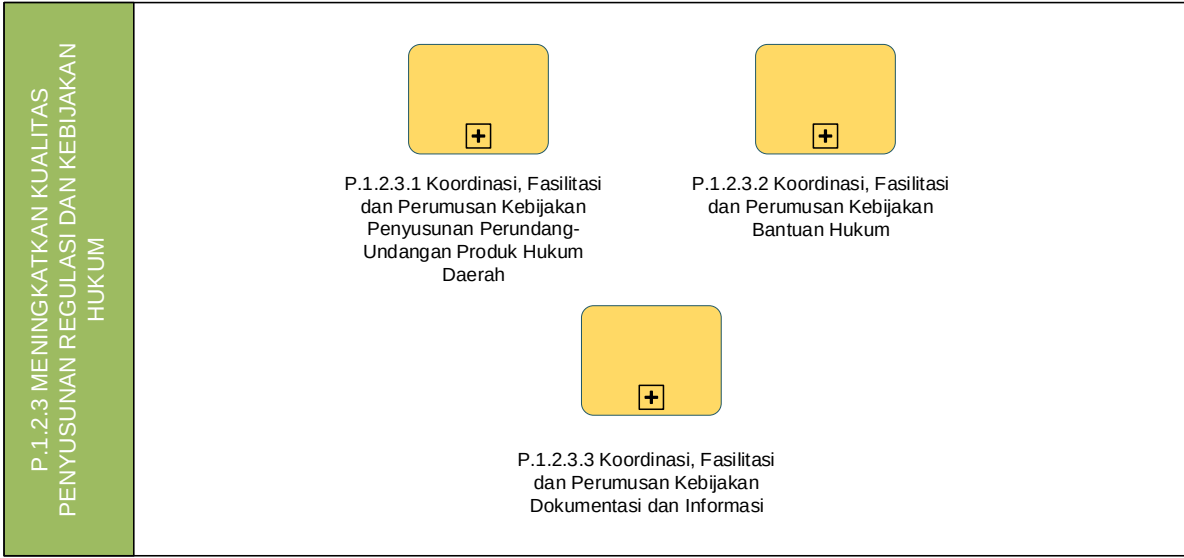
2.2.3.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



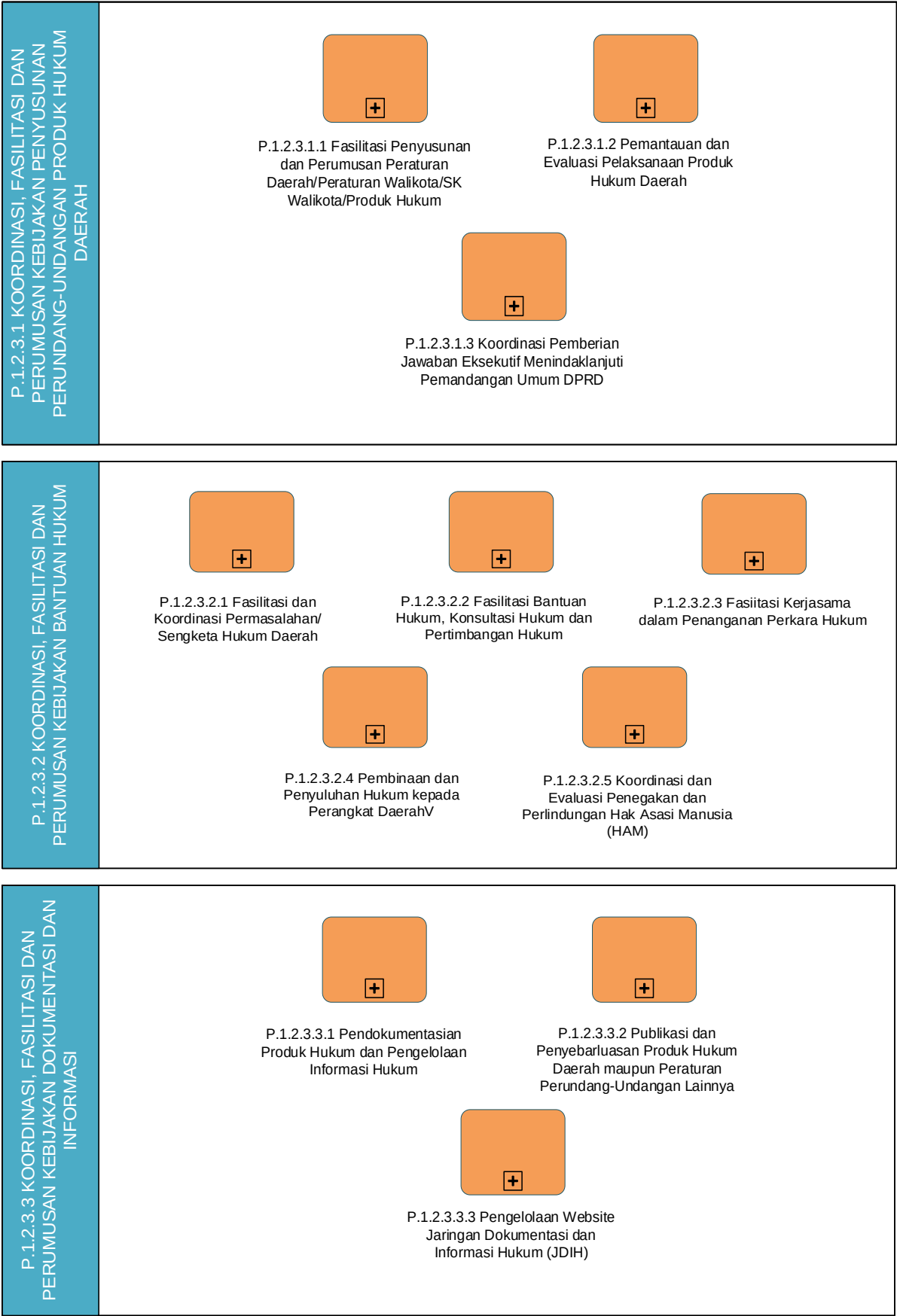
2.2.3.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



2.2.3.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



2.2.3.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3

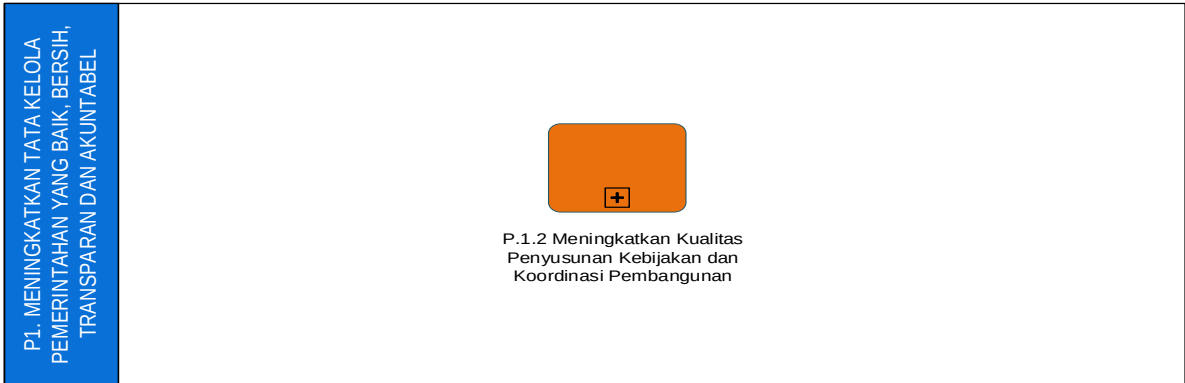


2.2.3.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4

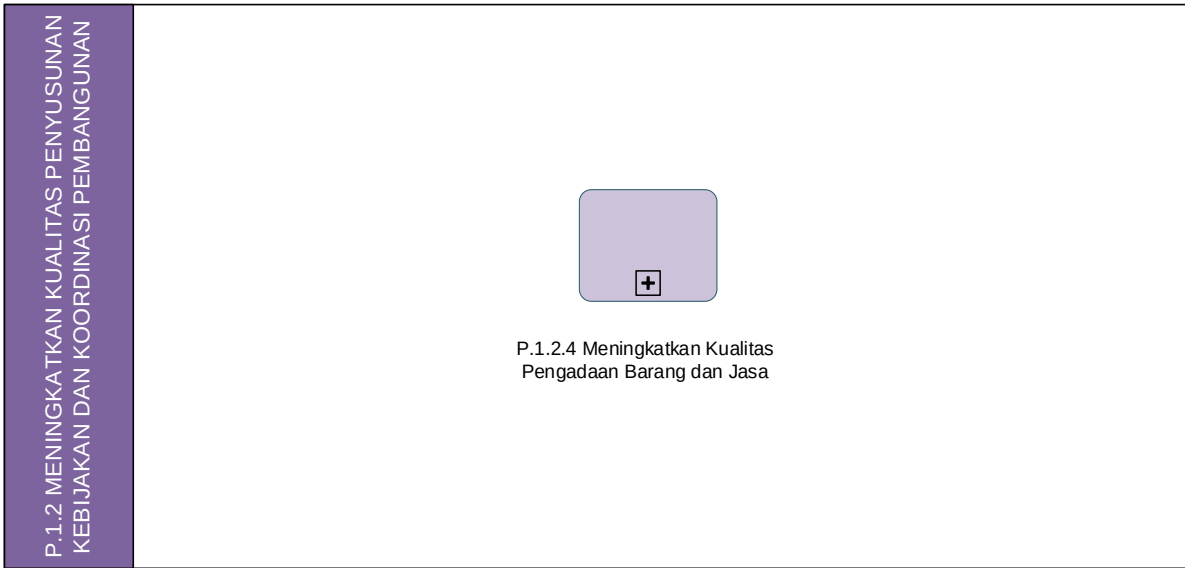


2.2.4. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

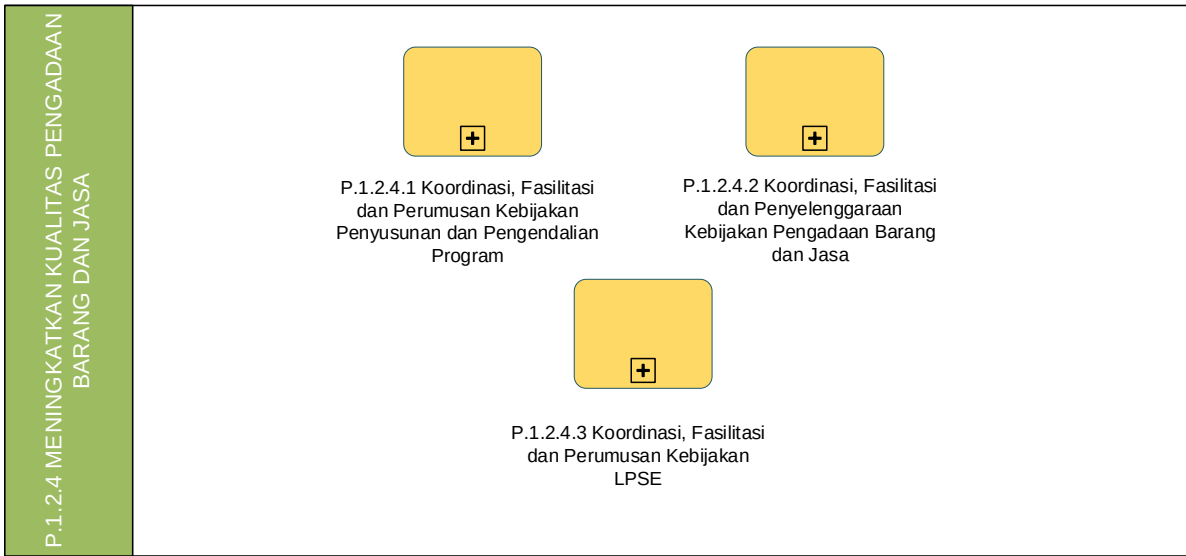
2.2.4.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



2.2.4.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



2.2.4.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2

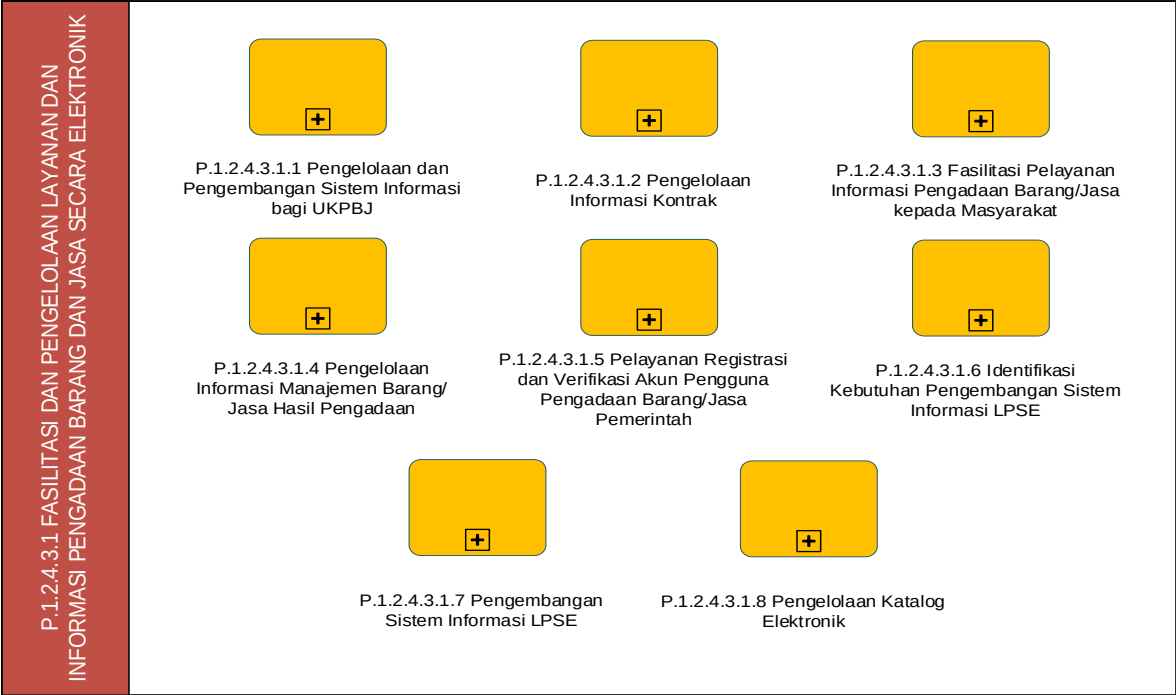


2.2.4.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



2.2.4.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



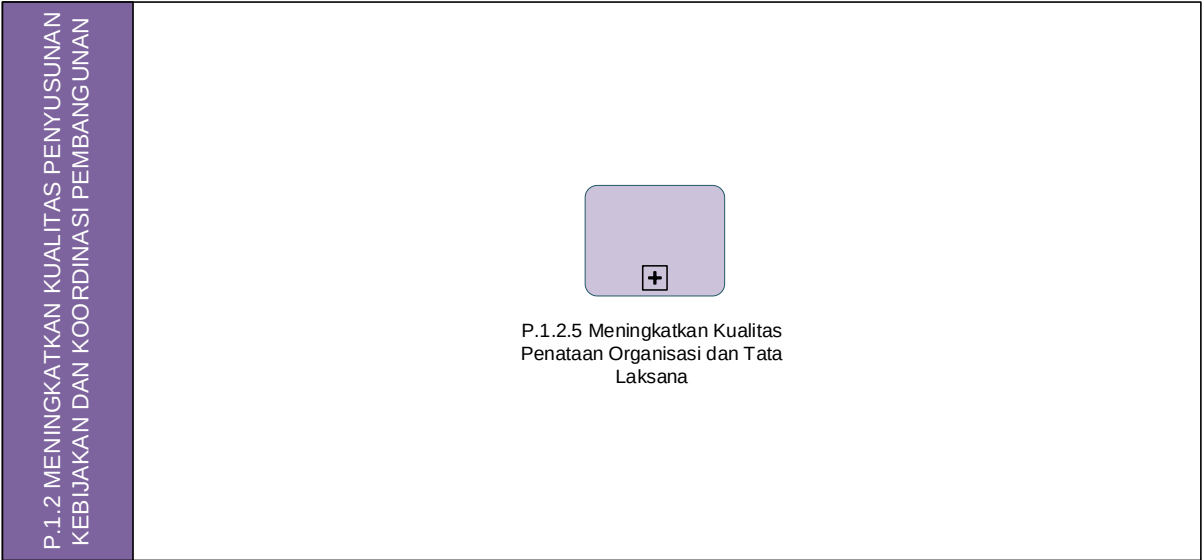


2.2.5. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI

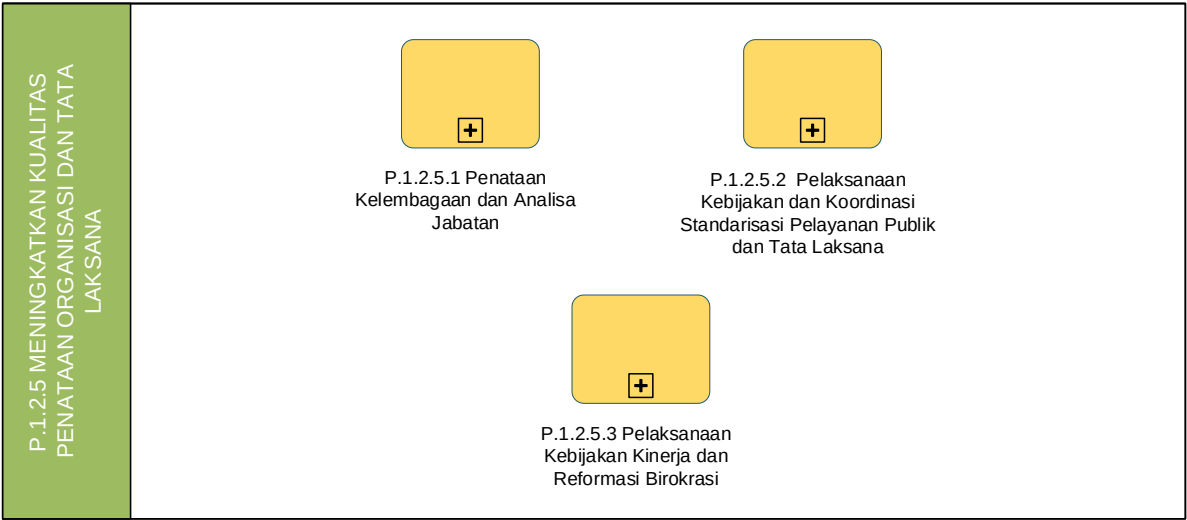
2.2.5.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



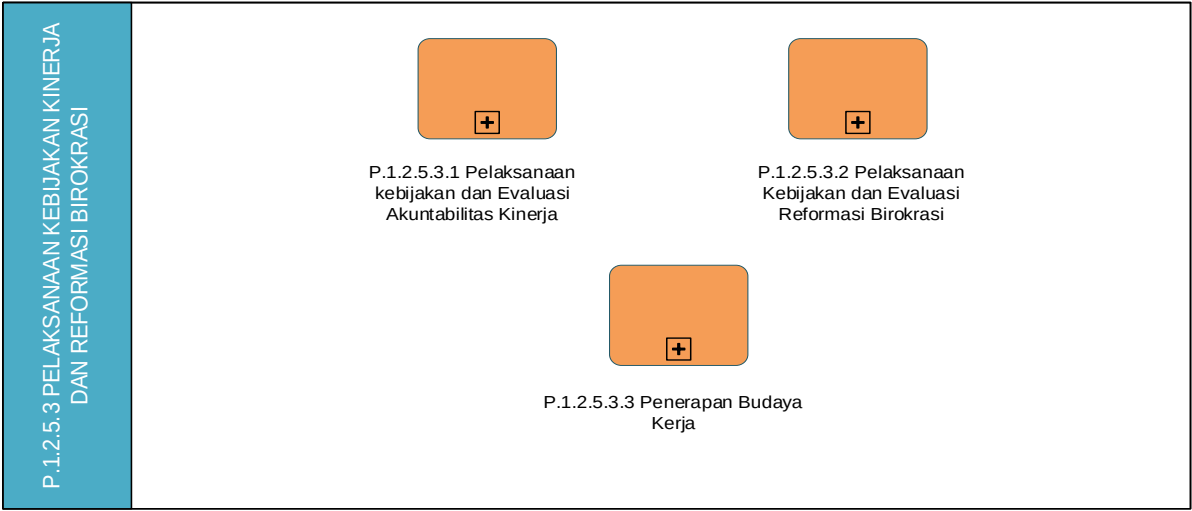
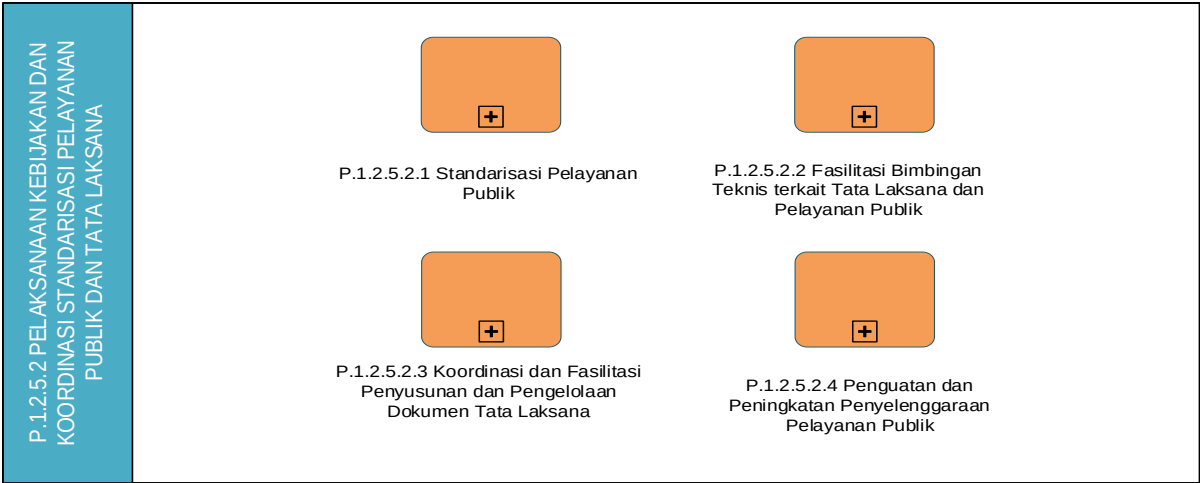
2.2.5.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



2.2.5.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



2.2.5.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



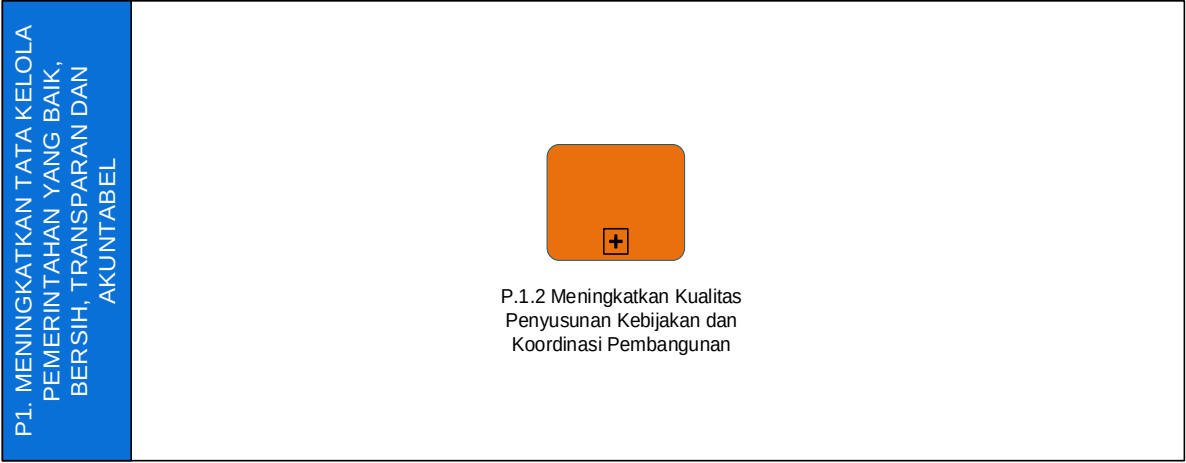
2.2.5.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



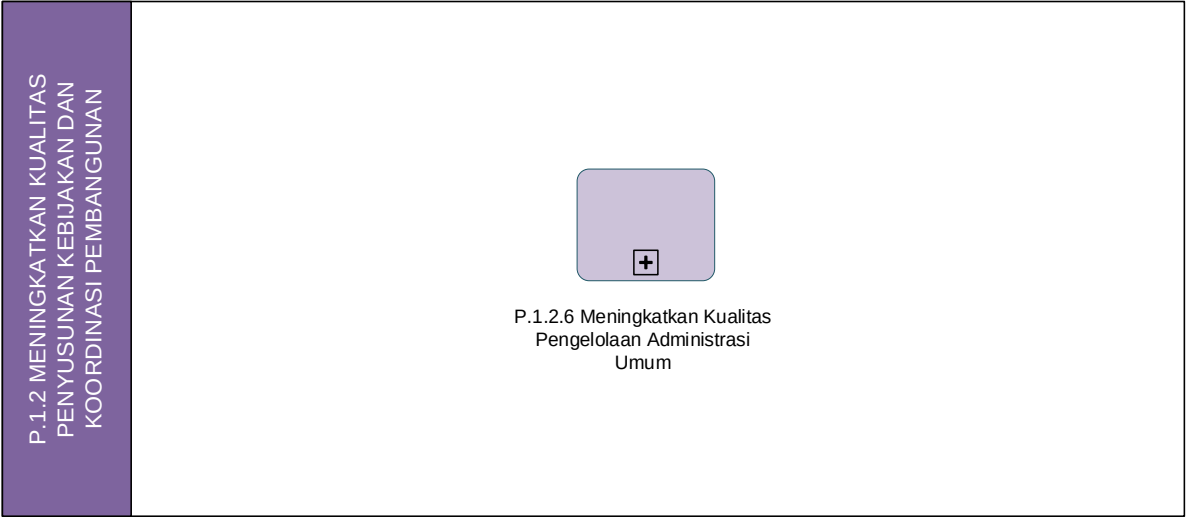
P.1.2.5.2.4 PENGUATAN DAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	 P.1.2.5.2.4.1 Koordinasi dan Fasilitasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  P.1.2.5.2.4.3 Sosialisasi dan Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik  P.1.2.5.2.4.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terkait Pelayanan Publik  P.1.2.5.2.4.4 Fasilitasi dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu
P.1.2.5.3.1 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	 P.1.2.5.3.1.1 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Blitar  P.1.2.5.3.1.2 Fasilitasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
P.1.2.5.3.2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	 P.1.2.5.3.2.1 Koordinasi Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi  P.1.2.5.3.2.2 Fasilitasi Penerapan Reformasi Birokrasi
P.1.2.5.3.3 PENERAPAN BUDAYA KERJA	 P.1.2.5.3.3.1 Standarisasi Pedoman Metode Kerja dan Prosedur Kerja

2.2.6. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM

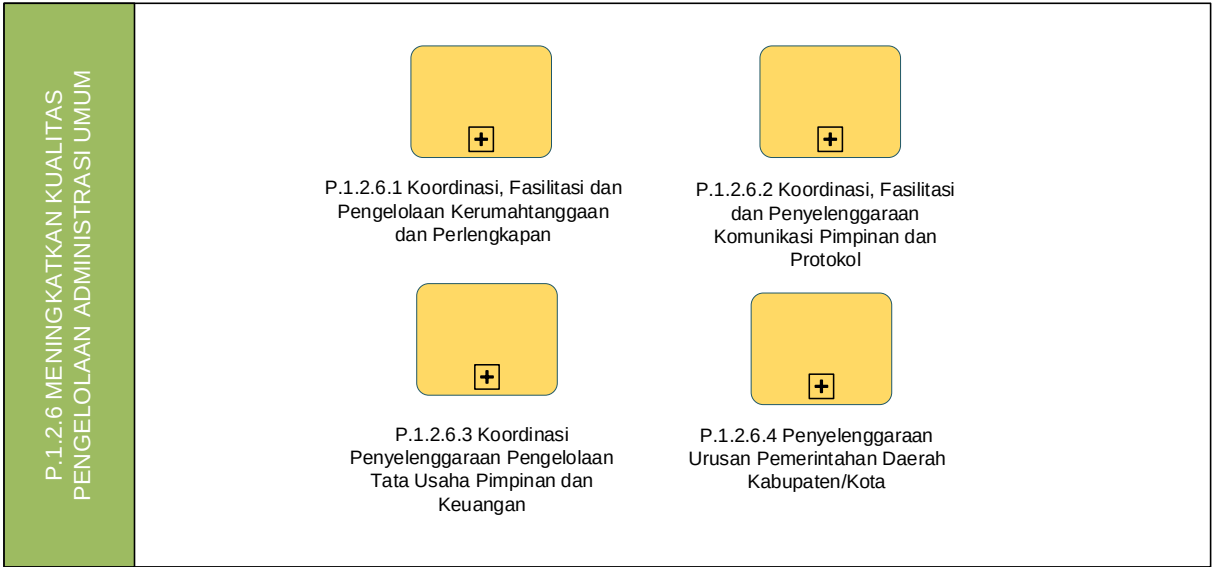
2.2.6.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



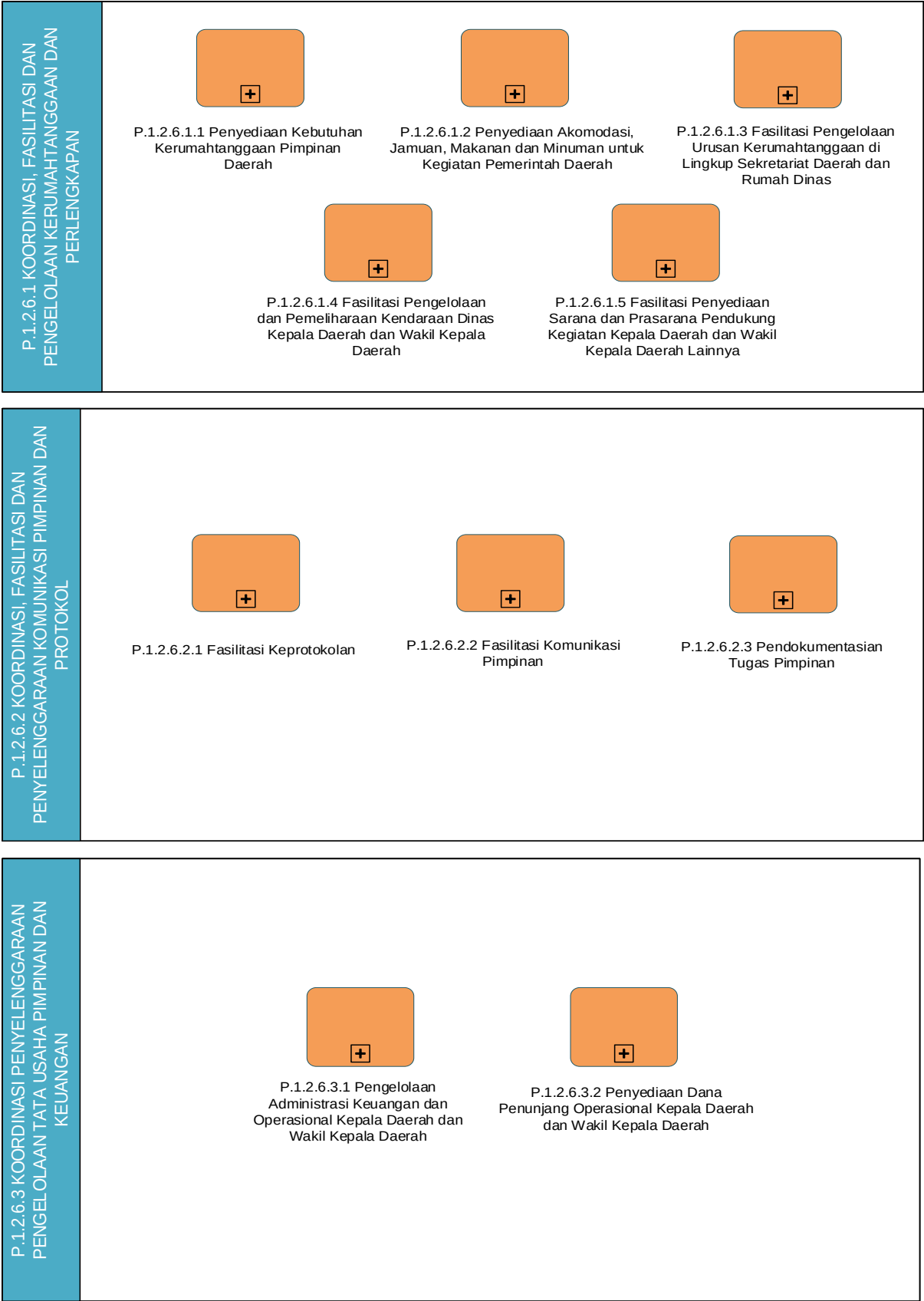
2.2.6.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

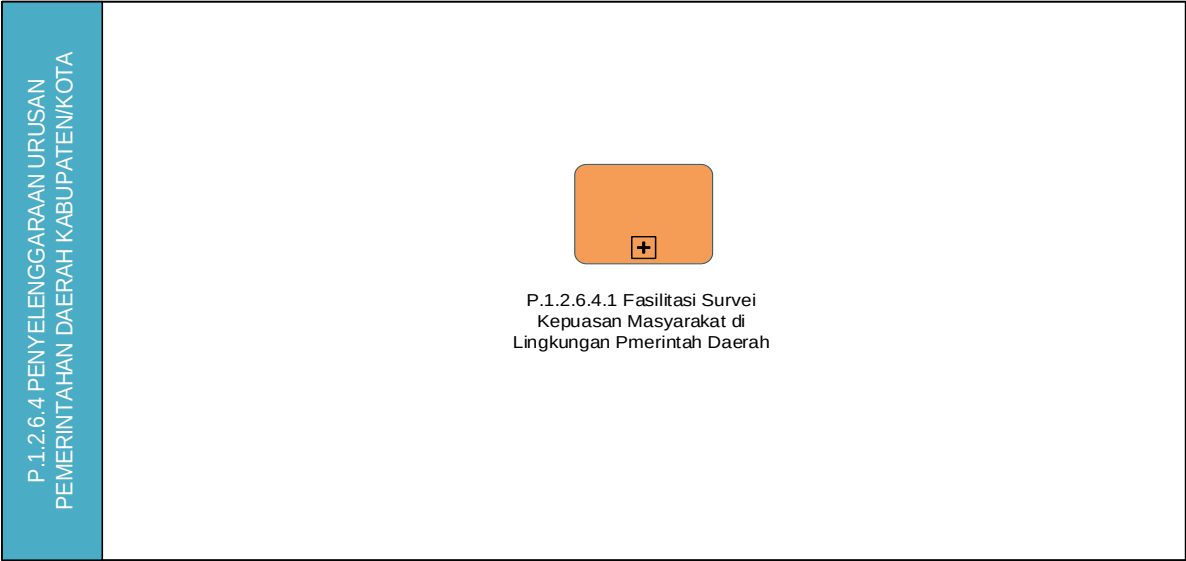


2.2.6.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



2.2.6.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



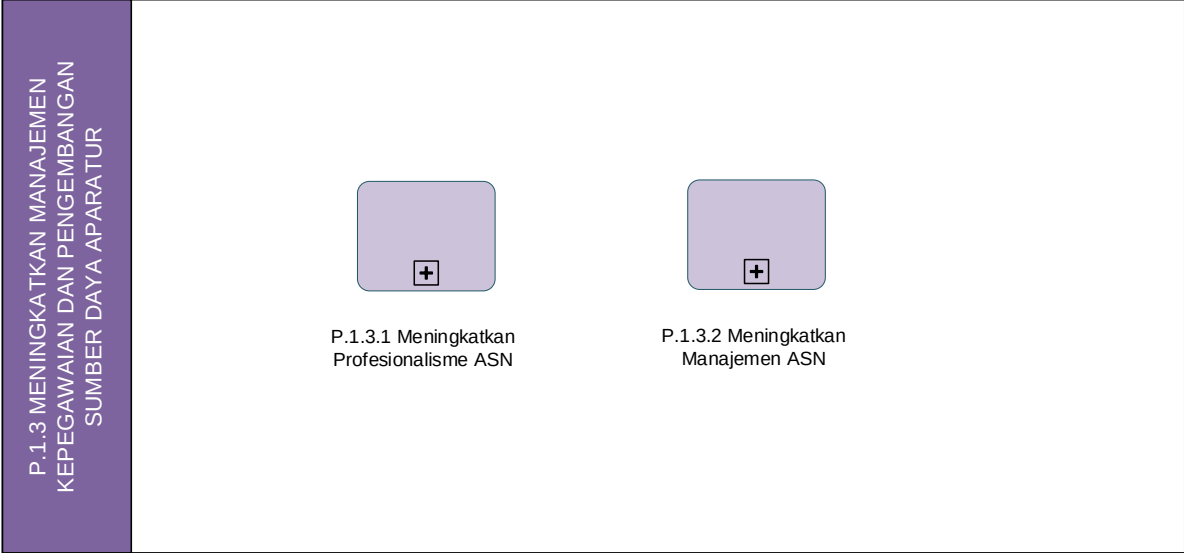


2.3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA

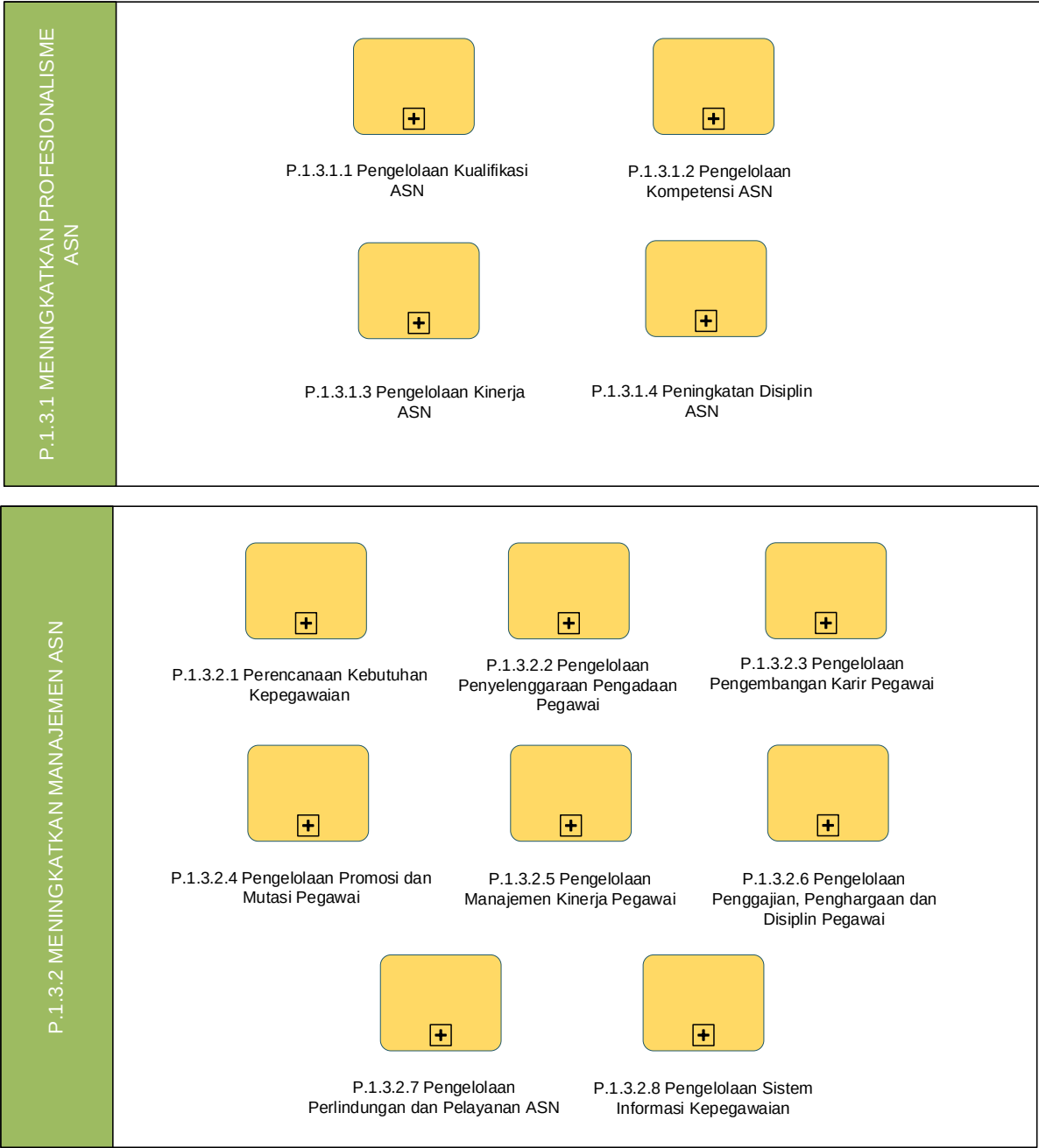
2.3.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



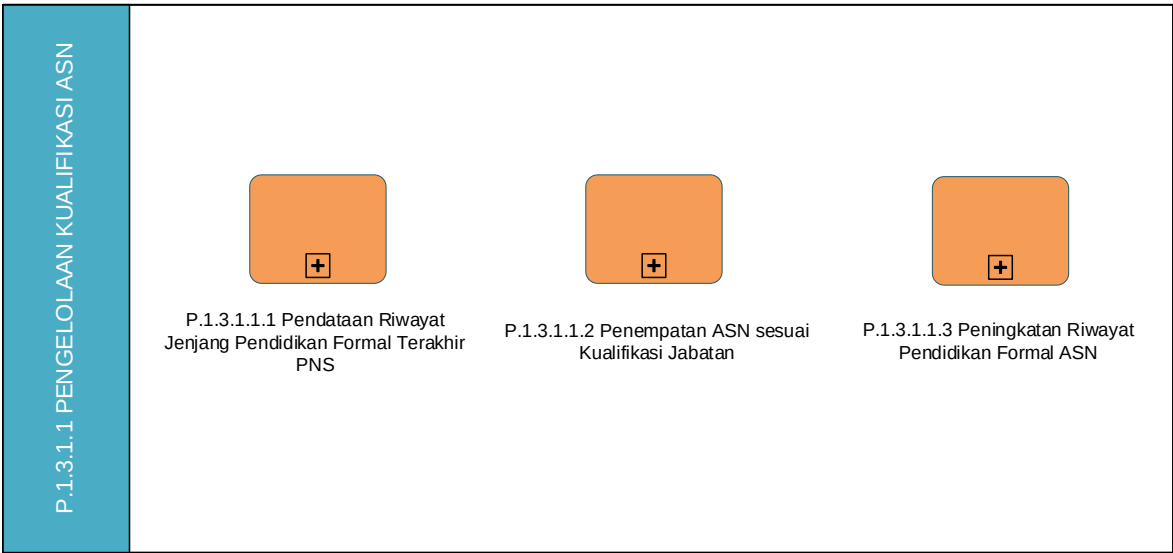
2.3.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

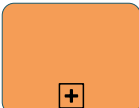
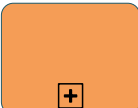
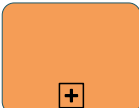
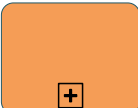


2.3.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2

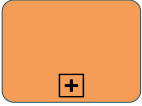


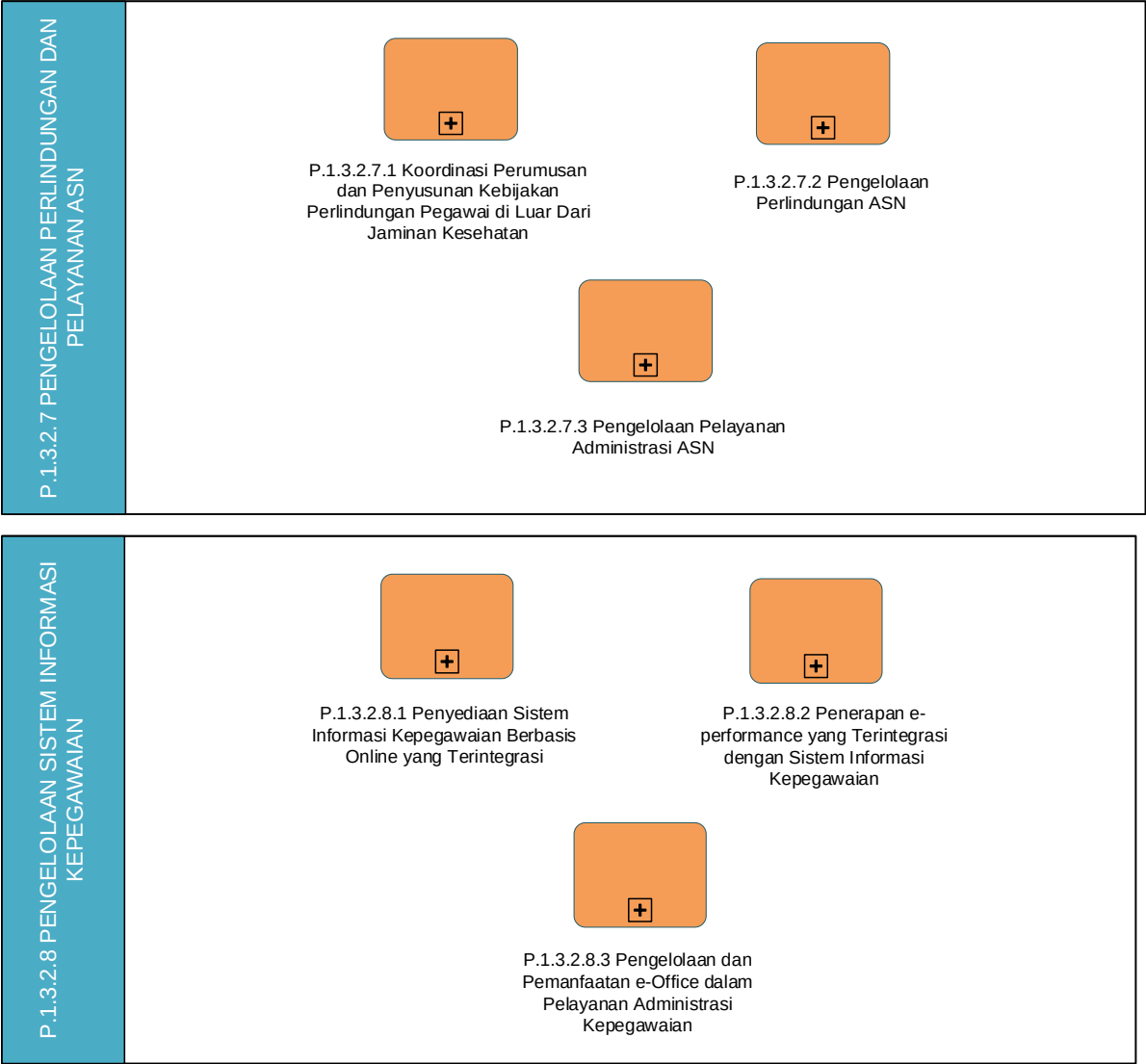
2.3.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



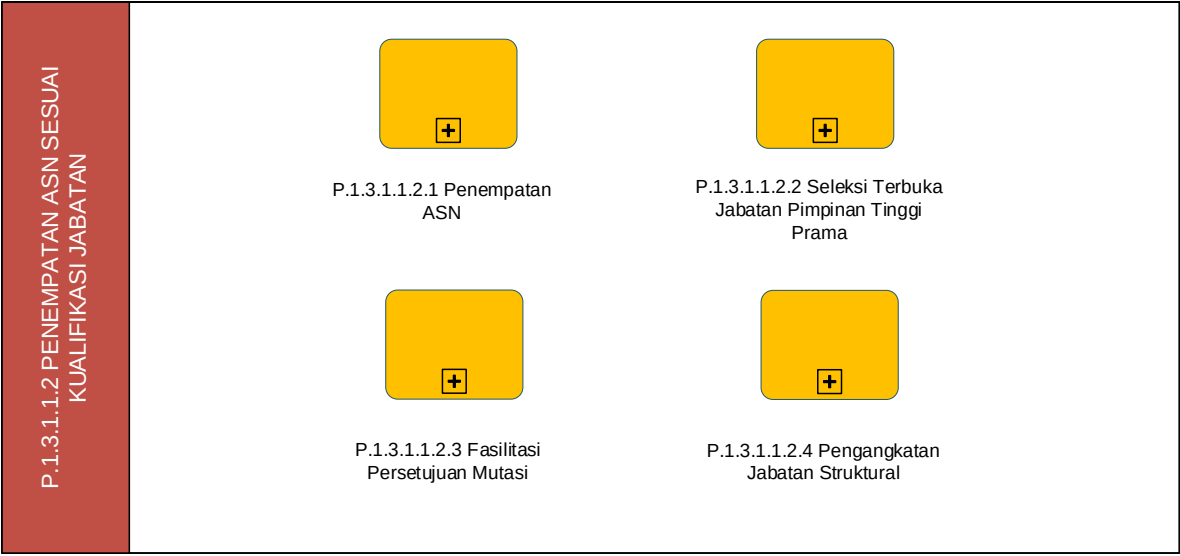
P.1.3.1.2 PENGELOLAAN KOMPETENSI ASN	 P.1.3.1.2.1 Identifikasi Pengembangan Kompetensi ASN  P.1.3.1.2.2 Peningkatan Kompetensi ASN
P.1.3.1.3 PENGELOLAAN KINERJA ASN	 P.1.3.1.3.1 Peningkatan Kinerja Individu ASN  P.1.3.1.3.2 Peningkatan Perilaku Kerja ASN
P.1.3.1.4 PENINGKATAN DISIPLIN ASN	 P.1.3.1.4.1 Koordinasi Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Penegakan Disiplin ASN  P.1.3.1.4.2 Pendataan Disiplin ASN  P.1.3.1.4.3 Fasilitasi Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin ASN  P.1.3.1.4.4 Proses Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi ASN

P.1.3.2.1 PERENCANAAN KEBUTUHAN KEPEGAWAIAN	P.1.3.2.1.1 Penyediaan Data Rencana Kebutuhan ASN
P.1.3.2.2 PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN PEGAWAI	P.1.3.2.2.1 Penyediaan Perencanaan dan Pengusulan Kebutuhan Pengadaan ASN Tahunan P.1.3.2.2.2 Penyediaan Kebijakan Internal Pengadaan ASN P.1.3.2.2.3 Koordinasi Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan ASN
P.1.3.2.3 PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	P.1.3.2.3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai P.1.3.2.3.2 Pengelolaan Manajemen Talenta

P.1.3.2.4 PENGELOLAAN PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI	 P.1.3.2.4.1 Koordinasi Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Pola Karir Instansi Berdasarkan Pola Karir Nasional  P.1.3.2.4.2 Pengelolaan Mutasi dan Promosi Berdasarkan Rencana Suksesi  P.1.3.2.4.3 Koordinasi Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator
P.1.3.2.5 PENGELOLAAN MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI	 P.1.3.2.5.1 Pengelolaan Kontrak Kinerja/Perjanjian Kinerja  P.1.3.2.5.2 Pengelolaan Penilaian Kinerja Berkala  P.1.3.2.5.3 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja
P.1.3.2.6 PENGELOLAAN PENGGAJIAN, PENGHARGAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI	 P.1.3.2.6.1 Koordinasi Pengelolaan Penggajian Pegawai  P.1.3.2.6.2 Koordinasi Fasilitasi Pemberian Penghargaan Pegawai dan Penegakan Disiplin Pegawai



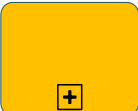
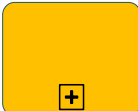
2.3.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



P.1.3.1.1.3 PENINGKATAN RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL ASN	P.1.3.1.1.3.1 Fasilitasi Tugas Belajar P.1.3.1.1.3.2 Fasilitasi Izin Belajar P.1.3.1.1.3.3 Pelayanan Pelaporan dan Pencabutan Tugas dan Izin Belajar
P.1.3.1.2.1 IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	P.1.3.1.2.1.1 Pendataan Bukti Kompetensi ASN P.1.3.1.2.1.2 Penyusunan Laporan Kompetensi ASN P.1.3.1.2.1.3 Fasilitasi Rekomendasi Pemenuhan Kompetensi ASN P.1.3.1.2.1.4 Evaluasi Hasil Pengembangan Kompetensi
P.1.3.1.2.2 PENINGKATAN KOMPETENSI ASN	P.1.3.1.2.2.1 Penyelenggaraan Pelatihan Klasikal P.1.3.1.2.2.2 Penyelenggaraan Pelatihan Non Klasikal

P.1.3.1.3.1 PENINGKATAN KINERJA INDIVIDU ASN	P.1.3.1.3.1.1 Rekapitulasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) P.1.3.1.3.1.2 Penilaian dan Analisis Capaian Kinerja ASN
P.1.3.1.3.2 PENINGKATAN PERILAKU KERJA ASN	P.1.3.1.3.2.1 Penilaian dan Pelaporan Perilaku Kerja pada Aspek Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama dan Kepemimpinan
P.1.3.1.4.1 KOORDINASI PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENEGAKAN DISIPLIN ASN	P.1.3.1.4.1.1 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penegakan Disiplin ASN P.1.3.1.4.1.2 Sosialisasi Kebijakan Penegakan Disiplin ASN

P.1.3.1.4.3 FASILITASI PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN ASN	P.1.3.1.4.3.1 Identifikasi atas Laporan Pelanggaran Disiplin ASN P.1.3.1.4.3.2 Pemberian Sanksi sesuai Tingkat Pelanggaran		
P.1.3.2.2.3 KOORDINASI PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN ASN	P.1.3.2.2.3.1 Pengajuan Kebutuhan Formasi ASN (CPNS dan PPPK) ke Kementerian PANRB P.1.3.2.2.3.4 Penetapan Pengangkatan ASN (CPNS dan PPPK)	P.1.3.2.2.3.2 Koordinasi Pelaksanaan dan Pengumuman Seleksi Penerimaan ASN P.1.3.2.2.3.5 Koordinasi Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji P.1.3.2.2.3.7 Pelaporan Pengadaan ASN	P.1.3.2.2.3.3 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai P.1.3.2.2.3.6 Pengelolaan Pelatihan Dasar bagi CPNS
P.1.3.2.3.1 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI	P.1.3.2.3.3.1 Penyusunan Kebijakan Internal Penilaian Kompetensi Pegawai P.1.3.2.3.3.3 Analisis Kesenjangan Posisi Pegawai	P.1.3.2.3.3.2 Pemetaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai P.1.3.2.3.3.4 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pegawai berdasarkan Analisis Kesenjangan	

P.1.3.2.3.2 PENGELOLAAN MANAJEMEN TALENTA	 P.1.3.2.3.4.1 Pemetaan dan Penilaian Talenta Pegawai  P.1.3.2.3.4.2 Pengelolaan Perencanaan Suksesi  P.1.3.2.3.3.3 Analisis Kesenjangan Posisi Pegawai  P.1.3.2.3.3.4 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pegawai berdasarkan Analisis Kesenjangan
P.1.3.2.3.2 PENGELOLAAN MANAJEMEN TALENTA	 P.1.3.2.3.4.1 Pemetaan dan Penilaian Talenta Pegawai  P.1.3.2.3.4.2 Pengelolaan Perencanaan Suksesi  P.1.3.2.3.4.3 Evaluasi Pelaksana Manajemen Talenta
P.1.3.2.5.3 KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA	 P.1.3.2.5.3.1 Penyusunan Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja

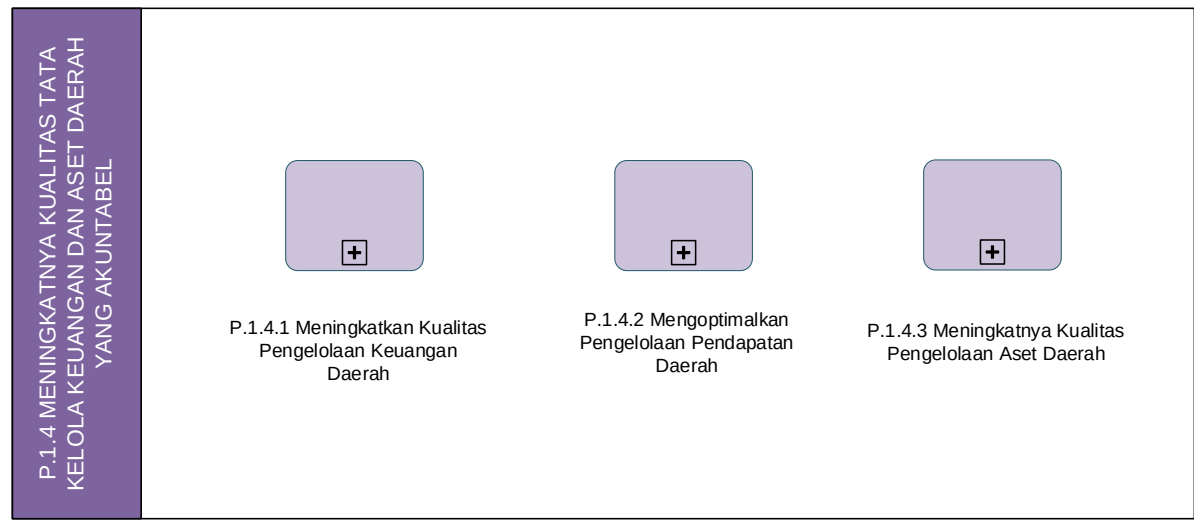


2.4. BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.4.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

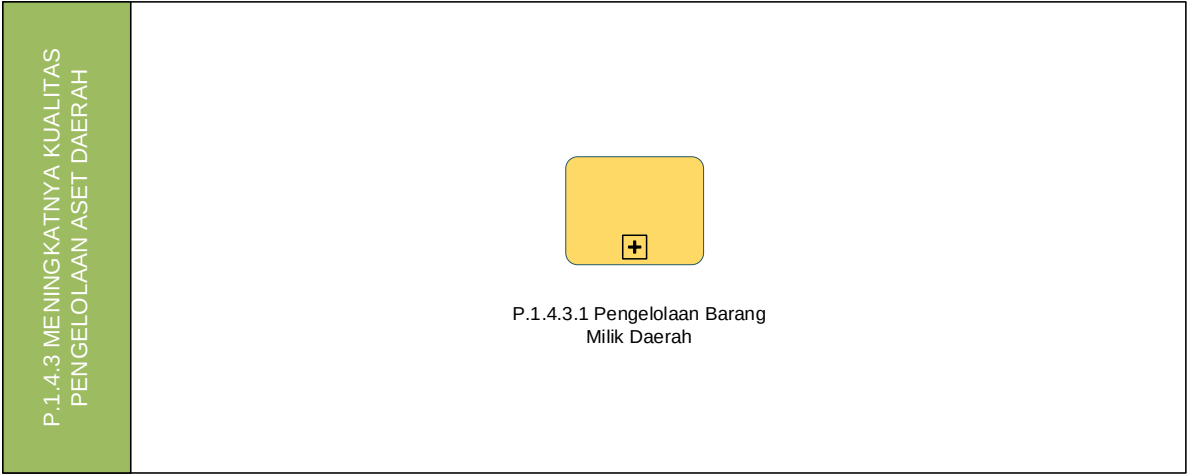


2.4.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



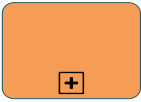
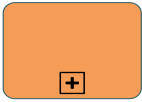
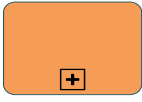
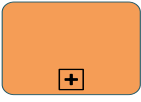
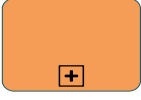
2.4.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2





2.4.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



P.1.4.1.2 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH			
	P.1.4.1.2.1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	P.1.4.1.2.2 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	P.1.4.1.2.3 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
			
	P.1.4.1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	P.1.4.1.2.5 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	P.1.4.1.2.6 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
			
	P.1.4.1.2.7 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	P.1.4.1.2.8 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	P.1.4.1.2.9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
P.1.4.1.3 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH			
	P.1.4.1.3.1 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	P.1.4.1.3.2 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	P.1.4.1.3.3 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			
	P.1.4.1.3.4 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	P.1.4.1.3.5 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	P.1.4.1.3.6 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			
	P.1.4.1.3.7 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	P.1.4.1.3.8 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	P.1.4.1.3.9 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

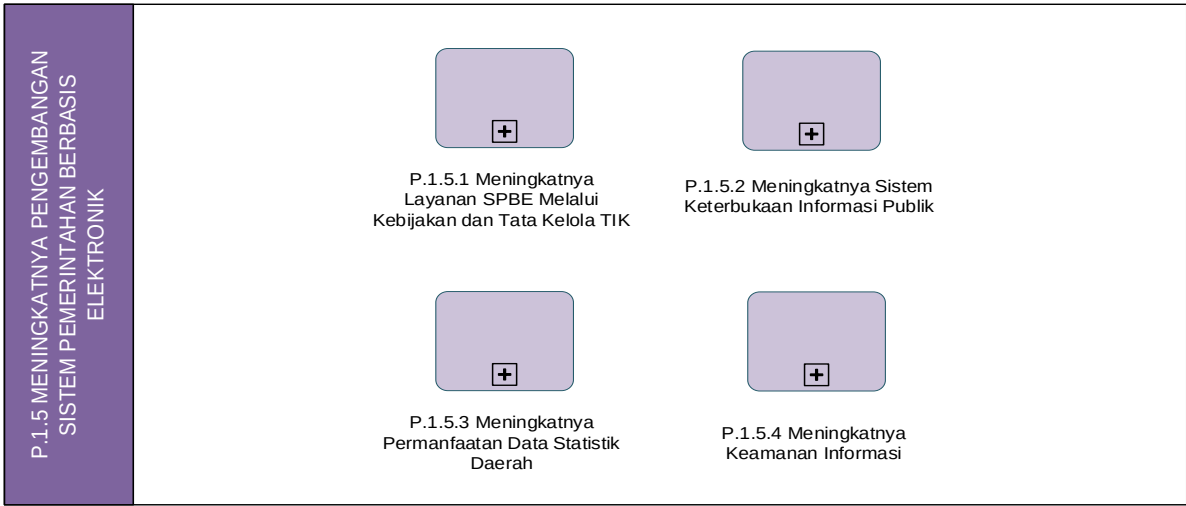
P.1.4.2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	P.1.4.2.1.1 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	P.1.4.2.1.2 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	P.1.4.2.1.3 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
			
	P.1.4.2.1.4 Penagihan Pajak Daerah	P.1.4.2.1.5 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	P.1.4.2.1.6 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
			
	P.1.4.2.1.7 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	P.1.4.2.1.8 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
P.1.4.3.1 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
	P.1.4.3.1.1 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	P.1.4.3.1.2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	P.1.4.3.1.3 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
			
	P.1.4.3.1.4 Penatausahaan Barang Milik Daerah	P.1.4.3.1.5 Inventarisasi Barang Milik Daerah	P.1.4.3.1.6 Penilaian Barang Milik Daerah
			
	P.1.4.3.1.7 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	P.1.4.3.1.8 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	P.1.4.3.1.9 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			
		P.1.4.3.1.10 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

2.5. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

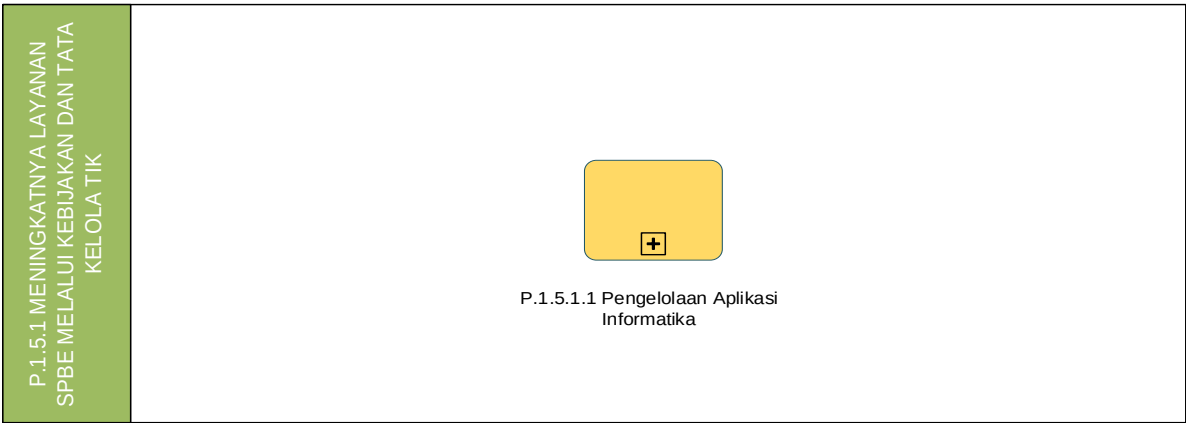
2.5.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



2.5.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

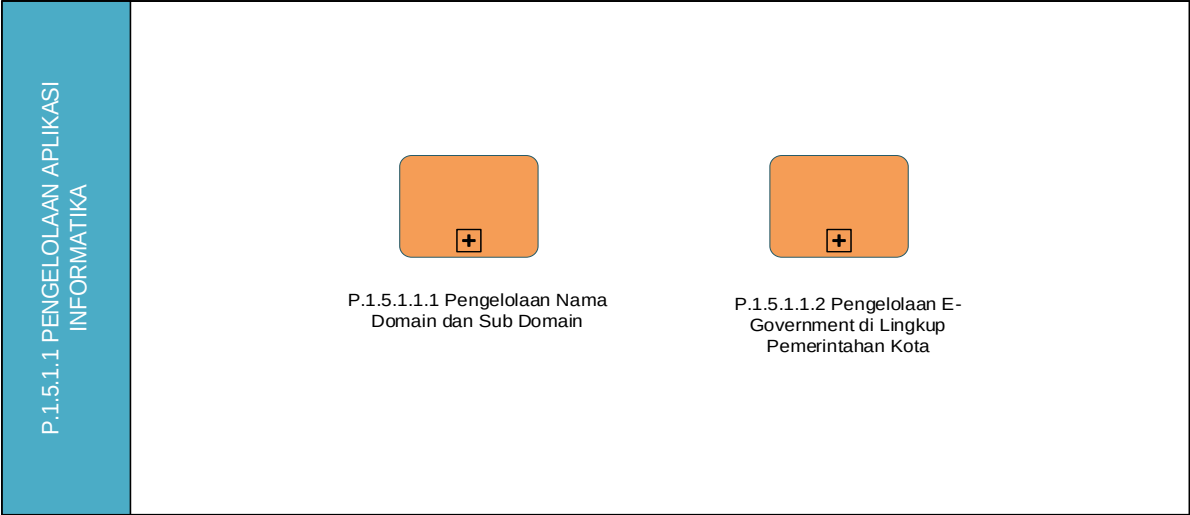


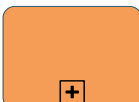
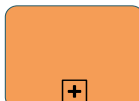
2.5.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



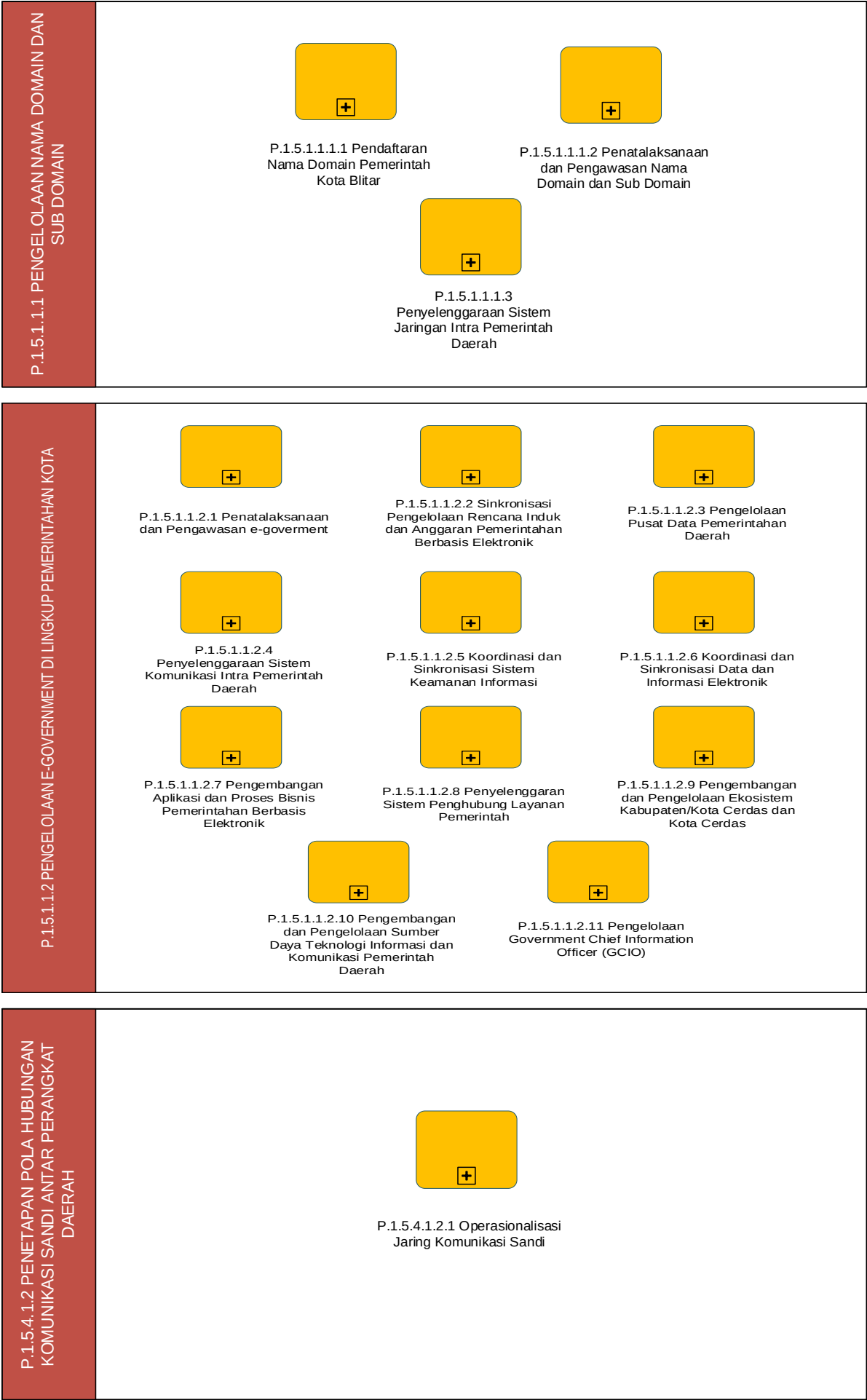


2.5.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



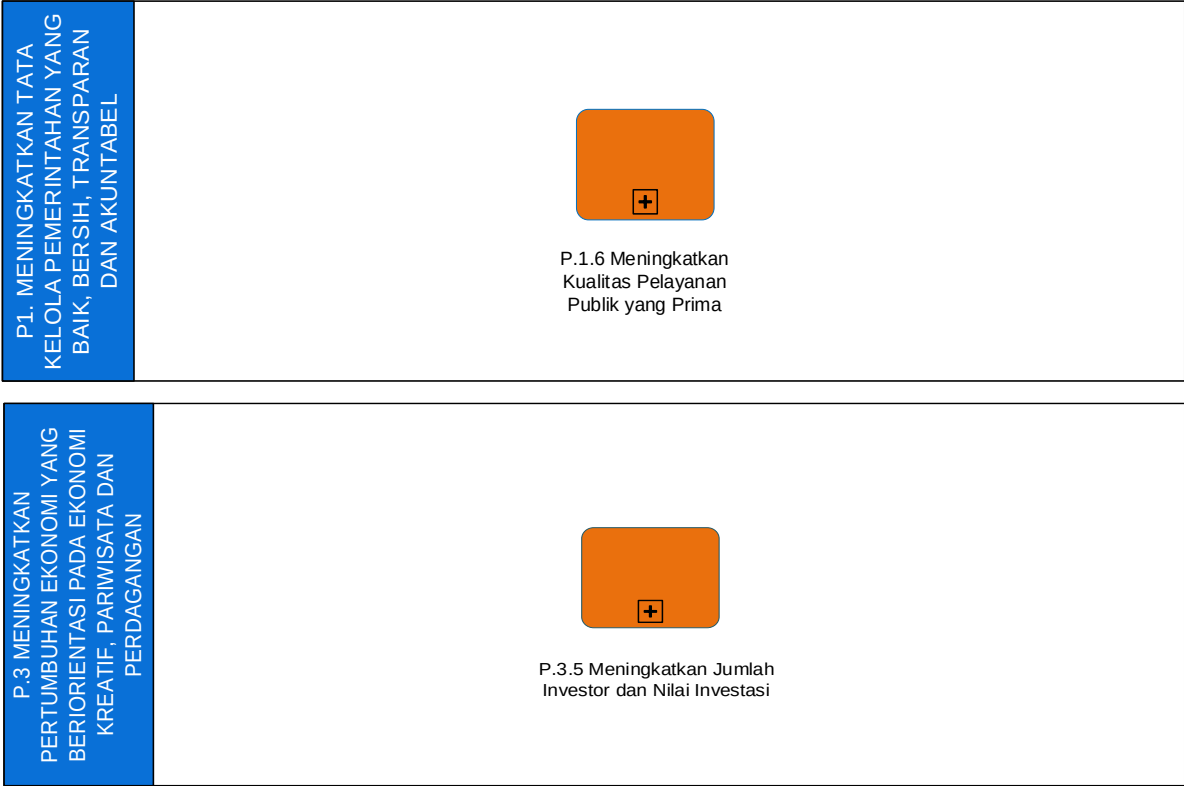
P.1.5.2.1 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
	P.1.5.2.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	P.1.5.2.1.2 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	P.1.5.2.1.3 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
			
	P.1.5.2.1.4 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	P.1.5.2.1.5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	P.1.5.2.1.6 Pelayanan Informasi Publik
			
	P.1.5.2.1.7 Layanan Hubungan Media	P.1.5.2.1.8 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	P.1.5.2.1.9 Manajemen Komunikasi Krisis
			
	P.1.5.2.1.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	P.1.5.2.1.11 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	
P.1.5.3.1 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	P.1.5.3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	P.1.5.3.1.2 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	P.1.5.3.1.3 Membangun Metadata Statistik Sektoral
			
	P.1.5.3.1.4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	P.1.5.3.1.5 Pengembangan Infrastruktur	P.1.5.3.1.6 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
P.1.5.4.1 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
	P.1.5.4.1.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	P.1.5.4.1.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	

2.5.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4

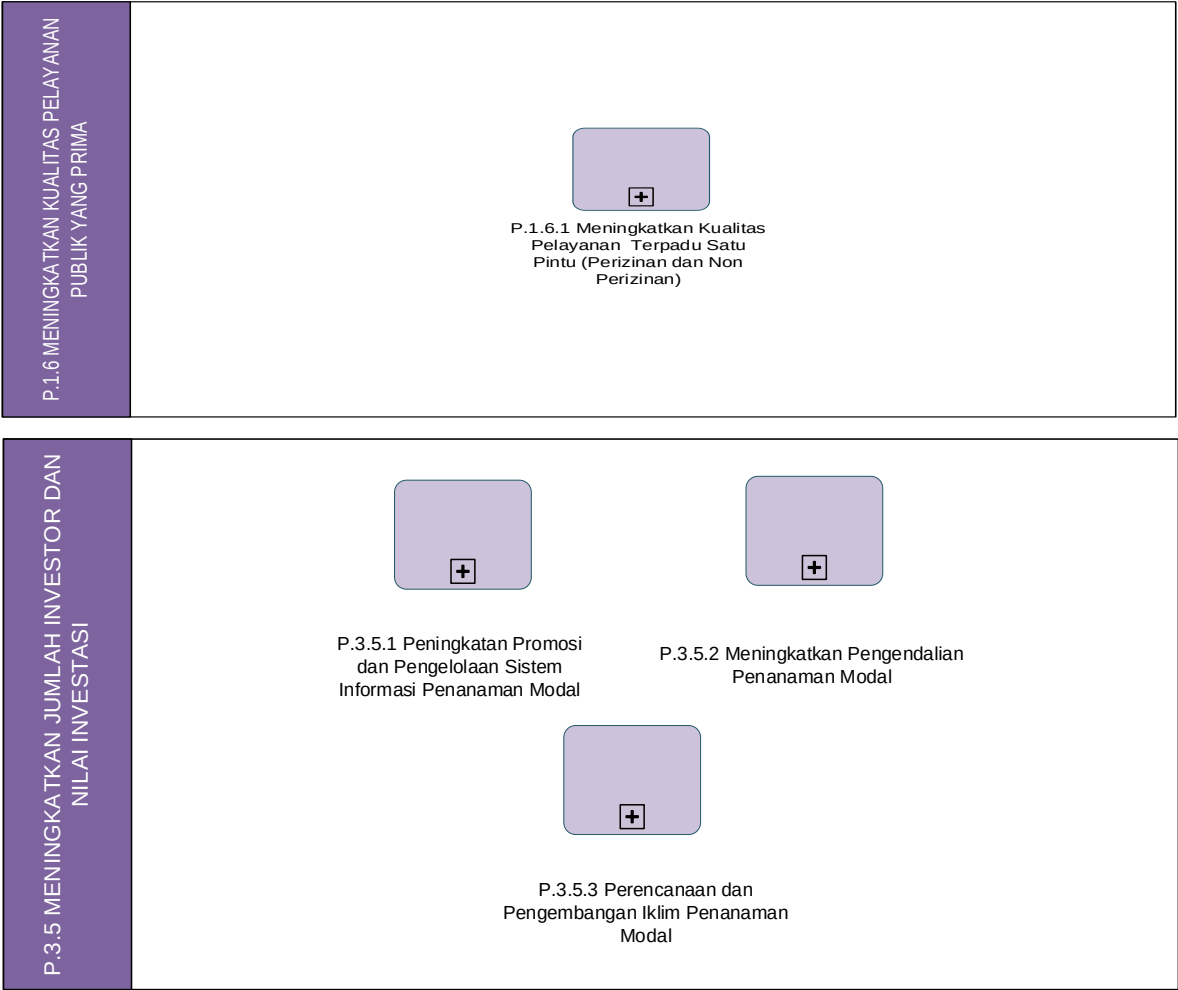


2.6. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.6.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

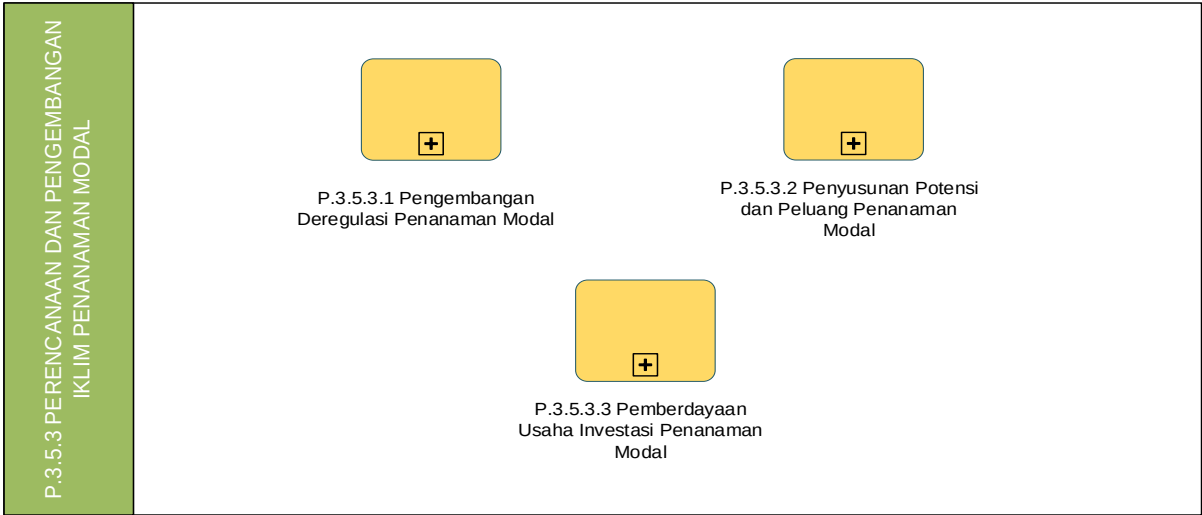


2.6.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

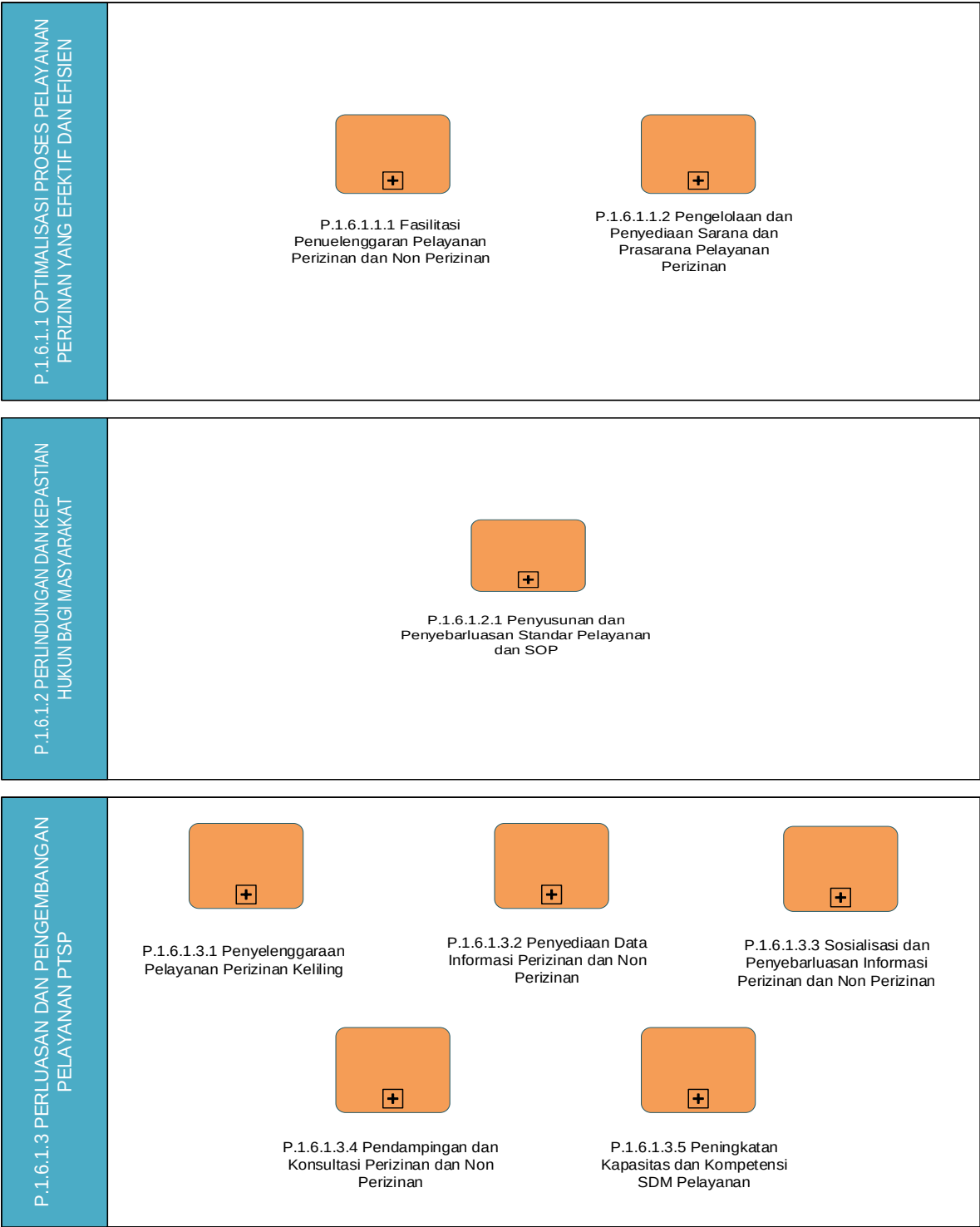


2.6.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2

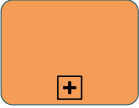
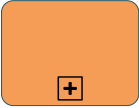




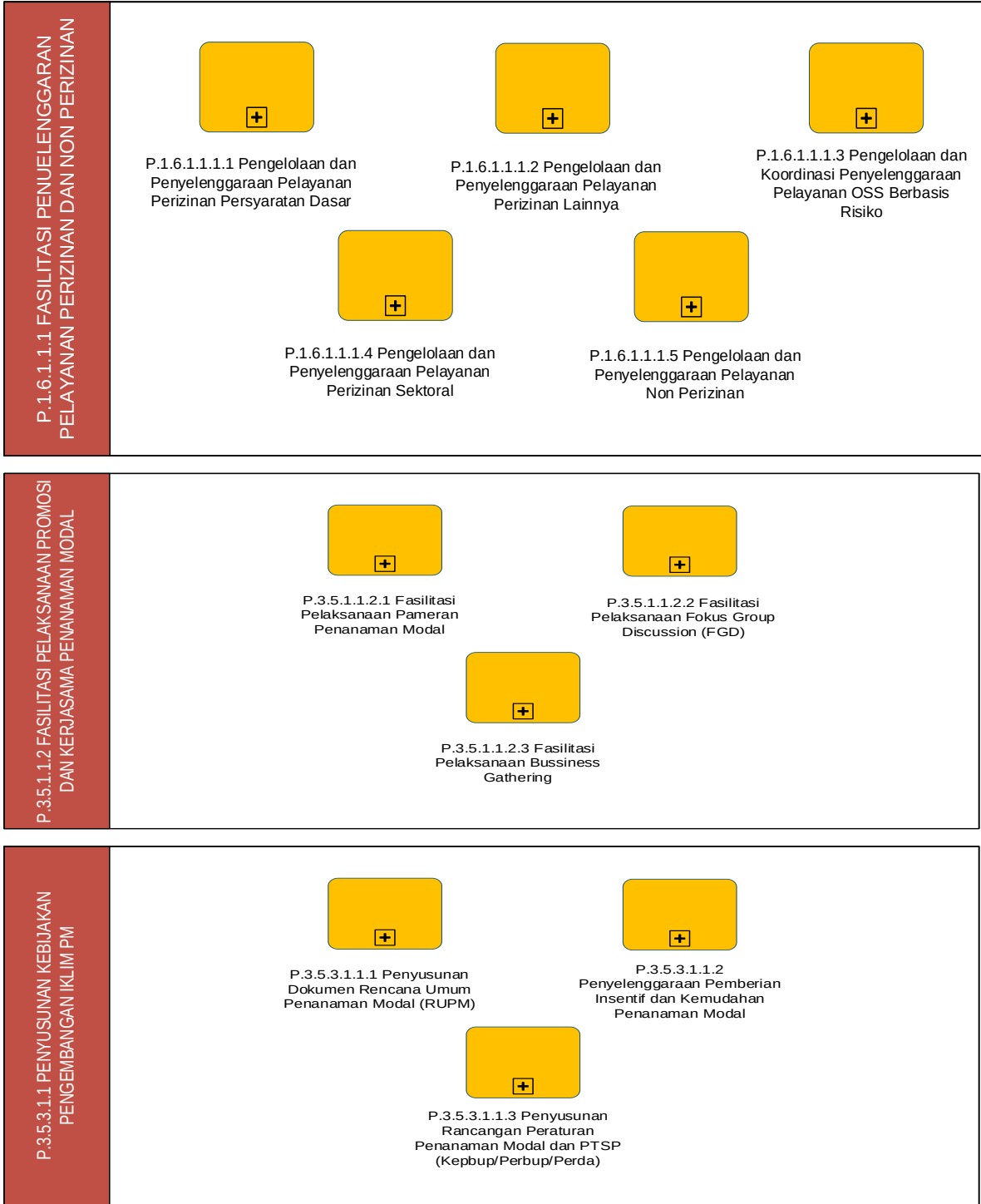
2.6.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



P.1.6.1.4 FASILITASI ADVOKASI PENDAMPINGAN PENGADUAN MASYARAKAT	P.1.6.1.4.1 Koordinasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
P.3.5.1.1 ENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	P.3.5.1.1.1 Penyiapan Bahan Promosi dari Hasil Kajian Peta Potensi, Peluang dan IPRO P.3.5.1.1.2 Fasilitas Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal P.3.5.1.1.3 Analisis Minat Penanaman Modal (Market Survey dan Market Intelligent)
P.3.5.1.2 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	P.3.5.1.2.1 Penyediaan Informasi Penanaman Modal dan Data Perizinan PTSP yang terupdate P.3.5.1.2.2 Publikasi dan Penyebarluasan Bahan Promosi Penanaman Modal P.3.5.1.2.3 Fasilitas Permintaan Data Penanaman Modal dan Perizinan
P.3.5.2.1 FASILITASI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	P.3.5.2.1.1 Monitoring dan Pelaporan Realisasi Investasi P.3.5.2.1.2 Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal (Rutin dan/atau Insidentil)

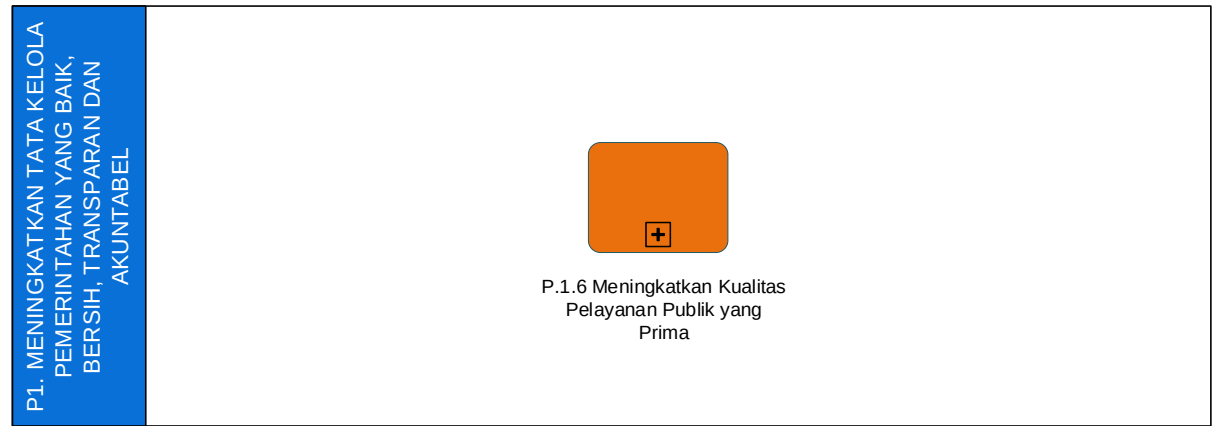
P.3.5.2.2 FASILITASI LAYANAN, ADVOKASI DAN KONSULTASI PELAPORAN PENANAMAN MODAL	 P.3.5.2.2.1 Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal  P.3.5.2.2.2 Verifikasi dan Evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)  P.3.5.2.2.3 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaporan LKPM
P.3.5.3.1 PENGEMBANGAN DEREGULASI PENANAMAN MODAL	 P.3.5.3.1.1 Penyusunan Kebijakan Pengembangan Iklim PM
P.3.5.3.2 PENYUSUNAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL	 P.3.5.3.2.1 Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi  P.3.5.3.2.2 Penyusunan IPRO (Investment Prospectus Ready to Offer)
P.3.5.3.3 PEMBERDAYAAN USAHA INVESTASI PENANAMAN MODAL	 P.3.5.3.3.1 Pelaksanaan Fasilitasi Kemitraan Usaha

2.6.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4

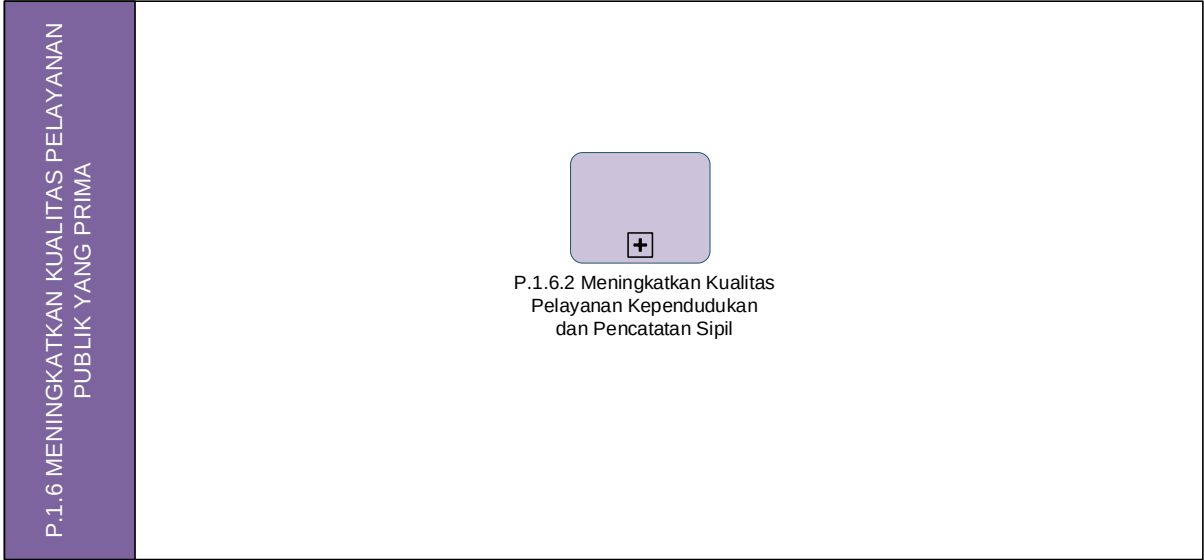


2.7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

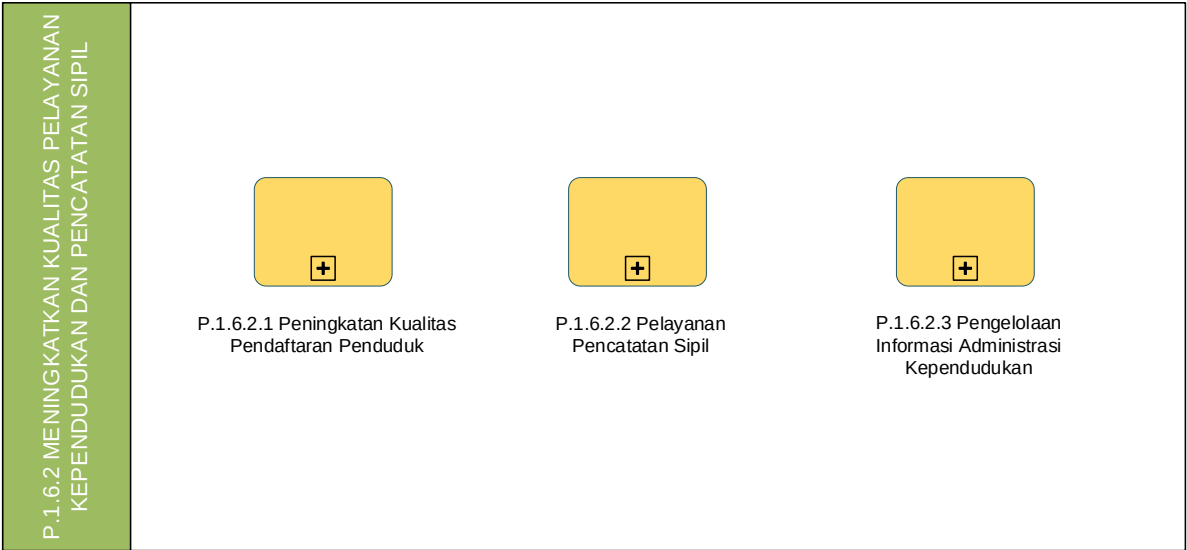
2.7.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



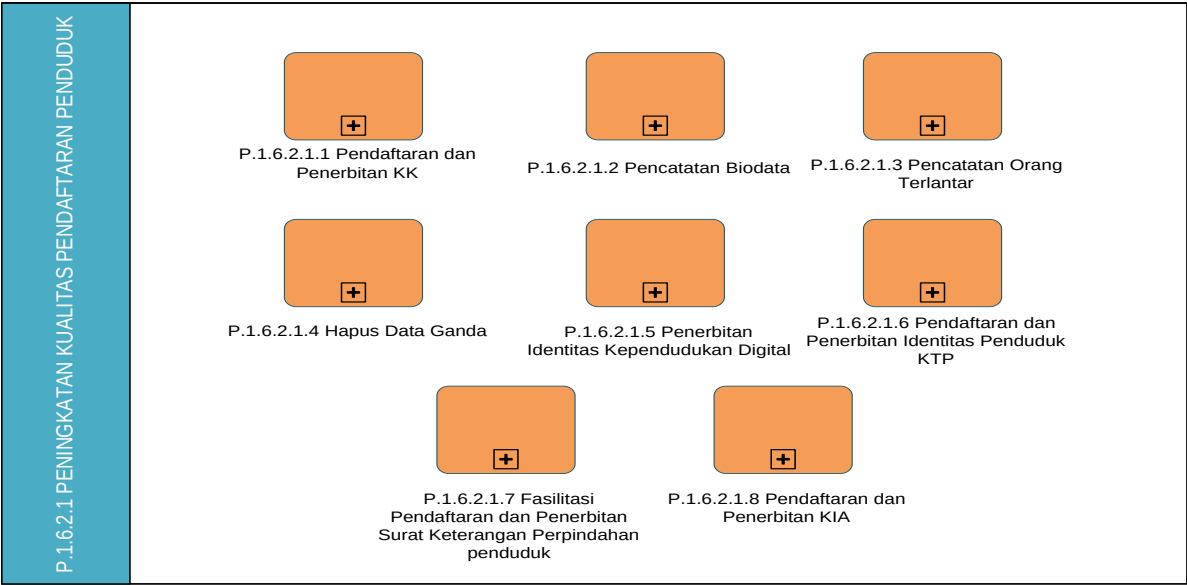
2.7.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

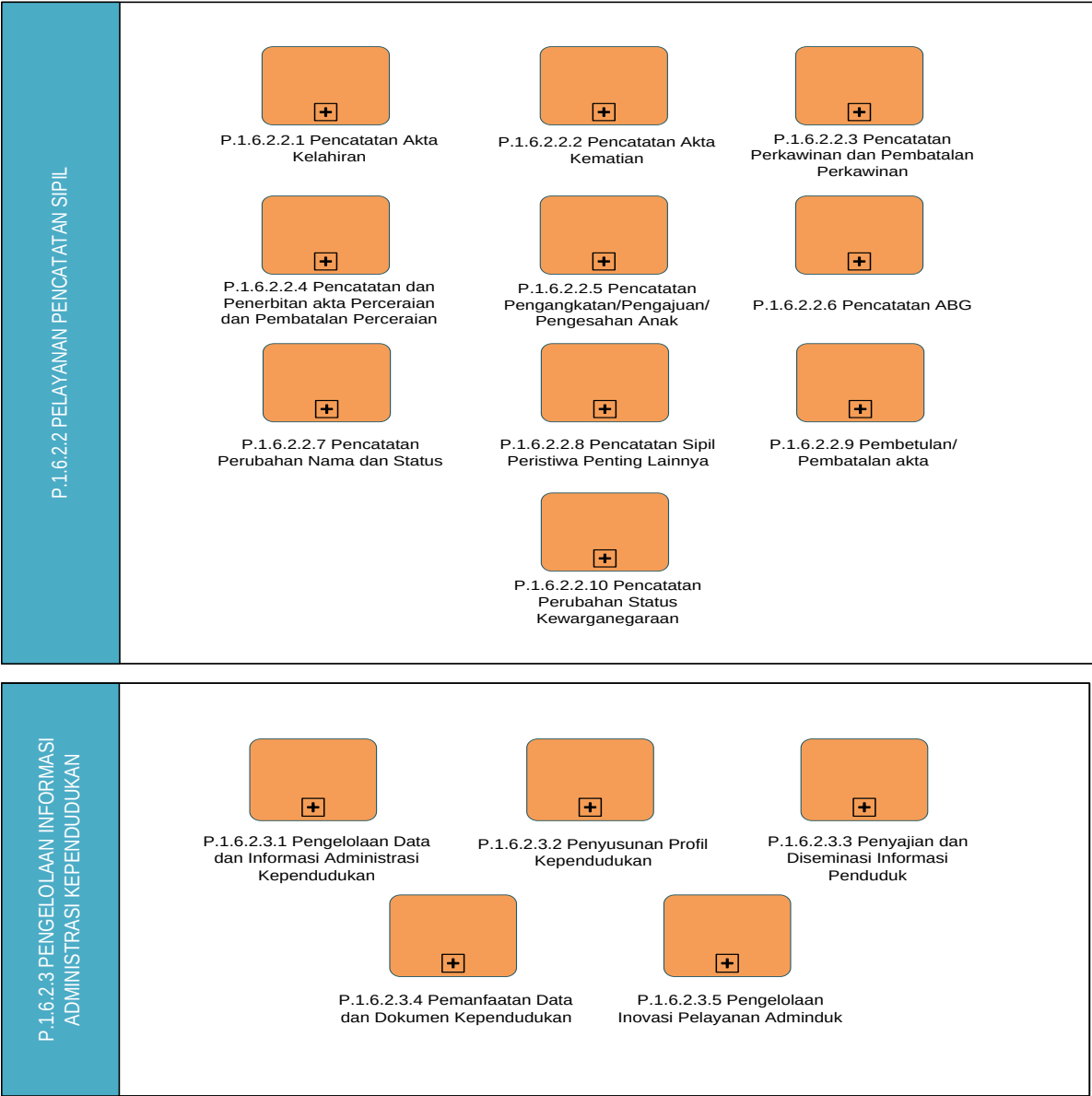


2.7.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



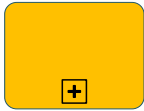
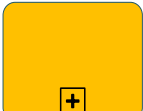
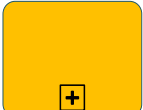
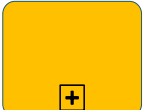
2.7.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3

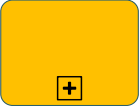




2.7.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4

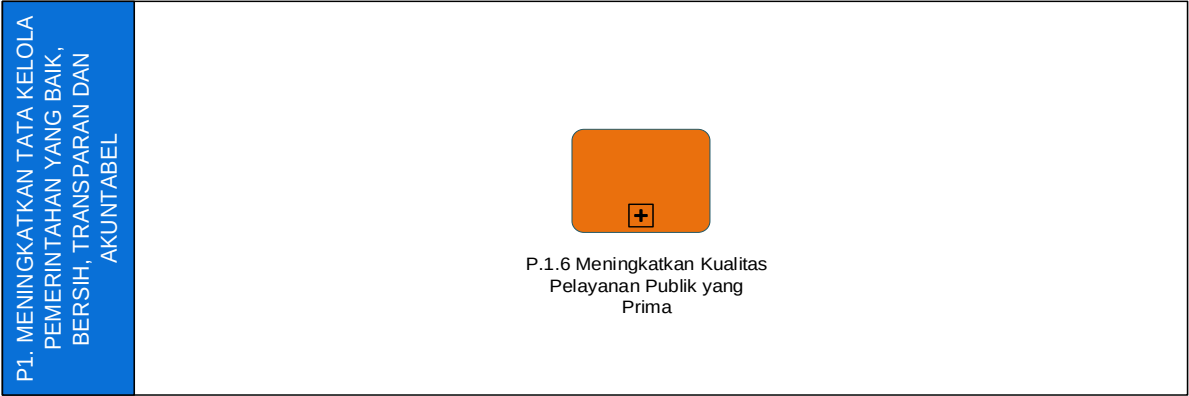


P.1.6.2.1.2 PENCATATAN BIODATA	 P.1.6.2.1.2.1 Pencatatan Biodata WNI dalam wilayah NKRI	 P.1.6.2.1.2.2 Pencatatan Biodata WNI di luar wilayah NKRI	 P.1.6.2.1.2.3 Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)
P.1.6.2.1.6 PENDAFTARAN DAN PENERBITAN IDENTITAS PENDUDUK KTP	 P.1.6.2.1.6.1 Penerbitan KTP-el baru untuk WNI	 P.1.6.2.1.6.2 Penerbitan KTP-el baru karena pindah, perubahan data, rusak dan hilang untuk WNI  P.1.6.2.1.6.4 Penerbitan KTP-el baru karena pindah, Perubaha Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan untuk OA	 P.1.6.2.1.6.3 Penerbitan KTP-el baru untuk OA
P.1.6.2.1.7 FASILITASI PENDAFTARAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PERPINDAHAN PENDUDUK	 P.1.6.2.1.7.1 Perpindahan Penduduk WNI dalam NKRI  P.1.6.2.1.7.4 Perpindahan Penduduk WNI keluar wilayah NKRI	 P.1.6.2.1.7.2 Perpindahan Penduduk OA ITAP (Izin Tetap Tetap) dalam NKRI  P.1.6.2.1.7.5 Perpindahan Penduduk WNI datang dari Luar Negeri	 P.1.6.2.1.7.3 Perpindahan Penduduk OA ITAS (Izin Tetap Terbatas) dalam NKRI  P.1.6.2.1.7.6 Pendaftaran bagi orang Asing ITAS (Izin Tetap Terbatas) datang dari luar wilayah NKRI

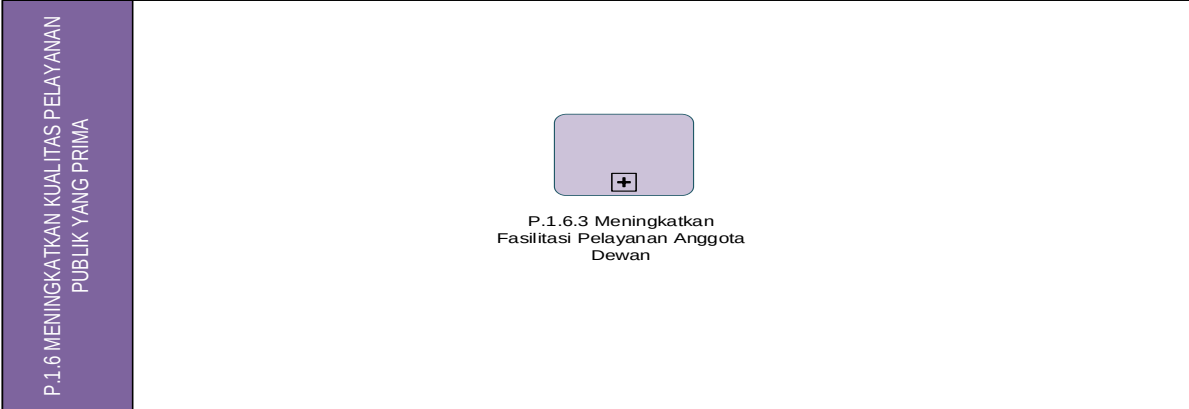
P.1.6.2.1.8 PENDAFTARAN DAN PENERBITAN KIA	 P.1.6.2.1.8.1 Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru untuk Anak WNI  P.1.6.2.1.8.2 Penerbitan KIA karena hilang / rusak dan pindah datang bagi WNI  P.1.6.2.1.8.3 Penerbitan KIA Baru untuk anak OA  P.1.6.2.1.8.4 Penerbitan KIA karena hilang / rusak dan pindah datang bagi OA
P.1.6.2.2.1 PENCATATAN AKTA KELAHIRAN	 P.1.6.2.2.1.1 Akta Kelahiran WNI  P.1.6.2.2.1.2 Akta Kelahiran OA (Orang Asing)  P.1.6.2.2.1.3 Pencatatan Surat Keterangan Lahir Mati
P.1.6.2.2.3 PENCATATAN PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	 P.1.6.2.2.3.1 Penerbitan Akta Perkawinan WNI dalam wilayah NKRI  P.1.6.2.2.3.2 Penerbitan Akta Perkawinan OA di wilayah NKRI  P.1.6.2.2.3.3 Pembatalan Perkawinan
P.1.6.2.2.4 PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA PERCERAIAN DAN PEMBATALAN PERCERAIAN	 P.1.6.2.2.4.1 Penerbitan Akta Perceraian  P.1.6.2.2.4.2 Pencatatan Pembatalan Perceraian

P.1.6.2.2.5 PENCATATAN PENGANGKATAN/ PENGAJUAN/ PENGESAHAN ANAK	 P.1.6.2.2.5.1 Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI  P.1.6.2.2.5.2 Pencatatan Pengakuan anak di wilayah NKRI  P.1.6.2.2.5.3 Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI  P.1.6.2.2.5.4 Pengesahan anak bagi penduduk WNI di wilayah NKRI  P.1.6.2.2.5.5 Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk OA di wilayah NKRI  P.1.6.2.2.5.6 Pencatatan pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI
P.1.6.2.2.6 PENCATATAN ABG	 P.1.6.2.2.6.1 Pencatatan ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda)  P.1.6.2.2.6.2 Pencatatan ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda) yang memilih menjadi WNI  P.1.6.2.2.6.3 Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA  P.1.6.2.2.6.4 Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan
P.1.6.2.2.9 PEMBETULAN/PEMBATALAN AKTA	 P.1.6.2.2.9.1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari Subjek Akta di wilayah NKRI  P.1.6.2.2.9.2 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan bagi Penduduk  P.1.6.2.2.9.3 Pencatatan Pembatalan Akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan / Contrarius Actus
P.1.6.2.2.10 PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN	 P.1.6.2.2.10.1 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di wilayah NKRI  P.1.6.2.2.10.2 Pencatatan perubahan status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA

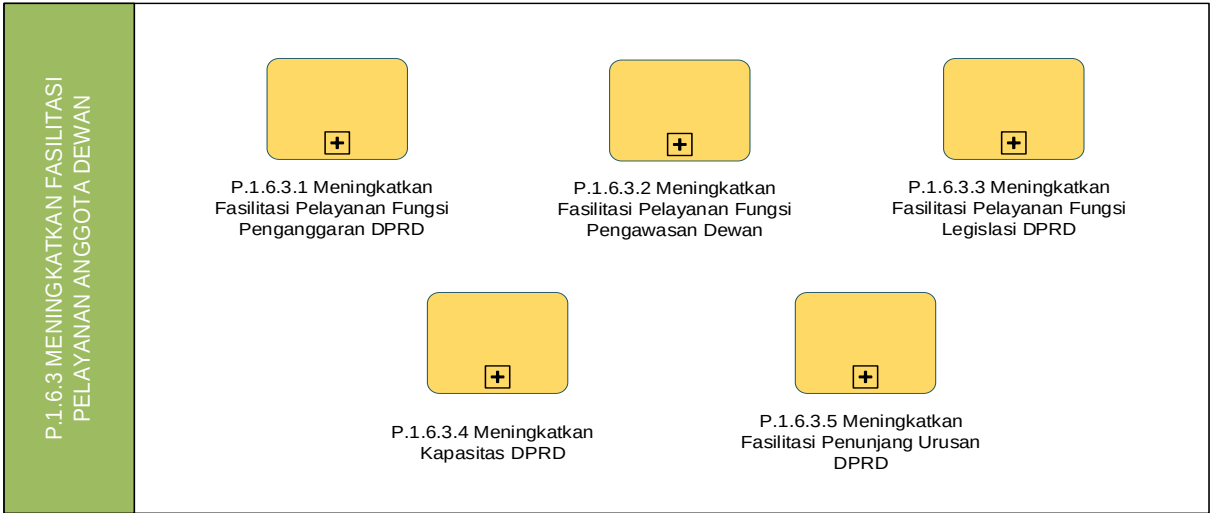
2.8. SEKRETARIAT DPRD
2.8.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



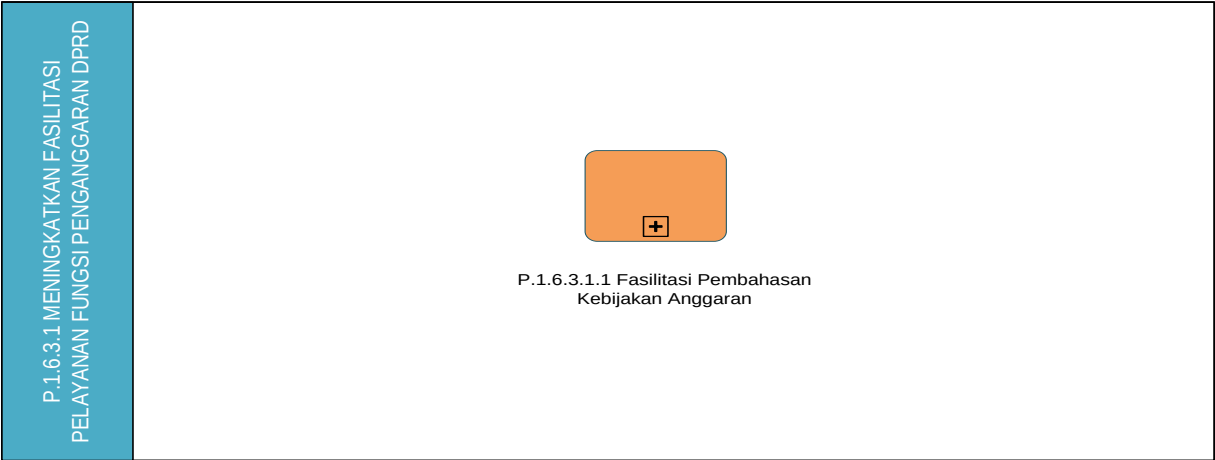
2.8.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



2.8.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



2.8.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



P.1.6.3.2 MENINGKATKAN FASILITASI PELAYANAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN	 P.1.6.3.2.1 Pengelolaan Layanan Fungsi Pengawasan Alat Kelengkapan DPRD  P.1.6.3.2.2 Pengelolaan Layanan Fungsi Penyampaian Aspirasi Masyarakat  P.1.6.3.2.3 Pengelolaan Reses  P.1.6.3.2.4 Fasilitasi Pengawasan Penggunaan Anggaran  P.1.6.3.2.5 Pengelolaan Layanan Fungsi Pengawasan Alat Kelengkapan DPRD  P.1.6.3.2.6 Fasilitasi Pembahasan Kerjasama Daerah  P.1.6.3.2.7 Fasilitasi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah/Walikota  P.1.6.3.2.8 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
P.1.6.3.3 MENINGKATKAN FASILITASI PELAYANAN FUNGSI LEGISLASI DPRD	 P.1.6.3.3.1 Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah
P.1.6.3.4 MENINGKATKAN KAPASITAS DPRD	 P.1.6.3.3.3 Fasilitasi Persidangan dan Rapat-Rapat DPRD Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD  P.1.6.3.4.2 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD
P.1.6.3.5 MENINGKATKAN FASILITASI PENUNJANG URUSAN DPRD	 P.1.6.3.3.2 Fasilitasi Kehumasan  P.1.6.3.3.4 Fasilitasi Keprotokolan  P.1.6.3.4.1 Fasilitasi Administrasi dan Kesejahteraan Anggota DPRD

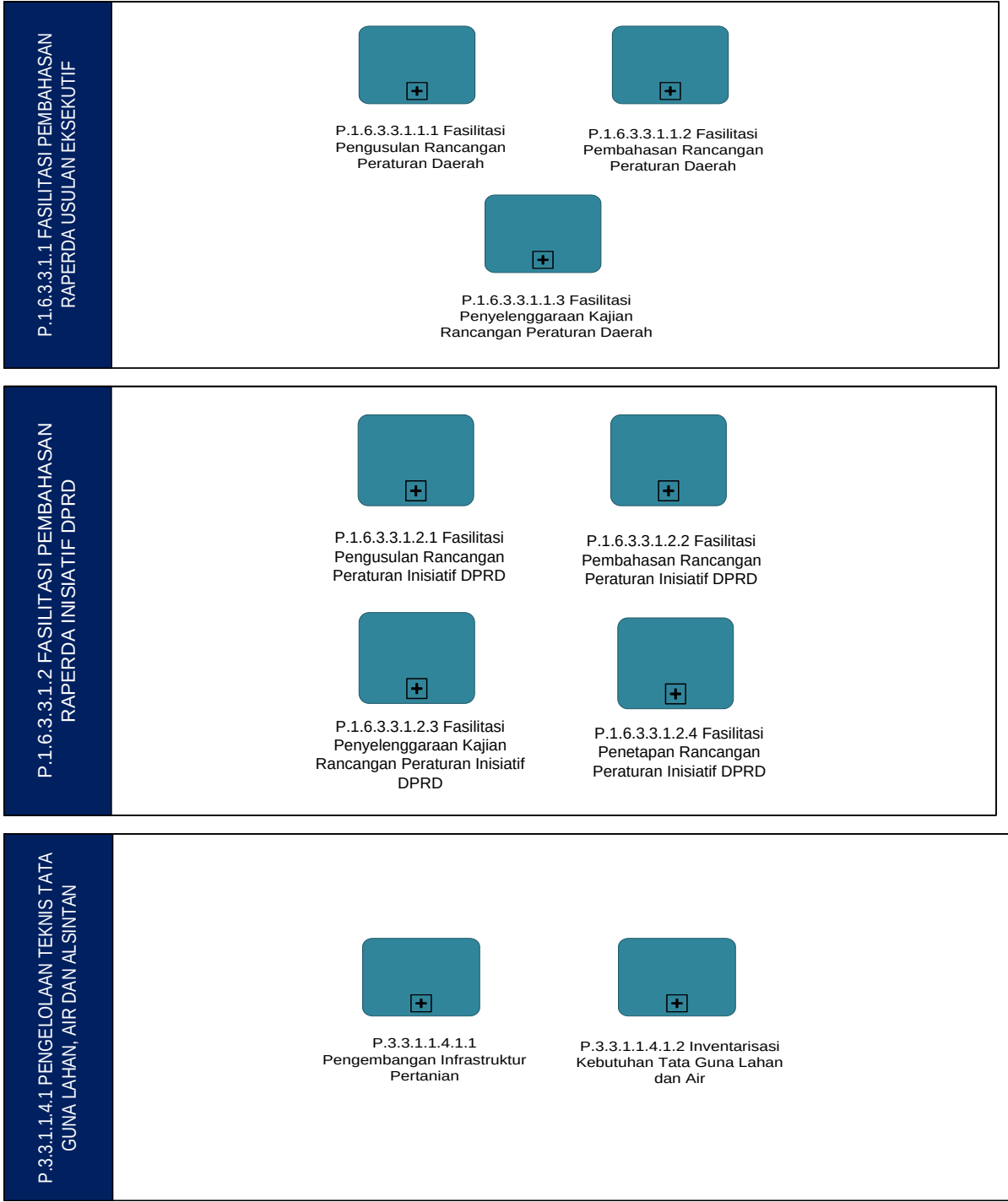
2.8.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



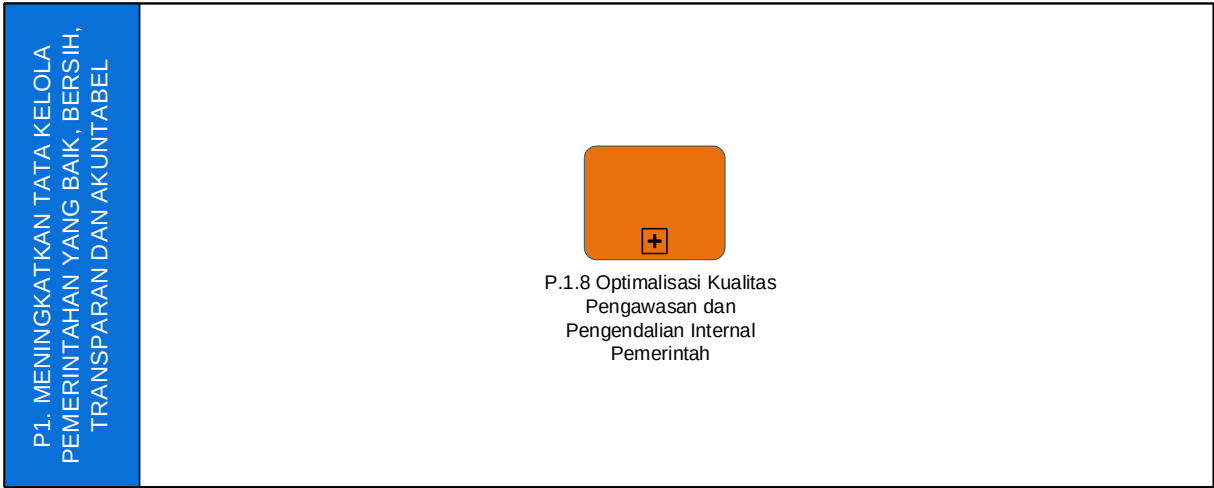
P.1.6.3.2.4 FASILITASI PENGAWASAN PENGUNAAN ANGGARAN	 P.1.6.3.2.4.1 Fasilitasi Pengawasan Penggunaan Anggaran yang Sudah Dilaksanakan
P.1.6.3.2.5 PENGELOLAAN LAYANAN FUNGSI PENGAWASAN ALAT KELENGKAPAN DPRD	 P.1.6.3.2.4.2 Fasilitasi Hearing Penggunaan Anggaran yang Sedang Dilaksanakan
P.1.6.3.3.1 FASILITASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	 P.1.6.3.3.1.1 Fasilitasi Pembahasan Raperda Usulan Eksekutif  P.1.6.3.3.1.2 Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD  P.1.6.3.3.1.3 Fasilitasi Pembahasan Kajian Perundang-Undangan dan/ atau Produk Hukum Lainnya  P.1.6.3.3.1.4 Koordinasi Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD  P.1.6.3.3.1.5 Administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota
P.1.6.3.3.3 FASILITASI PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT DPRD FASILITASI KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	 P.1.6.3.3.3.1 Pengelolaan Rapat-Rapat DPRD  P.1.6.3.3.3.2 Pengelolaan Risalah Rapat  P.1.6.3.3.3.3 Pengadministrasian Arsip Risalah dan Notulensi Rapat  P.1.6.3.3.3.4 Fasilitasi Penyusunan Renja DPRD  P.1.6.3.3.3.5 Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli/Narasumber Fasilitasi Kunjungan Kerja Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD

P.1.6.3.4.2 FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA DPRD	 P.1.6.3.4.2.1 Fasilitasi Peningkatan Bimbingan Teknis DPRD  P.1.6.3.4.2.2 Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli/ Narasumber  P.1.6.3.4.2.3 Fasilitasi Koordinasi/Konsultasi Kunjungan Daerah  P.1.6.3.4.2.4 Pengelolaan Komunikasi dan Publikasi DPRD  P.1.6.3.4.2.5 Pengelolaan Dokumentasi Program/ Kegiatan DPRD
P.1.6.3.3.2 FASILITASI KEHUMASAN	 P.1.6.3.3.2.1 Fasilitasi Kunjungan Kerja Tamu DPRD
P.1.6.3.3.4 FASILITASI KEPROTOKOLAN	 P.1.6.3.3.4.1 Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan DPRD
P.1.6.3.4.1 FASILITASI ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DPRD	 P.1.6.3.4.1.1 Administrasi Keanggotaan DPRD  P.1.6.3.4.1.2 Fasilitasi kesejahteraan (Keuangan dan Jaminan Kesehatan DPRD)  P.1.6.3.4.1.3 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana

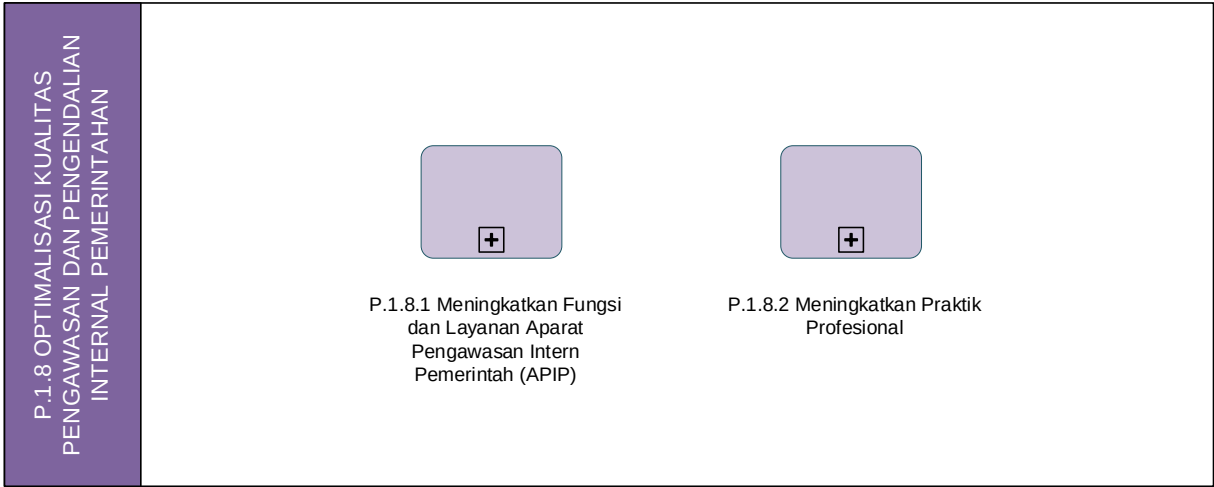
2.8.6. PETA PROSES BISNIS LEVEL 5



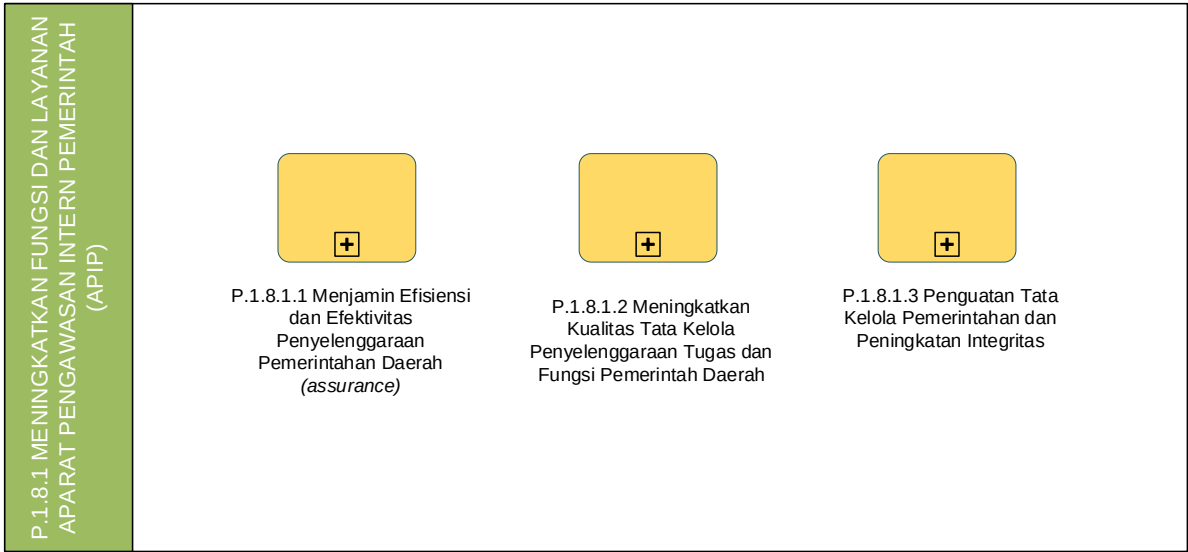
2.9. INSPEKTORAT DAERAH
2.9.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

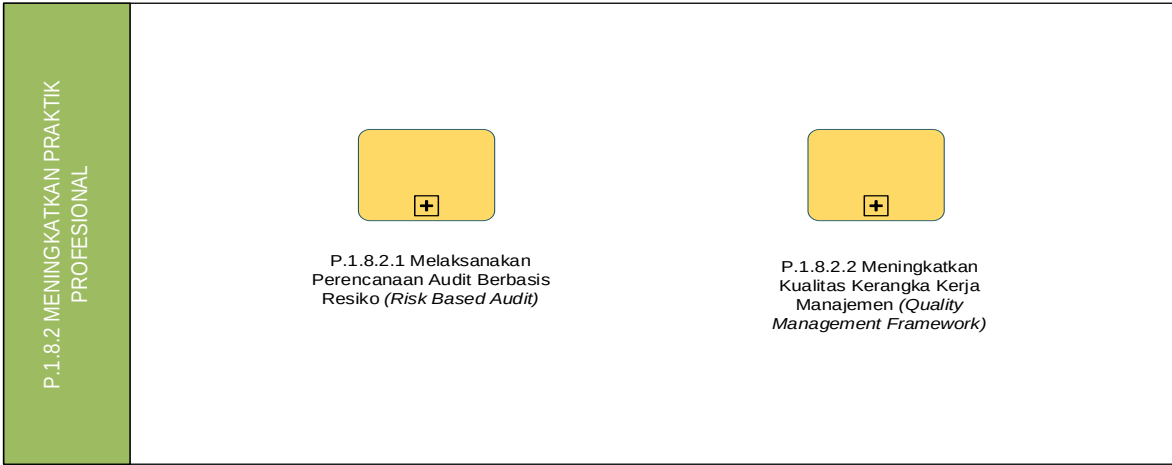


2.9.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

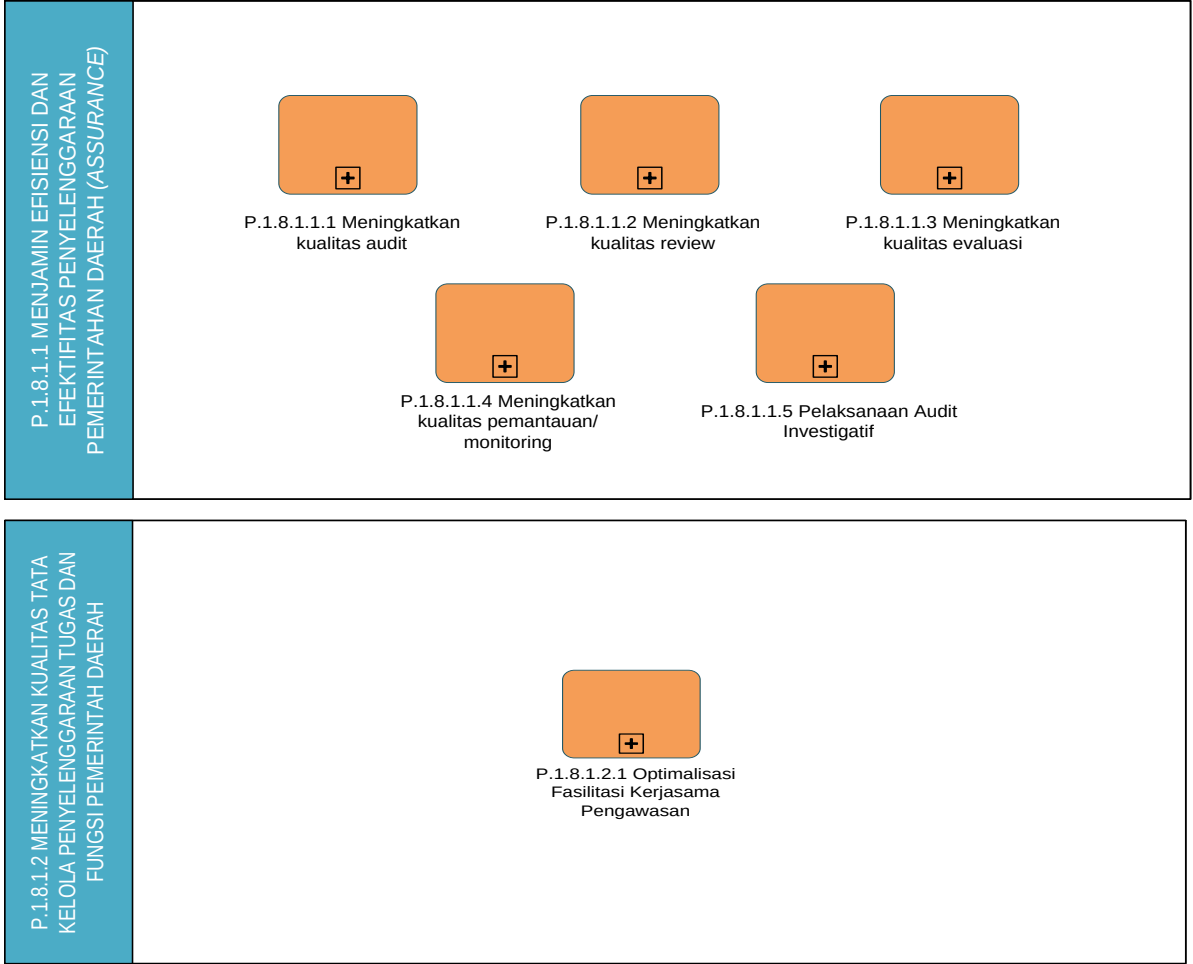


2.9.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



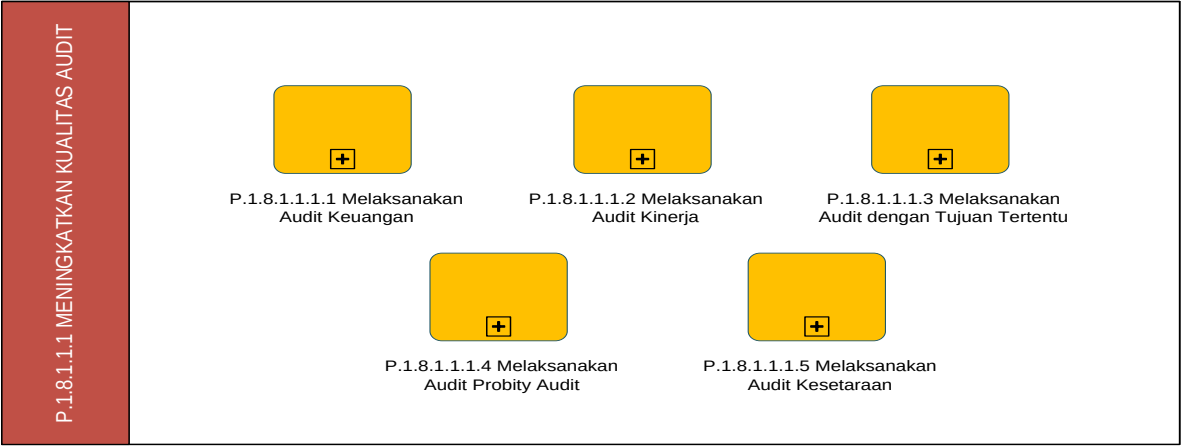


2.9.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3





2.9.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



P.1.8.1.1.2 MENINGKATKAN KUALITAS REVU	 P.1.8.1.1.2.1 Melaksanakan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah  P.1.8.1.1.2.2 Melaksanakan Reviu Dokumen Perencanaan Penganggaran Daerah  P.1.8.1.1.2.3 Melaksanakan Reviu Atas Laporan Keuangan  P.1.8.1.1.2.4 Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja
P.1.8.1.1.3 MENINGKATKAN KUALITAS EVALUASI	 P.1.8.1.1.3.1 Melaksanakan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  P.1.8.1.1.3.2 Melaksanakan Evaluasi Belanja  P.1.8.1.1.3.3 Melaksanakan Evaluasi Pembangunan  P.1.8.1.1.3.4 Melaksanakan Evaluasi Kelembagaan  P.1.8.1.1.3.5 Melaksanakan Evaluasi Kebijakan  P.1.8.1.1.3.6 Melaksanakan Evaluasi SAKIP  P.1.8.1.1.3.7 Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Program "Strategi Nasional"  P.1.8.1.1.3.8 Melaksanakan Evaluasi atas Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan  P.1.8.1.1.3.9 Melaksanakan Evaluasi dan Penjaminan Implementasi Manajemen Beresiko

P.1.8.1.1.4 MENINGKATKAN KUALITAS PEMANTAUAN/ MONITORING	 P.1.8.1.1.4.1 Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  P.1.8.1.1.4.4 Melaksanakan Pemantauan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan  P.1.8.1.1.4.2 Melaksanakan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Kebijakan  P.1.8.1.1.4.5 Melaksanakan Pemantauan Belanja  P.1.8.1.1.4.3 Melaksanakan Pemantauan terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah  P.1.8.1.1.4.6 Melaksanakan Pemantauan PAD  P.1.8.1.1.4.7 Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Program Strategis Nasional
P.1.8.1.1.5 PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF	 P.1.8.1.1.5.1 Audit Investigatif terkait Penyalahgunaan Wewenang  P.1.8.1.1.5.2 Audit Investigatif terkait ambatan dalam pelayanan masyarakat  P.1.8.1.1.5.3 Audit Investigatif terkait Indikasi KKN  P.1.8.1.1.5.4 Audit Investigatif terkait Pelanggaran Disiplin Pegawai
P.1.8.1.2.1 OPTIMALISASI FASILITASI KERJASAMA PENGAWASAN	 P.1.8.1.2.1.1 Optimalisasi Pelaksanaan Saber Pungli  P.1.8.1.2.1.2 Kerjasama Pengawasan dengan APH dan Instansi Vertikal lainnya  P.1.8.1.2.1.3 Kerjasama Pengawasan dengan APIP lainnya  P.1.8.1.2.1.4 Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah

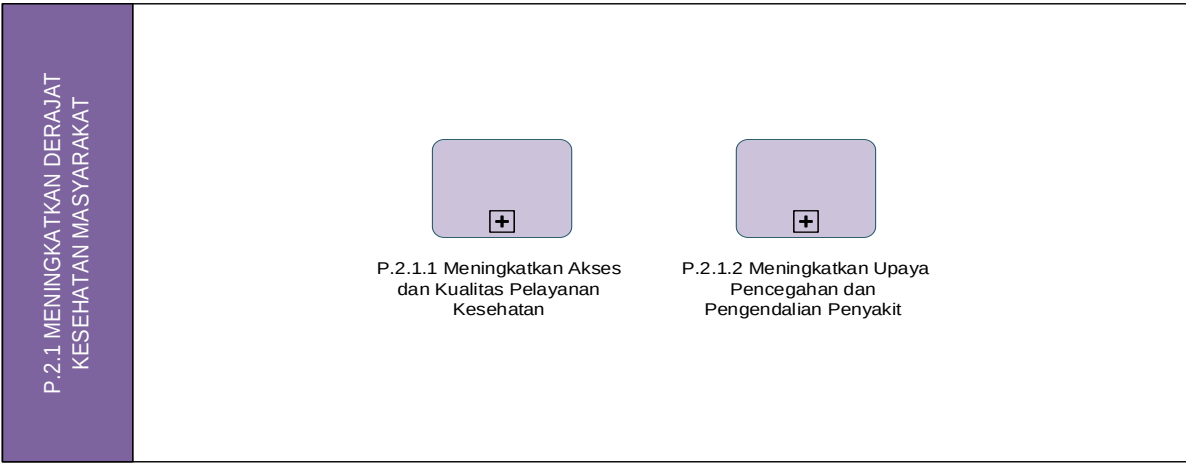


2.10. DINAS KESEHATAN

2.10.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



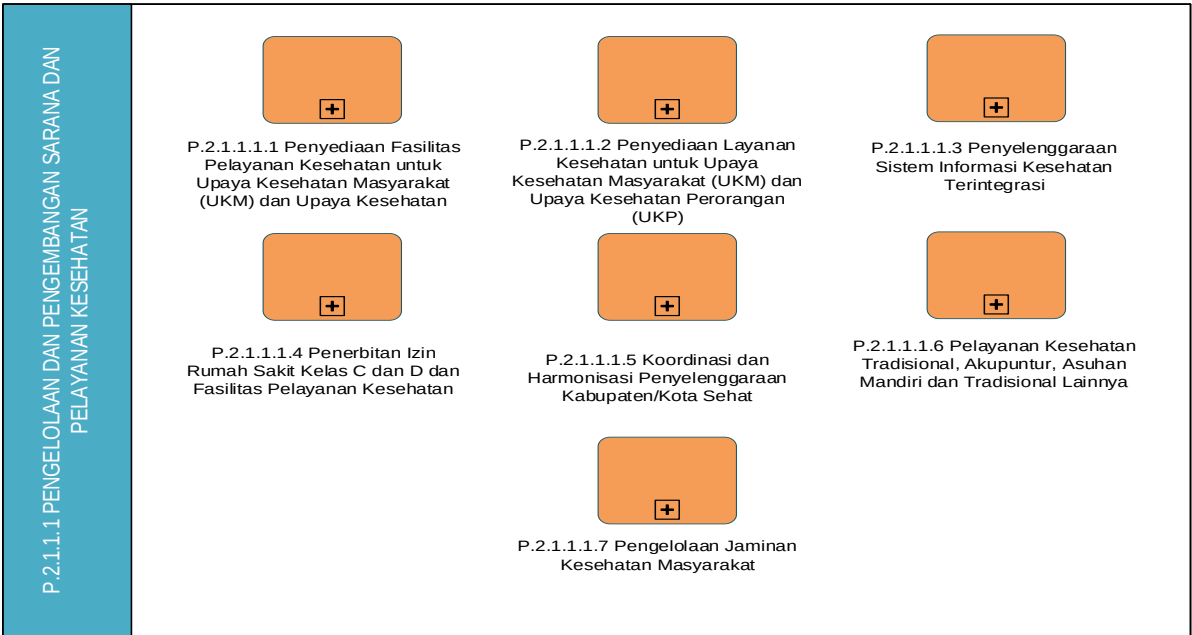
2.10.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



2.10.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



2.10.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3

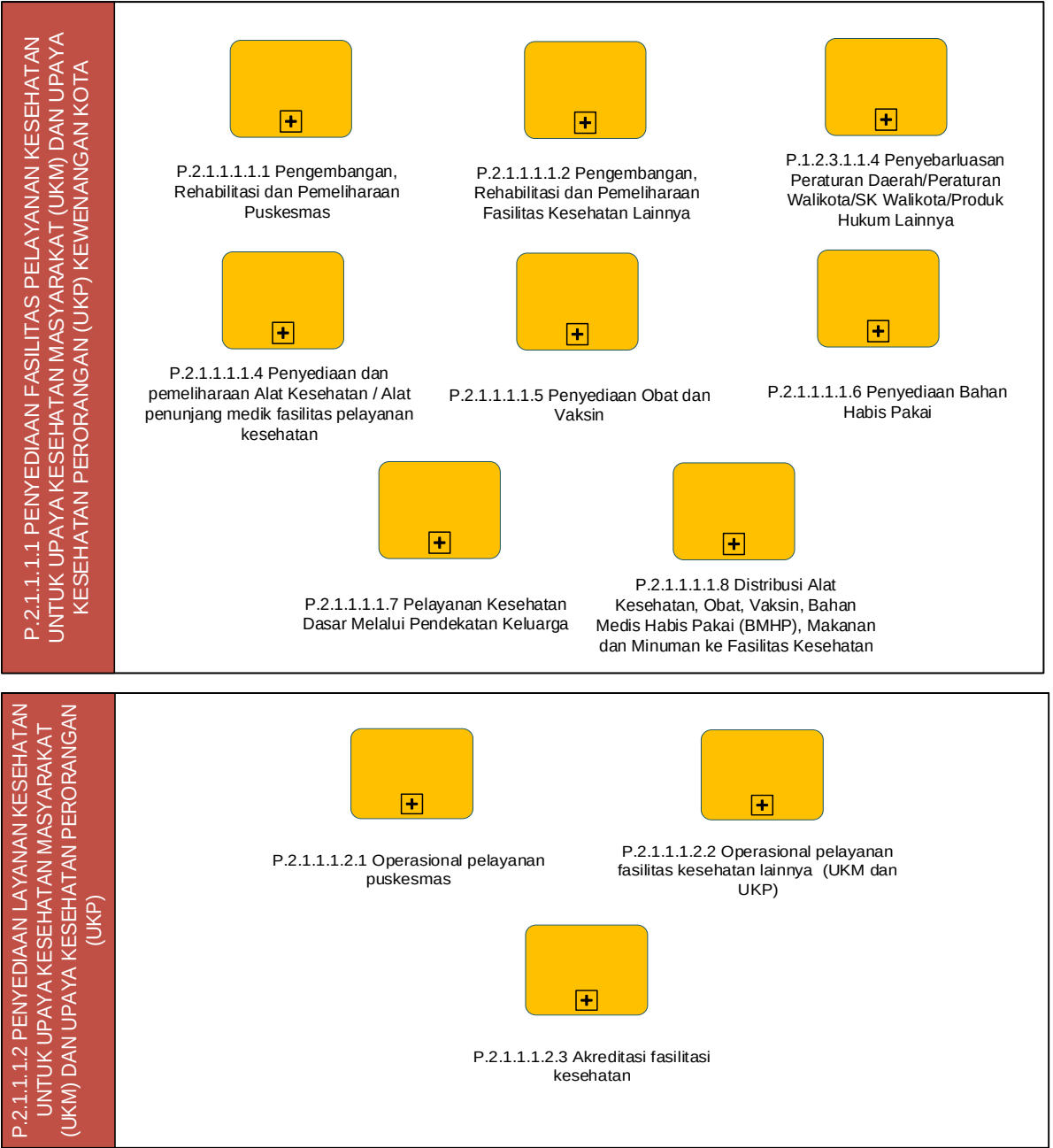


P.2.1.1.2 PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN	P.2.1.1.2.1 Pemberian Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan P.2.1.1.2.2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan P.2.1.1.2.3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan
P.2.1.1.3 PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN SEDIAAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	P.2.1.1.3.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal P.2.1.1.3.2 Pemberian Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 Tertentu Perusahaan RT
P.2.1.2.1 PENINGKATAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	P.2.1.2.1.1 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi P.2.1.2.1.2 Pelayanan kesehatan penderita diabetes P.2.1.2.1.3 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat P.2.1.2.1.4 Pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) P.2.1.2.1.5 Pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA P.2.1.2.1.6 Skrining PTM Usia 15-59
P.2.1.2.2 PENINGKATAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	P.2.1.2.2.1 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis P.2.1.2.2.2 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV P.2.1.2.2.3 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Langsung Lainnya

P.2.1.2.3 PENINGKATAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR TIDAK LANGSUNG	P.2.1.2.3.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular disebabkan Vektor P.2.1.2.3.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular disebabkan Zoonosis
P.2.1.2.4 SURVEILANS KESEHATAN DAN IMUNISASI	P.2.1.2.4.1 Pengeolalan Penyakit Potensi Wabah dan KLB P.2.1.2.4.2 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah P.2.1.2.4.3 Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional P.2.1.2.4.4 Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massa P.2.1.2.4.5 Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
P.2.1.2.6 PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	P.2.1.3.1.1 Penyelenggaraan Program Kesehatan Masyarakat P.2.1.3.1.2 Penyelenggaraan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga P.2.1.3.1.3 Penyelenggaraan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Lingkungan P.2.1.3.1.4 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor



2.10.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



P.2.1.1.1.3 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN TERINTEGRASI	P.2.1.1.1.2.1 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
P.2.1.3.1.1 PENYELENGGARAAN PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	P.2.1.3.1.1.1 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Pra Konsepsi, Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Neonatal) P.2.1.3.1.1.2 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar P.2.1.3.1.1.3 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut P.2.1.3.1.1.4 Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
P.2.1.3.1.3 PENYELENGGARAAN FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	P.2.1.3.1.3.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan P.2.1.3.1.3.2 Pengendalian dan Pengawasan TFU (Tempat fasilitas Umum) dan TPM (Tempat Pengolahan Makanan)
P.2.1.3.1.4 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR	P.2.1.3.1.4.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat P.2.1.3.1.4.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

2.11. RSUD MARDI WALUYO

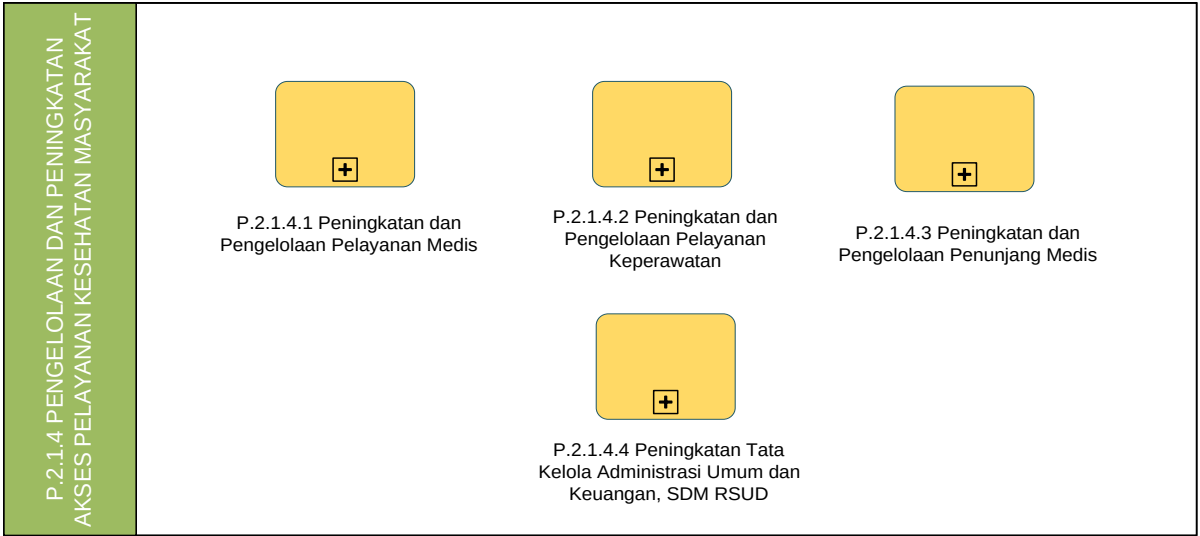
2.11.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



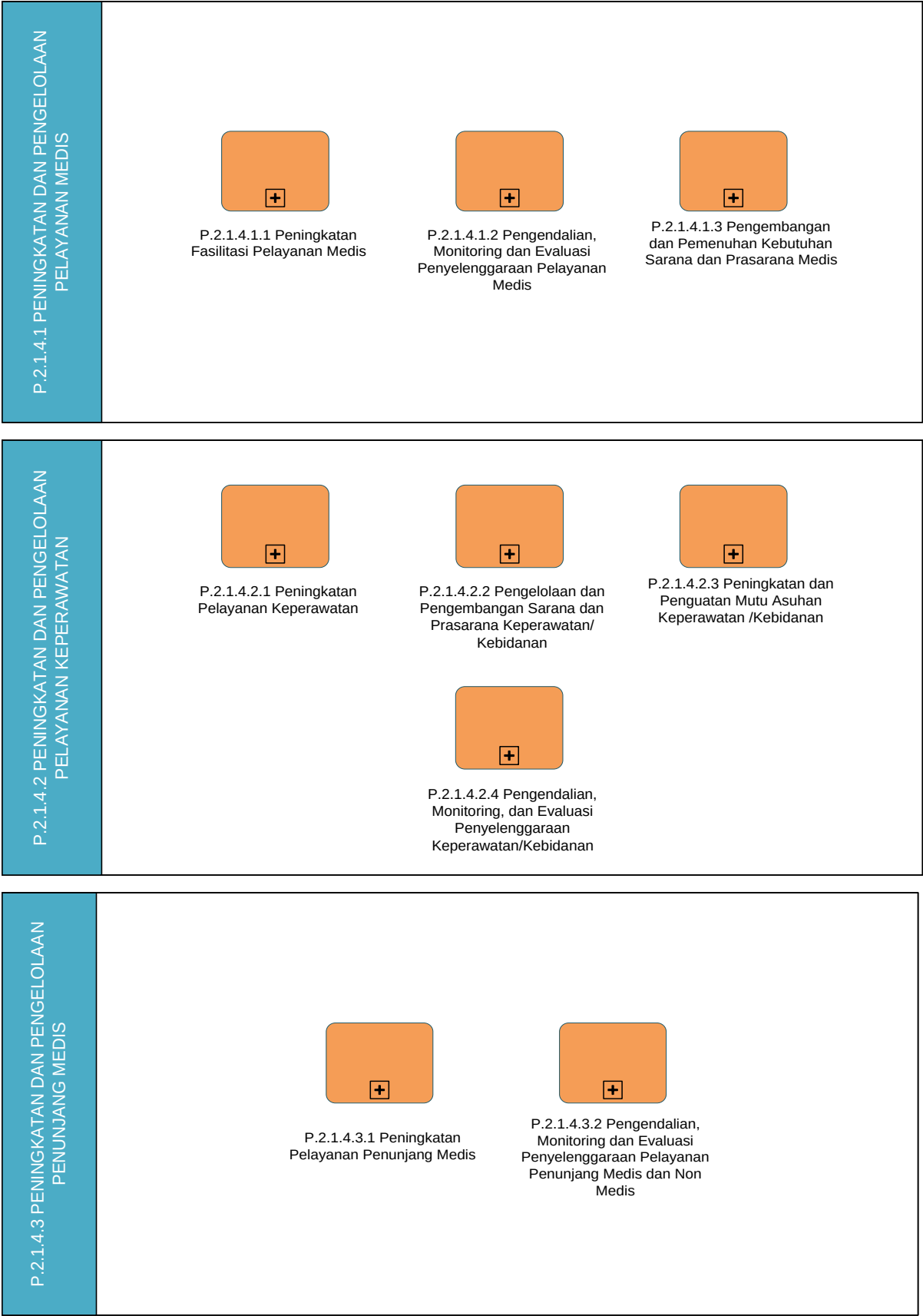
2.11.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

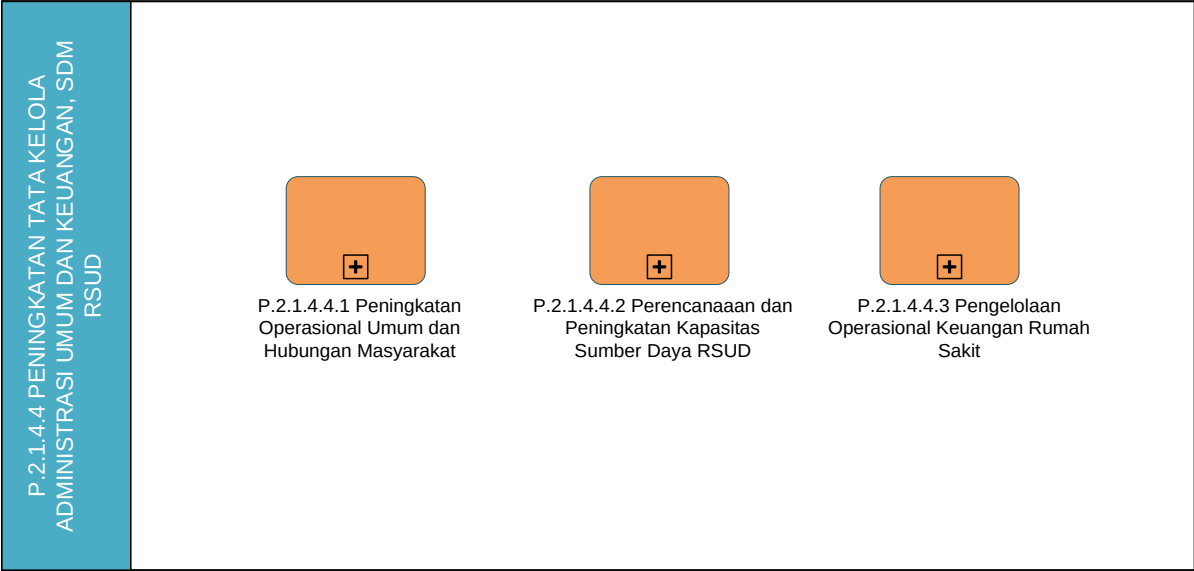


2.11.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



2.11.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3





2.11.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



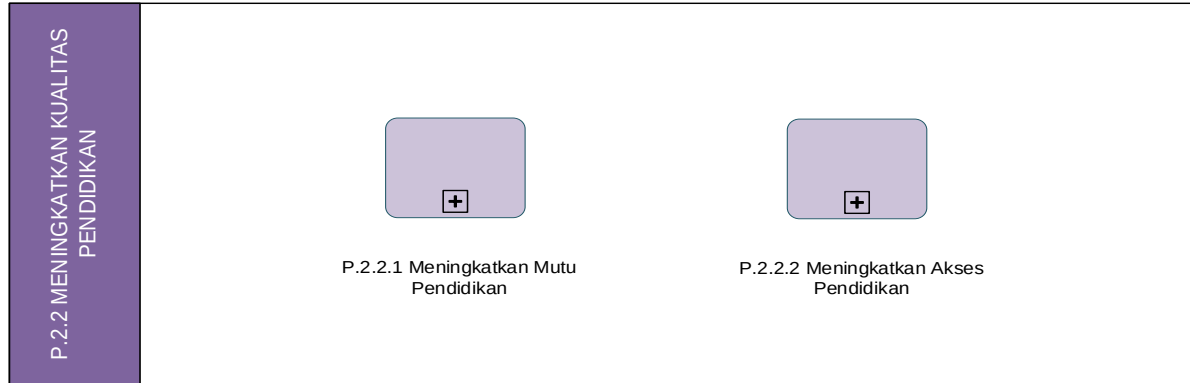
P.2.1.4.2.1 PENINGKATAN PELAYANAN KEPERAWATAN	P.2.1.4.2.1.1 Pengelolaan Instalasi Haemodialisa P.2.1.4.2.1.2 Pengelolaan Instalasi Rawat Jalan P.2.1.4.2.1.3 Pengelolaan Instalasi Rawat Inap P.2.1.4.2.1.4 Pengelolaan Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah P.2.1.4.2.1.5 Pengelolaan Instalasi Ambulance
P.2.1.4.3.1 PENINGKATAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	P.2.1.4.3.1.1 Pengelolaan Pelayanan Instalasi Farmasi P.2.1.4.3.1.2 Pengelolaan Pelayanan Instalasi Radiologi P.2.1.4.3.1.3 Pengelolaan Pelayanan Instalasi Laboratorium Sentral P.2.1.4.3.1.4 Pengelolaan Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medis P.2.1.4.3.1.5 Pengelolaan Pelayanan Instalasi Gizi P.2.1.4.3.1.6 Pelayanan Instalasi Sterilisasi Sentral dan Laundry
P.2.1.4.4.1 PENINGKATAN OPERASIONAL UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	P.2.1.4.4.1.1 Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana P.2.1.4.4.1.2 Pengelolaan dan Pengendalian Instalasi Penyehatan Lingkungan P.2.1.4.4.1.3 Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi P.2.1.4.4.1.4 Pengelolaan Hubungan Masyarakat Rumah Sakit P.2.1.4.4.1.5 Penanganan Pengaduan Layanan RSUD



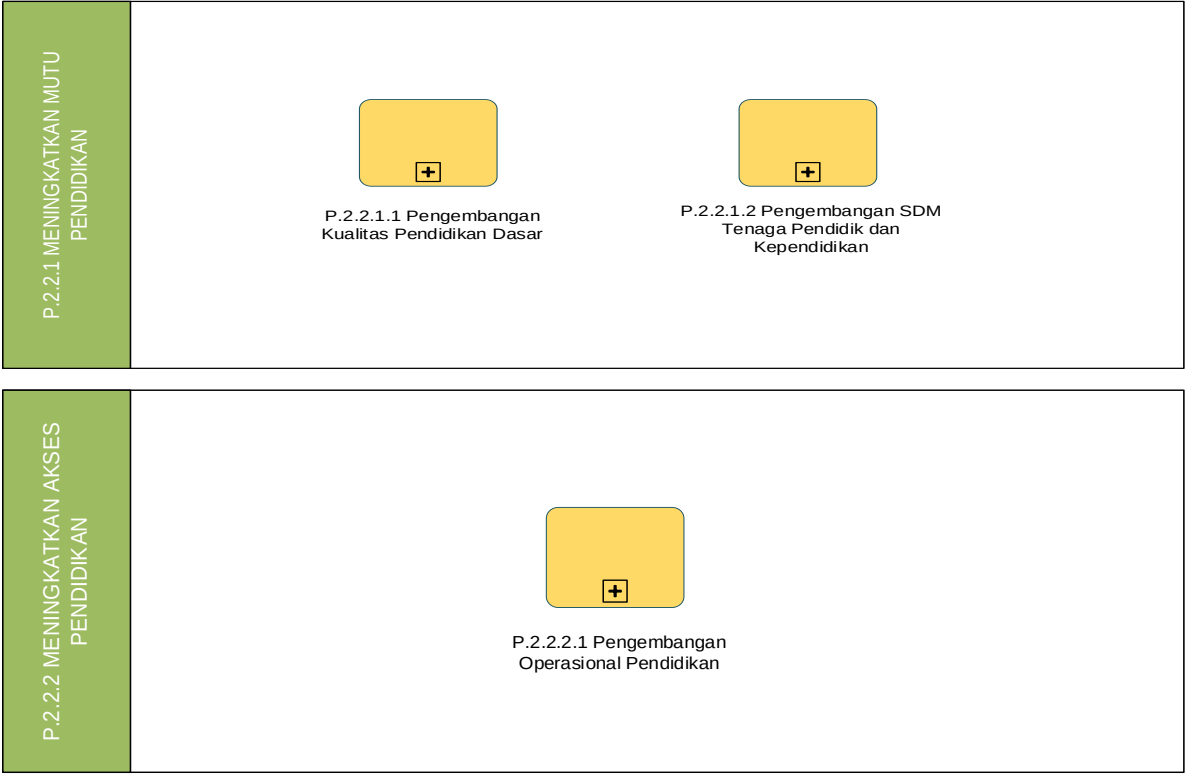
2.12. DINAS PENDIDIKAN
2.12.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



2.12.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

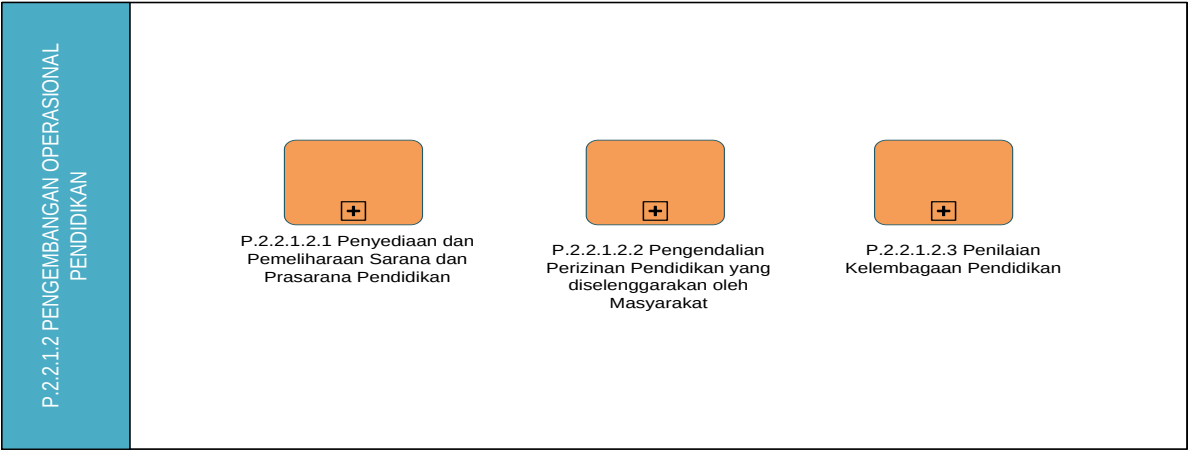


2.12.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



2.12.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3





2.12.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



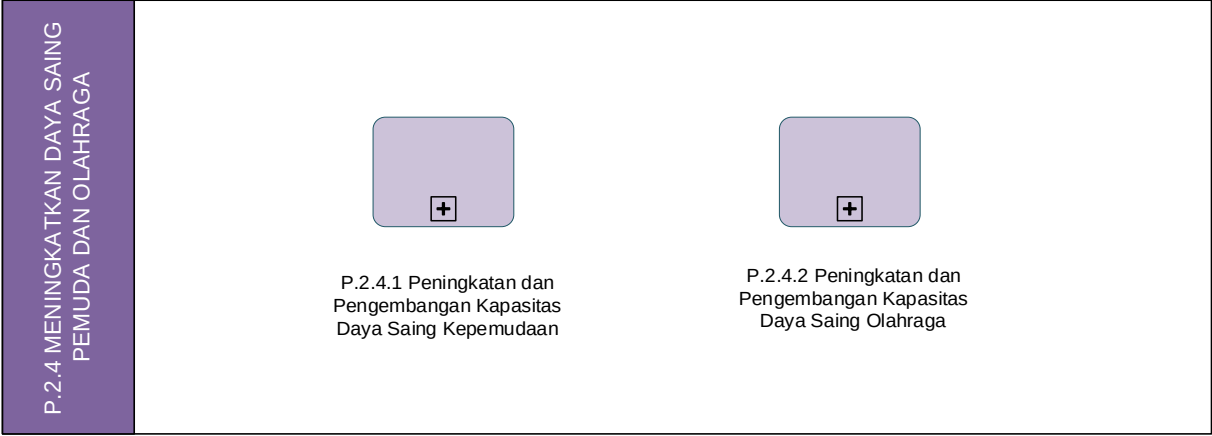
P.2.2.1.2.3 PENGEMBANGAN SDM PESERTA DIDIK	 P.2.2.1.2.3.1 Pengembangan Kurikulum Pendidikan
P.2.2.1.2.2 PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	 P.2.2.1.2.2.1 Fasilitasi Pengajuan NPSN SD/SMP  P.2.2.1.2.2.2 Fasilitasi Layanan Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD/SMP
P.2.2.1.2.3 PENILAIAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN	 P.2.2.1.2.3.1 Akreditasi Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)

2.13. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

2.13.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

P.2 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER, INTELEKTUAL DAN BERDAYA SAING	 P.2.4 Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga
--	---

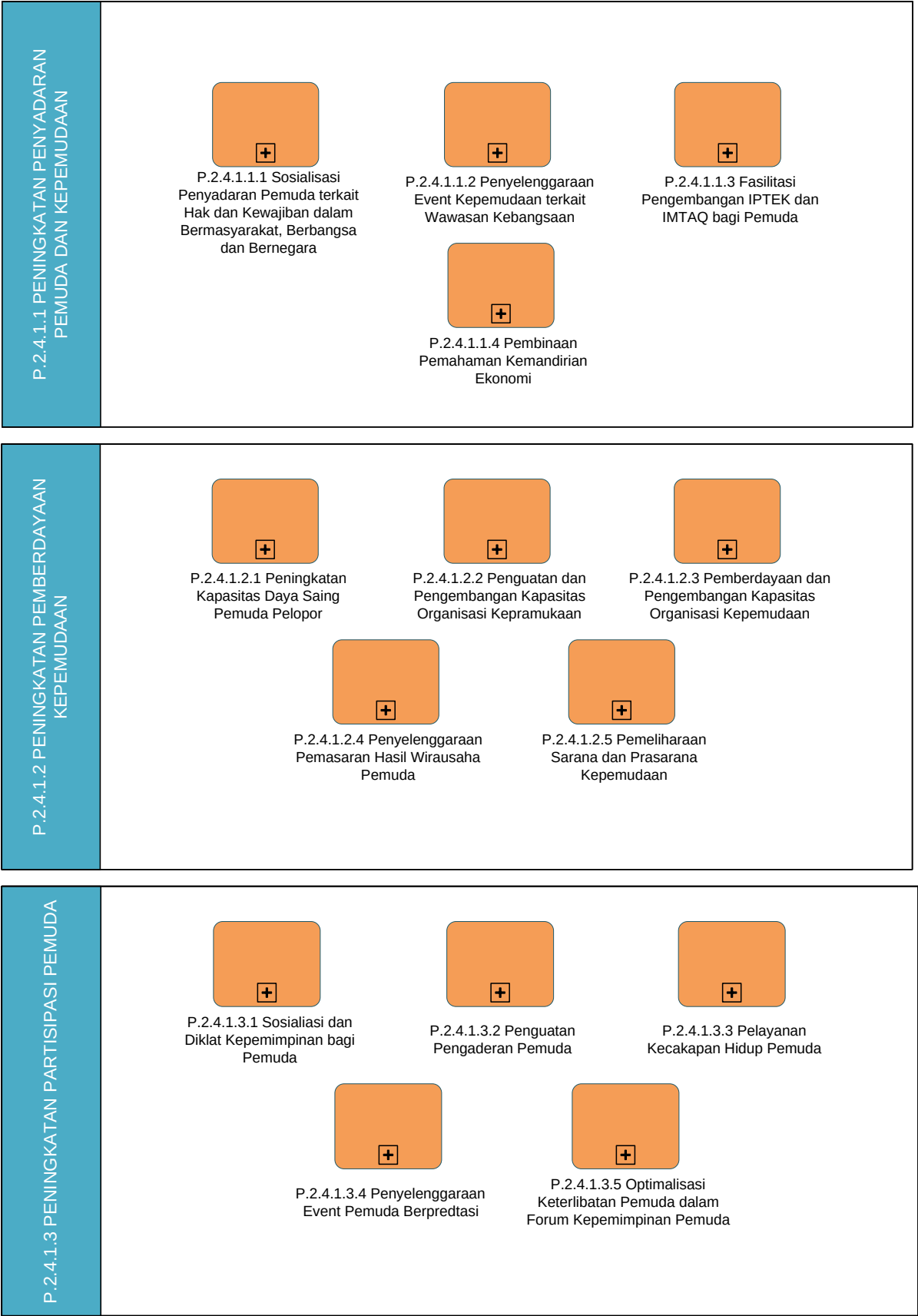
2.13.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

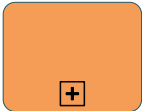
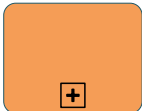
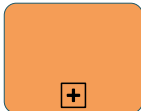
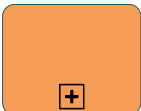
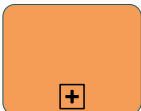


2.13.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



2.13.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



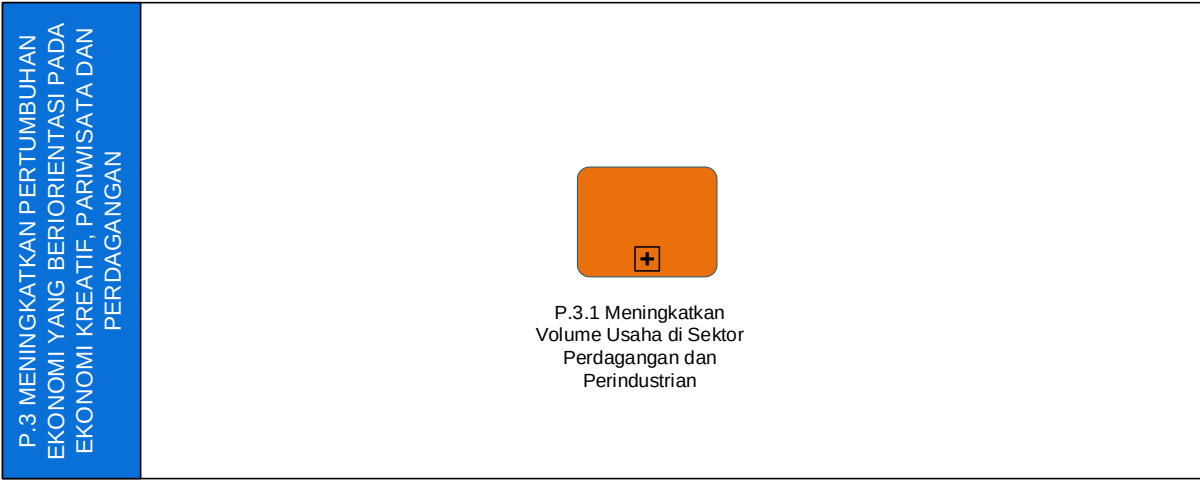
P.2.4.2.1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	 P.2.4.2.1.1 Pemasalan, Pembibitan dan Pengembangan Prestasi Olahragawan  P.2.4.2.1.2 Penyelenggaraan Event Kompetisi/Kejuaraan Olahraga yang Berjenjang dan Berkelanjutan  P.2.4.2.1.3 Penguatan Dukungan Prestasi Olahraga
P.2.4.2.2 PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN	 P.2.4.2.2.1 Peningkatan Kapasitas Pelatih Olahraga  P.2.4.2.2.2 Peningkatan Kapasitas Atlit  P.2.4.2.2.3 Peningkatan Kapasitas Praktisi Olahraga Lainnya  P.2.4.2.2.4 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga  P.2.4.2.2.5 Penguatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan
P.2.4.2.3 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANITITAS SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	 P.2.4.2.3.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga  P.2.4.2.3.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga  P.2.4.2.3.3 Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Keolahragaan

2.13.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4

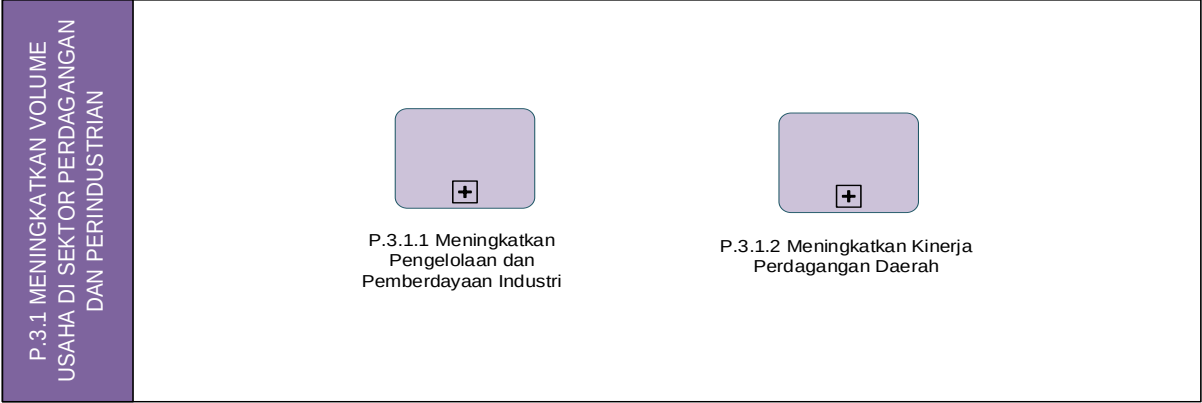


2.14. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.14.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



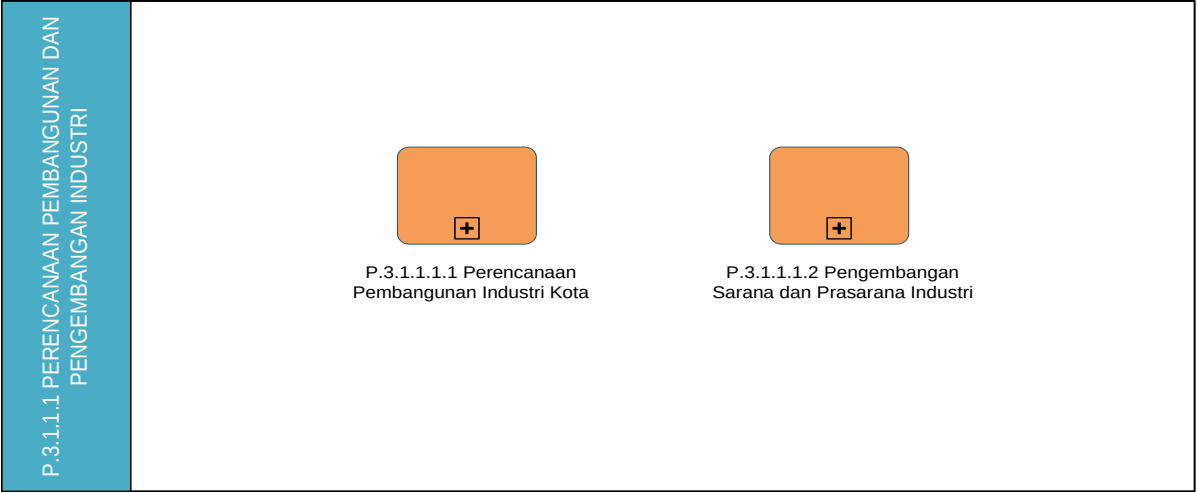
2.14.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



2.14.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



2.14.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



P.3.1.1.2 PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	 P.3.1.1.1.2 Fasilitas Verifikasi Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha Risiko Menengah Tinggi atau Risiko Tinggi melalui SIINas  P.3.1.1.1.2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
P.3.1.1.3 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	 P.3.1.1.3.1 Pendataan Industri Kecil Menengah
P.3.1.1.4 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI	 P.3.1.1.4.1 Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi Halal  P.3.1.1.4.2 Pembinaan dan Fasilitas Legalisasi Merek  P.3.1.1.4.3 Pembinaan Pelaku Usaha Industri
P.3.1.2.1 PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	 P.3.1.2.1.1 Fasilitas Pemberian Rekomendasi Perizinan Gudang  P.3.1.2.1.2 Pengelolaan, Revitalisasi dan Pemeliharaan Pasar Rakyat

P.3.1.2.2 PENGENDALIAN DAN STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKO DAN BARANG PENTING	 P.3.1.2.2.1 Penyelenggaraan Operasi Pasar  P.3.1.2.2.2 Penyediaan Informasi Harga Bahan dan Stok Pokok
P.3.1.2.3 STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	 P.3.1.2.3.1 Fasilitasi Tata Ulang Metrelogi Legal  P.3.1.2.3.2 Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan BDKT (Barang Dalam Kondisi Terbungkus) Konsumen di Kota
P.3.1.2.4 PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	 P.3.1.2.4.1 Promosi Produk Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang
P.3.1.2.5 PENGENDALIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN	 P.3.1.2.5.1 Fasilitasi Rekomendasi Pendaftaran Perusahaan (Pasar, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan)  P.3.1.2.5.2 Fasilitasi Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

P.3.1.2.5 PENGENDALIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN	P.3.1.2.5.1 Fasilitas Rekomendasi Pendaftaran Perusahaan (Pasar, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan) P.3.1.2.5.2 Fasilitas Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
---	--

P.3.1.2.6 PEMBINAAN PELAKU USAHA PERDAGANGAN (PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO, EKSPORTIR, DAN IMPORTIR	P.3.1.2.6.1 Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan P.3.1.2.6.2 Fasilitas Bantuan Modal dan Sarana Usaha Lainnya
---	--

2.14.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4

P.3.1.1.1 PERENCANAAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KOTA	P.3.1.1.1.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK)
P.3.1.1.2 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	P.3.1.1.1.2.1 Fasilitas Bantuan Usaha Modal dan Sarana Linnya

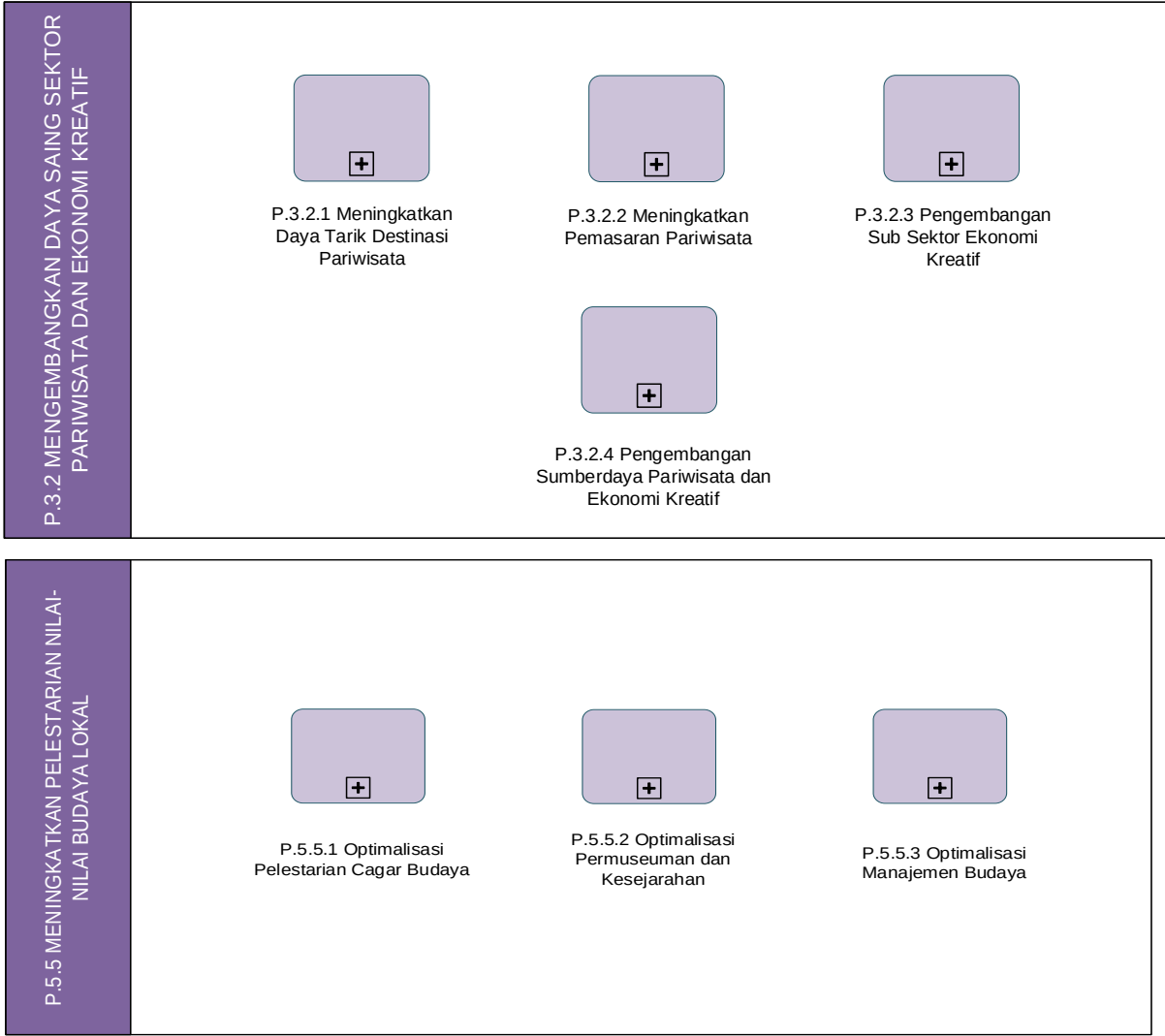


2.15. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

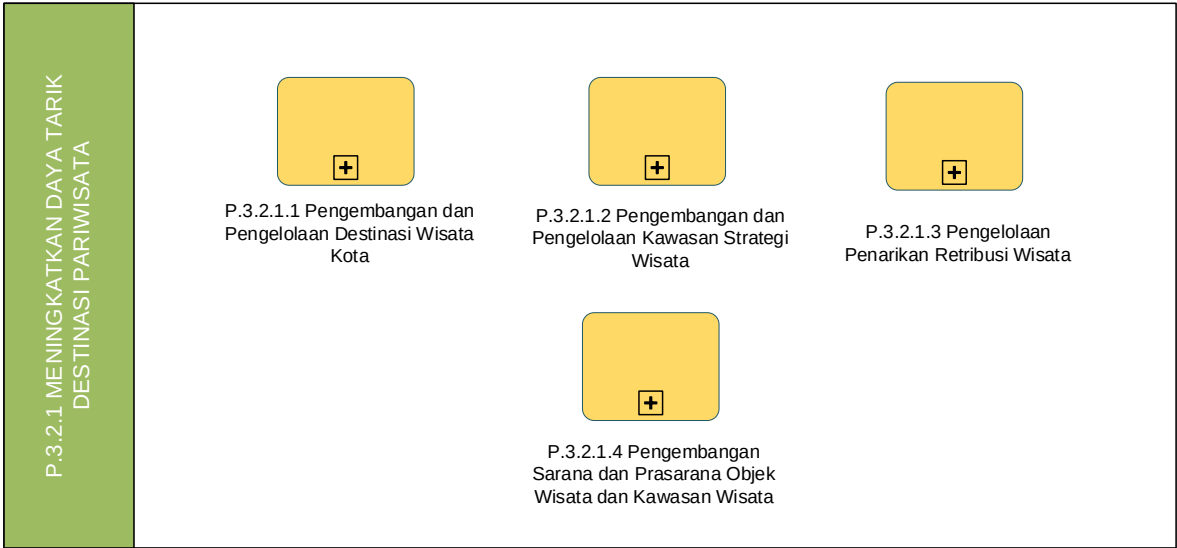
2.15.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

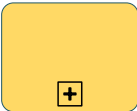
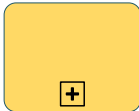
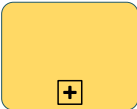
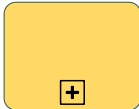


2.15.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



2.15.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



P.3.2.2 MENINGKATKAN PEMASARAN PARIWISATA	 P.3.2.2.1 Pemilihan Duta Wisata  P.3.2.2.2 Optimalisasi Pemasaran/Promosi Pariwisata
P.3.2.3 PENGEMBANGAN SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF	 P.3.2.3.1 Optimalisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Sub Sektor Ekonomi Kreatif
P.3.2 MENINGKATKAN PEMASARAN PARIWISATA	 P.3.2.1 Pemilihan Duta Wisata  P.3.2.2 Optimalisasi Pemasaran/Promosi Pariwisata
P.5.5.1 OPTIMALISASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	 P.5.5.1.1 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya  P.5.5.1.2 Layanan Cagar Budaya



2.15.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



P.3.2.2.2 OPTIMALISASI PEMASARAN/PROMOSI PARIWISATA	P.3.2.2.1.1 Penyediaan dan Publikasi Informasi Pariwisata P.3.2.2.1.2Koordinasi Promosi Pariwisata Dalam Negeri maupun Luar Negeri
P.3.2.4.1 PENGEMBANGAN LEMBAGA KEPARIWISATAAN	P.3.2.4.1.1 Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
P.5.5.1.1 PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	P.5.5.1.1.1 Pemeliharaan Cagar Budaya P.5.5.1.1.2 Pengembangan dan Pembangunan Sarana Prasarana Cagar Budaya P.5.5.1.1.3 Pendataan dan Monitoring Benda Cagar Budaya
P.5.5.1.2 LAYANAN CAGAR BUDAYA	P.5.5.1.2.1 Pendaftaran Cagar Budaya P.5.5.1.2.2 Fasilitasi Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah

P.5.5.2.1 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN MUSEUM	P.5.5.2.1.1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Koleksi Museum P.5.5.2.1.2 Pembangunan dan Pemeliharaan Museum
P.5.5.2.3 MENINGKATKAN PEMBINAAN SEJARAH	P.5.5.2.3.1 Penyediaan dan Publikasi Informasi Persejarahan Kota
P.5.5.3.1 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN LOKAL	P.5.5.3.1.1 Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal P.5.5.3.1.2 Pelestarian dan Perlindungan Warisan Budaya P.5.5.3.1.3 Penyediaan dan Publikasi Informasi Kebudayaan Lokal yang terupdate

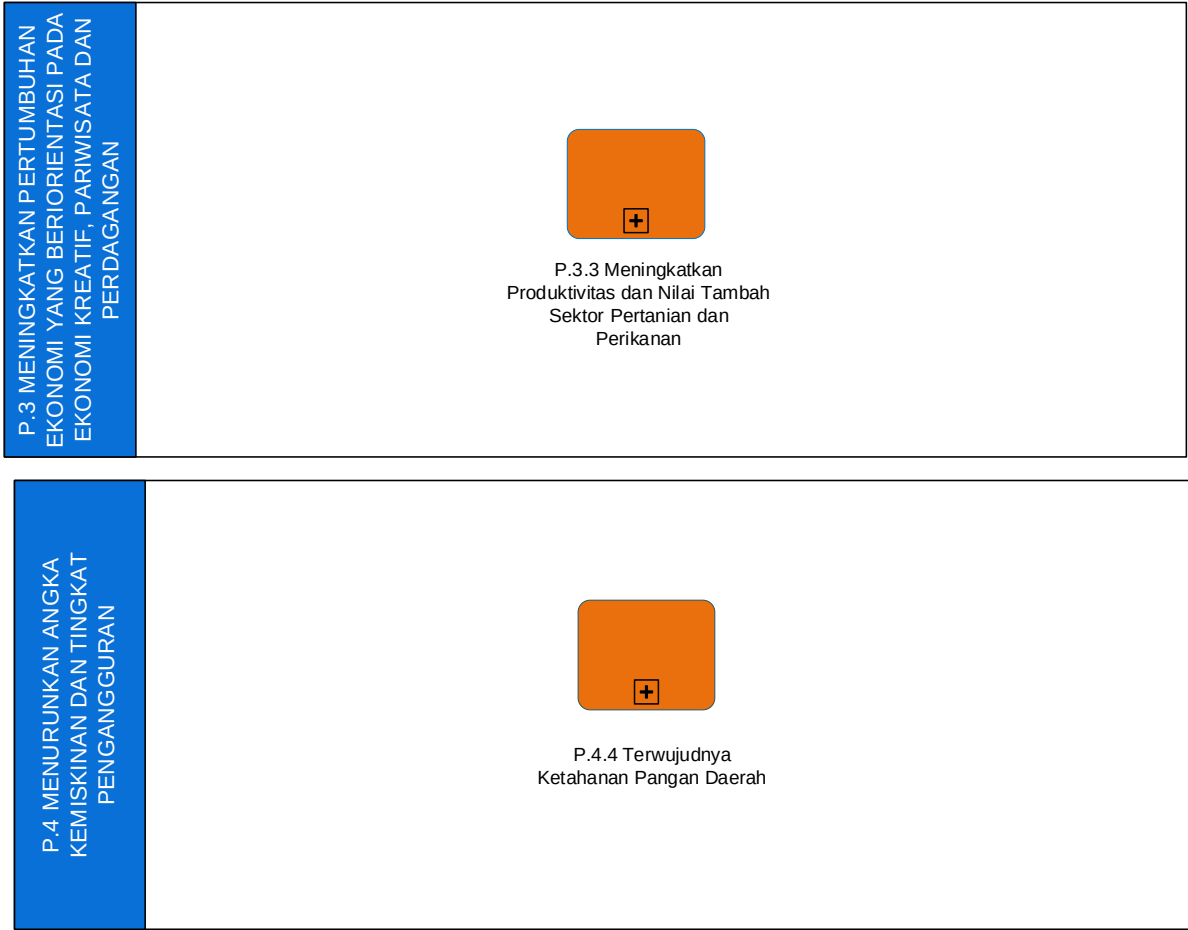


2.15.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4

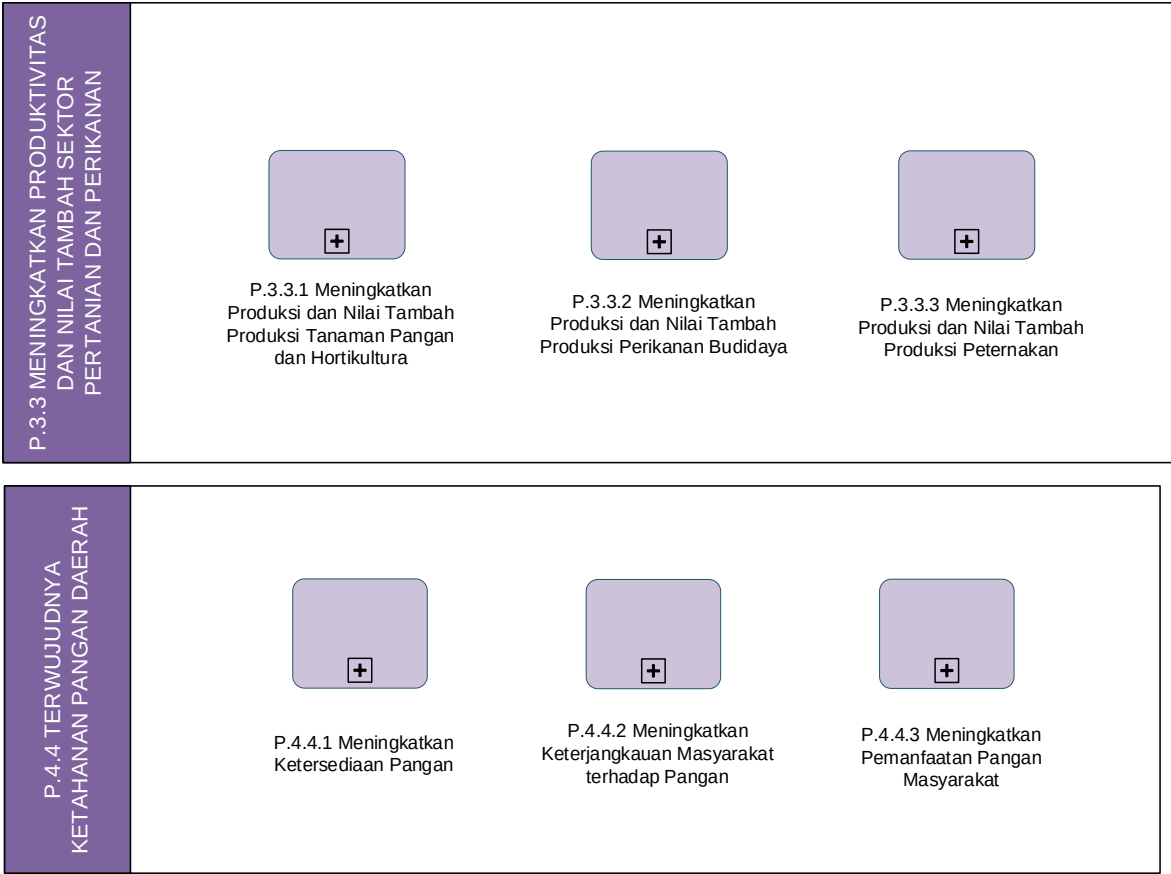


2.16. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

2.16.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



2.16.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



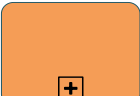
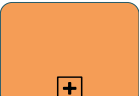
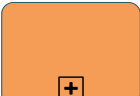
2.16.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2





2.16.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



P.3.3.2.1 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN BUDIDAYA	 P.3.3.2.1.1 Pengelolaan Perikanan Budidaya  P.3.3.2.1.2 Kebijakan Pengelolaan Perikanan Budidaya  P.3.3.2.1.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
P.3.3.2.2 PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK PERIKANAN	 P.3.3.2.2.1 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan  P.3.3.2.2.2 Pengendalian Perizinan Usaha Perikanan Budaya  P.3.3.2.2.3 Pengelolaan data statistik perikanan budidaya
P.3.3.4.1 PENINGKATAN PRODUKSI DAN HASIL PETERNAKAN	 P.3.3.4.1.1 Pengelolaan Budidaya Peternakan  P.3.3.4.1.2 Pengelolaan Data Statistik Peternakan  P.3.3.4.1.3 Penyediaan Fasilitas Pelayanan terkait Peternakan
P.3.3.4.2 PENGEMBANGAN USAHA PENGELOLAAN HASIL PETERNAKAN	 P.3.3.4.2.1 Pendampingan Izin Usaha Peternakan  P.3.3.4.2.2 Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Produk Olahan Asal Hewan  P.3.3.4.2.3 Fasilitas Permodalan dan Daya Saing

P.3.3.4.3 MENINGKATKAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER	P.3.3.4.3.1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan (Zoonosies) P.3.3.4.3.2 Pengawasan Produk Asal Hewan P.3.3.4.3.3 Fasilitasi Layanan RPH yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
P.4.4.1.1 PENGELOLAAN DATA KETERSEDIAAN PANGAN	P.4.4.1.1.1 Penyediaan Informasi Stok dan Ketersediaan Pangan P.4.4.1.1.2 Analisis NBM dan PPH Ketersediaan
P.4.4.2.1 PENGEMBANGAN AKSES PANGAN	P.4.4.2.1.1 Penyediaan Informasi Pemantauan Harga Sembako P.4.4.2.1.2 Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya P.4.4.2.1.3 Pemantauan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya P.4.4.2.1.4 Penyaluran Pangan Pokok atau Liannya
P.4.4.2.2 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI	P.4.4.2.2.1 Pembinaan Kelembagaan Usaha Pangan dan Toko Tani

P.4.4.2.3 PENANGANAN RAWAN PANGAN	 P.4.4.2.3.1 Analisa Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan  P.4.4.2.3.2 Intervensi Kerawanan Pangan
P.4.4.3.1 PENGANEKARAGAMAN PANGAN	 P.4.4.3.1.1 Diversifikasi Pangan dan Perbaikan Pola Konsumsi
P.4.4.3.2 PENGOPTIMALAN KONSUMSI PANGAN	 P.4.4.3.2.1 Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita
P.4.4.3.3 PENINGKATAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	 P.4.4.3.3.1 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

2.16.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



P.3.3.2.1.1 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	 P.3.3.2.1.1.1 Pelatihan Budidaya, Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
P.3.3.2.1.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	 P.3.3.2.1.2.1 pengelolaan Perikanan Budidaya  P.3.3.2.1.2.2 pemberdayaan dan pembudidaya Perikanan Budidaya
P.3.3.2.1.3 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN	 P.3.3.2.1.3.1 Inventarisasi Perencanaan Kebutuhan Sarpras Perikanan
P.3.3.2.2.1 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	 P.3.3.2.2.1.1 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  P.3.3.2.2.1.2 pembinaan atau pelatihan disverifikasi hasil produk olahan perikanan  P.3.3.2.2.1.3 Pemasaran Hasil Olahan Perikanan

P.3.3.2.2.2 PENGENDALIAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN BUDAYA	 P.3.3.2.2.2.1 Pemberian Rekom perizinan usaha perikanan budidaya	 P.3.3.2.2.2.2 Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya
---	--	--

P.3.3.4.1.1 PENGELOLAAN BUDIDAYA PETERNAKAN	 P.3.3.4.1.1.1 Penyediaan Bibit Peternakan yang Unggul	 P.3.3.4.1.1.2 Pembinaan dan Pendampingan Budidaya Peternakan	 P.3.3.4.1.1.3 Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Pakan, Hijauan Pakan Ternak dan Obat Hewan
---	---	--	---

P.3.3.4.1.3 PENYEDIAAN FASILITASI PELAYANAN TERKAIT PETERNAKAN	 P.3.3.4.1.3.1 Fasilitasi Layanan IB, PKB dan ATR	 P.3.3.4.1.3.2 Fasilitasi Pengujian Pakan Ternak	 P.3.3.4.1.3.3 Fasilitasi Pengujian Laboratorium Produk Peternakan
--	--	---	---

P.3.3.4.3.1 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN (ZONOSIES)	 P.3.3.4.3.1.1 Fasilitasi Perawatan, Pemeriksaan, Pengobatan dan Vaksinasi Ternak dan Hewan Lainnya	 P.3.3.4.3.1.2 Pelayanan Puskesmas/Klinik Jewan	 P.3.3.4.3.1.3 Pengendalian Penyakit Hewan (Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan)
---	--	--	--

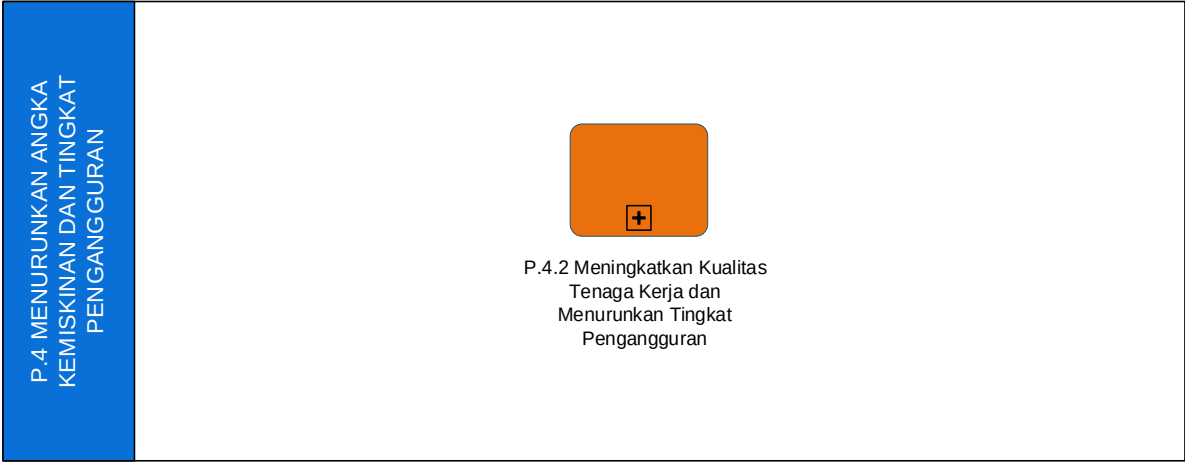
P.3.3.4.3.2 PENGAWASAN PRODUK ASAL HEWAN	 P.3.3.4.3.2.1 Pengawasan Produk Asal Hewan  P.3.3.4.3.2.2 Pengawasan Peredaran Produk Hewan  P.3.3.4.3.2.3 Pembinaan dan Pendampingan NKV dan Sertifikat Halal  P.3.3.4.3.2.4 Sosialisasi tentang Higiene dan Sanitasi Peternakan
P.4.4.2.2.1 PEMBINAAN KELEMBAGAAN USAHA PANGAN DAN TOKO TANI	 P.4.4.2.2.1.1 Penyelenggaraan Pasar Tani
P.4.4.2.3.1. ANALISA DATA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	 P.4.4.2.3.1.1 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ FSVA (Food Security dan Vulnerability Atlas)  P.4.4.2.3.1.2 SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)
P.4.4.2.3.2 INTERVENSI KERAWANAN PANGAN	 P.4.4.2.3.2.1 Penyaluran Bantuan Sembako/Intervensi Stunting/Intervensi Gizi Buruk



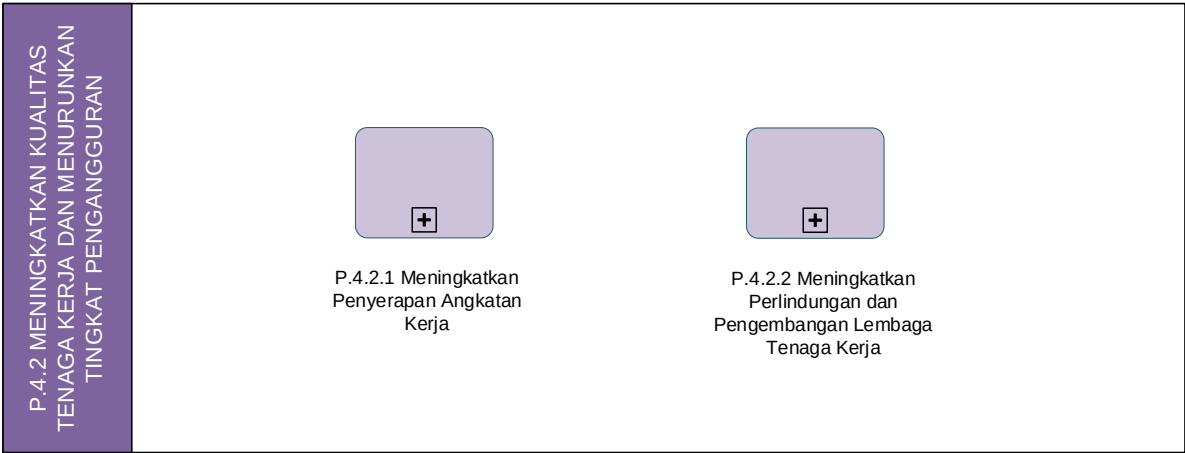
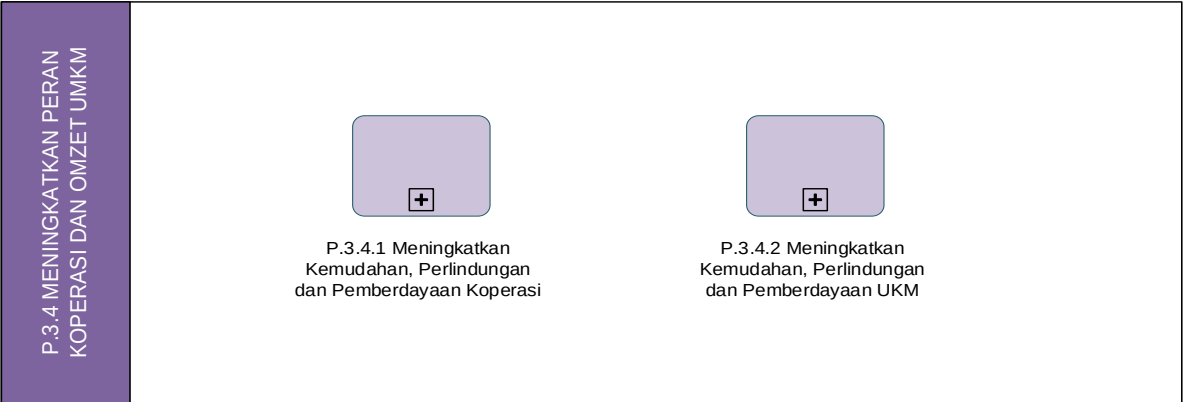
2.17. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

2.17.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

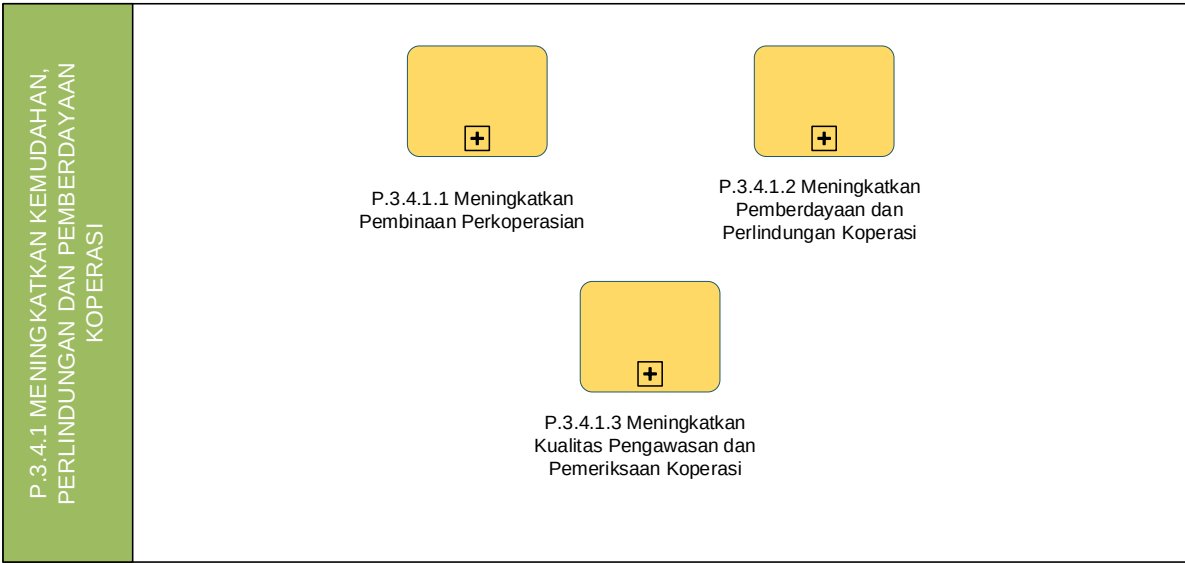


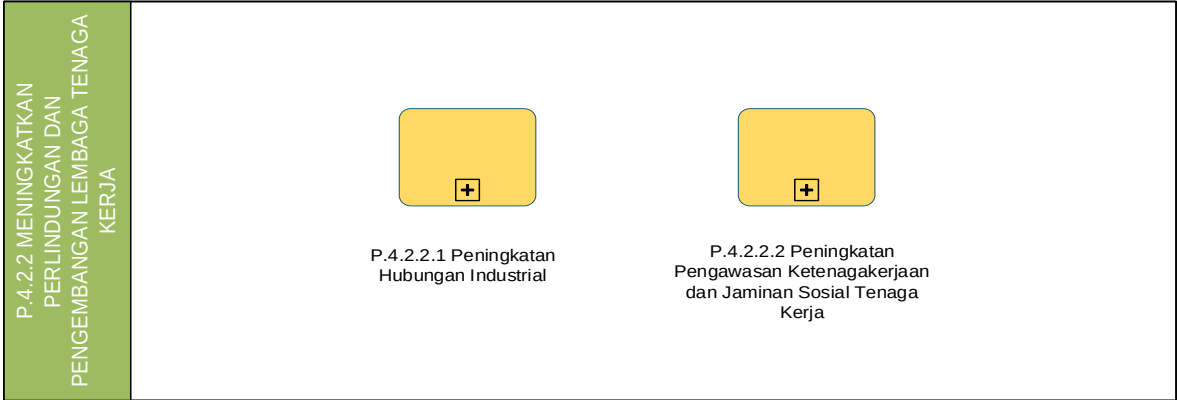
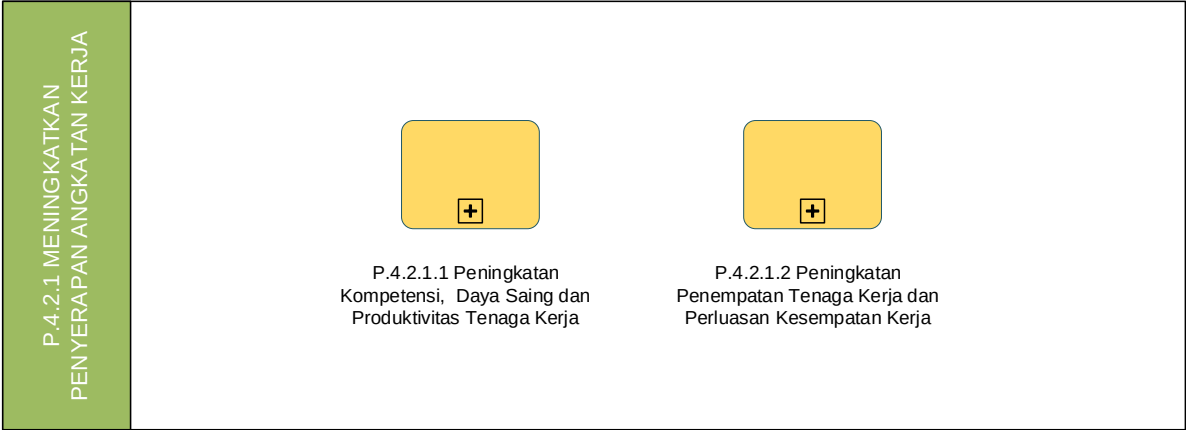
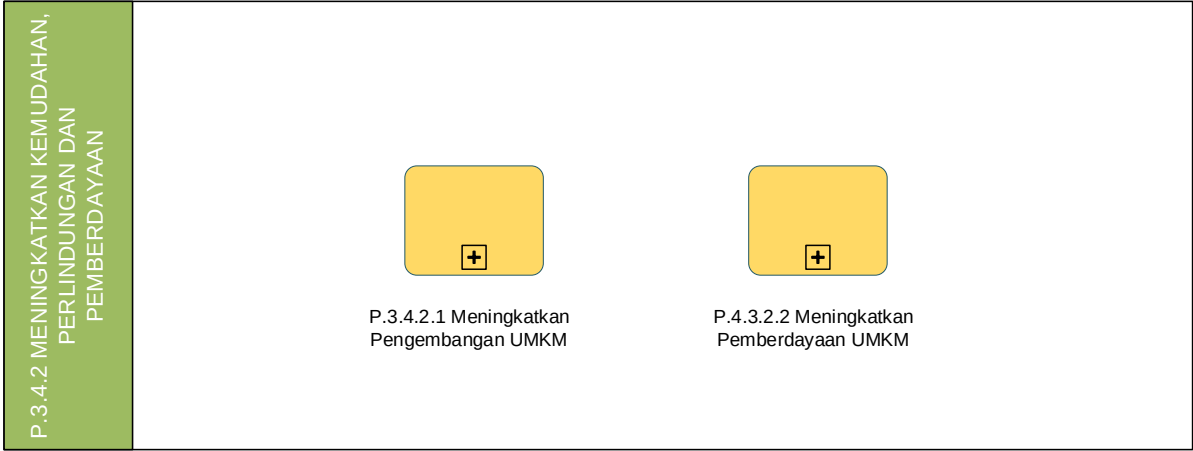


2.17.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

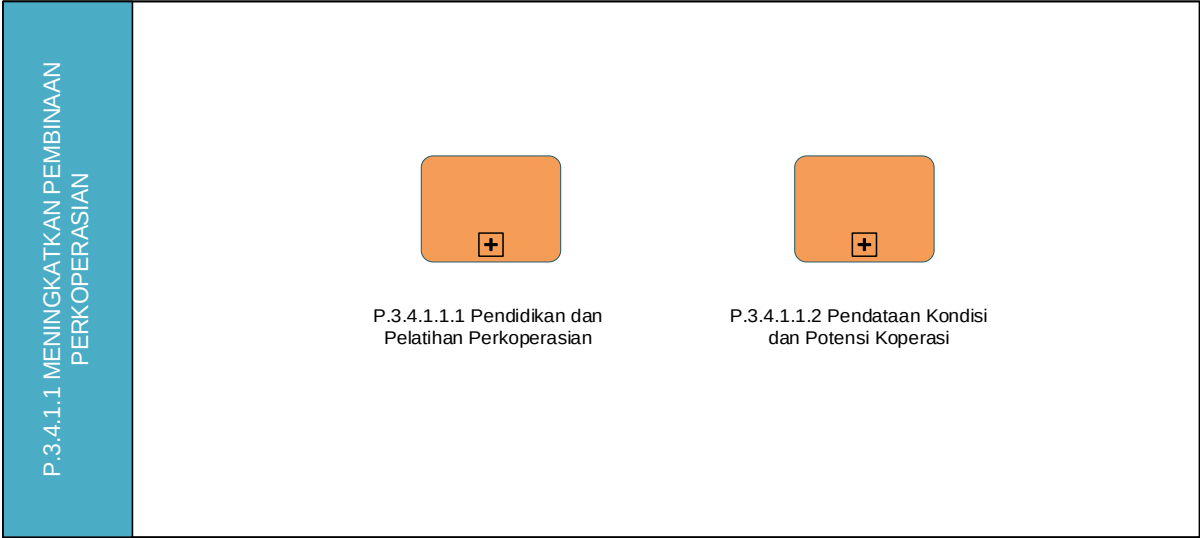


2.17.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2





2.17.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



P.3.4.1.2 MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	 P.3.4.1.2.1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi  P.3.4.1.2.2 Pengelolaan Perlindungan Koperasi
P.3.4.1.3 MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	 P.3.4.1.3.1 Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  P.3.4.1.3.2 Penilaian Kesehatan Koperasi/ Koperasi Simpan Pinjam/Unit  P.3.4.1.3.3 Pengendalian Izin Perkoperasian  P.3.4.1.3.4 Pendampingan Koperasi dalam Melaksanakan RAT
P.3.4.2.1 MENINGKATKAN PENGEMBANGAN UMKM	 P.3.4.2.1.1 Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Usaha Mikro  P.3.4.2.1.2 Pengembangan Kewirausahaan
P.3.4.2.2 MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN UMKM	 P.3.4.2.2.1 Pendataan dan Updating Usaha Mikro  P.3.4.2.2.2 Fasilitasi Kemitraan bagi Usaha Mikro  P.3.4.2.2.3 Fasilitasi Pendampingan Usaha dan Pengembangan Kerjasama  P.3.4.2.2.4 Peningkatan Akses Pasar Usaha Mikro

P.4.2.1.1 PENINGKATAN KOMPETENSI, DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	 P.4.2.1.1.1 Perencanaan Ketenagakerjaan  P.4.2.1.1.2 Fasilitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi  P.4.2.1.1.3 Fasilitas Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri  P.4.2.1.1.4 Pengendalian dan Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja
P.4.2.1.2 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	 P.4.2.1.2.1 Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan  P.4.2.1.2.2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
P.4.2.2.1 PENINGKATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	 P.4.2.2.1.1 Pelaksanaan Hubungan Industrial  P.4.2.2.1.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  P.4.2.2.1.3 Fasilitas Pendaftaran Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
P.4.2.2.2 PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL	 P.4.2.2.2.1 Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan  P.4.2.2.2.2 Pembinaan dan Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.17.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



P.3.4.2.1.1 FASILITASI PEMBINAAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	 P.3.4.2.1.1.1 Fasilitas Pembinaan Pengembangan Produksi dan Pengolahan Usaha  P.3.4.2.1.1.2 Fasilitas Pembinaan Pengembangan Pemasaran  P.3.4.2.1.1.3 Fasilitas Pembinaan Pengembangan SDM Usaha Mikro  P.3.4.2.1.1.4 Fasilitas Pembinaan Pengembangan Desain dan Teknologi
P.3.4.2.2.1 PENDATAAN DAN UPDATING USAHA MIKRO	 P.3.4.2.2.1.1 Pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)  P.3.4.2.2.1.2 Pendataan Usaha Mikro
P.3.4.2.2.3 FASILITASI PENDAMPINGAN USAHA DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA	 P.3.4.2.2.3.1 Pendampingan Kemudahan Perizinan Usaha bagi Usaha Mikro  P.3.4.2.2.3.2 Konsultasi dan Fasilitas Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro  P.3.4.2.2.3.3 Fasilitas Pendampingan Legalitas Usaha Mikro
P.3.4.2.2.4 PENINGKATAN AKSES PASAR USAHA MIKRO	 P.3.4.2.2.4.1 Penguatan Jaringan Kemitraan  P.3.4.2.2.4.2 Fasilitas Promosi Produk usaha mikro  P.3.4.2.2.4.3 Fasilitas Pameran dan Promosi Produk Usaha Mikro secara Digital

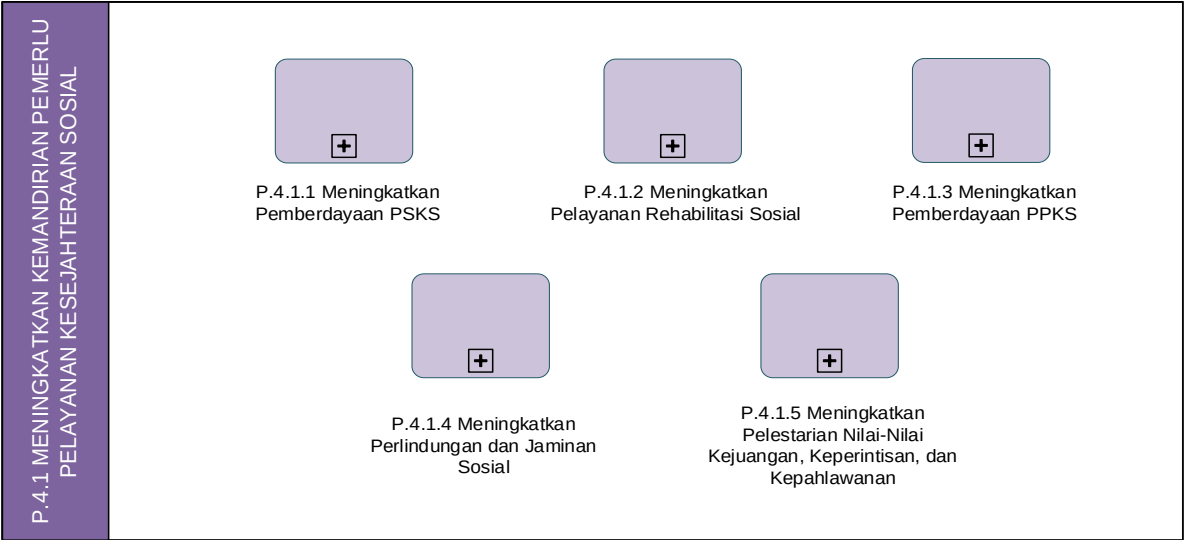
P.4.2.1.1.4 PENGENDALIAN DAN PENGUATAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA	 P.4.2.1.1.4.1 Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja  P.4.2.1.1.4.3 Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pelatihan Kerja
P.4.2.1.2.1 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN	 P.4.2.1.2.1.1 Penerbitan Kartu Tanda Pencari Kerja  P.4.2.1.2.1.2 Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)  P.4.2.1.2.1.3 Pendampingan dan Pembinaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)  P.4.2.1.2.1.4 Penyelenggaraan Pelayanan Antar Kerja
P.4.2.1.2.2 PENGCELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	 P.4.2.1.2.2.1 Pelaksanaan Bursa Kerja Online dan Offline
P.4.2.2.1.1 PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	 P.4.2.2.1.1.1 Sosialisasi Kesejahteraan dan Pengupahan serta Kepatuhan Syarat Kerja  P.4.2.2.1.1.2 Penyebarluasan Informasi dan Koordinasi Hubungan Industrial  P.4.2.2.1.1.3 Fasilitasi Koordinasi Hubungan Industrial melalui Lembaga Tripartiy dan Dewan Pengupahan Kota



2.18. DINAS SOSIAL
2.18.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

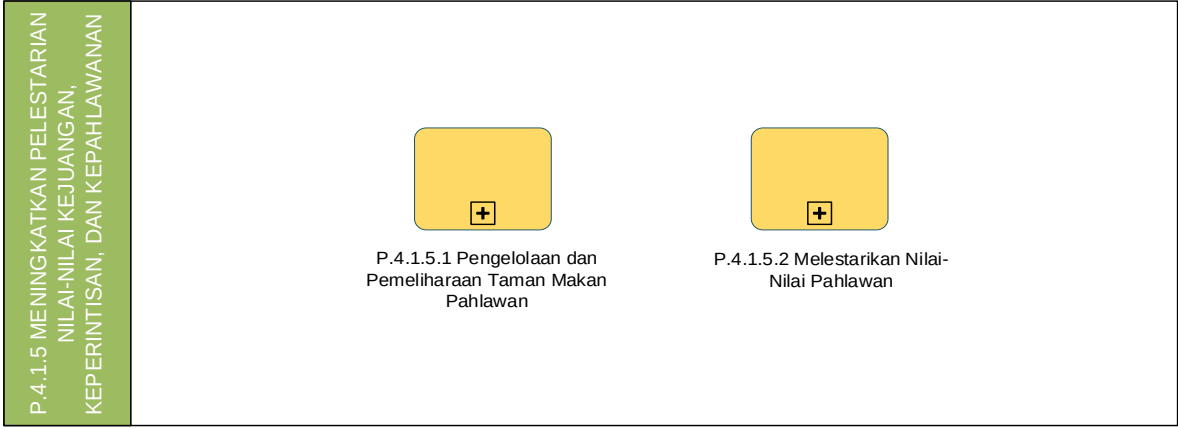


2.18.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

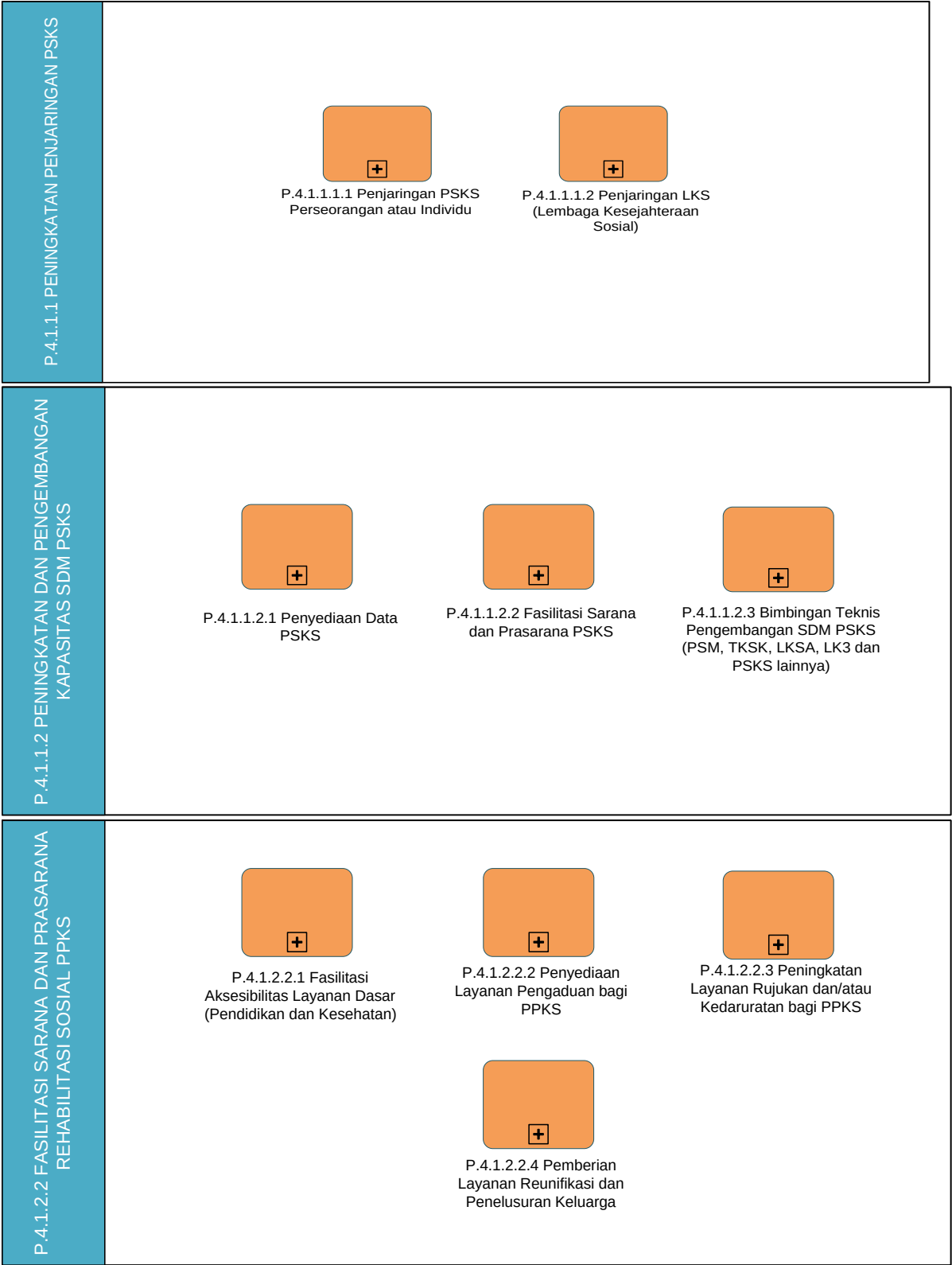


2.18.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2

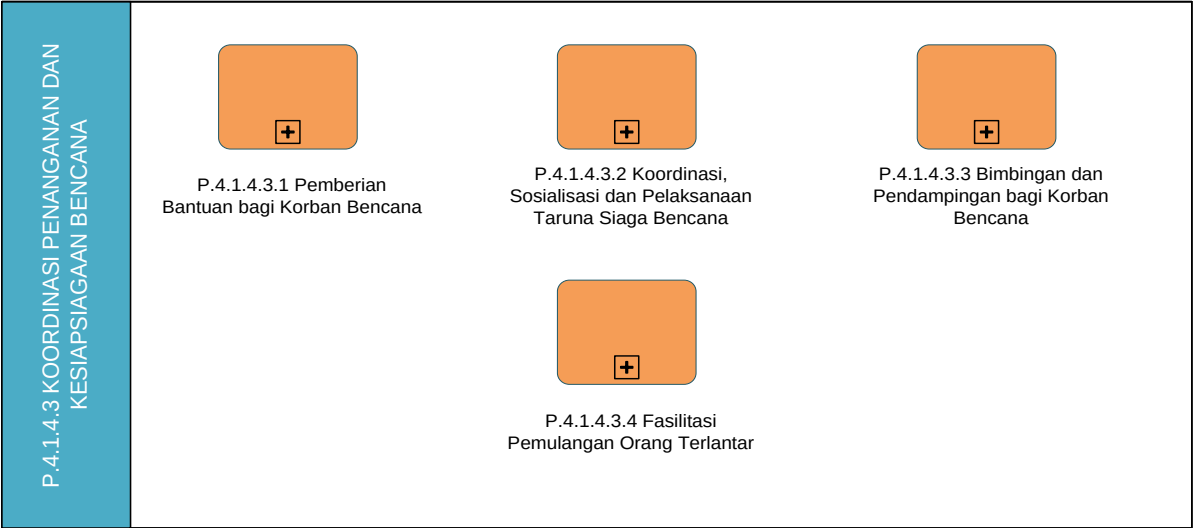




2.18.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



P.4.1.3.1 PENANGANAN FAKIR MISKIN	 P.4.1.3.1.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin
P.4.1.3.2 PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN	 P.4.1.3.2.1 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bagi PPKS  P.4.1.3.2.2 Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
P.4.1.4.1 PENYEDIAAN DATA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	 P.4.1.4.1.1 Koordinasi Data Kepesertaan PBPU-BP, PBI, luran
P.4.1.4.2 FASILITASI BANTUAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	 P.4.1.4.2.1 Pemeliharaan Anak Terlantar  P.4.1.4.2.2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga



2.18.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4

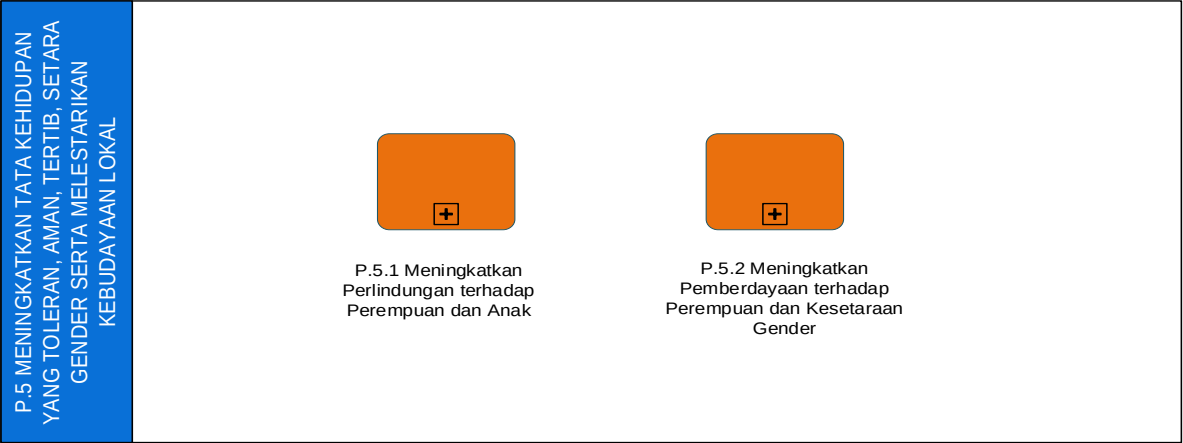




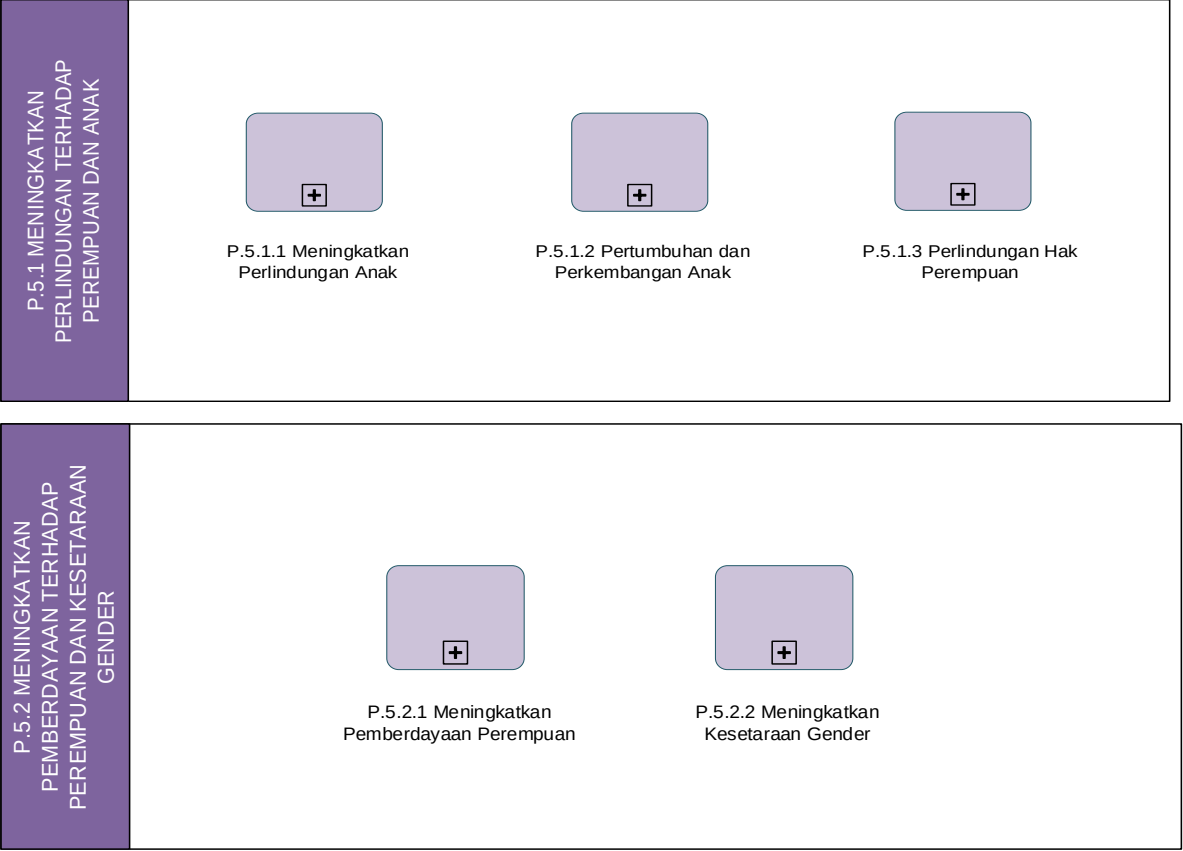
2.19. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.19.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

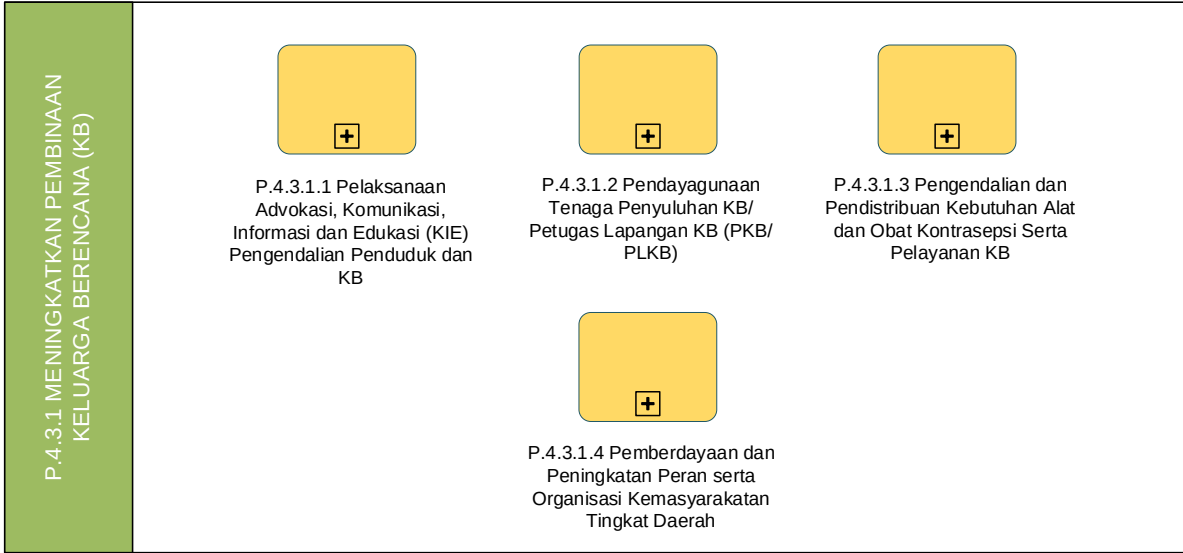


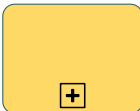
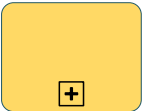


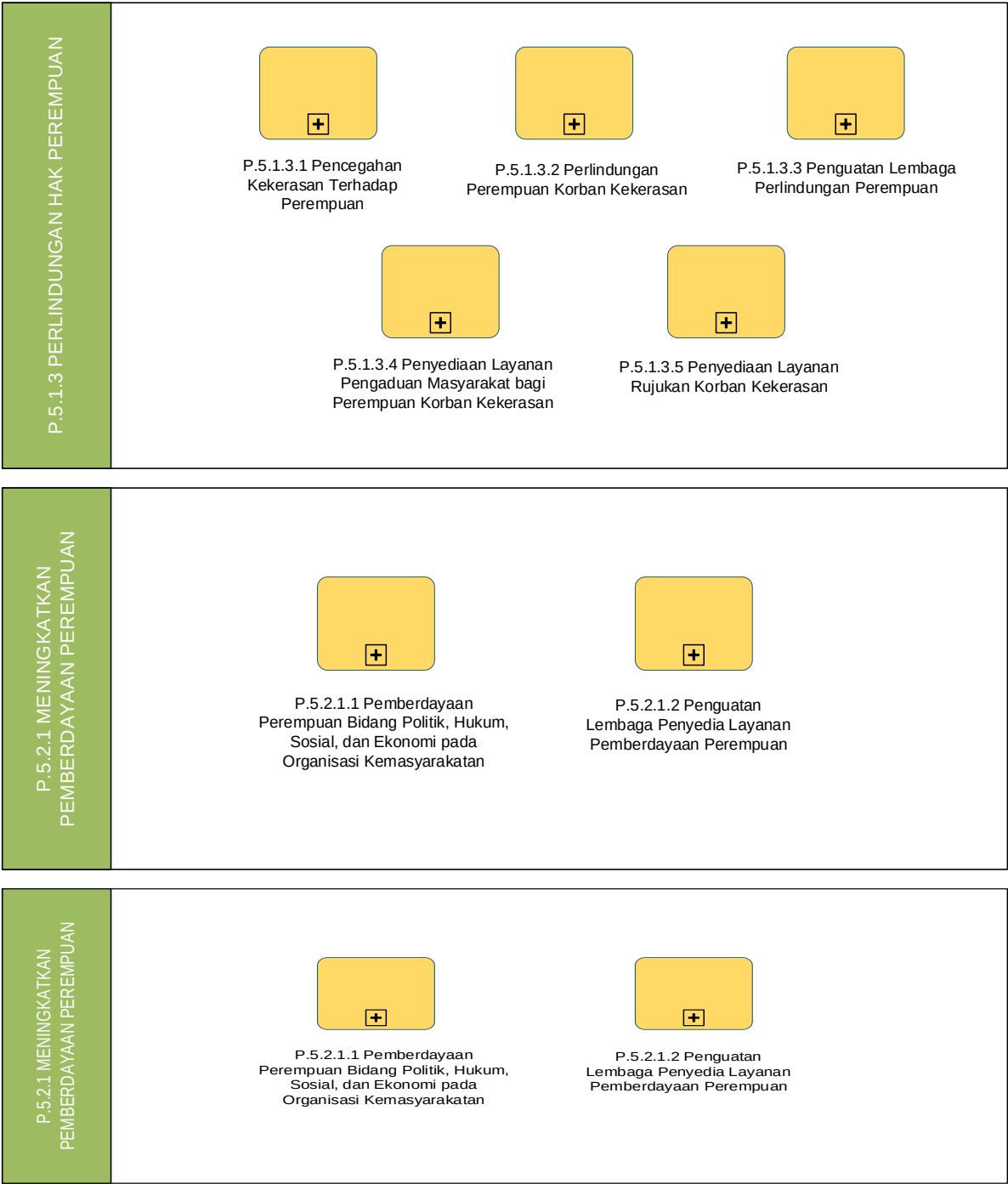
2.19.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



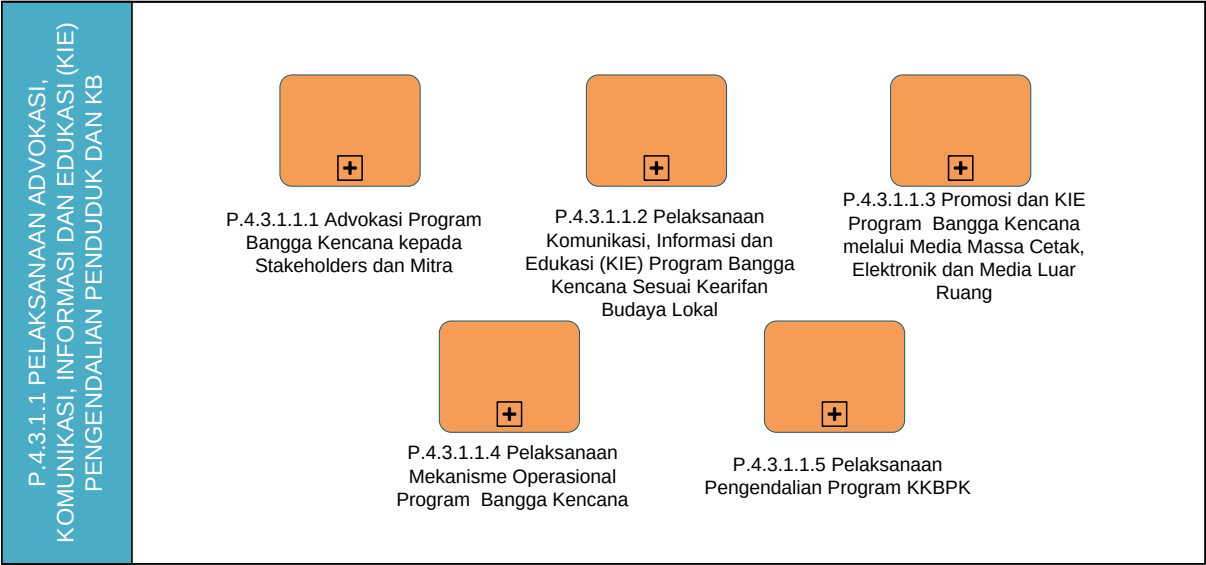
2.19.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



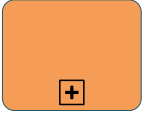
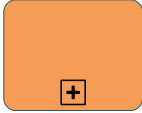
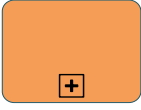
P.4.3.2 OPTIMALISASI PENGENDALIAN PENDUDUK	 P.4.3.2.1 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	 P.4.3.2.2 Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
P.4.3.3 MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	 P.4.3.3.1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	 P.4.3.3.2 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
P.5.1.1 MENINGKATKAN PERLINDUNGAN ANAK	 P.5.1.1.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	 P.5.1.1.2 Perlindungan Khusus Bagi Anak
	 P.5.1.1.3 Penguatan Lembaga Perlindungan Anak	 P.5.1.1.4 Penyediaan Layanan Rujukan Korban Kekerasan Anak
P.5.1.2 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK	 P.5.1.2.1 Pemenuhan Hak Anak (PHA)	 P.5.1.2.2 Peningkatan Kualitas Hidup Anak

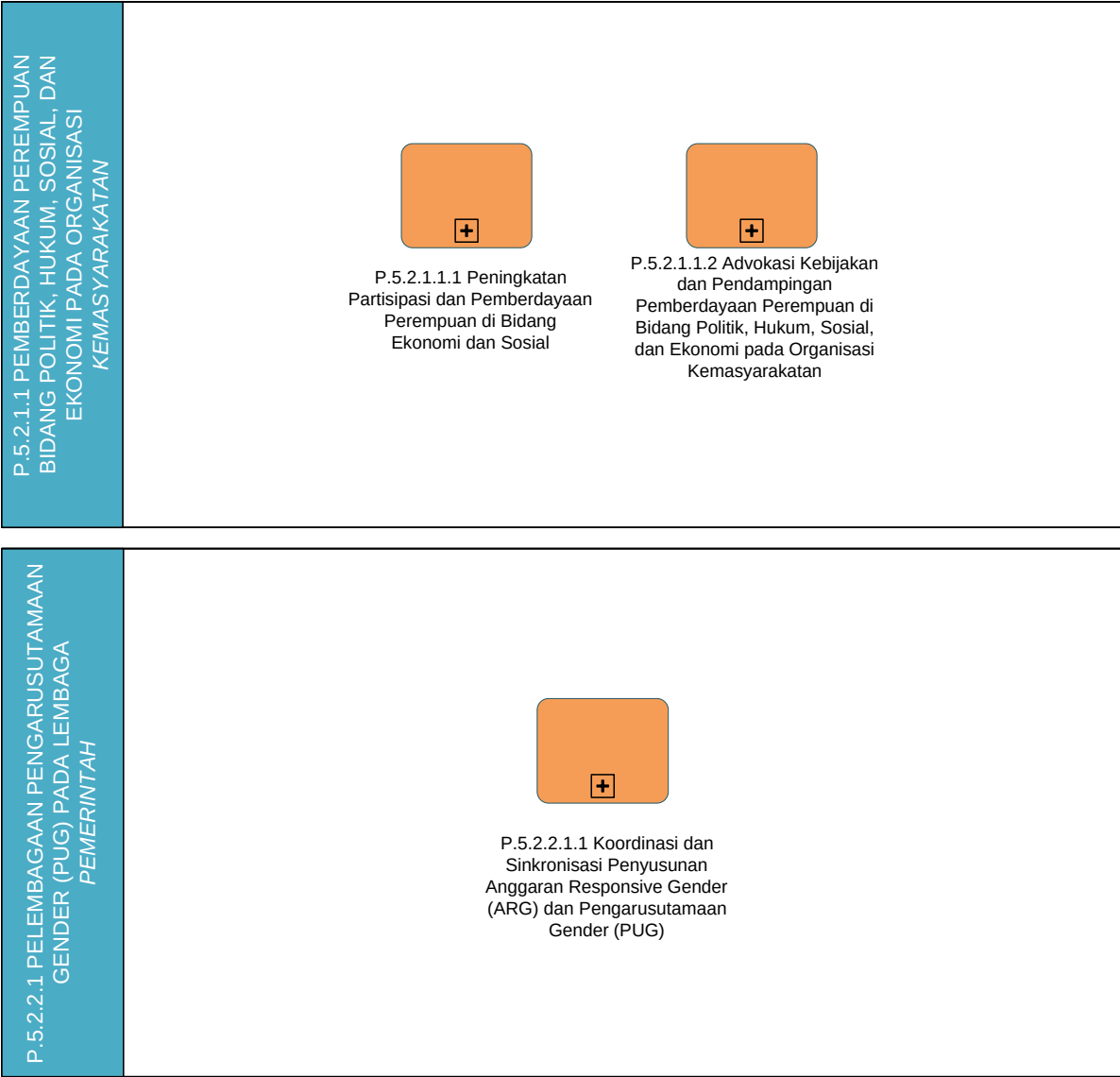


2.19.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3

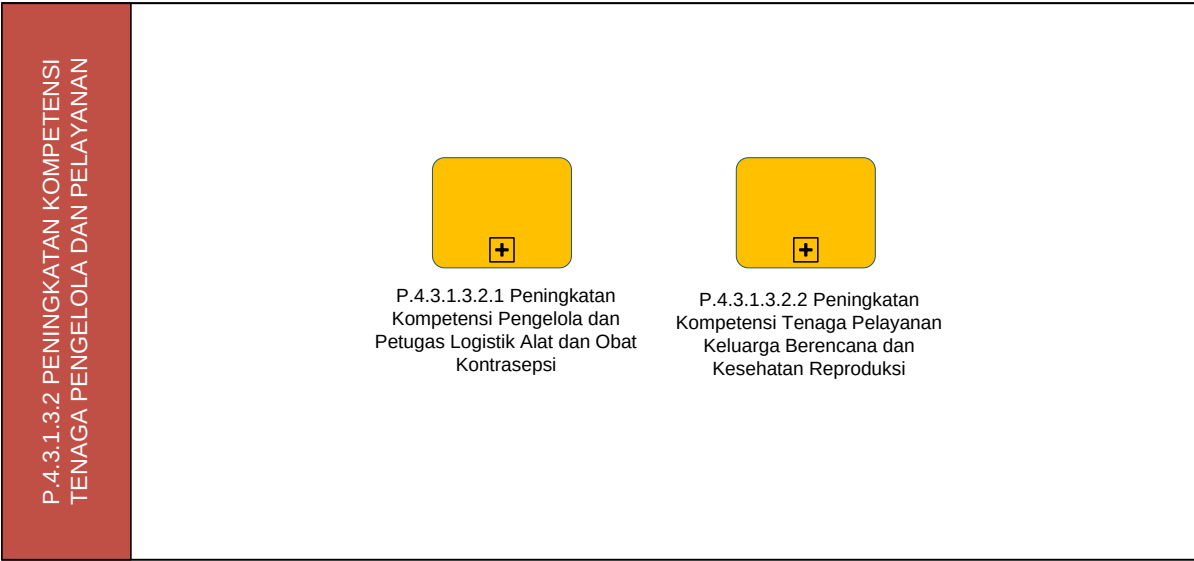


P.4.3.1.2 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/ PLKB)	P.4.3.1.2.1 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB P.4.3.1.2.2 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB P.4.3.1.2.3 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk PKB/PLKB
P.4.3.1.3 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAYANAN KB	P.4.3.1.3.1 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB P.4.3.1.3.2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengelola dan Pelayanan P.4.3.1.3.3 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan P.4.3.1.3.4 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Bereproduksi P.4.3.1.3.5 Peningkatan Kesertaan KB Pria
P.4.3.1.4 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH	P.4.3.1.4.1 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB P.4.3.1.4.2 Pembinaan Pasca Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi P.4.3.1.4.3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program atasi stunting di Kampung KB P.4.3.1.4.4 Fasilitasi Dapur Sehat
P.4.3.2.1 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK	P.4.3.2.1.1 Pengelolaan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga P.4.3.2.1.2 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

P.4.3.2.2 PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK	 P.4.3.2.2.1 Sinkronisasi Kebijakan Daerah terkait Pengendalian Kuantitas Penduduk  P.4.3.2.2.2 Peningkatan Kualitas Pendidikan Kependudukan melalui Jalur Pendidikan  P.4.3.2.2.3 Koordinasi Pelaksanaan Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)  P.4.3.2.2.4 Advokasi Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis kepada Pemangku Kepentingan
P.4.3.3.1 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	 P.4.3.3.1.1 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  P.4.3.3.1.2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan etahanan dan Kesejahteraan Keluarga  P.4.3.3.1.3 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola/ Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  P.4.3.3.1.4 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  P.4.3.3.1.5 Advokasi, Promosi, Sosialisasi dan Koordinasi Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)
P.4.3.3.2 PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	 P.4.3.3.2.1 Penguatan Kebijakan Daerah terkait Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  P.4.3.3.2.2 Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  P.4.3.3.2.3 Pemantauan Keluarga Beresiko Stunting  P.4.3.3.2.4 Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting
P.5.1.2.1 PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	 P.5.1.2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kota Layak Anak (KLA)



2.19.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



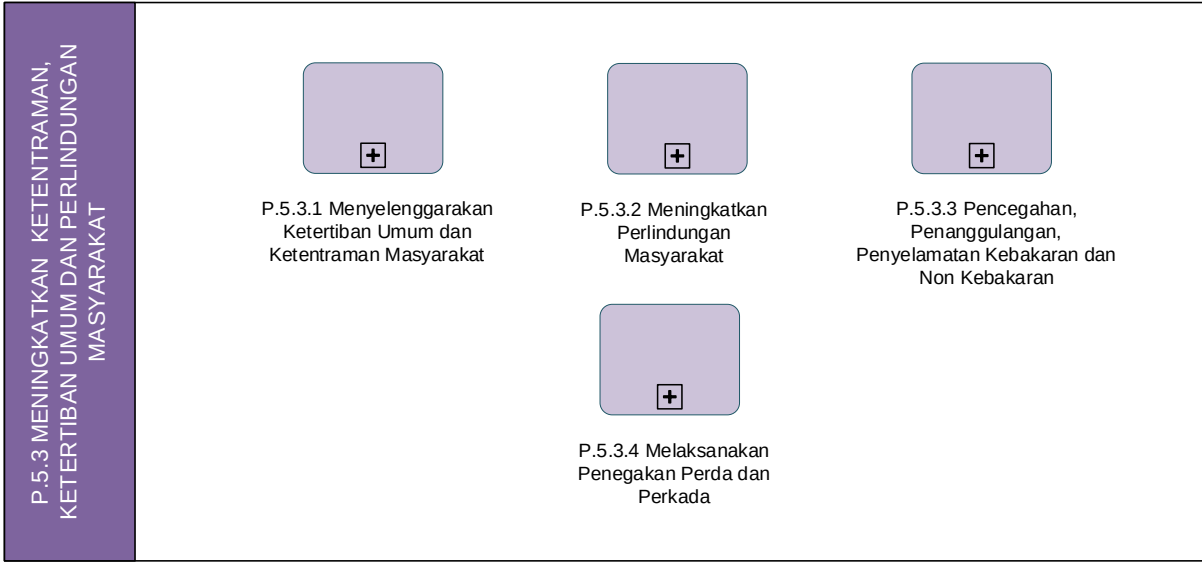
P.4.3.2.1.1 PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	P.4.3.2.1.1.1 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Daerah P.4.3.2.1.1.2 Pemetaan Data Kependudukan P.4.3.2.1.1.3 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga P.4.3.2.1.1.4 Pembinaan dan Pengawasan Data dan Sistem Informasi Keluarga P.4.3.2.1.1.5 Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga P.4.3.2.1.1.6 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian dan Pelayanan KB P.4.3.2.1.1.7 Grand Desain Pembangunan Kependudukan
---	---

2.20. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

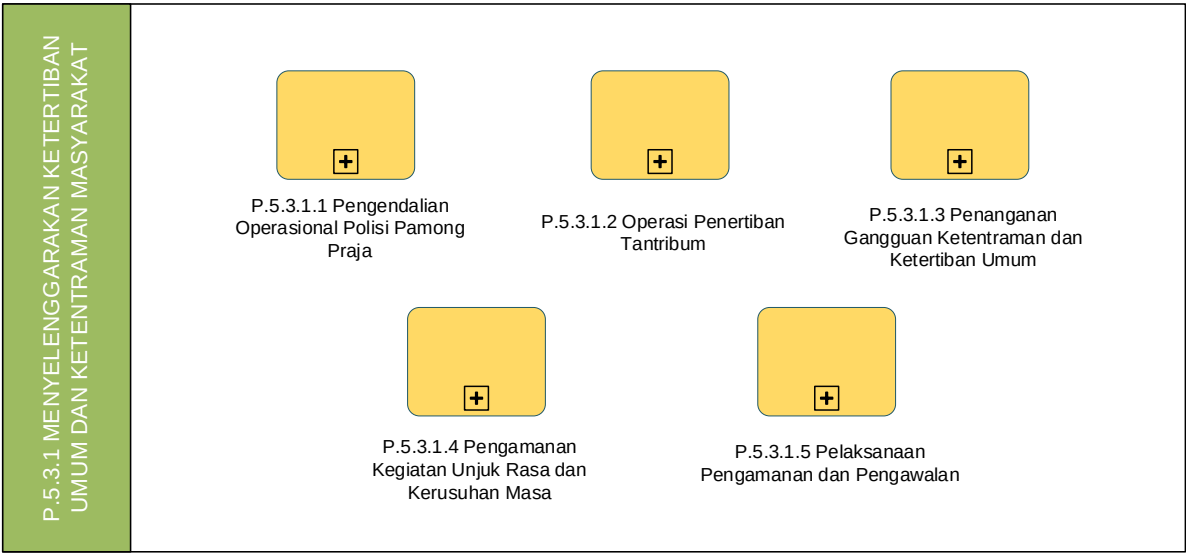
2.20.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

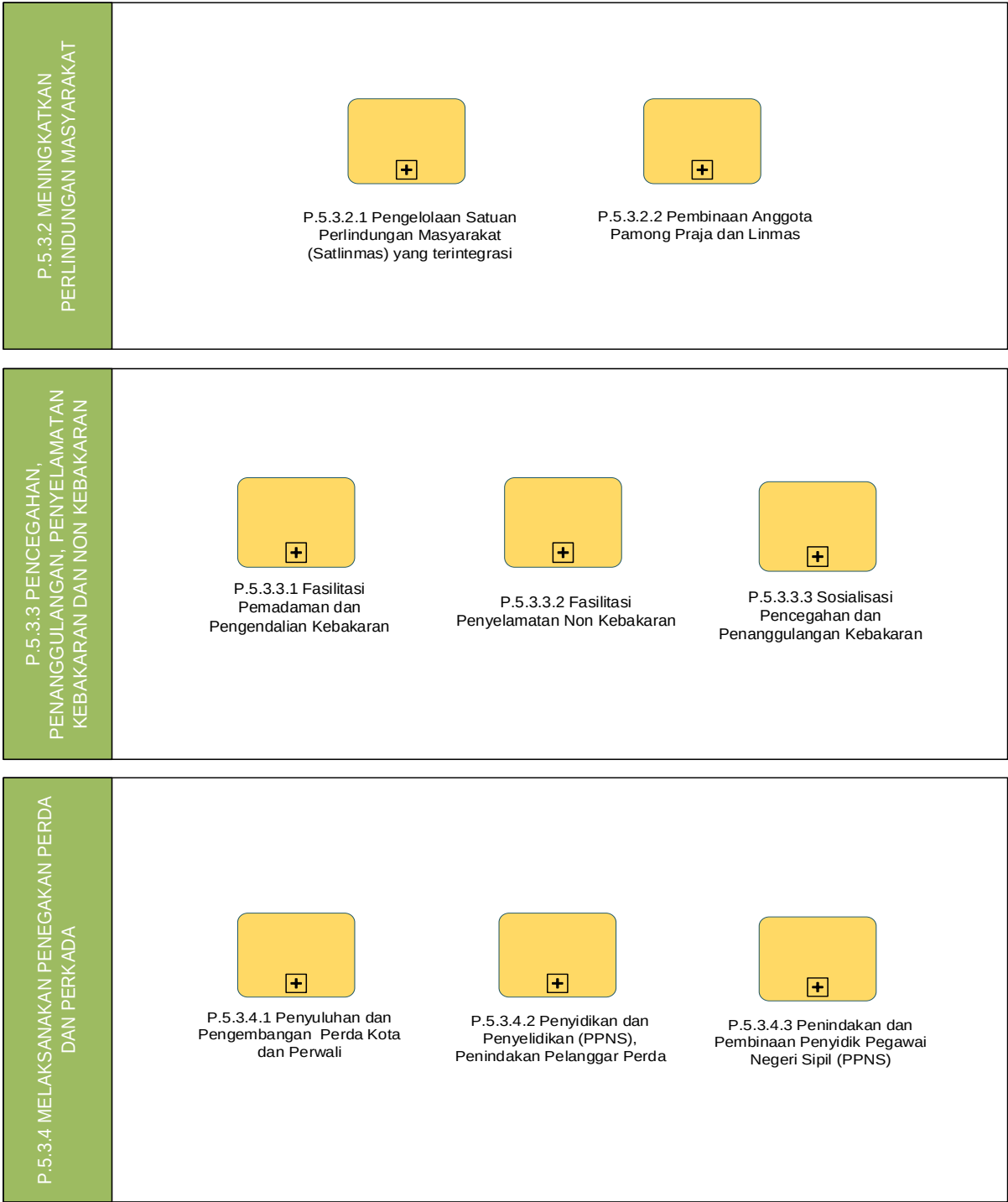


2.20.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



2.20.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2





2.20.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



P.5.3.1.2 OPERASI PENERTIBAN TANTRIBUM	 P.5.3.1.2.1 Pembinaan terhadap Pelanggar Ketertiban Masyarakat  P.5.3.1.2.2 Penyuluhan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
P.5.3.1.3 PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	 P.5.3.1.3.1 Penerimaan Aduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum
P.5.3.1.5 PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENGAWALAN	 P.5.3.1.5.1 Pengawasan Pejabat Daerah  P.5.3.1.5.2 Pengamanan Pejabat Daerah  P.5.3.1.5.3 Pengamanan Acara Penting Pemerintah Daerah  P.5.3.1.5.4 KoordinatorPengamanan Aset Daerah  P.5.3.1.5.5 Pengamanan Lokasi Kunjungan/Tempat Kerja Pemerintah Daerah
P.5.3.3.1 FASILITASI PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN	 P.5.3.3.1.1 Respon Cepat Penanggulangan Kejadian Kebakaran  P.5.3.3.1.2 Pemeliharaan Mobil Damkar Layak Fungsi  P.5.3.3.1.3 Penyediaan Sarpras Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan  P.5.3.3.1.4 Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran

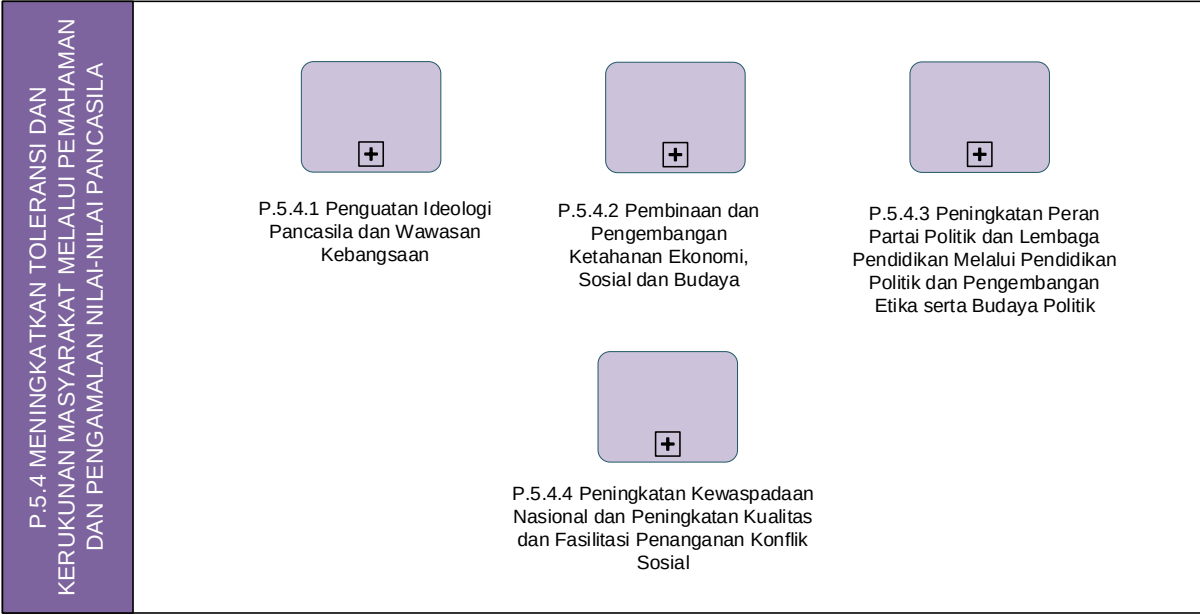
P.5.3.3.3 SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	 P.5.3.3.3.1 Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran
P.5.3.4.2 PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN (PPNS), PENINDAKAN PELANGGAR PERDA	 P.5.3.4.2.1 Tindak Lanjut Penanganan Gangguan Ketertiban Umum melalui Penindakan Non Justisial terhadap Warga Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum dan Objek Tertentu

2.21. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.21.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

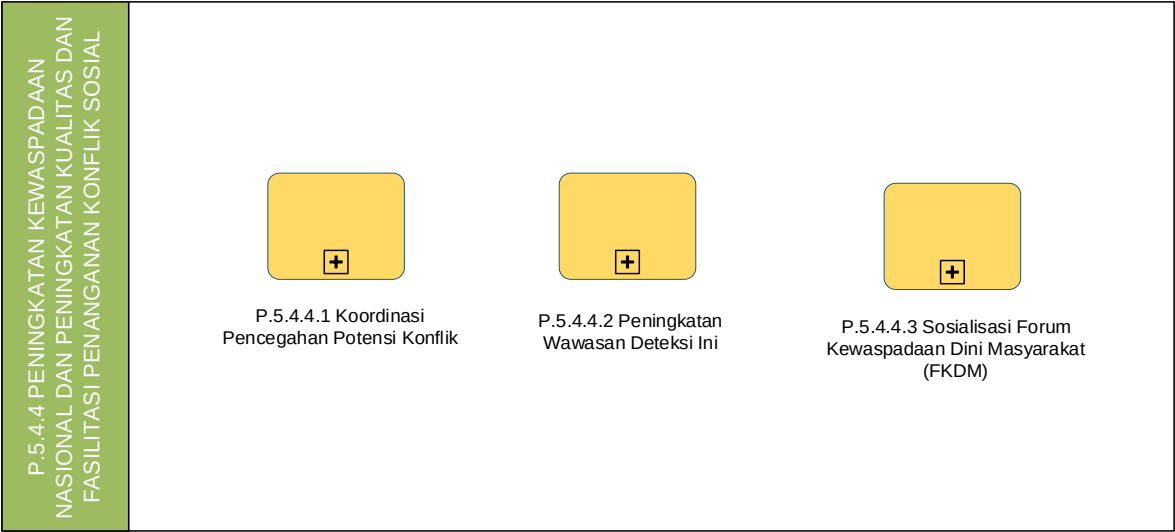
P.5 MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG TOLERAN, AMAN, TERTIB, SETARA GENDER SERTA MELESTARIKAN KEBUDAYAAN LOKAL	 P.5.4 Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Masyarakat melalui Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila
---	--

2.21.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

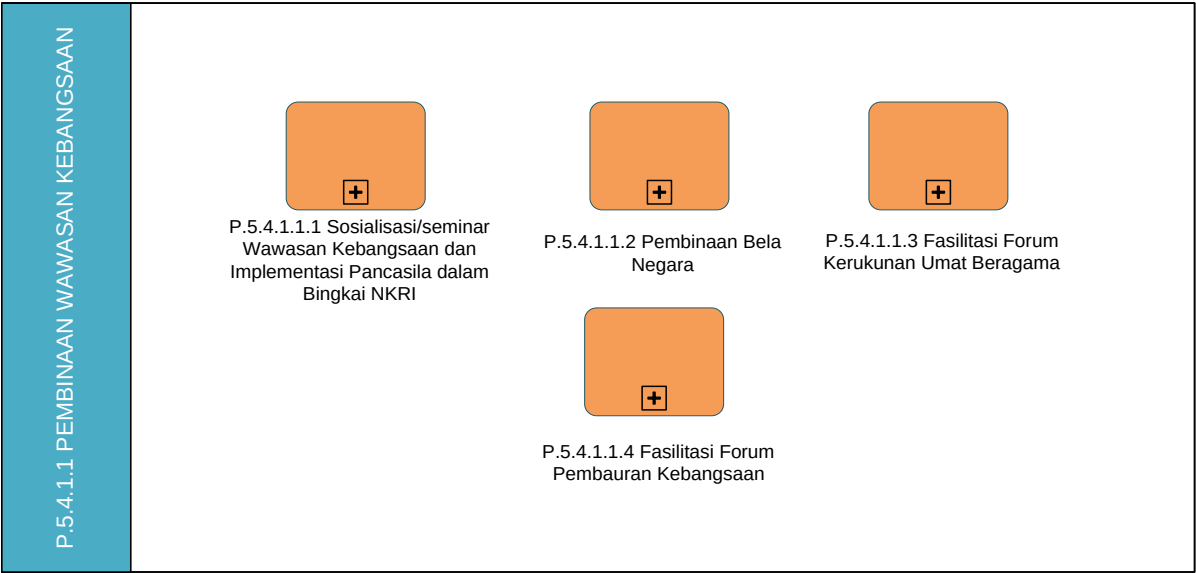


2.21.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2





2.21.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



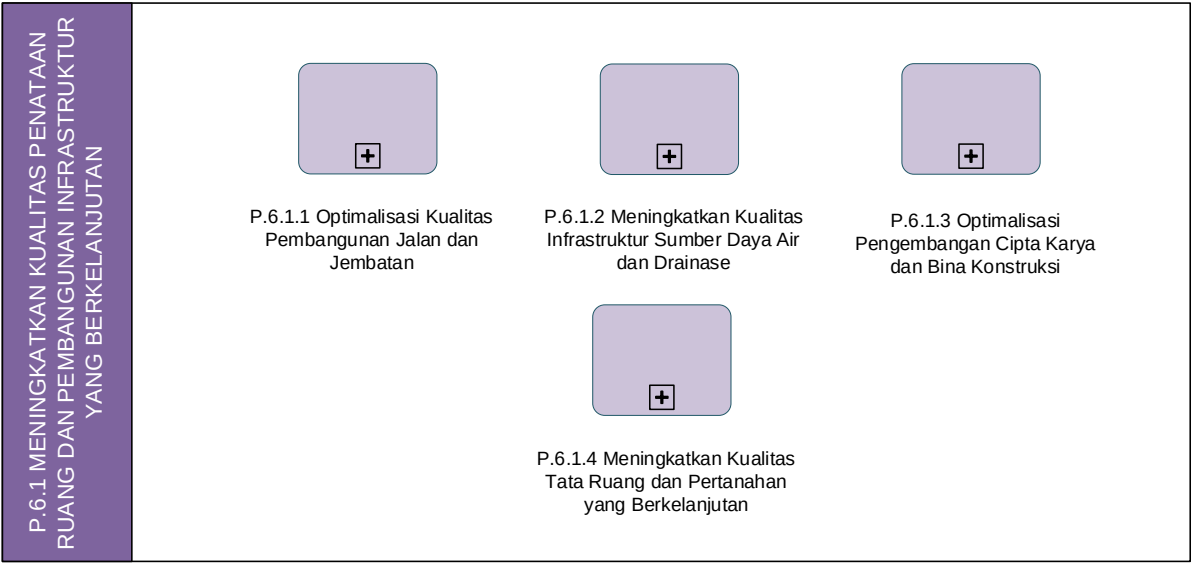
P.5.4.1.2 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	 P.5.4.1.2.1 Sosialisasi dan Pembinaan Ideologi Pancasila  P.5.4.1.2.2 Pelaksanaan Kegiatan Hari Bela Negara  P.5.4.1.2.3 Pembentukan Kampung Berkarakter Pancasila  P.5.4.1.2.4 Pembinaan bagi Paskibraka
P.5.4.3.1 PEMBINAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT	 P.5.4.3.1.1 Sosialisasi Pendidikan Politik  P.5.4.3.1.2 Hibah Parpol Tiap Tahun di Dewan  P.5.4.3.1.3 Hibah Bawaslu dan KPU untuk Tiap Pemilu
P.5.4.3.2 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ORMAS DAN ORSOSPOL	 P.5.4.3.2.1 Pemberdayaan Ormas Setiap Tahun
P.5.4.4.1 KOORDINASI PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK	 P.5.4.4.1.1 Pemantauan Kegiatan Demo  P.5.4.4.1.2 FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Setiap Tahun

2.22. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

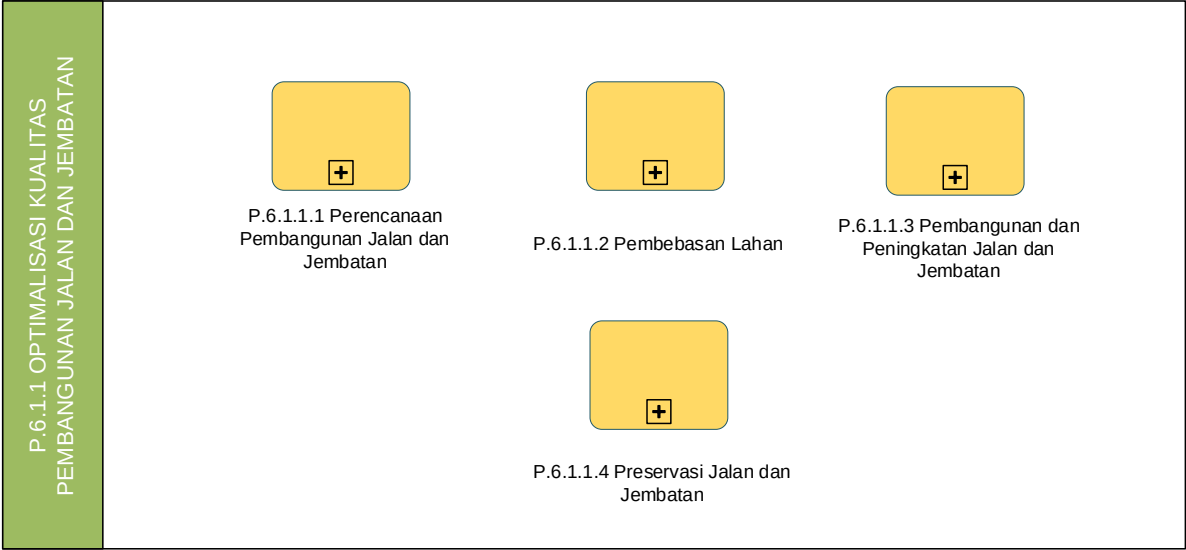
2.22.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

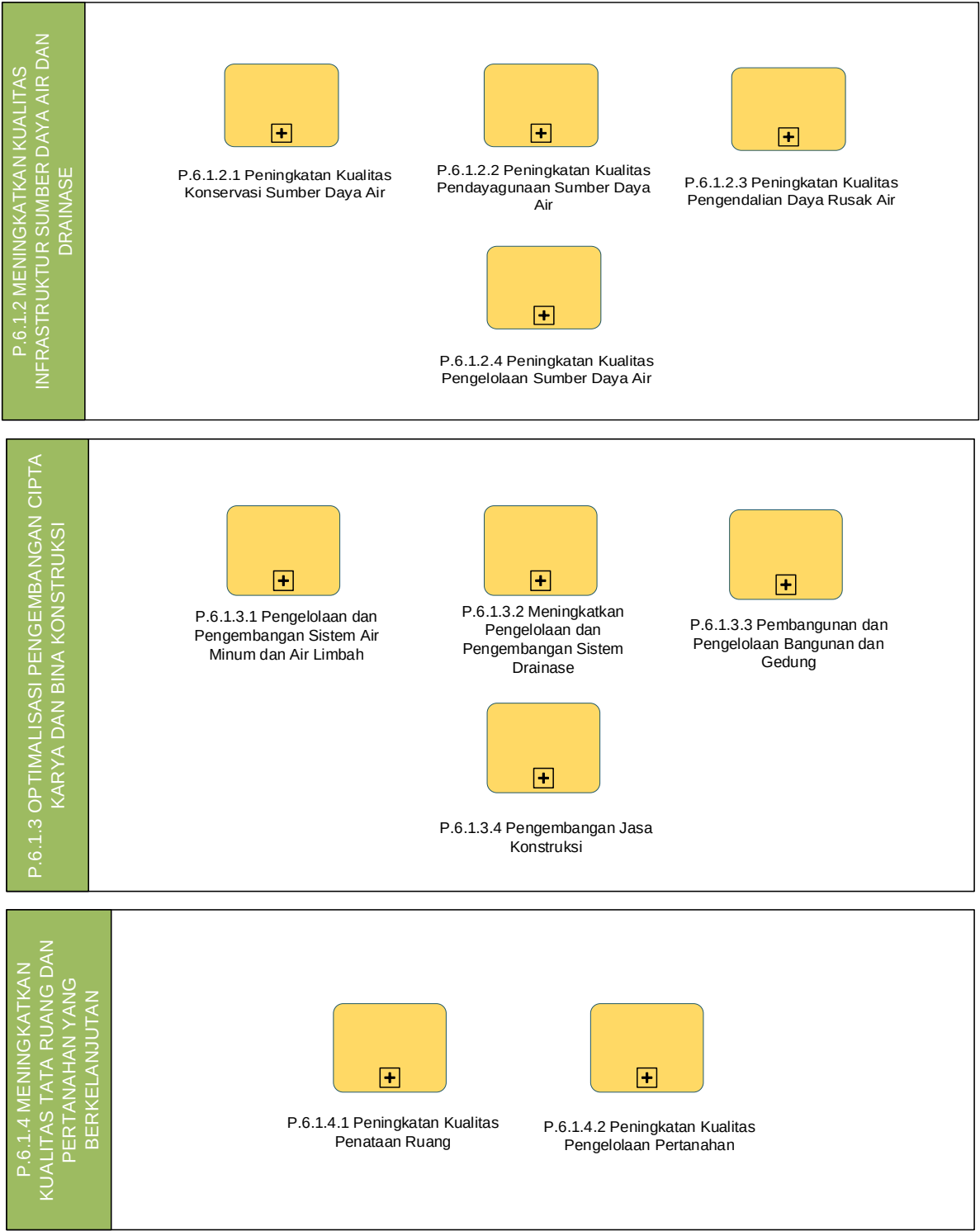


2.22.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

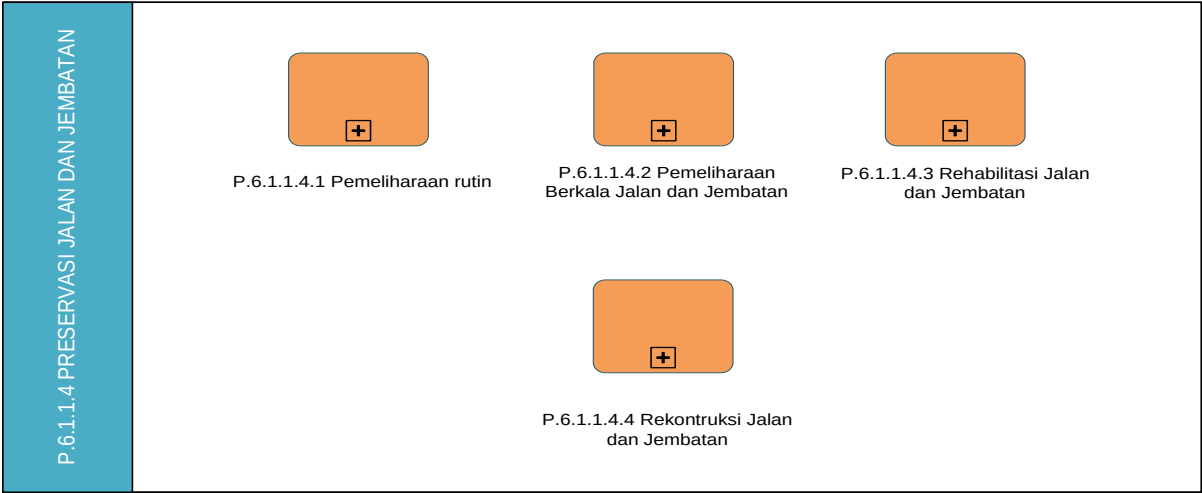


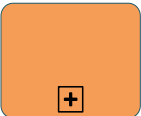
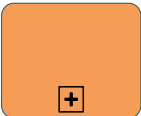
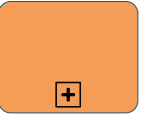
2.22.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2





2.22.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



P.6.1.2.4 PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	 P.6.1.2.4.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya  P.6.1.2.4.2 Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air  P.6.1.2.4.3 Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sumber daya Air  P.6.1.2.4.4 Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air
P.6.1.3.1 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	 P.6.1.3.1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  P.6.1.3.1.2 Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
P.6.1.3.2 MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	 P.6.1.3.2.1 Operasi Pemeliharaan Saluran Drainase  P.6.1.3.2.2 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan  P.6.1.3.2.3 Rehabilitasi Sistem Drainase  P.6.1.3.2.4 Penyusunan Masterplan Drainase

P.6.1.3.3 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN DAN GEDUNG	 P.6.1.3.3.1 Penyelenggaraan Kegiatan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah  P.6.1.3.3.2 Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya  P.6.1.3.3.3 Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung
P.6.1.3.4 PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	 P.6.1.3.4.1 Pembinaan Jasa Konstruksi  P.6.1.3.4.2 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
P.6.1.4.1 PENINGKATAN KUALITAS PENATAAN RUANG	 P.6.1.4.1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Tata Ruang  P.6.1.4.1.2 Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang
P.6.1.4.2 PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PERTANAHAN	 P.6.1.4.2.1 Penatagunaan Tanah  P.6.1.4.2.2 Penyelesaian Sengkata Tanah Garapan

2.22.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4

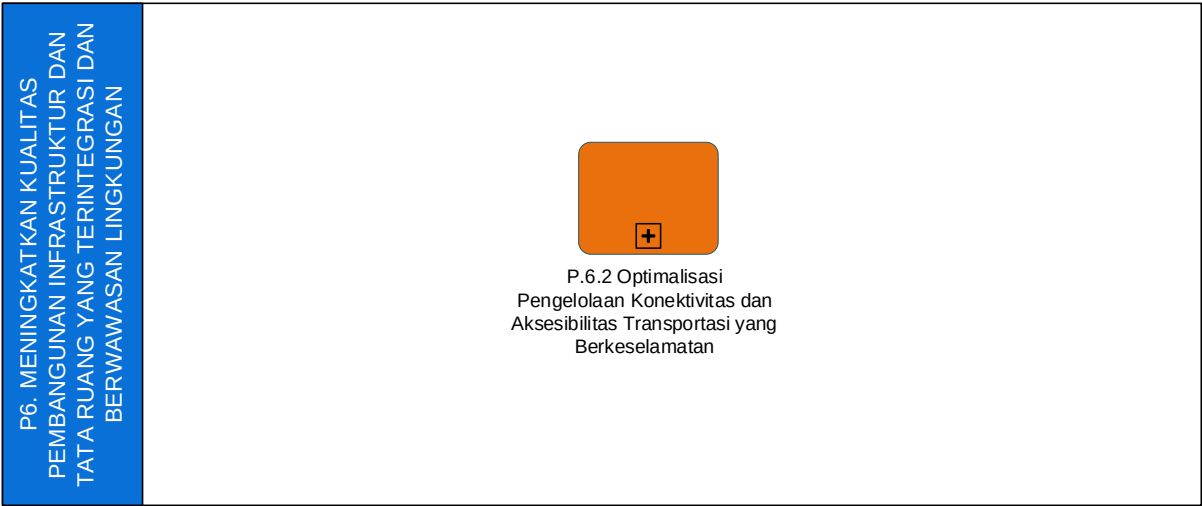


P.6.1.3.1.2 PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT	P.6.1.3.1.2.1 Fasilitas Penyedotan Lumpur Tinja P.6.1.3.1.2.2 Fasilitas Pengolahan Lumpur Tinja P.6.1.3.1.2.3 Penyewaan MCK Portable
P.6.1.3.2.2 PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	P.6.1.3.2.2.1 Penyediaan Sarana Pendukung
P.6.1.3.3.2 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA	P.6.1.3.3.2.1 Penyusunan Kebijakan Bangunan Gedung P.6.1.3.3.2.2 Bangtuan Teknis Bangunan Gedung P.6.1.3.3.2.3 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran Bangunan Gedung
P.6.1.3.3.3 PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	P.6.1.3.3.3.1 Fasilitas Penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) P.6.1.3.3.3.2 Fasilitas Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung

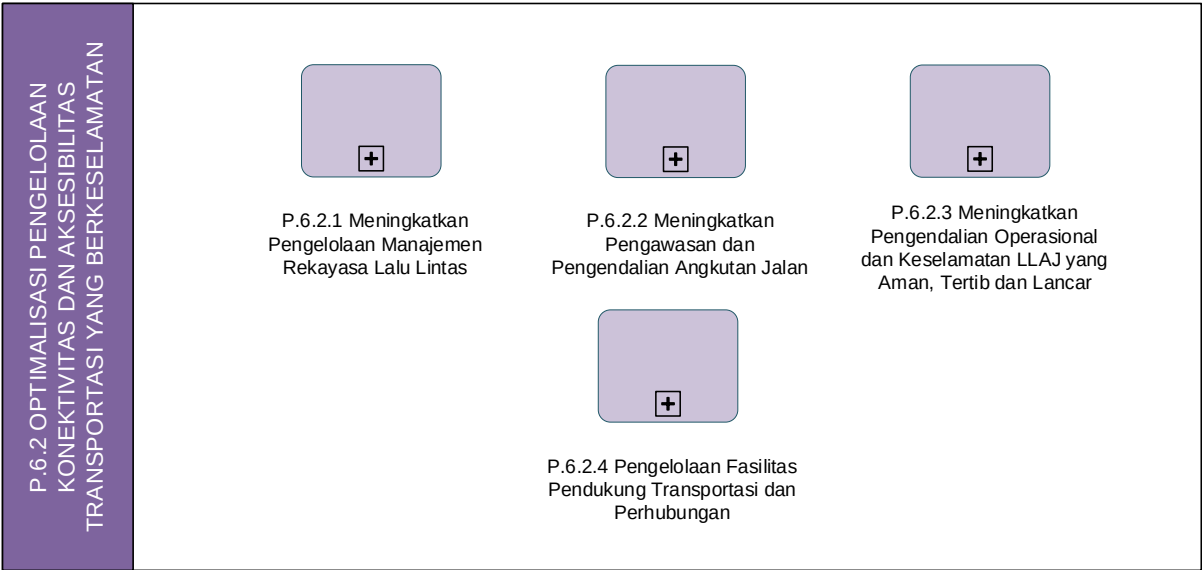
P.6.1.4.1.1 MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN TATA RUANG	 P.6.1.4.1.1.1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  P.6.1.4.1.1.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kota  P.6.1.4.1.1.3 Pelaksanaan Kegiatan Survei dan Pemetaan Tata Ruang
P.6.1.4.1.2 MENINGKATKAN KUALITAS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	 P.6.1.4.1.3.1 Fasilitasi Penerbitan Ijin Kesesuaian Rekomendasi Tekni Kegiatan Pemanfaatan Ruang
P.6.1.4.2.1 PENATAGUNAAN TANAH	 P.6.1.4.2.1.1 Penggunaan Tanah  P.6.1.4.2.1.2 Perencanaan Konsolidasi Tanah
P.6.1.4.2.2 PENYELESAIAN SENGKATA TANAH GARAPAN	 P.6.1.4.2.2.1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

2.23. DINAS PERHUBUNGAN

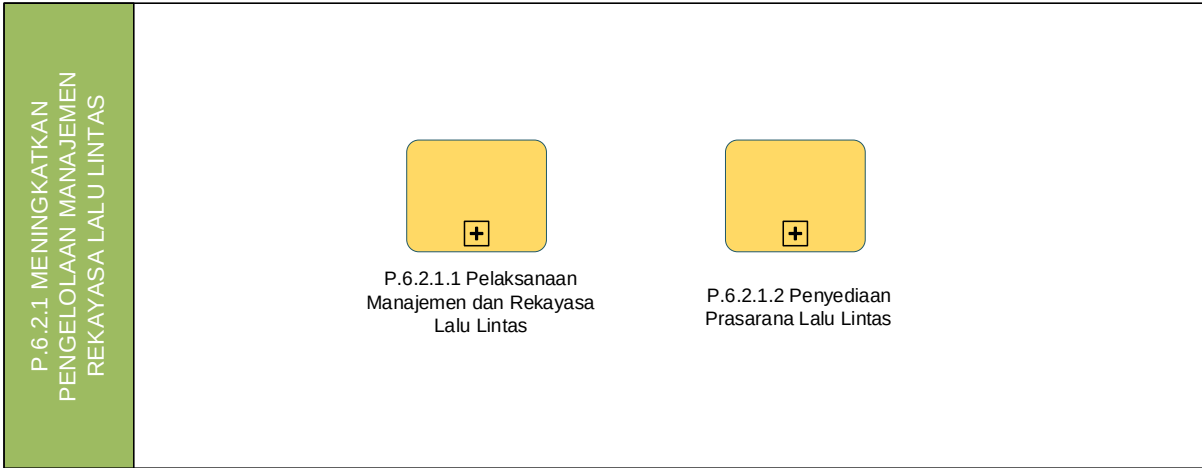
2.23.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



2.23.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

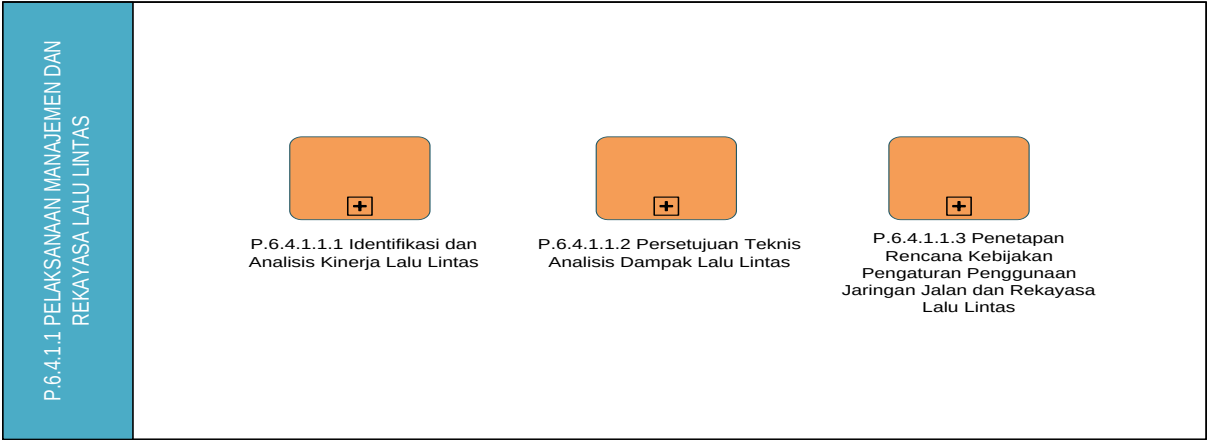


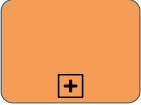
2.23.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2





2.23.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3

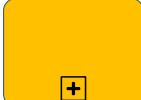
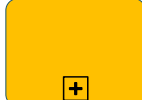


P.6.4.1.2 PENYEDIAAN PRASARANA LALU LINTAS	 P.6.4.1.2.1 Fasilitas sarana dan prasarana lain  P.6.4.1.2.2 Pengadaan Sistem Sarana dan Prasarana Lalu Lintas  P.6.4.1.2.3 Monitoring dan Evaluasi Sistem Sarana dan Prasarana Lalu Lintas  P.6.4.1.2.4 Pengaduan pelayanan prasarana lalu lintas  P.6.4.1.2.5 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
P.6.4.2.1 PENETAPAN KEBIJAKAN TERKAIT ANGKUTAN JALAN DAN TRANSPORTASI LAINNYA	 P.6.4.2.1.1 Penetapan Tarif Angkutan Umum  P.6.4.2.1.2 Pemetaan Jalur Transportasi
P.6.4.2.3 PENYELENGGARAAN LAYANAN DAN PENGAWASAN ANGKUTAN JALAN	 P.6.4.2.3.1 Fasilitas Layanan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Jalan  P.6.4.2.3.2 Pengawasan Keselamatan Transportasi melalui Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kewenangan Daerah

P.6.4.3.1 MENINGKATKAN PENGAWASAN PENGENDALIAN LLAJ	P.6.4.3.1.1 Penyelenggaraan Operasi Lalu Lintas yang efektif P.6.4.3.1.2 PAM Jalur Pengaturan Lalu Lintas
P.6.4.3.2 BIMBINGAN KESELAMATAN LLAJ	P.6.4.3.2.1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum P.6.4.3.2.2 Bimbingan Penyuluhan Tertib Lalu Lintas P.6.4.3.2.3 Kegiatan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas P.6.4.3.2.4 Pengaduan Penertiban Administrasi Kendaraan
P.6.4.4.1 PENYELENGGARAAN SISTEM PERPARKIRAN	P.6.4.4.1.1 Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Parkir P.6.4.4.1.2 Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran
P.6.4.4.2 PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TERMINAL SESUAI KEWENANGAN KOTA	P.6.4.4.2.1 Fasilitasi Izin Penggunaan Kegiatan Usaha (Kios/ Lahan/ Ponten) P.6.4.4.2.2 Peningkatan Layanan Terminal Tipe C

2.23.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



P.6.4.2.3.2 PENGAWASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI MELALUI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR KEWENANGAN DAERAH			
	P.6.4.2.3.2.1 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	P.6.4.2.3.2.2 Pengujian Mutasi Masuk Kendaraan	P.6.4.2.3.2.3 Pengujian Berkala Numpang Uji Masuk
			
	P.6.4.2.3.2.4 Rekomendasi Kendaraan Baru PKB	P.6.4.2.3.2.5 Rekomendasi Mutasi (Keluar/Masuk)	P.6.4.2.3.2.6 Rekomendasi Numpang Uji Keluar Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			
	P.6.4.2.3.2.7 Surat Rekomendasi Rubah Bentuk/ Sifat Kendaraan Bermotor	P.6.4.2.3.2.8 Rekomendasi Penilaian Teknis Penghapusan Kendaraan Dinas	P.6.4.2.3.2.9 Ramcek Penilaian Teknis Kendaraan untuk Wisata
			
	P.6.4.2.3.2.10 Uji Emisi Kendaraan Bermotor Non KBWU	P.6.4.2.3.2.11 Penggantian Smart Card atau Kartu Uji Hilang	
P.6.4.3.1.2 PAM JALUR PENGATURAN LALU LINTAS			
	P.6.4.3.1.2.1 PAM Jalur Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan Pemerintah	P.6.4.3.1.2.2 PAM Jalur Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan Insidentil	P.6.4.3.1.2.3 PAM Jalur Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan Masyarakat

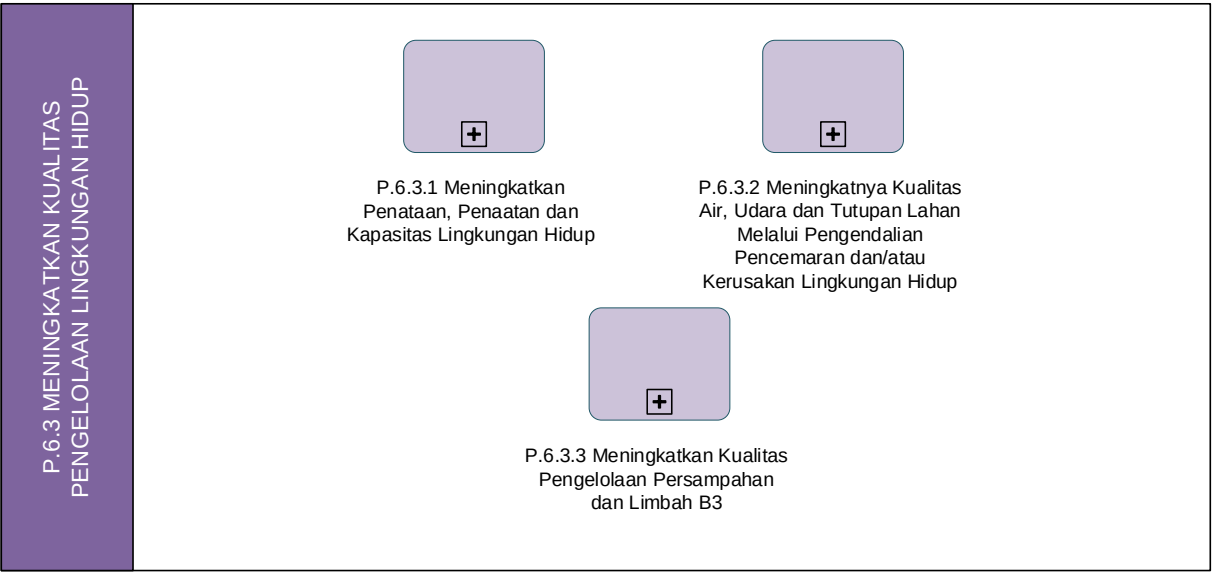
P.6.4.4.1.1 PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR	 P.6.4.4.1.1.1 Pemungutan Retribusi Parkir
P.6.4.4.1.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERPARKIRAN	 P.6.4.4.1.2.1 Pembinaan Jukir/ Pihak Ketiga  P.6.4.4.1.2.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Perparkiran  P.6.4.4.1.2.3 Penertiban dan Pengawasan Parkir Tepi Jalan Umum
P.6.4.4.2.2 PENINGKATAN LAYANAN TERMINAL TIPE C	 P.6.4.4.2.2.1 Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Terminal  P.6.4.4.2.2.2 Pemeliharaan Terminal

2.24. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

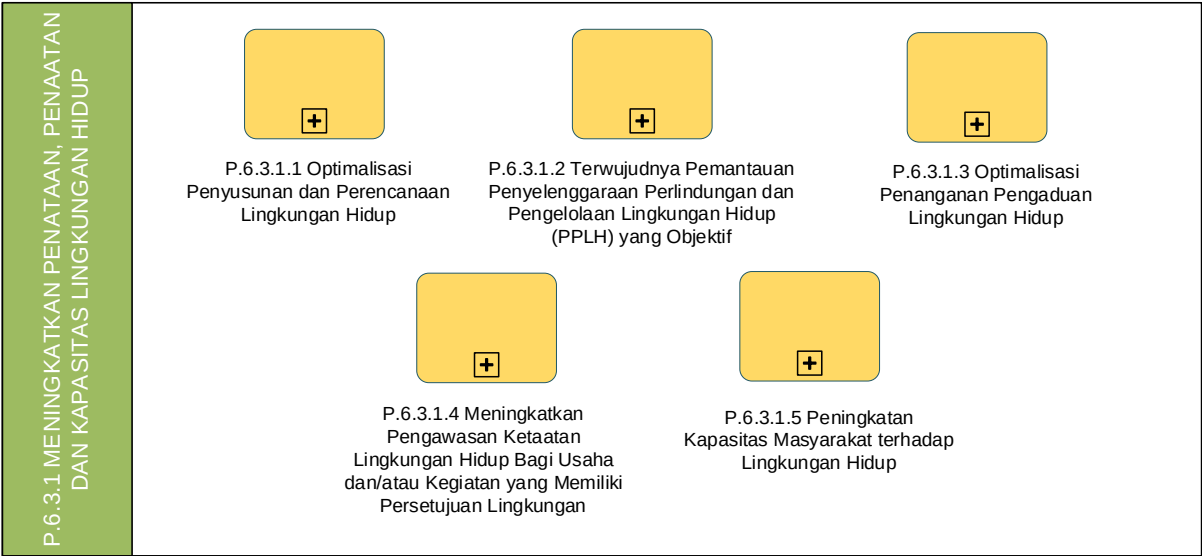
2.24.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



2.24.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

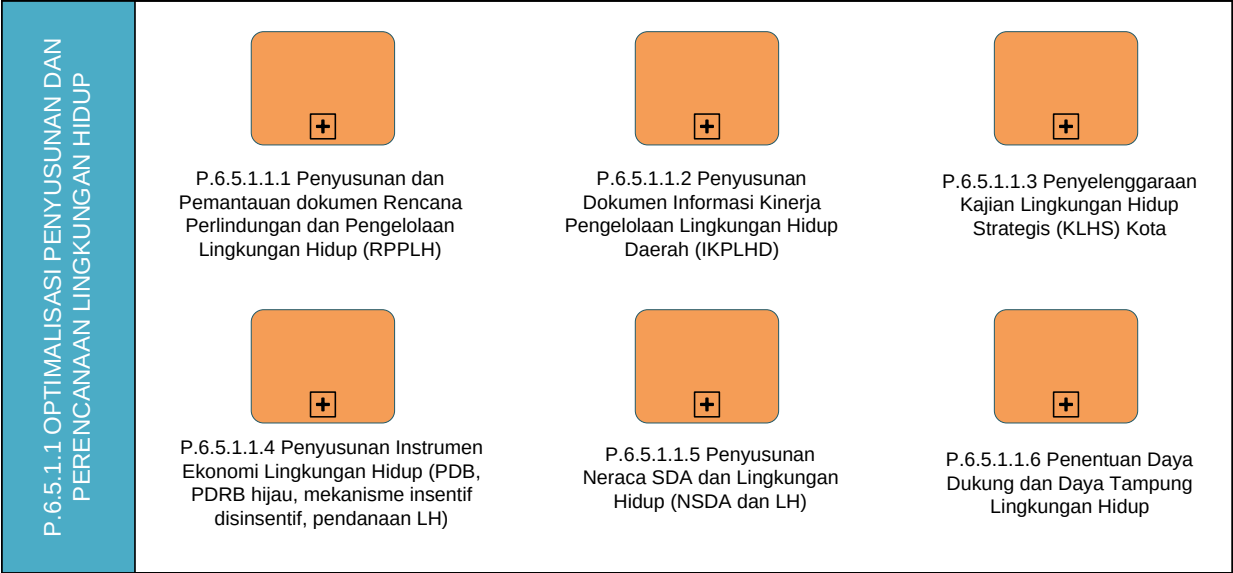


2.24.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2





2.24.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3

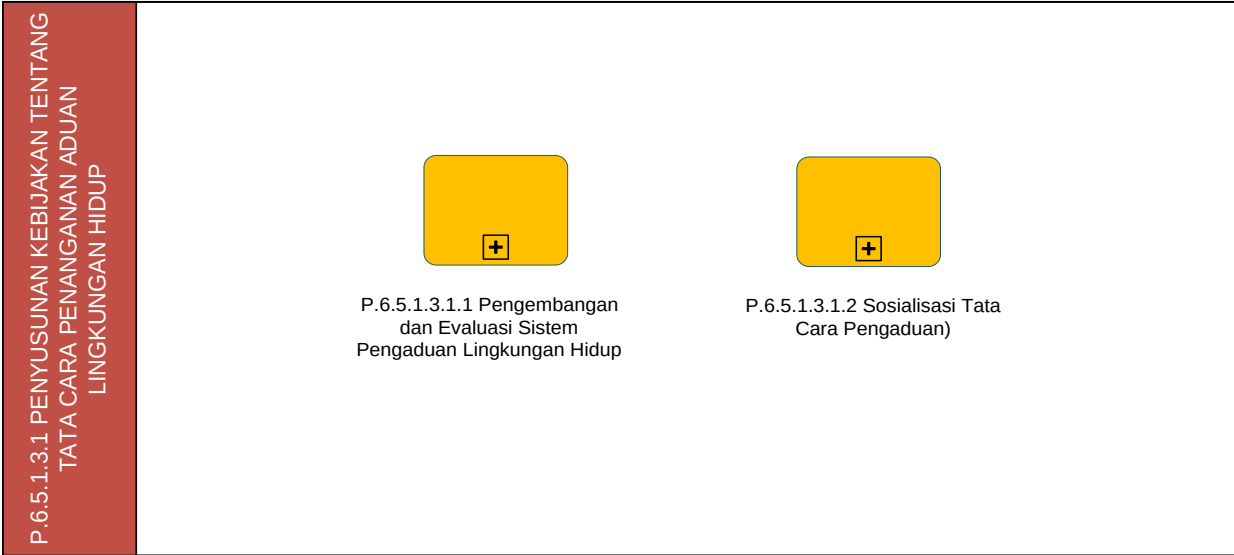


P.6.51.2 TERWUJUDNYA PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) YANG OBJEKTIF	P.6.5.1.2.1 Penyusunan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan LH (Amdal, UKL-UPL, Pertek, Audit LH, Analisis Resiko LH) P.6.5.1.2.2 Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal, UKL-UPL dan SPPL Non OSS) P.6.5.1.2.3 Penyusunan Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup
P.6.5.1.3 OPTIMALISASI PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	P.6.5.1.3.1 Penyusunan Kebijakan tentang Tata Cara Penanganan Aduan Lingkungan Hidup P.6.5.1.3.2 Fasilitasi Pengelolaan (Penerimaan dan Tindak Lanjut) Aduan Lingkungan Hidup
P.6.5.1.4 MENINGKATNYA PENGAWASAN KETAATAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MEMILIKI PERSETUJUAN LINGKUNGAN	P.6.5.1.4.1 Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan Lingkungan Hidup P.6.5.1.4.2 Pembentukan dan Pembinaan Tim Terkait Ketaatan Lingkungan Hidup
P.6.5.1.5 PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP	P.6.5.1.5.1 Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup P.6.5.1.5.2 Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup P.6.5.1.5.3 Fasilitasi dan Pendampingan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

P.6.5.2.1 MENINGKATKAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	P.6.5.2.1.1 Pelaksanaan Pemantauan Uji Kualitas Lingkungan (Air, Udara ambien, dan Tanah) P.6.5.2.1.2 Penentuan Buku Mutu Pengendalian LH P.6.5.2.1.3 Penyelenggaraan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
P.6.5.2.2 OPTIMALISASI PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	P.6.5.2.2.1 Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan LH (Pemberian Informasi, Pengisolasian, dan Penghentian) P.6.5.2.2.2 Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan./atau Kerusakan LH (Pembersihan, Remediasi, Rehabilitasi dan Restorasi)
P.6.5.2.4 PENGELOLAAN RTH DAN TAMAN SESUAI STANDAR	P.6.5.2.4.1 Perencanaan dan Penataan RTH dan Taman P.6.5.2.4.2 Pengadaan dan Pemeliharaan RTH dan Taman P.6.5.2.4.3 Pengendalian dan Pemantauan RTH dan Taman

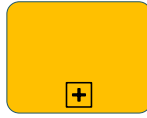
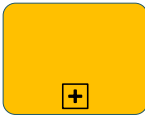
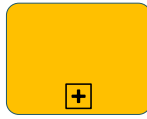


2.24.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4

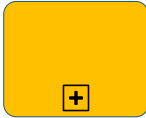


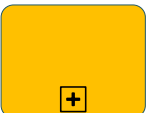
P.6.5.1.4.1 PELAKSANAAN PENGAWASAN KETAATAN LINGKUNGAN HIDUP	P.6.5.1.4.1.1 Penyelenggaraan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan P.6.5.1.4.1.2 Penyelenggaraan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan P.6.5.1.4.1.3 Penegakan Hukum atas Pelanggaran PPLH
P.6.5.1.4.2 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN TIM TERKAIT KETAATAN LINGKUNGAN HIDUP	P.6.5.1.4.2.1 Pembentukan Tim Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan P.6.5.1.4.2.2 Pembentukan Tim Monitoring dan Koordinasi Penegakan Hukum
P.6.5.1.5.1 OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	P.6.5.1.5.1.1 Pengembangan Materi Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup P.6.5.1.5.1.2 Pengembangan Data dan Akses Informasi Lingkungan P.6.5.1.5.1.3 Pelaksanaan Diklat dan Penyuluhan LH untuk Lembaga/Kelompok Masyarakat P.6.5.1.5.1.4 Peningkatan Kapasitas Instruktur dan Penyuluh LH P.6.5.1.5.1.5 Penyediaan Sarpras Diklat dan Penyuluhan LH

P.6.5.1.5.2 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	 P.6.5.1.5.2.1 Pembinaan Sekolah Adiwiyata, Kelurahan Berseri, Saka Kalpataru dan Ecopesantren
P.6.5.1.5.3 FASILITASI DAN PENDAMPINGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP	 P.6.5.1.5.3.1 Fasilitasi Penghargaan Adiwiyata (Tingkat Kota/Provinsi/ Nasional/Mandiri)  P.6.5.1.5.3.2 Fasilitasi Penghargaan Kelurahan Berseri (Tingkat Kota/Provinsi/ Nasional/Mandiri)
P.6.5.2.1.1 PELKASANAAN PEMANTAUAN UJI KUALITAS LINGKUNGAN (AIR, UDARA, AMBIEN, DAN TANAH)	 P.6.5.2.1.1.1 Penyediaan Sarpras Pemantauan Lingkungan

P.6.5.2.1.2 PENENTUAN BAKU MUTU PENGENDALIAN LH	 P.6.5.2.1.2.1 Penentuan Baku Mutu Lingkungan  P.6.5.2.1.2.2 Penentuan Baku Mutu Sumber Pencemar  P.6.5.2.1.2.3 Penentuan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan
P.6.5.2.1.3 PENYELENGGARAAN UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	 P.6.5.2.1.3.1 Pembinaan terhadap Kelurahan yang Melaksanakan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim  P.6.5.2.1.3.2 Fasilitasi Biopori dan Sumur Resapan  P.6.5.2.1.3.3 Fasilitasi Penghargaan Program Kampung Iklim  P.6.5.2.1.3.4 Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)
P.6.5.2.2.1 PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH (PEMBERIAN INFORMASI, PENGISOLASIAN DAN PENGHENTIAN)	 P.6.5.2.2.1.1 Penyediaan Sistem Informasi terkait Kondisi, Potensi Dampak dan Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH  P.6.5.2.2.1.2 Pembinaan terkait Upaya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

P.6.5.2.4.2 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN RTH DAN TAMAN	P.6.5.2.4.2.1 Pengadaan Bibit Tanaman dan Satwa di Area Hutan/Taman Kota P.6.5.2.4.2.2 Pemeliharaan Pohon Lindung dan Jalur Hijau P.6.5.2.4.2.3 Pemeliharaan Air Mancur dan Lampu Hias P.6.5.2.4.2.4 Pengadaan dan Pemeliharaan Satwa, Sarpras Taman, dan RTH
P.6.5.2.4.3 PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RTH DAN TAMAN	P.6.5.2.4.3.1 Pemantauan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Kritis P.6.5.2.4.3.2 Koordinasi Pengelolaan Penjualan Hasil Penebangan Pohon dan Hasil Pemanfaatan Sarpras Umum (Kebon Rojo, Taman dan RTH lainnya)
P.6.5.3.1.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	P.6.5.3.1.1.1 Perumusan kebijakan pengurangan sampah P.6.5.3.1.1.2 Perumusan kebijakan penanganan sampah P.6.5.3.1.1.3 Penyediaan informasi pengelolaan persampahan P.6.5.3.1.1.4 Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis P.6.5.3.1.1.5 Penyusunan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah

P.6.5.3.1.2 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU	 P.6.5.3.1.2.1 Penetapan Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah,TPS 3R dan PDU (Pusat Daur Ulang)  P.6.5.3.1.2.2 Pemungutan Retribusi Jasa Pengelolaan Sampah  P.6.5.3.1.2.3 Penyelenggaraan Pemilahan, Pengumpulan dan Pengangkutan  P.6.5.3.1.2.4 Penyelenggaraan Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah  P.6.5.3.1.2.5 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
P.6.5.3.1.3 KOORDINASI DAN KERJASAMA SERTA KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN PIHAK LAIN	 P.6.5.3.1.3.1 Pemberian Izin dan/atau Rekomendasi Pengolahan Sampah (Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah) bagi swasta  P.6.5.3.1.3.2 Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengelolaan Sampah oleh Pihak Lain
P.6.5.3.1.4 OPTIMALISASI PENGURANGAN SAMPAH BERBASIS PERAN SERTA	 P.6.5.3.1.4.1 Pembinaan Pembatasan Timbunan Sampah (Produsen/ Industri)  P.6.5.3.1.4.2 embentukan pusat daur ulang/bank sampah  P.6.5.3.1.4.3 Pembinaan dan Sosialisasi pusat daur ulang/bank sampah/KSM  P.6.5.3.1.4.4 Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pusat daur ulang/bank sampah

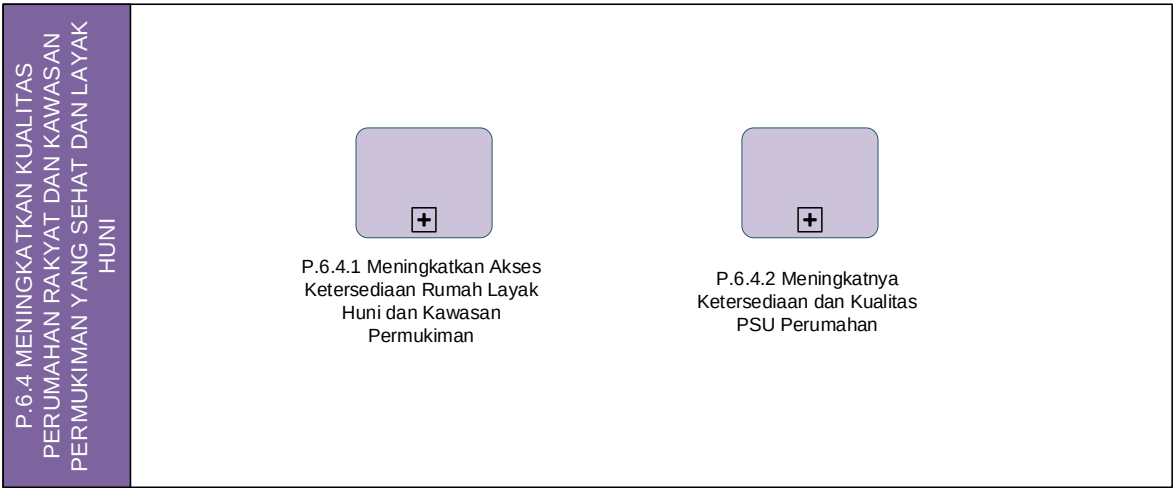
P.6.5.3.1.5 KOORDINASI DAN FASILITASI PENILAIAN PENGHARGAAN ADIPURA	 P.6.5.3.1.5.1 Pembentukan tim penilai pendukung penghargaan adipura
P.6.5.3.2.1 PENYELENGGARAAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DAERAH (PENGAJUAN, PERPANJANGAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN)	 P.6.5.3.2.1.1 Penerbitan Izin/ Rekomendasi Rincian Teknis Penyimpanan  P.6.5.3.2.1.2 Pemantauan dan Pengawasan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Daerah
P.6.5.3.2.2 PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 DAERAH (PENGAJUAN, PERPANJANGAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN)	 P.6.5.3.2.2.1 Penerbitan Izin/ Rekomendasi Rincian Teknis Pengumpulan/ Penimbunan/ Penguburan Limbah B3  P.6.5.3.2.2.2 Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengolahan, Pemanfaatan, Pengangkutan dan Penimbunan Limbah B3 Daerah

2.25. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.25.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

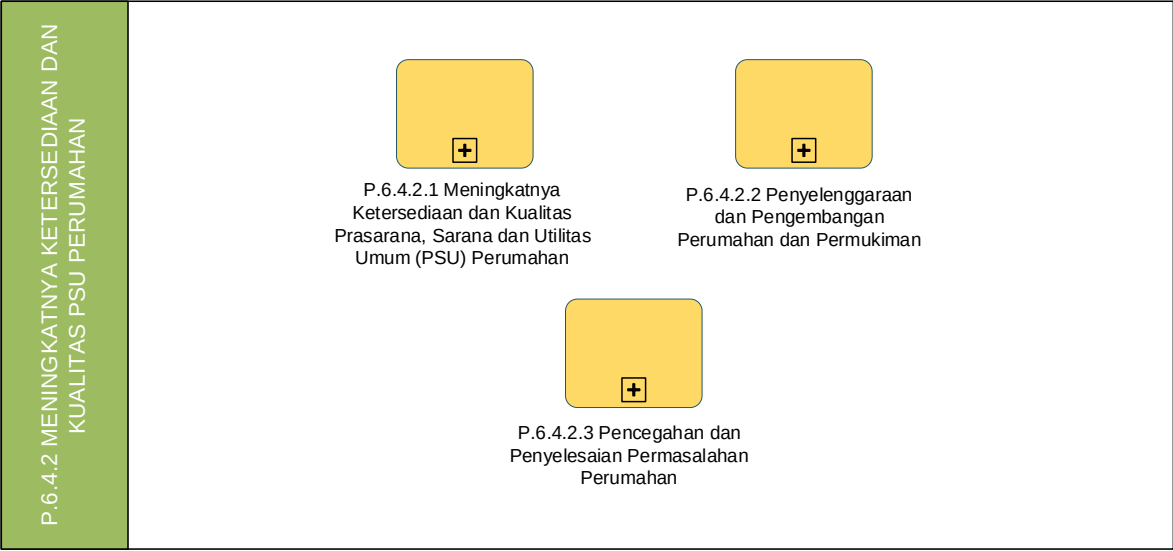


2.25.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



2.25.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2





2.25.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3

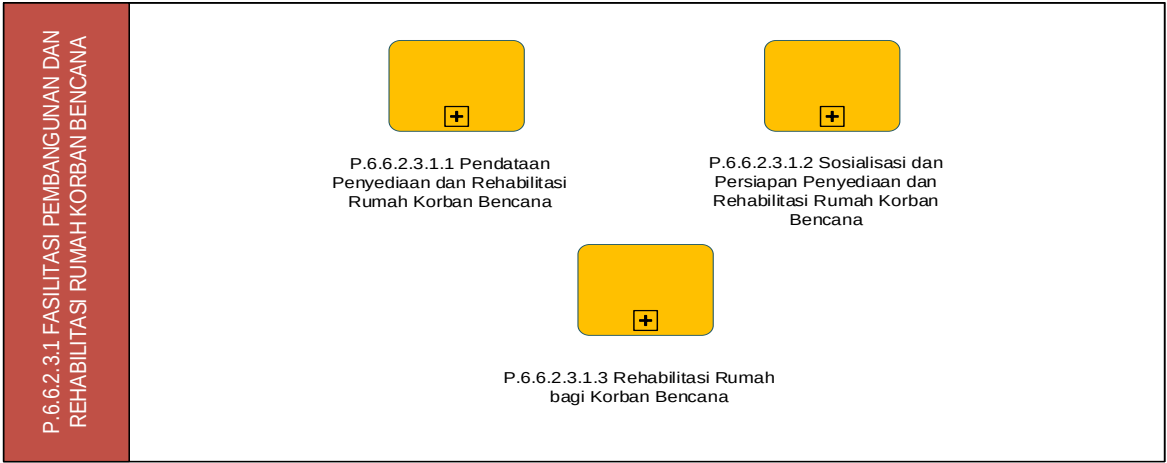


P.6.6.2.1 MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN	P.6.6.2.1.1 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Huni P.6.6.2.2.2 Pemeliharaan Lingkungan Perumahan P.6.6.2.2.3 Pengendalian Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
P.6.6.2.2 PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	P.6.6.2.2.1 Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus P.6.6.2.2.2 Pemeliharaan Lingkungan Perumahan P.6.6.2.2.3 Pengendalian Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
P.6.6.2.3 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERUMAHAN	P.6.6.2.3.1 Fasilitas Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana P.6.6.2.3.2 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

2.25.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



P.6.6.1.2.4 PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	 P.6.6.1.1.4.1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni  P.6.6.1.1.4.2 Pembangunan Baru Rumah Swadaya  P.6.6.1.1.4.3 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
P.6.6.1.2.5 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	 P.6.6.1.1.5.1 Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi rencana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemugaran atau peremajaan pemukiman kumuh di kota blitar  P.6.6.1.1.5.2 Fasilitasi Urusa Pemakaman (Sosialisasi dan Koordinasi Urusan Pemakaman, Honor Juru Kunci Makam)
P.6.6.2.1.3 PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN PERUMAHAN	 P.6.6.2.1.4.1 Penelolaan Jalan dan Drainase Lingkungan Perumahan
P.6.6.2.2.3 PENGENDALIAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	 P.6.6.2.2.3.1 Verifikasi dan Persetujuan Site Plan Perumahan Pengembang

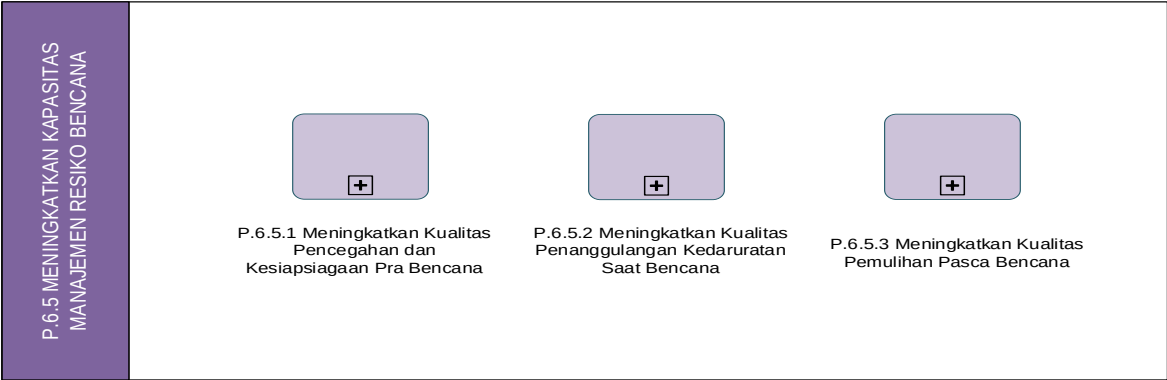


2.26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

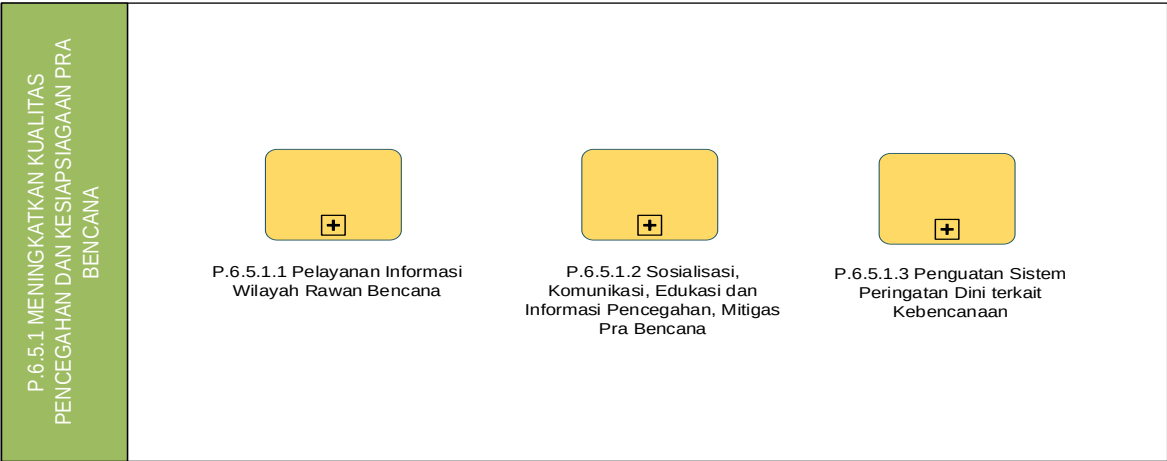
2.26.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

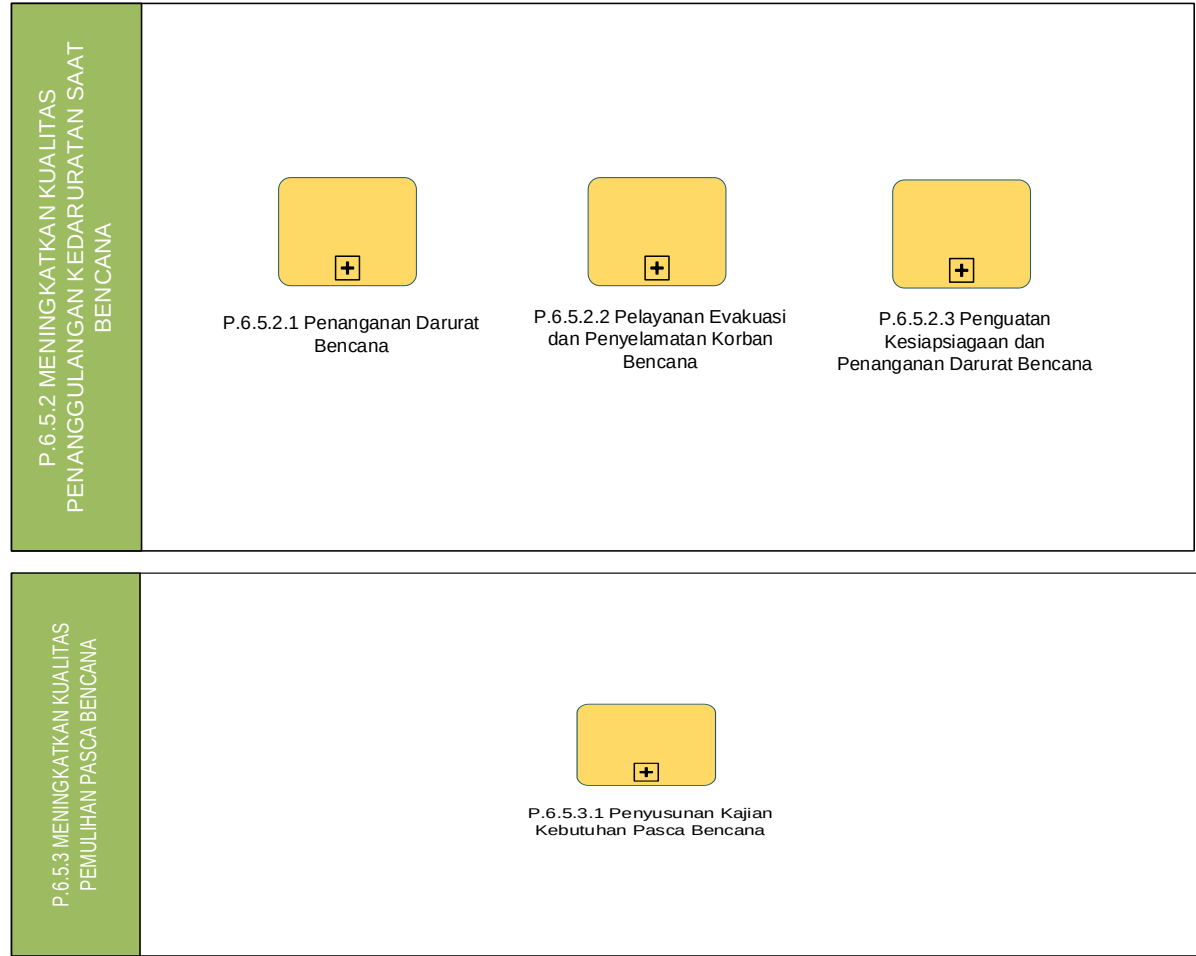


2.26.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



2.26.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2

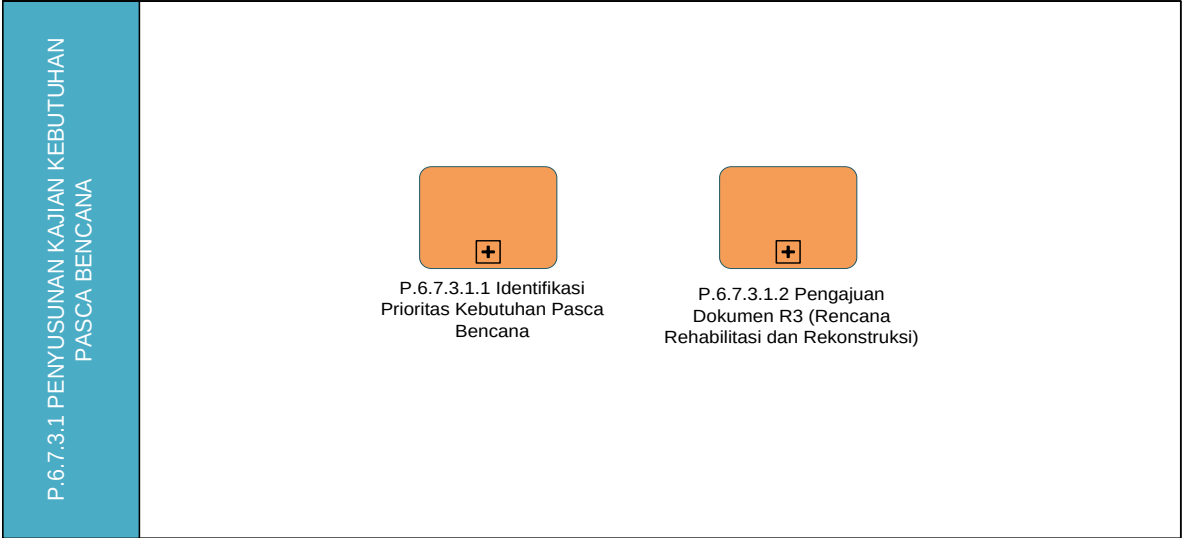




2.26.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3

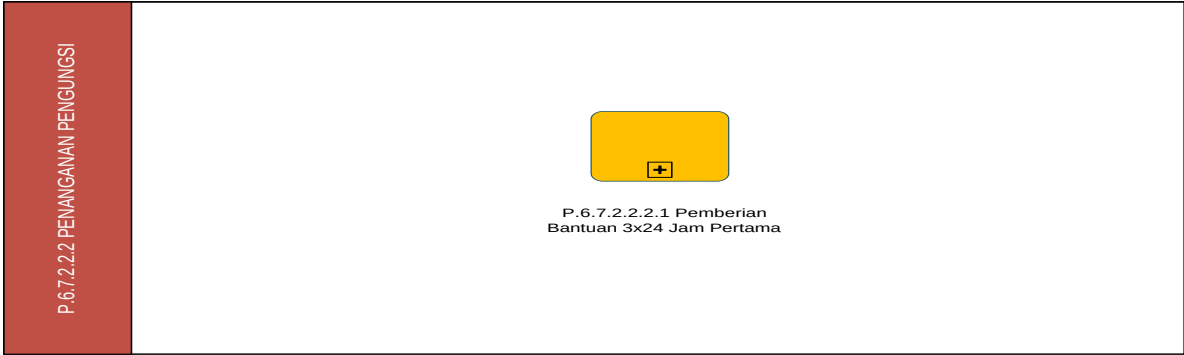


P.6.7.1.3 PENGUATAN SISTEM PERINGATAN DINI TERKAIT KEBENCANAAN	 P.6.7.1.3.1 Penyusunan dan Penetapan Kebijakan/Regulasi terkait Kapasitas Manajemen Kebencanaan  P.6.7.1.3.2 Peningkatan Kapasitas SDM Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana  P.6.7.1.3.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan  P.6.7.1.3.4 Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan  P.6.7.1.3.5 Pengendalian Operasional Tanggap Darurat
P.6.7.2.1 PENANGANAN DARURAT BENCANA	 P.6.7.2.1.1 Respon Cepat Darurat Bencana  P.6.7.2.1.2 Penyiapan Logistik dan Sarana Prasarana Penanggulangan bencana
P.6.7.2.2 PELAYANAN EVAKUASI DAN PENYELAMATAN KORBAN BENCANA	 P.6.7.2.2.1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana  P.6.7.2.2.2 Penanganan Pengungsi
P.6.7.2.3 PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	 P.6.7.2.3.1 Pembentukan dan Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana  P.6.7.2.3.2 Pembentukan RSAB dan Puskesmas Aman Bencana



2.26.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4

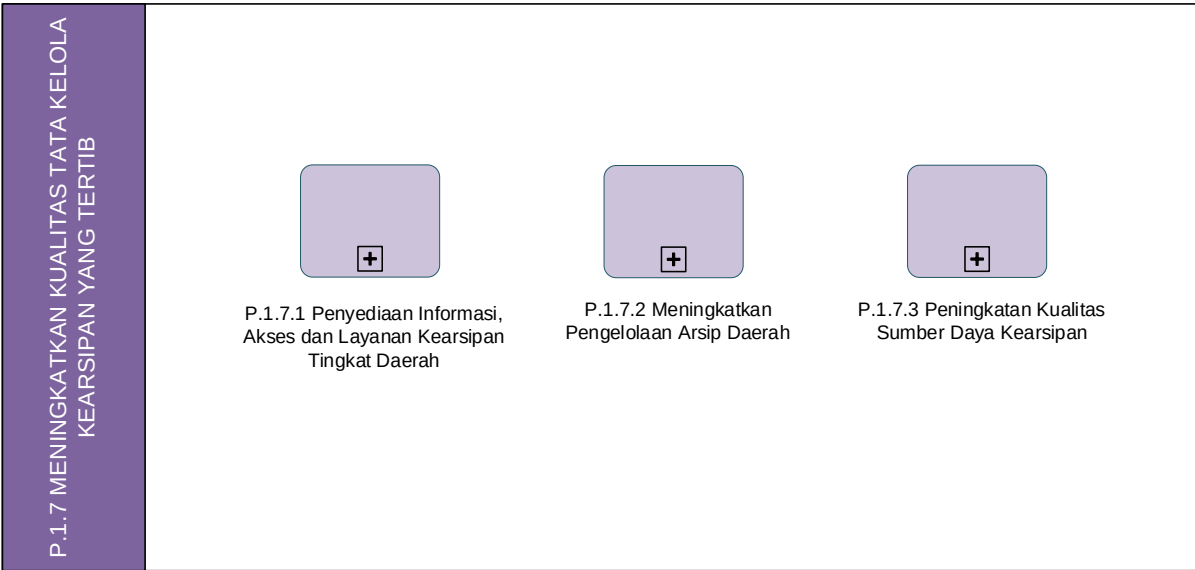


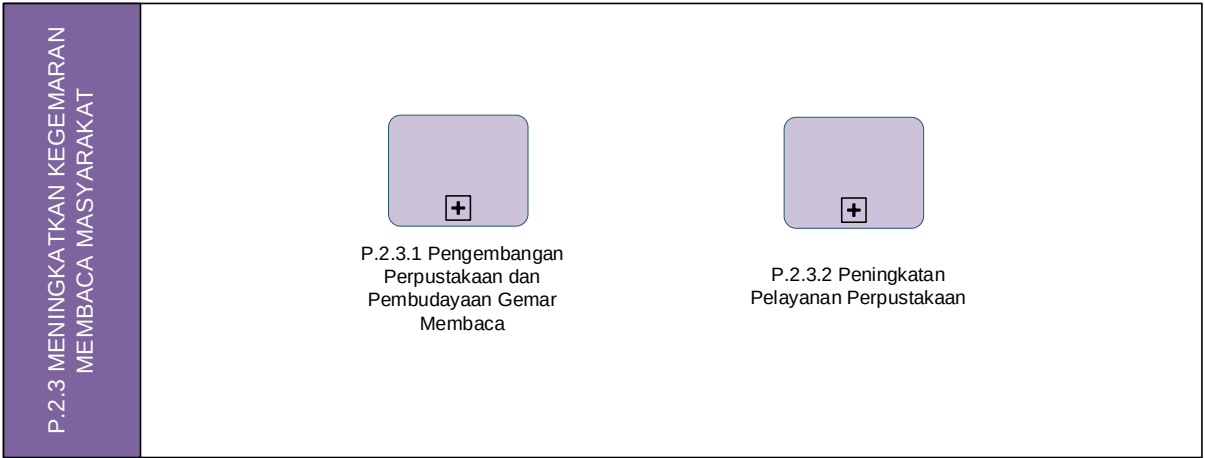


2.27. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.27.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



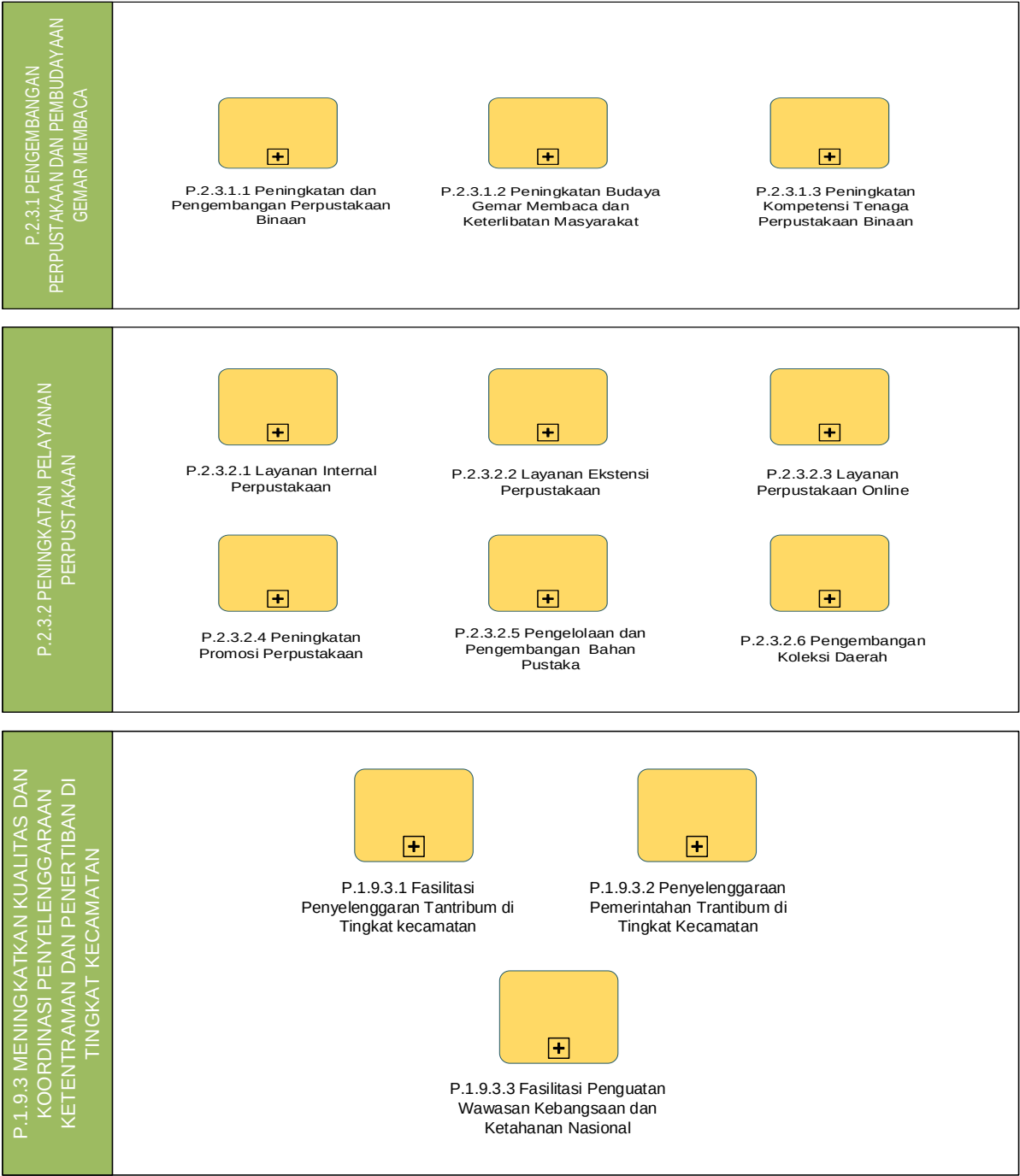
2.27.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1



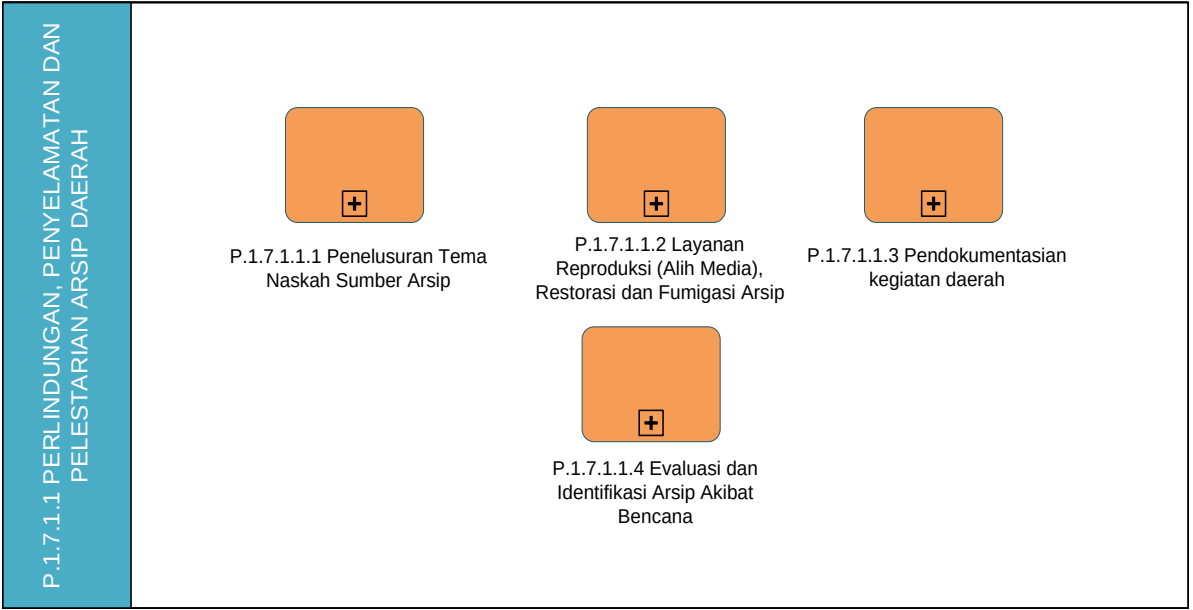


2.27.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2

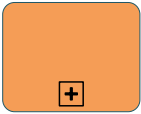
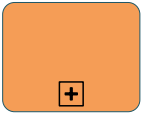


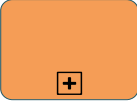
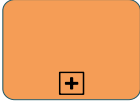


2.27.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



P.1.7.1.2 PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH	 P.1.7.1.2.1 Penyajian Informasi Data Arsip Statis  P.1.7.1.2.2 Penyajian Informasi Data Arsip Dinamis  P.1.7.1.2.3 Pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah
P.1.7.1.3 PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KEARSIPAN	 P.1.7.1.3.1 Promosi dan Publikasi Kearsipan Daerah  P.1.7.1.3.2 Pameran Arsip Teksual dan Virtual  P.1.7.1.3.3 Seminar dan Edukasi Kearsipan  P.1.7.1.3.4 Layanan Penyajian Arsip Dokumenter  P.1.7.1.3.5 Layanan Peminjaman Arsip Statis  P.1.7.1.3.6 Layanan Konsultasi Kearsipan
P.1.7.2.1 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	 P.1.7.2.1.1 Penyusutan Arsip Dinamis  P.1.7.2.1.2 Penataan Arsip Dinamis  P.1.7.2.1.3 Pengawasan Arsip Dinamis
P.1.7.2.2 PENGELOLAAN ARSIP STATIS	 P.1.7.2.2.1 Akuisisi Arsip Statis  P.1.7.2.2.2 Pembinaan Arsip Statis  P.1.7.2.2.3 Preservasi Arsip Statis

P.1.7.2.3 PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF	 P.1.7.2.3.1 Pengelolaan Arsip Inaktif dengan Retensi > 10 tahun  P.1.7.2.3.2 Pemusnahan Arsip Inaktif dengan Retensi > 10 tahun  P.1.7.2.3.3 Pendampingan Pemusnahan Arsip dengan Retensi < 10 tahun
P.1.7.3.1 PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PENGELOLA ARSIP DAERAH	 P.1.7.3.1.1 Pelatihan Kompetensi Kearsipan  P.1.7.3.1.2 Pengawasan Kearsipan
P.1.7.3.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	 P.1.7.3.2.1 Pengawasan Audit Kearsipan Internal  P.1.7.3.2.2 Penyusunan Rancangan Kebijakan Kearsipan
P.2.3.1.1 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BINAAN	 P.2.3.1.1.1 Pendataan dan Pembinaan Perpustakaan Binaan  P.2.3.1.1.2 Melaksanakan Monev Perpustakaan Sekolah  P.2.3.1.1.3 Lomba Perpustakaan Sekolah  P.2.3.1.1.4 Pembinaan Akreditasi Perpustakaan

P.2.3.1.2 PENINGKATAN BUDAYA GEMAR MEMBACA DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT			
	P.2.3.1.2.1 Sosialisasi Peningkatan Budaya Baca	P.2.3.1.2.2 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	P.2.3.1.2.3 Kafe Literasi (Kangen Fokus Ngobrolne Literasi)
			
	P.2.3.1.2.4 Pelaksanaan Kegiatan Parenting Literasi	P.2.3.1.2.5 Talkshow Peningkatan Minat Baca	P.2.3.1.2.6 Pemilihan Duta Baca dan Bunda Baca / Literasi
			
	P.2.3.1.2.7 Pembentukan Taman Baca Masyarakat	P.2.3.1.2.8 Webinar Online Kepenulisan	
P.2.3.1.3 PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PERPUSTAKAAN BINAAN			
	P.2.3.1.3.1 Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan	P.2.3.1.3.2 Pembinaan Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan	
P.2.3.2.1 LAYANAN INTERNAL PERPUSTAKAAN			
	P.2.3.2.1.1 Layanan Pendaftaran Kartu Anggota	P.2.3.2.1.2 Layanan Sirkulasi	P.2.3.2.1.3 Layanan Audio Visual
			
	P.2.3.2.1.4 Layanan Referensi	P.2.3.2.1.5 Layanan Rujukan	P.2.3.2.1.6 Wisata Buku
			
	P.2.3.2.1.7 Bimbingan Pemustaka	P.2.3.2.1.8 Layanan Baca Ditempat	P.2.3.2.1.9 Layanan Pesan Antar

P.2.3.2.2 LAYANAN ESTENSI PERPUSTAKAAN	P.2.3.2.2.1Layanan Ekstensi (Perpustakaan Keliling, Pojok Baca) P.2.3.2.2.2 Layanan LTPD/ LTPS P.2.3.2.2.3 Perpustakaan Keliling P.2.3.2.2.4 Pojok Baca/Buklon P.2.3.2.2.5 Pocadi (Pojok Baca Digital)
P.2.3.2.5 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	P.2.3.2.5.1 Seleksi dan Pengadaan Naskah Kuno P.2.3.2.5.2 Alih Media Bahan Pustaka P.2.3.2.5.3 Fumigasi Bahan Pustaka P.2.3.2.5.4 Penyiangan (Wedding) Bahan Pustaka P.2.3.2.5.5 Perbaikan Bahan Pustaka yang rusak P.2.3.2.5.6 Entry Data Inisilite P.2.3.2.5.7 Klasifikasi Buku P.2.3.2.5.8 Donasi Bahan Pustaka P.2.3.2.5.9 Perencanaan dan Seleksi Bahan Perpustakaan P.2.3.2.5.10 Survei Kebutuhan Pemustaka P.2.3.2.5.11 Pengadaan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan P.2.3.2.5.12 Perawatan Bahan Perpustakaan P.2.3.2.5.13 Penyusunan Bibliografi
P.2.3.2.6 PENGEMBANGAN KOLEKSI DAERAH	P.2.3.2.6.1 Pelaksanaan Pelatihan Penulisan Lokal Konten P.2.3.2.6.2 Pelaksanaan Lomba Penulisan Lokal Konten P.2.3.2.6.3 Peminjaman Buku Lokal Konten P.2.3.2.6.4 Workshop Kepenulisan Artikel P.2.3.2.6.5 Lomba Kepenulisan Kota Blitar P.2.3.2.6.6 Bedah Buku Lokal Konten

2.27.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4

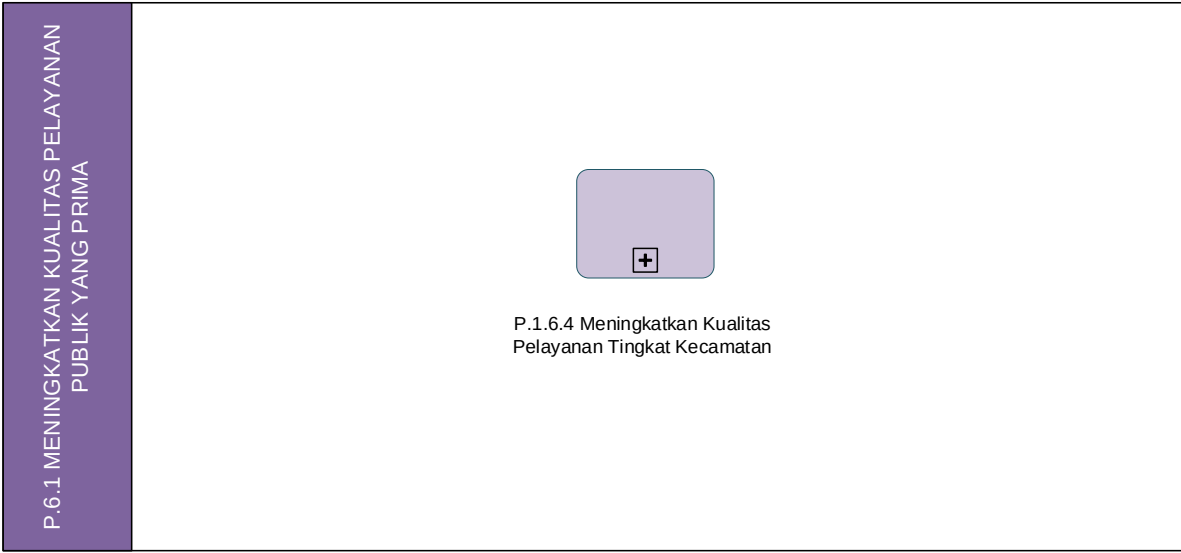


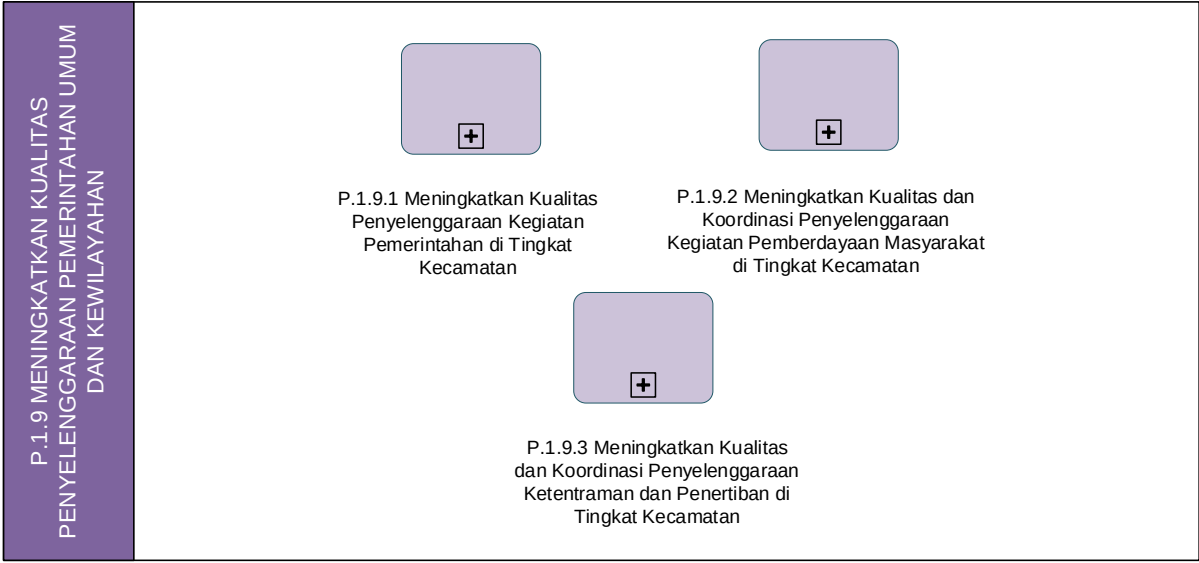
2.28. KECAMATAN

2.28.1. PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

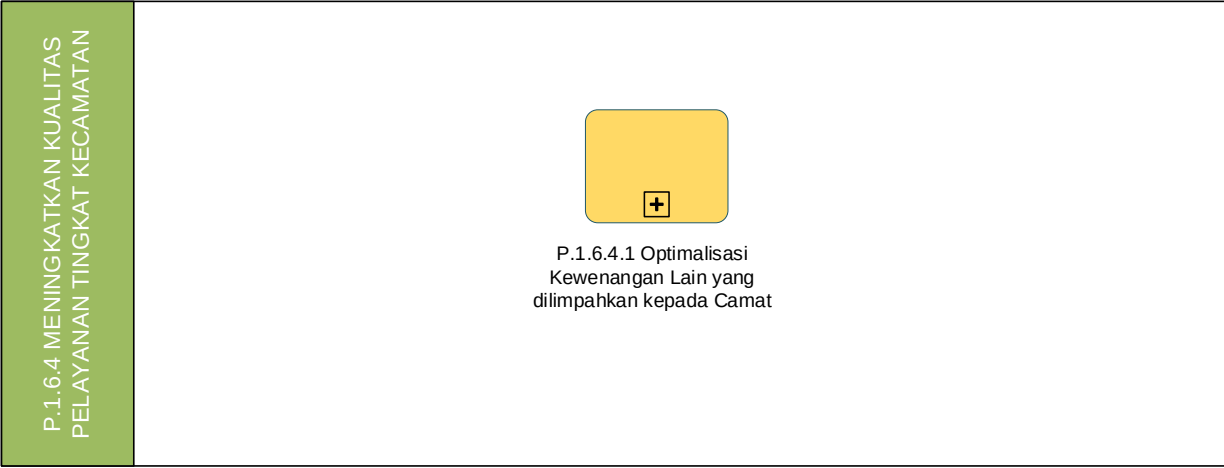


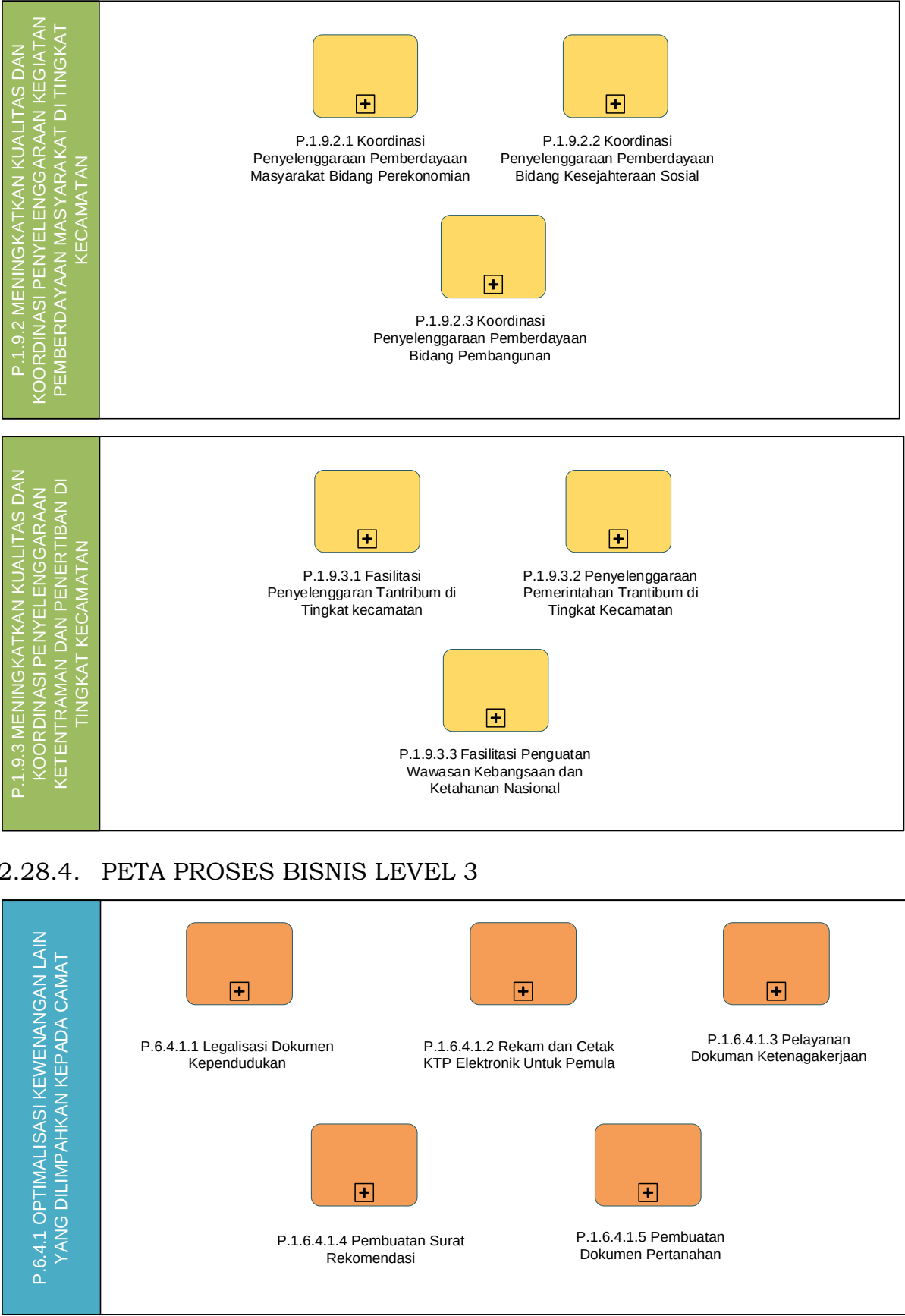
2.28.2. PETA PROSES BISNIS LEVEL 1





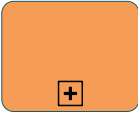
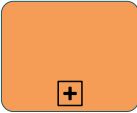
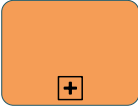
2.28.3. PETA PROSES BISNIS LEVEL 2



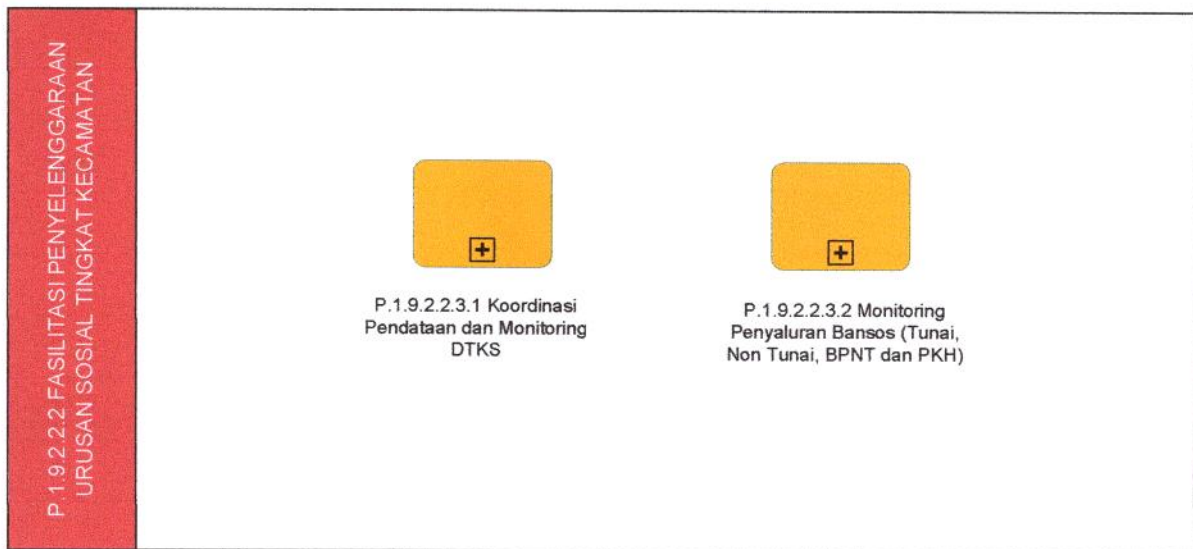


2.28.4. PETA PROSES BISNIS LEVEL 3



P.1.9.2.3 KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN BIDANG PEMBANGUNAN	 P.1.9.2.3.1 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat  P.1.9.2.3.2 Fasilitasi Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan  P.1.9.2.3.3 Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat  P.1.9.2.3.4 Peningkatan Skill Masyarakat (Wirausaha Baru)
P.1.9.3.1 FASILITASI PENYELENGGARAN TANTRIBUM DI TINGKAT KECAMATAN	 P.1.9.3.1.1 Monitoring Penyelenggaraan Ketentraman dan Penertiban Umum (Patroli Keliling)  P.1.9.3.1.2 Pembinaan Pelaksana Tantribum (Anggota Satlinmas, PAM kelurahan, Poskamling)  P.1.9.3.1.3 Fasilitasi Pembinaan Forum Kerukunan Umat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat  P.1.9.3.1.4 Fasilitasi Penanganan Konflik Pemerintahan/Sosial
P.1.9.3.2 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TRANTRIBUM DI TINGKAT	 P.1.9.3.2.1 Penyewaan Tanah Aset Eks  P.1.9.3.2.2 Fasilitasi PBB

2.28.5. PETA PROSES BISNIS LEVEL 4



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008